

PENDIDIKAN DI INDONESIA 1900-1940



AAN

ktorat
yaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1977

310.198
PEN

harris

PENDIDIKAN DI INDONESIA 1900 - 1940

*Kebijaksanaan Pendidikan
di Hindia Belanda
1900 ~ 1940*

PERPUSTAKAAN	
DIREKTORAT STRUKTUR DAN METODE PEMBELAJARAN	
NO. INDEK	505
TGL.	26 Mei 1978.

Judul asli : "Het Onderwijsbeleid in Nederland-Indië, 1900-1940

Karya : Dr. S.L. van der Wal.

KATA PENGANTAR

Buku yang berisi laporan tentang kebijaksanaan pendidikan sebelum masa kemerdekaan sangat langka diperoleh di negara kita. Laporan seperti itu patut diteliti untuk dijadikan bahan pemikiran mengenai keadaan pendidikan kita baik masa kini maupun di masa yang akan datang.

Untuk tujuan itu pilihan jatuh kepada buku berjudul "Het Onderwijs-beleid In Nederlands-Indie, 1900-1940" (= Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940) karya Dr. S.L.van der Wal, seorang guru besar sejarah Indonesia (khususnya sejak 1900 hingga kini) pada "Rijks-universiteit Utrecht" di negeri Belanda. Buku tersebut bukanlah sekedar buku bacaan, tetapi suatu publikasi sumber yang memuat dokumen-dokumen mengenai surat-menyurat antara tokoh-tokoh puncak di negeri Belanda dan Hindia Belanda, semuanya dalam bidang kebijaksanaan pendidikan. Oleh karena itu sistematikanya tidak menurut materi mengenai sesuatu pokok persoalan, tetapi disusun sesuai dengan urutan peristiwa secara kronologis. Karena terbatasnya waktu yang tersedia maka buku ini tidak diterjemahkan secara menyeluruh, tetapi disadur sedemikian rupa sehingga inti persoalan tidak terganggu dan pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran, keputusan serta langkah-langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat Belanda dan Hindia Belanda pada jamannya.

Sudah barang tentu saduran ini masih banyak terikat kepada tata-bahasa dan susunan kalimat bahasa aselinya, sehingga kadang-kadang terasa agak janggal bila dilihat dari kacamata bahasa Indonesia. Hal ini sulit dihindarkan karena dikhawatirkan bahwa saduran bebas akan dapat mengaburkan makna daripada isi yang sebenarnya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hierarkhi dan urutan pertanggungjawaban dalam sistim ketata negaraan dan pemerintahan di Hindia Belanda serta sistim persekolahan pada jaman itu dilampirkan bagan dan penjelasan seperlunya agar pembaca dapat mengikuti saduran ini dengan seksama.

Saduran ini diterbitkan dalam dua buku. Buku I berisi dokumentasi surat-menyurat yang berlangsung antara tahun 1900 dan 1913/1914. Dokumentasi tersebut antara lain memuat materi mengenai pendidikan pertanian, teknik, sekolah-sekolah untuk anak-anak gadis Bumi-putera, dan Cina. Diantaranya yang sangat menarik adalah bahwa orang sudah mulai mengadakan eksperimen dan penelitian mengenai kebutuhan yang mendesak akan sekolah dasar (desa) di Indonesia sejak 70-80 tahun yang lalu, yang hingga kini masih merupakan masalah yang hangat. Buku II meliputi dokumentasi antara tahun 1913/1914 hingga tahun 1940. Buku II ini antara lain membahas mengenai pendidikan tinggi, pendidikan guru, sekolah peralihan ("schakel-school"), perpustakaan rakyat dan bahkan mengenai organisasi pemuda yang diliputi oleh gagasan-gagasan kebangsaan yang sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu.

Dengan selesainya penyaduran buku tersebut di atas, sudah pada tempatnya kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyadur yaitu Sdr. Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasuki dari IKIP Bandung.

Mudah-mudahan buku yang diterbitkan untuk lingkungan terbatas ini dapat merupakan sumbangan yang berarti, khususnya bagi para "penyusun kebijaksanaan" dan "pengambil keputusan" dalam bidang pendidikan, guna menentukan langkah di masa depan.

Selain itu, kami masih mengharapkan saran-saran untuk perbaikan penerbitan kami selanjutnya.

JAKARTA, DESEMBER 1977

Pjs. Kepala Pusat Pengolahan Data,
Statistik dan Konsepsi,



SOENARDI RONOWISROYO

NIP 130427530

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	111
Bentuk dan Susunan Ketatanegaraan dan Pemerintahan di Negeri Belanda dan Hindia Belanda (1900-1940) . . .	v
Organigram Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan di Negeri Belanda dan Hindia Belanda (1900-1940) . . .	viii
Pendidikan Pertanian	1
Pendidikan Teknik	2
Perluasan Pendidikan Bumiputera di Jawa	5
Pendidikan Untuk Gadis-gadis Bumiputera	10
Perluasan Bahasa Belanda Diantara Penduduk Bumiputera .	15
Pemberian Subsidi Kepada Sekolah-sekolah Bumiputera Swasta	28
Pendidikan Dasar Bagi Penduduk Bumiputera - Sekolah- sekolah Ketrampilan	30
Pendidikan Bagi Anak-anak Para Pejabat (Swapraja) . . .	34
Pendidikan Bagi Penduduk Bumiputera - Azas-azas Kebijak- sanaan	42
Pendidikan Bagi Orang-orang Cina	43
Reorganisasi Pendidikan Bumiputera - Pendidikan Pertu- kangan	45
Pendidikan Rakyat - Percobaan Dengan Sekolah-sekolah De- sa di Jawa	58
Reorganisasi Pendidikan Bumiputera - Pendidikan Pertu- kangan	76
Pendidikan Bagi Orang-orang Cina	88
Pembatasan Pemasukan Orang-orang Bumiputera ke Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.)	92
Pendidikan Rakyat - Sekolah Desa dan Sekolah-sekolah Ne- geri	99

Pendidikan Eropa (Barat) Bagi Orang-orang Bumiputera . . .	106
Pendidikan Rakyat di Luar Jawa dan Madura - Pendidikan Pegawai Negeri	113
Perluasan Penerimaan Orang-orang Bumiputera di Sekolah Rendah Eropa - Perluasan Sekolah Bumiputera Kelas I . .	119
Pemberian Subsidi Kepada Sekolah-sekolah Bumiputera Swasta	127
Pendidikan Rakyat di Jawa dan Madura	137
Pendidikan Pertukangan	139
Pendidikan Untuk Perkembangan Lebih Lanjut Bagi Golongan Bumiputera - Sekolah Bumiputera Belanda (H.I.S.) . . .	142
Masyarakat Bumiputera dan Politik Pendidikan	158
Pendidikan Bagi Gadis Bumiputera	160
Pendidikan Untuk Perkembangan Lebih Lanjut Bagi Golongan Bumiputera - Sekolah Bumiputera Belanda (H.I.S.) . . .	163
Pendidikan Pertukangan	171
Sekolah Menengah Hindia Belanda	174
Pendidikan Bagi Orang-orang Cina	185
Pendidikan Rakyat - Sekolah Bumiputera Kelas II dan Sekolah-sekolah Lanjutan (Vervolg school)	193
Pendidikan Swasta Bersubsidi - Menentukan Pendidikan Agama Menjadi Fakultatif	206
Sekolah Bumiputera Belanda (H.I.S.) - Pemasukan Anak-anak Eropa	209

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Sistim Persekolahan Jaman Hindia Belanda .	212
Lampiran II : Daftar Menteri Urusan Daerah Jajahan, 1900-1940	213
Daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1900-1940	214
Daftar Ketua Dewan Hindia Belanda 1900-1940	214
Lampiran III: Daftar Direktur Pendidikan, Agama (dan Kejuruan), 1900-1940	215

BENTUK DAN SUSUNAN KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA
(1900 - 1940)

I. Negeri Belanda

Karena Hindia Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, maka dengan sendirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia Belanda dalam kurun waktu antara 1900-1940 tidak boleh tidak negeri Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga.

Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional (monarki konstitusional) artinya suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja atau Ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Raja atau Ratu adalah kepala negara sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana menteri memimpin satu departemen, diantaranya ada departemen (urusan) daerah jajahan (departement van Kolonien).

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet merupakan pencerminan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Staten-Generaal). Dengan kata lain para anggota kabinet itu diangkat dan diberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggung jawab kepada DPR mengenai jalannya pemerintahan.

Lembaga DPR menggunakan sistem bikameral, artinya terdapat dua badan yaitu Eerste Kamer (majelis tinggi) yang bertugas meneliti dan mengawasi majelis rendah, disamping mempunyai kekuasaan perundang-undangan, dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang mengontrol jalannya pemerintahan dan memegang kekuasaan utama dalam bidang perundang-undangan.

Daerah-daerah jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao diatur dan diawasi oleh Menteri (urusan) Daerah Jajahan. Oleh karena itu Wali Negara dalam hal ini Gubernur Jenderal Hindia

Belanda bertanggung jawab kepada Raja (Ratu) melalui Menteri Jajahan mengenai segala sesuatunya yang berhubungan dengan Hindia Belanda. Seperti telah dikemukakan pertanggung jawaban Menteri yang sebenarnya adalah pada DPR.

II. Hindia Belanda

Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara (Land-voogd) yang berpangkat Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh delapan kepala departemen (direktur) beserta staf dan pembantu-pembantunya.

Departemen-departemen tersebut ialah:

1. Departemen Kehakiman
2. Departemen Keuangan
3. Departemen Pemerintahan Dalam Negeri
4. Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan *)
5. Departemen Urusan Ekonomi **)
6. Departemen Perhubungan dan Pengairan ***)
7. Departemen Peperangan
8. Departemen Marine (Angkatan Laut)

Gubernur Jenderal diangkat untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi menurut kebiasaan yang berlaku tenggang waktu jabatannya adalah 5 tahun. Dalam melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Sekretariat Umum (Algemene Secretarie) dengan beberapa Sekretaris negara (Gouvernements-Secretarissen). Mereka ini menjalankan tugas pembantuan yang bersifat teknis untuk kelancaran pekerjaan Gubernur Jenderal. Tetapi sejak tahun 1918 lembaga ini dan para sekretarisnya

*) Pada tahun 1912 Departemen P.A.K. diganti menjadi Departemen Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst).

**) Urusan Ekonomi meliputi pertanian, perikanan, kedokteran hewan, kerajinan, kehutanan, perusahaan negara, perkebunan (taman) Negara Bogor, perdagangan, statistik, percetakan negara, lembaga tera.

***) Perhubungan dan Pengairan meliputi PJKA, PTT, Bank Tabungan Pos, PUTL, Pelabuhan, penerbangan, irigasi, jembatan dan jalan, pengawasan jalan, gedung-gedung negara dan pertambangan.

mulai kurang berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu ada lembaga lain yang bernama Dewan Hindia (Raad van Indië) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dan mempunyai "wewenang pemerintahan serta" (medebesturende bevoegdheid).

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perundang-undangan dan kontrol adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang dianggap "mewakili rakyat" Hindia Belanda yang anggotanya semula mayoritas orang Belanda, tetapi kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera. Sebagian besar anggotanya dipilih dan sebagian diangkat.

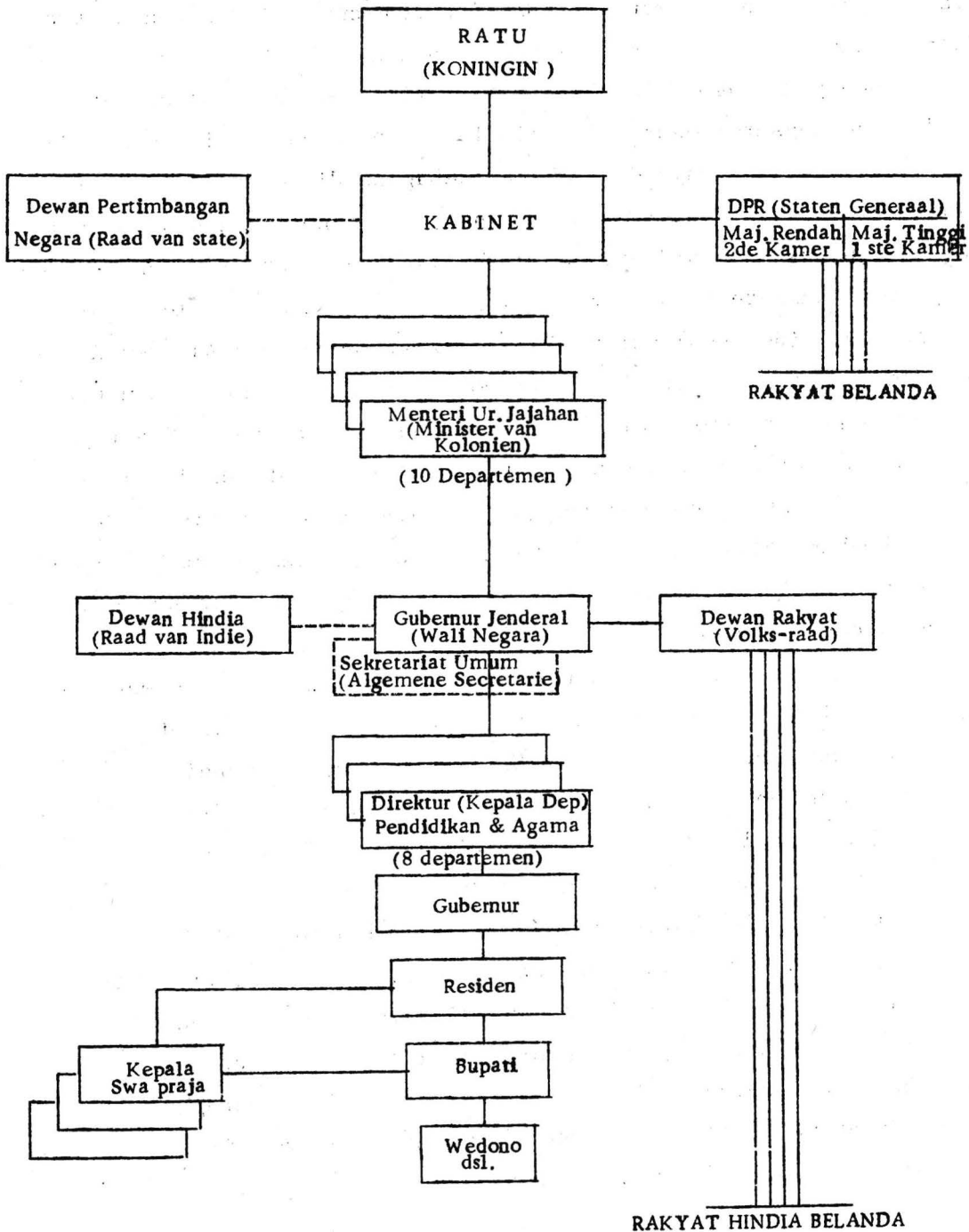
Pejabat di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen, Bupati, dan selanjutnya. Mulai dari Bupati ke bawah dijabat oleh tokoh-tokoh dan pemuka Bumiputera. Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang pejabat Eropa (Belanda) yaitu di pulau Jawa dan Madura Asisten Residen, dan di daerah seberang seorang Kontrolir. Di samping itu terdapat pula pemuka Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja (Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat residen seperti Yogyakarta dan Surakarta dan ada pula setingkat kabupaten atau lebih rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabatan bupati, wedono, dsb. diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka kepala swapraja dijabat secara turun-temurun.

Dalam hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat mengenai pendidikan di Hindia Belanda antara pejabat-pejabat yang relevan dengan masalah tersebut. Khususnya mengenai pendidikan dasar, Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan, Agama, (dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.

Pejabat-pejabat yang banyak terlibat dalam surat-menyurat dalam buku ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jenderal, Direktur P.A.K., Direktur P.D.N., Sekretaris (kelas I), Menteri Jajahan, dll. Selain itu lembaga-lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat, D.P.R. (Staten Generaal), dsb. banyak pula disebut-sebut.

Dengan penguraian kami yang sekedarnya ini kami harapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirarkhi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu.

ORGANIGRAM KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA
 (1900-1940)



PENDIDIKAN PERTANIAN

1. Surat Gubernur Jenderal (Rooseboom) kepada Menteri Jajahan (Cremer) tanggal 6 Juli 1900 nomor 1257/16

Dalam surat ini Gubernur Jenderal memperhatikan surat Menteri Jajahan yang dahulu (J.H. Bergsma) tertanggal 6 Februari 1896 litt. A no. 34/341 yang mengharap perhatian Pemerintah Hindia Belanda atas usul yang dikemukakan dalam Majelis Rendah dari Dewan Perwakilan Rakyat Belanda supaya di Hindia Belanda didirikan kursus untuk pendidikan pertanian praktis.

Dikemukakan, surat permohonan yang sejak itu diterima dari Pengurus Sindikat Umum Kopi tertanggal Malang 19 September 1899 yang mendapat dukungan dalam berbagai surat permohonan dari perkumpulan-perkumpulan pertanian dan perkebunan, dan begitu pula dari Kamar Dagang dan Kerajinan Semarang. Semuanya menekankan perlunya di Hindia Belanda diberikan pendidikan pertanian dan mohon diadakan tindakan persiapan seperlunya untuk mendirikan Sekolah Pertanian.

Direktur Kebun Raya (M. Treub) dan Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (O. van der Wijck), yang didengar dan diminta nasehat-nasehatnya tentang hal ini, ternyata dari nasehat-nasehat yang diberikannya sangat menyetujui usul didirikannya Sekolah Pertanian di Hindia Belanda, begitu pula Dewan Hindia Belanda.

Didirikannya lembaga pendidikan pertanian swasta di Hindia Belanda sangat mendesak, karena sejumlah besar penduduk akan mendapat sumber penghidupan dan dalam berbagai cabang industri yang diusahakan di sini, pertanian menduduki tempat yang sangat penting.

Dalam hal ini dikemukakan pula bahwa sekolah semacam itu akan memberi manfaat bagi orang-orang Eropa yang tidak atau kurang mampu. Menurut hemat Gubernur Jenderal, lembaga demikian akan memberikan

jasa yang lebih besar kepada bagian terbesar penduduk Hindia Belanda daripada lembaga pengajaran seperti Gymnasium Bagian B Willem III di Betawi.

Dalam suratnya tertanggal sama nomor 45/Rah. dengan menyimpang dari nasehat Dewan Hindia Belanda diusulkan pembubaran bagian B Gymnasium Willem III dan pendirian sekolah pertanian, untuk memberi bukti baru kepada masarakat Hindia Belanda, bahwa Pemerintah tidak bermaksud mengurangi kepentingan penduduk, tetapi bahwa Pemerintah justru mempunyai pandangan terbuka atas kebutuhan masarakat Hindia Belanda yang sesungguhnya. *)

Usul-usul terperinci untuk pendirian sekolah pertanian ini belum dapat diajukan, karena data-data belum ada. Sekiranya Menteri dalam prinsip menyetujui pendirian sekolah pertanian di Bogor, tindakan-tindakan selanjutnya yang diperlukan akan segera dilaksanakan untuk menyusun rencana terperinci.

Dengan melampirkan semua salinan surat yang bersangkutan dimohon persetujuan Menteri dan kemudian dikirim program dan data-data lainnya dari semua bagian Sekolah Pertanian Negeri di Wageningen (Belanda).

PENDIDIKAN TEKNIK

2. Surat Gubernur Jenderal (Rooseboom) kepada Menteri Jajahan (Cremer) tertanggal 6 Juli 1900 nomor 1258/17

Dalam surat ini Gubernur Jenderal meneruskan salinan surat usul Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tertanggal 26 Mei 1900 nomor 7090a untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan di Betawi terdiri dari Hogere Burger-school (sekolah lanjutan) dengan 3 tahun ajaran disertai mata pelajaran Dagang yang terikat pada sekolah itu

*) penduduk dan masarakat = penduduk dan masarakat Eropa (penyadur)

(Bagian A) dan mata pelajaran pendidikan masinis, ahli bangunan, ahli pertambangan (Bagian B) di bawah satu pimpinan. Menenuhi surat kawat Menteri Jajahan tertanggal 26 Januari hrf.D no.52/241 yang mengharap dikirim data-data yang diperlukan supaya dalam Anggaran Belanja untuk tahun berikutnya sudah dapat dipersiapkan perluasan pendidikan teknik di Hindia Belanda yang nyata perlu sekali. Dilampirkan pula salinan nasehat Dewan Hindia Belanda tertanggal 22 Juni 1900 nomor III yang menyatakan persetujuannya mengenai usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tersebut di atas, dan sesuai dengan pendapat Dewan Hindia Belanda dikemukakan pendapatnya, bahwa pendirian sekolah-sekolah kejuruan khusus, seperti kursus untuk ahli teknik gula, sekolah pertanian, kelas pendidikan untuk guru-guru bantu tidak perlu menunggu sampai dicukupi oleh prakarsa swasta. Tetapi bahwa tanggung jawab Pemerintah harus meluas sedemikian rupa sampai pembukaan lembaga-lembaga demikian itu segera setelah terbukti kebutuhannya. Dalam suratnya tertanggal 6 Juli 1900 nomor 1257/16 telah diusulkan untuk membuka sekolah pertanian di Hindia Belanda.

Diharapkan supaya Menteri Jajahan memohonkan pemberian kuasa Raja untuk mendirikan lembaga pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan di Betawi seperti diuraikan dalam usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja 1901 pos sejumlah f.58.645,- (diharapkan kursus baru dibuka tanggal 1 Juli 1901) sedangkan subsidi yang diberikan kepada Sekolah Pertukangan di Betawi sebanyak f.1.000,-- per bulan hanya diberikan sampai bulan itu, karena sekolah ini akan terlebur dalam kursus-kursus teknik tersebut. Didukungnya pula permohonan Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan supaya kepada Ratu dimohonkan izin untuk memberikan nama Koningin Wilhelmina School (KWS) kepada lembaga pendidikan baru itu.

3. Surat Menteri Jajahan (Cremer) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 12 September 1900 nomor 49/2280

Dalam surat ini Menteri Jajahan membalas, bahwa sesuai dengan surat Gubernur Jenderal tertanggal 6 Juli 1900 nomor 1258/17 dalam rencana Anggaran Belanja 1901 telah dimasukkan pos untuk pendirian lembaga pendidikan menengah dan kejuruan, dan jika keuangan yang diperlukan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, akan dimohonkan idzin Ratu untuk menamakan lembaga baru itu: KWS.

Mengenai pendirian sekolah-sekolah kejuruan khusus seperti kursus ahli teknik gula, sekolah pertanian, kelas pendidikan guru bantu, menurut pendapatnya untuk sementara, pihak swasta merasa terpenggil - seperti pendirian sekolah pelayaran - dan dalam hal-hal sedemikian prakarsa swasta patut diterima dengan terima kasih dan di mana perlu Pemerintah membantu dengan keuangan, karena dengan demikian menguntungkan Kas Negara dan meringankan tugas Pemerintah.

Tetapi mengenai pendirian lembaga pendidikan yang lebih luas ruang lingkupnya, yang diperuntukkan untuk menyebarkan manfaat dalam lingkungan yang sangat luas dan yang akan minta persaratan terlalu tinggi, maka Pemerintah harus banyak memberi bantuan personil dan keuangan. Seperti untuk sekolah pertanian, dapat disetujui pendapat Gubernur Jenderal bahwa tidak perlu menunggu prakarsa swasta, tetapi lembaga tersebut harus baru dan dihidupkan oleh Pemerintah segera terbukti kebutuhannya dan keadaan keuangan mengizinkan.

Disetujui usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dalam suratnya tertanggal 26 Mei 1900 nomor 7090a, tentang perlunya lembaga pendidikan menengah dan kejuruan baru ini diperuntukkan juga bagi orang-orang Bumiputera dan pada umumnya untuk memberikan juga kepada mereka kesempatan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Tidak hanya sekolah umum Eropa yang sudah ada dan lembaga pendidikan baru, tetapi sekolah kejuruan khusus terbuka juga bagi penduduk Bumiputera dan Timur Asing. Cita-cita mengikutsertakan Bumiputera dan Timur Asing dalam pendidikan bukan Bumiputera sedapat mungkin harus dimajukan. Pengeluaran untuk sekolah-sekolah Eropa

yang sudah ada, yang dibebankan pada sub-bagian "pendidikan untuk orang Eropa" dapat menimbulkan salah paham dan memberikan sebab penarikan kesimpulan yang keliru dengan akibat yang sangat luas, karena nama itu akan menimbulkan secara tidak benar dugaan bahwa sekolah-sekolah ini memang hanya dapat dimasuki oleh anak-anak Eropa.

Kesalah-pahaman ini akan lebih disesalkan dengan ditambahkannya apa yang disebut "pendidikan untuk orang Eropa" dengan pendidikan menengah dan kejuruan yang sudah sering disebut-sebut, dan segera diharapkan pula pendidikan pertanian dan perkebunan; sehingga dengan demikian perbandingan jumlah uang yang diijinkan untuk "pendidikan untuk Bumiputera" nampaknya akan lebih buruk.

Karena pertimbangan inilah dipandang perlu untuk menghapus nama "pendidikan untuk orang Eropa" dan lebih suka memilih nama "pendidikan negeri untuk umum", dan dalam berbagai peraturan nama dan istilah yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan dengan nama baru. Dianggap kurang bijaksana untuk bertindak tanpa berembug lebih dahulu dengan Gubernur Jenderal. Diharapkan pandangan dan usul-usul Gubernur Jenderal tentang persesuaian nama pendidikan dengan nama baru yang diuraikan di atas dapat diterima pada waktunya agar dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Belanja 1902. Pemisahan pendidikan khusus untuk penduduk Bumiputera dengan nama yang lebih tepat tetap ada.

PERLUASAN PENDIDIKAN BUMIPUTERA DI JAWA

4. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 20 Pebruari 1901 nomor 2226

Pasal 1 Surat Keputusan Raja tanggal 28 September 1892 nomor 44 (Lembaran Negara 1893 nomor 125) membagi sekolah negeri Bumiputera di Hindia Belanda dalam 2 kategori yaitu sekolah kelas 1 dan

sekolah kelas 2, yang disebut akhir ini untuk penduduk Bumiputera pada umumnya. Pasal 2 dari Reglemen dalam Lembaran Negara 1893 nomor 128 menentukan tentang sekolah-sekolah ini, bahwa gedung dan meubiler harus disesuaikan sedapat mungkin dengan lingkungan yang sudah biasa bagi para murid. Sebagaimana terbukti dari peraturan yang dikutip di atas, golongan sekolah ini merupakan pendidikan rakyat yang sesungguhnya. Maka dari itu rencana pelajaran sekolah tersebut sangat sederhana (pasal 5 Reglemen tersebut) dan syarat untuk pengangkatan jadi kepala sekolah kelas 2 memiliki akte guru bantu sudah dipandang cukup (pasal 9 paragraf c Peraturan dalam Lembaran Negara 1893 nomor 127).

Akan tetapi dalam kenyataannya pengaturan sekolah-sekolah kelas 2 tidak begitu sederhana seperti diperkirakan oleh Reglemen. Di Jawa dan Madura rencana pelajaran sekolah kelas 2 telah diperluas, yaitu pada 3 kelas (yang dimiliki kebanyakan sekolah dalam bentuknya yang paling sederhana) ditambah kelas 4, dimana diajarkan sebagian besar mata pelajaran tersebut dalam pasal 4 Reglemen dalam Lembaran Negara 1893 nomor 128 yang lebih khusus diperuntukkan bagi sekolah sekolah kelas 1. Selanjutnya yang menjadi kepala sekolah kelas 2 hampir semua guru-guru yang terdidik, hal mana bagi rencana pelajaran yang luas perlu sekali.

Bahwa sekolah-sekolah kelas 2 sekarang di Jawa dan Madura tidak mencukupi kebutuhan akan pendidikan rakyat, akan segera tampak dengan menyolok, jika diingat jumlahnya (212) dibandingkan dengan jumlah penduduk (25.370.545 menurut Almanak Negara 1901). Jika sekolah-sekolah swasta/subsidi ikut dihitung yang jumlahnya $\pm$ 230, ternyata terdapat 1 sekolah untuk tiap 57.400 penduduk. Hanya bagian sangat kecil dari penduduk mendapat kesempatan untuk menyuruh anak-anaknya sedikit menikmati pendidikan. Bahwa kekurangan ini pada umumnya sangat dirasakan, terbukti pada perjalanannya ke Jawa Timur, ketika ia dimana-mana diberi tahu tentang keinginan rakyat untuk mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menerima pendidikan oleh negara, baik oleh pegawai-pegawai Eropa maupun Bumiputera.

Kenyataan, bahwa tiap tahun oleh para pegawai penilik dan Kepala Daerah ("Gewest") dikemukakan tempat-tempat yang disediakan untuk pembukaan sekolah kelas 2 yang jumlahnya jauh lebih besar daripada dana yang diizinkan untuknya. Hampir semua sekolah yang dalam tahun-tahun akhir ini dibuka, segera dikunjungi oleh jumlah murid yang sangat besar, bahkan banyak diantaranya sampai sejumlah maksimum 210 anak. Dari uraian tersebut di atas ternyata perlu sekali untuk dalam jangka waktu yang tidak begitu lama membuka sekolah-sekolah kelas 2 dalam jumlah yang lebih besar daripada yang sampai sekarang dimungkinkan dengan keadaan keuangan yang tersedia, untuk dapat mencukupi kebutuhan pendidikan rakyat. Menurut pandangannya itu bukan permintaan yang terlalu tinggi, bahwa tiap ibu kota kawedanaan dan ibu kota kecamatan diberi satu sekolah kelas 2. Dengan memperhitungkan jumlah tempat dimana sudah ada sekolah negeri atau sekolah swasta subsidi, akan diperlukan pembukaan $\pm$ 1300 sekolah kelas 2. Mengingat kebutuhan yang sesungguhnya dari penduduk desa dan juga biaya yang besar, dianggapnya tidak perlu untuk mengatur sekolah-sekolah baru itu menurut sekolah kelas 2 yang sudah ada, sepanjang mereka tidak diperuntukkan bagi ibu kota karesidenan ("Gewest") dan kabupaten ("afdeling") dimana diharapkan jumlah murid yang lebih besar.

(Pandangan tentang personil, rencana pelajaran dan bangunan sekolah yang diusulkan)

Andaikan pendirian jumlah sekolah seluruhnya yang dipandang perlu itu dibagi atas 5 tahun - jangka waktu mana jangan sedikitpun ditunda-tunda karena sangat mendesaknya kebutuhan - maka untuk tiap-tiap tahun itu harus diperhitungkan dana untuk pembukaan $\pm$ 250 sekolah. Dapat diperkirakan masing-masing sekolah akan mempunyai 40 a' 60 murid. Untuk personil diperkirakan seorang guru memerlukan gaji f.20,- sampai f.30,- (pasal 4 paragraf 4b Lembaran Negara 1893 nomor 128) atau rata-rata f.25,- sebulan, serta seorang pembantu (kwekeling) dengan gaji f.12,- sampai f.15,- atau rata-rata f.13,50 per bulan, jumlah f.38,50 per bulan.

(Perhitungan pengeluaran yang berhubungan dengan usul itu dan saran-saran pelaksanaan rencana, jika dana yang diperlukan telah disetujui)

5. Surat Menteri Jajahan (van Asch van Wijck) kepada Gubernur Jenderal tertanggal 23 Januari 1902 nomor 19/235

Dalam surat ini Menteri Jajahan menjawab surat Gubernur Jenderal tertanggal 18 Agustus 1901 nomor 1678a/17 serta surat kawatnya tertanggal 21 Agustus 1901 nomor 0004 tentang penambahan sekolah negeri Bumiputera, bahwa pandangannya dalam usul-usul tersebut tidak dapat disetujui. Surat Menteri Jajahan lama tertanggal 4 Mei 1901 litt. A1 nomor 53/1226 tentang perluasan jumlah calon guru (kwekeling) dari sekolah-sekolah guru Bumiputera di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo tidak dapat disetujui sesuai dengan azas-azas yang diterima dalam tahun 1893 (menarik laporan yang diajukan oleh Menteri Baron van Dedem kepada Janda Raja, Ibu Suri Emma tertanggal 15 Juni dan 23 September 1892 litt A1 nomor 3 dan 13) bahwa tidak ada dan tidak akan ada maksud untuk memasukkan pemeliharaan pendidikan rakyat di Hindia Belanda menjadi tanggungan Pemerintah. Hal ini harus dicukupi oleh prakarsa swasta. Negara hanya membantu sebanyak mungkin prakarsa swasta dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang diinginkan dan diharapkan oleh Pemerintah. Negara hanya perlu bertindak sendiri dimana sungguh-sungguh ada kebutuhan akan pendidikan rendah oleh Pemerintah.

Kini ternyata bahwa pandangan yang tercantum dalam surat Gubernur Jenderal tertanggal 7 September 1901 nomor 1813/20 adalah sejalan dengan pendapat Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, dalam laporannya tertanggal 6 Juli 1901 nomor 8213. Ditunjuknya halaman 3 dari laporan Direktorat P.A.K. tersebut, yang mengatakan bahwa sekarang belum perlu disinggung dan tak akan disinggung dalam tahun-tahun pertama berikut, persoalan memberikan pendidikan rakyat, karena jika pendirian sekolah-sekolah kelas 2 di Jawa dan Madura tetap dilaksanakan dengan derap yang sama seperti tahun-tahun terakhir ini yakni rata-rata 10 a' 12 sekolah tiap tahunnya, maka akan memakan waktu kira-kira satu abad lamanya sebelum tiap ibu kota kawedanan dan kecamatan dapat memiliki sekolah demikian.

Baru kemudian sesungguhnya dapat dibicarakan pendidikan rakyat. Mengingat hal ini Direktur P.A.K. mengajukan usul-usul untuk dalam jangka waktu yang jauh lebih pendek sampai pada keadaan sedemikian itu. Ini membuktikan, bahwa meskipun sudah ada surat dari Menteri Jajahan lama, Direktur P.A.K. masih tetap berpegangan pada pemikiran pendidikan rakyat oleh Negara, yang merupakan tujuan dari cita-citanya yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu cukup singkat.

Ditunjuknya penjelasan dari azas-azas 1893, halaman 52/53 dari Nota Sejarah yang sangat penting dalam Laporan Umum tentang pendidikan Bumiputera di Hindia Belanda dari tahun-tahun 1893-1897 dimana dikatakan, bahwa beban langsung untuk pendirian sekolah-sekolah bagi kepentingan penduduk Bumiputera terletak pada Pemerintah, seolah-olah tidak ada sekolah swasta, dan Pemerintah berkewajiban untuk mendirikan sekolah-sekolah. Menurut pendapatnya penjelasan tersebut kurang tepat.

Tidak ada keberatan untuk melanjutkan pembukaan sekolah-sekolah kelas 2 dimana ternyata memang perlu, tetapi hal ini harus dikerjakan dengan seksama dan hati-hati, dan jangan sampai menuruti cita-cita Direktur P.A.K. yang akan menjurus ke penyediaan pendidikan rakyat umum oleh Negara.

Dalam suratnya tanggal sama nomor 20/236 dijelaskannya pemikiran-pemikirannya, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan rendah untuk penduduk Bumiputera dengan cara lain, yaitu dengan pengaturan yang lebih baik tentang pemberian subsidi dari Kas Negara kepada sekolah Bumiputera swasta, daripada yang sekarang sudah diatur dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146.

PENDIDIKAN UNTUK GADIS-GADIS BUMIPUTERA

6. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon)
kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tertanggal 31 Oktober 1901
nomor 23520

Meskipun pada sekolah-sekolah negeri Bumiputera terbuka juga bagi gadis-gadis, kesempatan ini hanya terdapat di beberapa bagian Hindia Belanda, dan hanya dalam jumlah sangat terbatas. Sebab-sebabnya ialah sebagai akibat dari pendapat umum yang tersebar luas di kalangan Bumiputera, bahwa pendidikan demikian tidak perlu bagi anak-anak gadisnya, dan adanya keberatan bahwa gadis-gadis Bumiputera yang sudah berumur 10-12 tahun dibiarkan bergaul dengan anak-anak lelaki. Peserta sekolah-sekolah Eropa yang terdiri dari puteri Kepala-Kepala Bumiputera sangat kecil, terutama disebabkan karena terlalu tingginya uang sekolah yang dipungut dari murid-murid tersebut, dan kesulitan dalam memiliki persyaratan pendidikan sebelumnya supaya dapat diterima di sekolah-sekolah tersebut. Terhadap sekolah campuran masih ditambah keberatan yang sama seperti terhadap sekolah Bumiputera.

Anak lelaki Bumiputera di sekolah rendah, sekolah pendidikan untuk pegawai Bumiputera, sekolah Dokter Jawa, dan lembaga pendidikan menengah makin lama makin banyak mendapat kesempatan untuk perkembangan lebih lanjut, tetapi bagi gadis-gadis masih harus tertinggal di belakang. Satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam keadaan demikian perkembangan masyarakat Bumiputera tidak dapat maju dengan pesat.

Didorong oleh pertimbangan ini dalam surat edarannya kepada para Residen tertanggal 20 Nopember 1900 nomor 15336 - yang salinannya bersama ini dilampirkan kepada Gubernur Jenderal - para Residen dimohon mempergunakan pengaruh mereka supaya lebih banyak gadis Bumiputera dimasukkan ke sekolah-sekolah Eropa dan sekolah-sekolah Bumiputera. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam surat edaran tersebut mereka juga ditanya tentang perasaan dan pandangannya

tentang pendirian sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera. Mereka juga diminta menyampaikan pandangan dan nasehat para Bupati tentang hal ini.

Jawaban-jawaban yang diterima, yang bersama ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal, telah mengecewakannya dalam banyak hal. Pada umumnya oleh penasehat-penasehat baik Eropa maupun Bumiputera diakui perlunya didirikan pendidikan khusus bagi gadis-gadis Bumiputera, tetapi kebanyakan mengemukakan sangat banyak keberatan. Terhadap penerimaan lebih banyak gadis di sekolah-sekolah Bumiputera dan Eropa pada umumnya tidak ada keberatan. Kebanyakan Residen berpendapat bahwa penggalakan ke arah itu pasti akan membawa hasil dan ada sementara yang menambah pandangan, supaya **syarat masuk ke sekolah-sekolah Eropa** dibuat lebih mudah, dan terutama uang sekolah bagi murid-murid Bumiputera di sekolah-sekolah itu perlu sekali diturunkan. Hal ini telah dibicarakan terperinci dalam suratnya tertanggal 17 Januari dan 9 April 1901 nomor 776 dan 4368, tetapi belum dipastikan. (Surat Keputusan tanggal 15 Mei 1901 no.15). Dari lembaga-lembaga di ibu kota karesidenan termaktub dalam surat edarannya kepada para Residen dan dari institut-institut di Semarang dan Betawi, para penasehat mengharapkan hasil yang sangat tipis. Terhadapnya banyak diajukan keberatan, terutama berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Jumlah pemuda yang terdidik secara Barat masih sangat sedikit, gadis-gadis yang telah mengenyam peradaban Barat akan menginginkan kawin dengan pemuda-pemuda yang terdidik dalam arah yang sama, dan ini tidak selalu mungkin, dan akibatnya kekecewaan yang mendalam.
 Lebih lanjut gadis-gadis tersebut akan mempunyai kebutuhan kebutuhan, yang oleh pegawai negeri Bumiputera pangkat rendah tidak akan dapat dipenuhi dari penghasilannya yang kecil -- tidak semua gadis dapat kawin dengan Bupati, Patih atau Wedono. Perkawinan tidak bahagia akan terjadi.
2. Sangat umum adat menaruh keberatan terhadap pendidikan lebih lanjut bagi gadis-gadis mereka yang telah mencapai

umur 10-12 tahun pergi sendiri tanpa pengawasan. Dari umur itu sampai waktu mereka dikawinkan, mereka harus dipingit.

Banyak nasehat memberi kesan seolah-olah mencari-cari keberatan, sedangkan sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cara-cara apa keberatan itu dapat diatasi.

Meskipun tetap berkeyakinan, bahwa sekolah-sekolah yang akan diusulkannya itu perlu sekali dan banyak kemungkinan hidup terus, nasehat-nasehat memaksanya melepaskan maksudnya untuk mengajukan usul yang bersifat umum, karena dari kebanyakan Residen dan Bupati yang akan melaksanakannya, tidak diresapi oleh kemanfaatan sekolah bagi gadis Bumiputera.

Satu-satunya Kepala Karesidenan, yang tanpa janji apapun, berani menganjurkan pendirian sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera, ialah Residen Banten (Hardeman). Dapat disetujui sepenuhnya pandangannya termuat dalam surat tertanggal 19 Pebruari 1901 nomor 1280/23, mengapa justru di Keresidenan Banten dengan mengingat keadaan, politik pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera harus mendapat lebih banyak perhatian daripada di lain daerah.

Sebagaimana terbukti dari daftar yang dilampirkan Residen Banten, sekolah di Serang akan mendapat jumlah murid yang cukup. Kepala-Kepala Bumiputera tertinggi di keresidenan juga menyambut hangat pembukaan sekolah tersebut. Karena itu dengan tidak ragu-ragu lagi usul dimajukan.

Contoh dari Kepala-Kepala di Banten mempunyai pengaruh baik atas Kepala-Kepala di keresidenan lain.

Di sekolah ini pelajaran bahasa Belanda harus diberikan, dengan pengertian bahwa gadis-gadis yang orang tuanya menaruh keberatan mendapat pembebasan.

Pengerjaan, pengaturan, dan rencana pelajaran dari sekolah yang diusulkan disertai hitungan pembiayaan.

7. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan (J.H. Abendanon) tertanggal 19 Desember 1901, nomor 4023

Dalam surat ini diberi tahu, bahwa Pemerintah tidak dapat menyetujui pandangan-pandangan dalam surat Direktur PAK tertanggal 31 Oktober 1901 nomor 23520 tentang kebutuhan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera.

Keberatan para Kepala Pemerintah Keresidenan terhadap pendirian sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera dapat dibenarkan oleh Gubernur Jenderal, mengingat:

Kedudukan dari gadis dalam masyarakat Bumiputera dan hubungan antara isteri terhadap suami. Keadaan gadis dan isteri dalam masyarakat Bumiputera, membuktikan bahwa kebutuhan akan pelajaran dan kemajuan Eropa baginya belum begitu umum, sehingga Pemerintah belum diharuskan untuk membuka kesempatan yang jauh lebih besar daripada yang sekarang diberikan di sekolah-sekolah yang sudah ada.

Harus diusahakan lebih dulu untuk mengajar dan memajukan lelaki (suami), karena jika ini tidak dilaksanakan dan ditempuh yang diusulkan Direktur PAK, maka ini akan menimbulkan hubungan pincang dalam masyarakat Bumiputera, yang akan menjurus ke keadaan yang sangat menyedihkan dalam kehidupan sosial dan perkawinan. Pendidikan dan kemajuan yang makin besar dan hubungan dengan masyarakat Eropa dari suami, lambat laun akan mempunyai pengaruh pada kedudukan wanita (isteri). Baru saat itulah dapat dikatakan, bahwa ada kebutuhan akan pendidikan bagi wanita (isteri), dan menurut pendapat Wali Negara barulah tiba waktunya untuk memberi lebih banyak kesempatan akan pelajaran bagi wanita.

Gubernur Jenderal memandang belum waktunya untuk mendirikan sekolah gadis di tiap ibukota Keresidenan menurut contoh sekolah yang diusulkan didirikan di Serang. Menurut pendapatnya harus diperhitungkan tidak hanya konservatisme (kekolotan) orang Indonesia,

tetapi juga penghasilannya yang sangat terbatas. Pegawai Bumiputera yang tinggalnya di ibukota keresidenan, yang gadisnya dapat menikmati sekolah gadis sedemikian jumlahnya relatif kecil. Pegawai-pegawai Bumiputera, yang tinggalnya di bagian lain dari keresidenan, akan harus memondokkan gadisnya di rumah teman atau saudara, sehingga disamping uang sekolah akan juga harus membayar sekedar uang pondokan di ibukota Keresidenan. Jumlah uang itu mungkin sekali tidak akan dapat disisihkan dari penghasilannya yang relatif kecil.

Tentang jumlah gadis yang menurut laporan Residen Banten akan mengunjungi sekolah gadis di Serang dikatakan, setelah diselidiki, ternyata terdapat 43 gadis yang orang tuanya tinggal di luar ibukota Serang, diantaranya hanya 9 gadis adalah anak pegawai dengan gaji yang mungkin akan dapat menanggung biaya sekolah dan pondokan. Para Bupati, karena tahu, bahwa Residen menaruh perhatian besar pada sekolah gadis itu, akan bekerja sekeras mungkin untuk membujuk pegawai pegawai bawahannya supaya menyekolahkan gadisnya. Tiap pegawai Bumiputera akan berusaha untuk bekerja sama, supaya sekolah itu dapat dibuka dengan jumlah murid yang cukup banyak. Tetapi Gubernur Jenderal khawatir bahwa jumlah itu akan menyusut, karena biayanya melebihi kekuatan para orang tua.

Mungkin juga, selama Hardeman tetap jadi Residen Banten, para Bupati tidak akan berhenti memaksa pegawai-pegawai bawahannya menyekolahkan gadisnya meskipun biayanya melebihi kekuatannya. Apakah pemaksaan pendidikan sedemikian itu akan dapat dianjurkan.

Seandainya laporan Residen Banten itu betul, bahwa Kepala Kepala Bumiputera di Banten telah diresapi oleh rasa pentingnya memajukan kecerdasan anak-anaknya di lembaga pendidikan Eropa, masih disangsikan apakah kesukaan pada pendidikan Eropa itu ada juga bagi gadis-gadisnya. Betul, bahwa pegawai-pegawai Bumiputera Banten melebihi rekan-rekannya di daerah lain, tetapi di Jawa hal itu tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, percobaan untuk membuka sekolah gadis di Serang, yang keberhasilannya sesungguhnya hanya tergantung pada tetap atau tidaknya fungsi Residen sekarang ini, tidak dapat disetujui oleh Pemerintah.

PERLUASAN BAHASA BELANDA
DI ANTARA PENDUDUK BUMIPUTERA

8. Nota Bagian A. dari Kementerian Jajahan tertanggal 16 Desember 1901

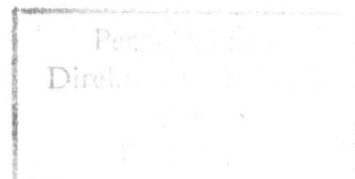
Sudah lama terkandung cita-cita untuk membawa penduduk Bumiputera ke kemajuan yang lebih tinggi dengan memajukan pengajaran bahasa Belanda di antara mereka. Pengetahuan bahasa Belanda membuka banyak sekali jalan ke pengetahuan dan ilmu, yang tertutup bagi Bumiputera yang hanya mengerti bahasanya sendiri. Setelah dimasukkan bahasa Belanda sebagai salah satu matapelajaran di sekolah guru Bumiputera sehingga dengan demikian pendidikannya lebih tinggi dan dengan sendirinya akan langsung menguntungkan penduduk.

Tetapi dengan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1886 (Lembaran Negara Hindia Belanda nomor 47) bahasa Belanda sebagai matapelajaran dicoret dari program. Menurut sementara orang hal ini disebabkan, karena bahasa Belanda diajarkan tidak hanya sebagai matapelajaran saja, tetapi juga sebagai media pengantar untuk matapelajaran lainnya. Bahwa pengetahuan tentang bahasa Belanda yang dicapai oleh murid-murid dinilai kurang baik, itu sudah tentu. Maka dari itu banyak yang berpendapat, bahwa penggunaan bahasa itu dalam pelajaran-pelajaran lainnya sangat merugikan.

Usaha Menteri Jajahan Keuchinius dalam 1889 untuk mengembalikan bahasa Belanda di sekolah guru Bumiputera tidak berhasil, karena nasehat-nasehat yang tak menguntungkan.

Perluasan bahasa Belanda di Hindia Belanda sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memajukan penduduk Bumiputera pada umumnya, tetapi untuk memajukan Kepala-kepala dan orang-orang terkemuka (bangsawan) Bumiputera. Buktinya ialah sebagai berikut:

Dalam tahun 1878 karena keinginan yang diketahui dari tokoh-tokoh terkemuka Bumiputera, yang menginginkan pelajaran yang lebih baik dan lebih luas daripada pengajaran bahasa Belanda, maka dalam tahun 1878 didirikan sekolah Kepala Bumiputera (hoofden school). Ketika Menteri Keuchenius dalam tahun 1889 mendesak diajarkannya



kembali bahasa Belanda di sekolah-sekolah guru, ia mendesak pula perluasan bahasa Belanda di kalangan Bumiputera secara umum. Oleh karena itu di Hindia Belanda timbul banyak pendapat, antara lain bahwa sudah cukup dengan diberikannya pelajaran bahasa Belanda di sekolah kepala Bumiputera.

Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah kepala Bumiputera dalam reorganisasi tahun 1893 dihapuskan. Dalam reorganisasi 1893 itu sekolah-sekolah itu tidak lagi diperuntukkan untuk memajukan orang-orang terkemuka atau bangsawan Bumiputera, tetapi dijadikan sekolah pendidikan pegawai negeri Bumiputera. Dalam tahun 1899 bahasa Belanda dikembalikan menjadi bahasa pengantar.

Di sekolah kepala Bumiputera di Magelang, dimana dimulai reorganisasi tersebut, ternyata tidak diperoleh hasil yang baik. Perluasan bahasa Belanda kecuali untuk memajukan penduduk Bumiputera, mempunyai maksud dan tujuan politik juga. Ikatan antara tanah induk (Negeri Belanda) dengan tanah-tanah jajahan diharapkan dengan demikian dapat menjadi lebih erat. Akan tetapi beberapa residen ternyata tidak dapat menyetujui pendapat ini. Banyak pegawai Eropa mengabaikan permintaan untuk memajukan penggunaan bahasa Belanda dengan pegawai Bumiputera, bahkan beberapa diantaranya menolak bicara dengan bahasa Belanda dengan pegawai Bumiputera. Ketika kurang perhatian terjadi sampai dua kali yakni dalam tahun 1890 dan 1900, maka Sekretaris Pemerintah kelas I dengan surat edarannya menunjukkan kepada para Kepala Pemerintahan Keresidenan (Residen) adanya keinginan Pemerintah ke arah itu.

Keengganan mereka dinyatakan dalam "de Indische Tolk" (Juru Bahasa Hindia Belanda) 1890 sesudah surat edaran Pemerintah pertama 1890 yang berbunyi:

"Orang Jawa dengan mengingat orang yang diajak bicara mempergunakan bahasa Jawa kraton, tinggi atau rendah.

Terhadap pegawai kita (= Belanda) mereka menggunakan bahasa Jawa Tinggi, dan mereka dijawab dengan bahasa Melayu. Ini

bukan soal "etiket" sebagaimana dikira oleh surat edaran itu, tetapi soal hormat, yang telah sangat mendalam pada rakyat dan lembaga-lembaga negara. Bahasa Belanda tidak mempunyai perbedaan seperti bahasa Jawa, sehingga orang Bumiputera yang bicara dengan orang Belanda dalam bahasa Belanda, menyamakan dirinya dengan orang Belanda. Ia tahu, bahwa dengan demikian ia tidak sopan untuk tidak dikatakan kurang ajar".

Pendapat orang Eropa sedemikian itu dinyatakan pula dalam nota tuan v.d. Kemp yang ditulis sebagai jawaban atas pidato Prof. Kern tahun 1890 di depan Perhimpunan Hindia Belanda tentang masalah sampai kemana perlunya memajukan pengetahuan bahasa Belanda di kalangan penduduk Bumiputera (Notulen Perhimpunan Hindia Belanda 1891 halaman 158).

Cara-cara yang dianjurkan untuk melaksanakan cita-cita untuk memajukan penyebaran pengetahuan bahasa Belanda terutama di kalangan orang-orang terkemuka dan bangsawan dan Kepala-kepala Bumiputera ialah:

1. penggunaan bahasa Belanda dalam pertukaran pikiran jabatan antara pegawai-pegawai Eropa dan Bumiputera.
2. penambahan sekolah-sekolah kepala Bumiputera.

Akhir-akhir ini dalam Laporan Sementara di Majelis Rendah (Tweede Kamer) tentang Anggaran Belanja Hindia Belanda untuk tahun 1900 halaman 4 paragraf 8 didesak penggunaan dua cara tersebut di atas. Dalam surat berikutnya tertanggal 1 Desember 1899 nomor 58 Menteri Jajahan Cremer mengadakan penukaran pertimbangan lebih lanjut dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang dua cara tersebut. Dalam surat itu Menteri tidak lupa menyebut diri sebagai pendukung besar dari perluasan bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda dalam suratnya tertanggal 28 Januari 1900 nomor 180/14 menjawab surat tersebut di atas:

- ad.1. "Pendapat pembesar-pembesar Hindia Belanda tentang ini sangat tidak menguntungkan. Bahkan sangat menolak untuk mengadakan percobaan. Direktorat Pemerintahan Dalam Negeri

sebelum mengambil putusan menelaah bagaimana keadaan bahasa Belanda pada umumnya di kalangan kepala dan pegawai Bumiputera. Terbukti dari laporan halaman 4/5 - "

"Jumlah pegawai Bumiputera - yang dihasilkan oleh apa yang disebut sekolah-sekolah kepala Bumiputera dan menjabat sebagai pegawai masih sangat sedikit. Jumlah mereka lenyap ditelan dalam masa yang besar itu, mereka belum menguasai keadaan di mana-mana, hanya masih merupakan sedikit titik-titik terang. Bagian terbesar pegawai Bumiputera sekarang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan Bumiputera murni, hampir sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang bahasa Belanda".

Dengan sendirinya Direktur Pemerintahan Dalam Negeri keberatan terhadap desakan dari atas untuk mempergunakan bahasa Belanda dalam pertukaran pikiran jabatan. Tetapi ia ingin memajukan pemakaian bahasa Belanda jika pegawai-pegawai Bumiputera sendiri mengambil prakarsanya. Pemakaian berbagai bahasa dalam surat-menyurat jabatan di sana-sini akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan (umpamanya pada pergantian personil) merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam masa peralihan.

Dewan Hindia Belanda juga sangat menentang usaha mempergunakan bahasa Belanda dalam surat-menyurat jabatan, dan bertindak lebih jauh daripada Direktur Pemerintahan Hindia Belanda. Dewan menganggap sangat tidak perlu pemakaian bahasa Belanda, meskipun prakarsa keluar dari pegawai-pegawai Bumiputera sendiri, karena di satu pihak mengingat pengganti-penggantinya yang mungkin tidak mengerti bahasa Belanda dan di lain pihak mengingat juga personil di Biro-biro Jabatan, yang tidak akan mengerti surat yang ditulis dalam bahasa Belanda, meskipun pimpinannya mengerti bahasa itu.

Gubernur Jenderal sangat menyetujui pendapat dari Dewan Hindia Belanda, dan baru mau mengambil percobaan, jika pengetahuan bahasa Belanda sudah dapat dianggap tersebar secara umum di kalangan pegawai Bumiputera. Dari hasil percobaan ini nantinya akan tergantung apakah surat-menyurat jabatan antara pegawai-pegawai Eropa dan Bumiputera secara umum dapat dilakukan dalam bahasa Belanda.

Akhirnya mengenai ad.1 dapat dinyatakan, bahwa surat Menteri tertanggal 1 Desember 1899 nomor 58 sudah tegas dan Pemerintah Hindia Belanda dapat mengeluarkan surat edarannya (sirkuler) tertanggal 5 Pebruari 1900 nomor 344.

Ad.2 Pemikiran untuk menambah jumlah sekolah kepala Bumiputera dan atau menambah jumlah murid pada sekolah-sekolah yang sudah ada dapat disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal tindakan ini dilihat sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai penyebaran bahasa Belanda. Terpisah dari soal biaya, yang dalam surat-menyurat tidak dibicarakan, terdapat satu keberatan yang harus dipertimbangkan yaitu bahwa di sekolah-sekolah dapat dibentuk calon pegawai negeri, yang kemudian mungkin tidak semuanya mendapat kesempatan untuk ditempatkan.

Untuk tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidak-puasan di kemudian hari, penambahan jumlah sekolah kepala Bumiputera baru menjadi soal, jika sudah ada kepastian dan jaminan, bahwa pemuda-pemuda yang jumlahnya akan jauh lebih besar daripada jumlah yang diluluskan oleh sekolah yang sudah ada, mempunyai harapan yang pasti mendapat tempat dalam jabatan negara, dan karier yang dapat dikatakan memenuhi harapan-harapannya.

Untuk menyelidiki apakah tidak akan dapat diadakan perbaikan dalam keadaan yang ada, dan apakah benar bahwa para pemuda pemilik ijazah sekolah Kepala Bumiputera sering harus menunggu sampai bertahun-tahun untuk dipekerjakan, Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan menasihatkan untuk mengadakan pemeriksaan dengan teliti mengenai:

sampai di mana dalam 5 tahun terakhir ini para lulusan sekolah Kepala Bumiputera yang segera mendapat pengangkatan, dan bagaimana riwayat pekerjaan dalam jabatan dari para pemilik ijazah yang telah diangkat selama 10 tahun akhir-akhir ini.

Dewan Hindia Belanda sangat setuju dengan pemikiran ini dan mendesak supaya segera diadakan:

1. pemeriksaan seperti tersebut di atas, karena Dewan Hindia Belanda menduga, bahwa Kepala-kepala Pemerintahan Keresidenan kurang atau tidak mematuhi Surat Edaran Sekretaris Pemerintah kelas I tertanggal 2 Juli 1891 nomor 159 (Lamp. Lembaran Negara nomor 4762), dimana tegas dinyatakan keinginan Pemerintah, supaya para pemuda pemilik ijazah sekolah Kepala Bumiputera segera mungkin dipekerjakan dengan gaji.
2. pembaharuan surat edaran ini, tetapi dengan tambahan bahwa pada kenaikan tingkat harus lebih banyak diperhatikan pendidikan.
3. pengawasan yang dipertajam atas pentaatan peraturan-peraturan dalam Surat Edaran termaktub dalam sub 2.

Gubernur Jenderal menyetujui nasihat Dewan Hindia Belanda dan mengeluarkan dua surat edaran untuk melaksanakan nasihat tersebut:

1. tanggal 28 Januari 1901 nomor 261
2. tanggal 28 Januari 1901 nomor 260

Dari kenyataan-kenyataan dapat disimpulkan, bahwa saat itu yang dicitakan penyebaran bahasa Belanda hanya di kalangan Kepala-kepala dan orang-orang terkemuka Bumiputera,

Sekarang nampaknya pada Pemerintah Hindia Belanda ada semangat lain, nampaknya ingin menyebarkan bahasa Belanda dalam lingkungan yang lebih luas. Hal ini dapat disimpulkan dari:

1. usul Gubernur Jenderal untuk mengadakan kembali pengajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah guru.
2. subsidi yang sangat banyak diberikan kepada swasta untuk penyelenggaraan kursus-kursus bahasa Belanda,

Berbagai keadaan mungkin menjadi sebab perubahan sikap Pemerintah Hindia Belanda, antara lain:

1. Sebagai titik tolak apa yang termuat dalam Laporan Sementara tentang Anggaran Belanja untuk tahun 1900 halaman 4 paragraf 8.

Ditunjukkan pula sarana-sarananya:

- a. anjuran masuk sekolah-sekolah Bumiputera juga oleh anak-anak yang kurang mampu.
 - b. pemberian bantuan yang kuat kepada swasta.
2. Surat dari Bagian A. Kementerian Jajahan kepada Gubernur Jenderal tertanggal 1 Desember 1899 nomor 58 (= ditulis karena Laporan Sementara tersebut).
- Pemerintah menyatakan dengan tegas pendapatnya, bahwa memajukan pengajaran bahasa Belanda di kalangan Bumiputera dianggapnya sangat penting.
3. Tindakan Mr. Abendanon selaku Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mungkin sekali mempengaruhi juga. Terkenal bahwa Abendanon dengan segala syarat dan sarana akan melaksanakan cita-citanya memajukan penduduk Bumiputera, dan dapat diramalkan bahwa ia akan melakukan penyebaran bahasa Belanda lebih gigih daripada Direktur sebelumnya.
4. Menurut artikel dalam "het Onderwijs" (Pendidikan) nomor 39 dan 40 tahun ke-9 tanggal 6 dan 13 Oktober 1900 di kalangan Bumiputera sekarang ternyata ada cita-cita yang lebih sungguh-sungguh untuk belajar bahasa Belanda.
5. Akhirnya, dari jumlah pemberian subsidi yang sangat banyak akhir akhir ini mungkin sekali Hindia Belanda bertindak dalam semangat daripada Menteri Jajahan sekarang.

Patut dicatat: Dalam rapat Himpunan Hindia Belanda tanggal 18 Nopember 1890 (Notulen Himpunan Hindia Belanda 1890 hal.229) ia menyatakan pendapatnya, bahwa kepada orang Jawa dan Melayu harus diberi kesempatan untuk belajar bahasa Belanda dengan memberikan subsidi kepada swasta yang menyelenggarakan kursus-kursus. Kebanyakan subsidi yang diberikan akhir-akhir ini, diberikan sesudah ia menjadi Menteri Jajahan (van Asch van Wijck).

Sampai kemana perlunya penyebaran bahasa Belanda di kalangan rakyat

biasa di Hindia Belanda, Bagian A. menganggap tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut. Cukup ditunjukkan, bahwa di balik banyak pendukung, juga banyak yang keberatan dengan berbagai alasan, antara lain:

1. Melihat hasil-hasil peradaban Eropa atas orang-orang Hindu (di Hindia) yang dianggap tidak menguntungkan (=buruk). (Notulen Himpunan Hindia Belanda 1891 halaman 152/157).
2. Menyangsikan manfaatnya mempopulerkan bahasa Belanda di kalangan Bumiputera (codem halaman 161).
3. Takut jumlah orang yang tidak puas akan bertambah; jika Bumiputera yang berbicara bahasa Belanda merasa dirinya di atas masyarakat Bumiputera, akan mengetahui bahwa masyarakat Eropa belum terbuka baginya.
4. Menganggap penyebaran bahasa Belanda akan merugikan orang-orang Belanda.

(Pandangan-pandangan terperinci dari sub. a usul Gubernur Jenderal untuk mengadakan lagi bahasa Belanda di sekolah-sekolah guru, maka pada sekolah ini harus diadakan kursus persiapan 2 tahun dimana pengajaran bahasa Belanda jadi bahasa pokok).

Akhirnya ditentukan untuk pemberian subsidi pada kursus bahasa Belanda. Dalam hal ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Untuk menghitung jumlah subsidi.
2. Syarat-syarat untuk pemberian subsidi.

Ad.1 Subsidi berupa uang ganti rugi bulanan kepada guru dihitung f.4,- per jam pelajaran dipotong dengan uang sekolah yang diterimanya.

Ad.2 Sebagai syarat pemberian subsidi dikaitkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Besarnya uang sekolah tidak boleh lebih dari f.1.50 per murid per bulan. Pada subsidi pertama kepada kursus di Semarang tidak keberatan dipungut uang sekolah f.2.50. Pada permintaan subsidi di Tegal, Residen Tegal dan juga

Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan menganggap f.2.50 bagi orang Bumiputera terlalu tinggi, dan diturunkan f.1.50 untuk dapat menerima subsidi.

2. Kepada murid alat-alat pelajaran diberikan dengan cuma-cuma. Jumlah yang diperuntukkan untuk pembelian alat-alat pelajaran diberikan sekaligus oleh Pemerintah.

Ketentuan ini diberikan pada pemberian subsidi kepada kursus di Rembang, uang sekolah diturunkan jadi f.1.50

3. Pelajaran tidak menjurus ke persiapan murid untuk menempuh ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars Examen).

Ketentuan ini dicantumkan, karena pada kedua kursus pertama **dengan tegas** sebagai tujuan diberikan:

mendidik untuk ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars Examen) (K.A.E. diadakan tahun 1864). Diinginkan membuat calon pegawai lebih trampil untuk pekerjaannya dengan menyuruh belajar bahasa Belanda. Residen Semarang (P.F. Sythoff) menjelaskan maksud dan tujuan kursus itu dengan alasan:

1. Kesempatan untuk belajar bahasa Belanda bagi orang Bumiputera sukar diperoleh.
2. Sekolah N.E.S. terlalu mahal, dan jumlahnya terlalu sedikit, sangat jauh di luar jangkauan orang Bumiputera.
3. Tempat di sekolah Kepala Bumiputera sangat sedikit, dan bahasa Belanda tidak cukup diajarkan.
4. Sekolah-sekolah Eropa (E.L.S.) tidak diperhitungkan untuk anak-anak Bumiputera yang jumlahnya sangat banyak, lagi pula tidak cocok untuk kebutuhan khususnya, dan tidak mengajarkan bahasa Jawa dan Melayu sehingga akhirnya anak-anak Bumiputera tidak akan mengerti tiga bahasa itu dengan baik.

Residen melihat kursus-kursus itu tidak hanya baik untuk mendidik pegawai-pegawai yang trampil, tetapi juga berguna bagi persiapan masuk sekolah dokter Jawa.

Kebutuhan akan lembaga seperti itu terbukti ketika kursus yang dibuka pada tanggal 4 Mei 1900 di bawah asuhan dua orang guru

dengan jumlah murid 38 orang, tanggal 28 Juni sudah berjumlah 93 orang. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan sangat menyokong permintaan-permintaan subsidi tersebut, karena ia melihat didalamnya kemungkinan peralihan mengajarkan bahasa Belanda kepada lembaga-lembaga Pemerintah. Ia akan mengajukan usul-usul ke arah itu. Kursus di Tegal mula-mula akan meniru kursus di Semarang, tetapi Residen Tegal keberatan terutama terhadap tujuan untuk persiapan menempuh ujian pegawai kecil. Mempersiapkan orang-orang Bumiputera dengan jumlah besar untuk ujian ini (maksud kursus itu) sangat tidak dibenarkan, karena akan menimbulkan persaingan berat bagi orang-orang Indo (peranakan Belanda).

Selain itu orang-orang Bumiputera yang terdidik tidak akan lagi puas dengan jabatan-jabatan yang didudukinya sampai saat itu, tetapi menginginkan naik, dan harapan-harapan ini tidak akan dapat dipenuhi. (Bumiputera - jurutulis; Indo - klerik).

Maka dari itu Residen Tegal membatasi kursus itu sampai pengajaran bahasa Belanda. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengakui bahwa keberatan yang diajukan cukup beralasan, dan selanjutnya dalam kursus-kursus akan melihat hanya "satu sarana mendapatkan ke-trampilan untuk kemajuan lebih lanjut". Itu sebabnya dalam pemberian subsidi yang kemudian dicantumkan ketentuan nomor 3.

Akhirnya patut dicatat:

1. Biaya untuk subsidi diambil dari pos artikel 324 "Pengeluaran tidak terduga".
2. Lokasi kursus kebanyakan di gedung sekolah Bumiputera kelas 1, yang memang diijinkan oleh Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan.
3. Jumlah dan tempat kursus adalah seperti tercantum dalam daftar terlampir. (Semarang, Tegal, Pati, Probolinggo, Bangkalan, Kudus, Mojokerto, Nganjuk, Purworejo, Kutoarjo, Boyolali, Magelang, Wonosobo, Malang, dan Pasuruan).

Bagian A.1 dari Kementerian Jajahan dapat menyetujui catatan-catatan Menteri, bahwa sekarang pemberian subsidi jalannya lepas tanpa batas.

Tetapi Bagian A. menyangsikan, untuk memberi anjuran kepada Gubernur Jenderal supaya dalam memberi keputusan pemberian subsidi dapat dibatasi hanya kepada yang sangat perlu saja. Pengajaran bahasa Belanda kepada Bumiputera di Hindia Belanda tidak merupakan "keharusan mutlak", sebagaimana dapat dikatakan dengan pemberian pendidikan umum. Karena sekali sudah setuju dengan azas itu, maka sukar sekali untuk menemukan satu kriterium, dimana kepada kursus ini dapat diberikan subsidi, dan kepada kursus yang lain tidak. Mungkin dapat diberikan beberapa pembatasan, dengan selanjutnya tidak memberikan subsidi kepada kursus-kursus, yang didirikan di tempat dimana sudah ada kesempatan belajar bahasa Belanda.

Bagian A.1 ingin mengetahui pendapat Menteri mengenai usul mengadakan kembali bahasa Belanda di sekolah guru Bumiputera. Bersama dengan surat tentang subsidi pendapat tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jenderal.

Penyusun Nota menghubungkan dua masalah, yang seharusnya terpisah menjadi satu:

1. Pendidikan guru Bumiputera - yaitu metodik pengajaran yang dinikmatinya, dibandingkan dengan siklus pengajaran yang mereka alami sendiri untuk dapat memenuhi tujuannya.
2. Memprogandakan bahasa Belanda, supaya dengan demikian ikatan lebih erat terbentuk antara orang-orang Eropa dan Bumiputera, antara tanah kelahiran Belanda dan tanah jajahan.

Ad.1 Hanya mengenai masalah teknis saja, yaitu mentrampilkan guru.

Ad.2 Mengenai kesukaan (hoby), tetapi para pendukungnya lebih mendorong tujuan politisnya ke depan.

Untuk melaksanakan kedua masalah tersebut bersamaan, maka masalah pendidikan guru (ad.1) disesuaikan dengan ad.2 karena dengan demikian bahasa Belanda dapat lebih diprogandakan. Keberatan terhadap ini didasarkan atas:

1. Pendidikan guru Bumiputera ialah masalah tersendiri.
2. Orang dapat dididik dengan sangat baik, dan ia dapat menjadi guru yang baik, juga tanpa bahasa Belanda.

3. Sangat disangsikan apakah anak-anak Bumiputera akan mendapat manfaat dari pengetahuan bahasa Belanda dari gurunya.
4. Anak-anak Bumiputera belum membutuhkan pengetahuan bahasa Belanda, dan seandainya membutuhkannya seharusnya diajarkan oleh guru-guru Belanda dan bukan guru-guru Bumiputera.
5. Dari pandangan politis juga bukan tujuan Pemerintah untuk membuat rakyat Bumiputera jadi orang Belanda semua dengan kebutuhannya yang lebih banyak, keluhan, ketidakpuasan, dan sebagainya.
6. Pendidikan Bumiputera harus tetap Bumiputera, dan ini mungkin, karena pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupannya dapat diajarkan dalam bahasa Bumiputera.

Menurut Bagian A.1 dari Kementerian Jajahan, pendidikan Bumiputera sekarang sudah terlalu banyak diberikan. Bagi anak-anak Bumiputera, yang mengunjungi sekolah-sekolah Pemerintah, tidak ada keharusan untuk mengetahui bahasa Belanda, dan juga tidak akan dirugikan.

Apakah hal ini lain bagi guru-guru Bumiputera?

Menurut Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan jawabannya:

"Ya" dengan alasan:

1. Tampak tuntutan mendapat pengetahuan bahasa Belanda yang lebih banyak.
2. Karena itu baik sekali untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada guru-guru Bumiputera, yang dengan jalan ini pengetahuan umumnya akan maju dan bertambah, dan dalam hal ini akan berguna bagi pendidikan.

Yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan para pendukungnya adalah kaum utopis, yang berjalan kian kemari dengan gambaran impiannya, tanpa memperhitungkan syarat-syarat untuk kehidupan praktis.

2. Dimana bukti adanya tuntutan untuk mendapat lebih banyak pengetahuan tentang bahasa Belanda.
3. Mengajarkan bahasa Belanda kepada guru-guru Bumiputera ada dua keberatan:
 - a. masa pendidikannya jadi guru jadi banyak lebih lama;
 - b. pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih banyak (gaji, tunjangan, penambahan personil dan gedung).
4. Guru Bumiputera yang tetap memberikan pelajaran dalam bahasa Bumiputera di desanya tidak akan memelihara dan mempergunakan dalam percakapan sehari-hari bahasa Belanda yang telah dipelajarinya.
5. Hasil dari pendidikannya akan segera hilang, karena setelah menjabat guru ia merasa bebas dan berdiri sendiri.
6. Sangat disangsikan, apakah guru-guru akan belajar terus untuk mendapat tambahan pengetahuan, kebanyakan akan tetap pada lingkaran jabatannya dan percaya bahwa pengetahuan yang diperlukannya dapat dipelajari dalam bahasa-bahasa Bumiputera.

Bagian A.1 mengingatkan sejarah penyebab dicoretnya bahasa Belanda dari sekolah-sekolah guru Bumiputera sebagai bahasa pengantar dan sebagai matapelajaran. Hal itu terjadi dalam tahun 1886, dan serkarang 15 tahun kemudian apakah keadaan akan terbalik dengan tiba-tiba.

Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda mulai cenderung untuk mengikuti Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan. Wali Negara itu mohon pandangan Menteri. Bagian A.1 menasehatkan tindakan tegas dan penolakan, karena:

1. Usul itu tidak dapat diharapkan berhasil.
2. Akibat keuangan bagi perbendaharaan negara, yang dalam waktu dekat akan makin lama makin banyak dibebani, tanpa ada manfaat sebagai imbalannya.

Mengenai Ad.2, kesukaan akan kursus-kursus bahasa Belanda, menurut Bagian A.1 sebaiknya Gubernur Jenderal diajarkan supaya untuk sementara waktu lebih baik menunggu hasil dari kursus-kursus yang telah didirikan, sebelum memberikan subsidi baru.

Menurut dugaan Bagian A.1 ada usaha para guru kursus untuk mendapat penghasilan sampingan yang cukup lumayan (f.100.-- subsidi di samping gaji f.200.-- a f.300.-- sebulan). Disangsikan apakah tambahnya kursus akan memberi manfaat dalam ukuran yang sama seperti bertambahnya permintaan subsidi.

PEMBERIAN SUBSIDI

KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPUTERA SWASTA

9. Surat Menteri Jajahan (van Asch van Wijck) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 23 Januari 1902 nomor 20/236

Dalam surat ini dengan menarik surat Gubernur Jenderal tertanggal 6 September 1901 nomor 1812/29 tentang peninjauan kembali ketentuan tentang pemberian subsidi Negara kepada sekolah Bumiputera Swasta, dan menyusuli suratnya tanggal 23 Januari 1902 litt.A. no.19/235 tentang penambahan jumlah sekolah Bumiputera Negeri, Menteri menyampaikan pendapat serta pemikirannya kepada Gubernur Jenderal sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan rendah bagi penduduk Bumiputera yang makin lama makin bertambah, dapat ditempuh jalan lain daripada jalan yang akan menjurus ke perluasan jumlah sekolah Bumiputera Negeri yang senantiasa makin menanjak.

Jika pada perluasan jumlah sekolah Bumiputera yang lebih dari biasa akan ada bahaya meng-alpakan azas-azas tahun 1893 mengenai pendidikan Bumiputera dengan terlalu memberatkan kekuatan keuangan negara, maka dengan jalan perubahan peraturan pemberian subsidi kepada sekolah Bumiputera Swasta, seperti yang sekarang ada menurut Lembaran Negara 1895 nomor 146, maka:

bahaya kesatu tersebut di atas (=peng-alpaan azas 1893) dapat ditanggulangi, sedangkan bahaya kedua (=pembebanan kekuatan keuangan negara) tak akan perlu dikhawatirkan.

2. Menyetujui usul Gubernur Jenderal mengenai perubahan-perubahan dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 termuat dalam suratnya ter-

tanggal 14 Pebruari 1901 nomor 311/36 telah disetujui oleh Menteri lama. Dalam surat tersebut Gubernur Jenderal telah menyampaikan data dari akibat keuangan dari perubahan yang diusulkan, dan membantah beberapa keberatan.

3. Disetujui pula usul untuk memperluas batas-batas pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah swasta.
4. Jumlah uang subsidi termaktub dalam Lembaran Negara tersebut terlalu kecil (f.100.-- - f.250.-- per tahun menurut jumlahnya murid, ditambah f 20.-- - f.40.-- biaya pemeliharaan) dan harus dinaikkan. Sebagai dasar diambil biaya minimum setahun dari sekolah Bumiputera Negeri dengan jumlah murid tertentu. Subsidi yang diberikan kepada sekolah swasta dengan jumlah murid sama kira-kira 2/3 dari biaya minimum tersebut.

Dengan dinaikannya jumlah subsidi, prakarsa swasta akan lebih dirangsang; lebih-lebih akan adanya kepastian bahwa subsidi pasti diberikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sekolah swasta, jika memenuhi syarat-syarat termaktub dalam konsep perubahan ordonansi dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 (surat Gubernur Jenderal tertanggal 14 Pebruari 1901 nomor 311/36) mempunyai hak atas subsidi.

5. Putusan apakah sudah memenuhi syarat tersebut diserahkan kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (menarik surat Gubernur Jenderal tanggal 6 September 1901 nomor 1812/29) dengan putusan lebih tinggi pada Gubernur Jenderal.
6. Pertanggungan jawab tentang uang subsidi dianggap tidak perlu, jika sudah memenuhi syarat dalam pasal 1 dan jumlah subsidi kurang dari biaya sekolah negeri yang paling sederhana (penambahan alinea pada pasal 6 yang telah ada termaktub dalam pasal 7 dari konsep, dipandang tidak perlu).
7. Perubahan pasal 6 dari konsep tentang pengawasan atas sekolah-sekolah swasta subsidi dipandang perlu.

Banyak sekolah swasta enggan dan merasa segan akan mohon subsidi karena adanya peraturan pengawasan ini. Terutama sekolah-sekolah

zending dibuat terlalu banyak tergantung pada putusan pengawas. Lain dari itu sering tidak mungkin untuk menemukan orang Eropa untuk anggota Komisi Sekolah, sehingga harus diangkat orang Bumiputera, yang dengan demikian mendapat posisi terhadap anggota zending, hal mana tidak diinginkan.

8. Disamping pemberian subsidi, harus ditentukan pula peraturan tentang pemberian bantuan yang cukup untuk pembangunan gedung dan perlengkapan pertama.

Pada akhir surat Menteri mengharap menerima pendapat Gubernur Jenderal dan penyelesaian masalah itu segera mungkin, supaya dapat mengajukan usul-usul dalam Anggaran Belanja tahun 1903. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dengan suratnya tertanggal 24 Juni 1901 sudah menyatakan dukungannya pada arah yang dipikirkan Menteri Jajahan dengan mengatakan:

"tambahnya jumlah sekolah-sekolah swasta subsidi merupakan tanda yang sangat baik, karena dengan jalan ini kebutuhan akan sekolah rakyat yang dirasakan di mana-mana, makin lama makin banyak dapat dipenuhi dengan jalan minta biaya yang jauh lebih sedikit daripada jika seluruhnya harus dipikul oleh Pemerintah".

PENDIDIKAN DASAR BAGI

PENDUDUK BUMI PUTERA - SEKOLAH-SEKOLAH KETRAMPILAN

10. Surat Menteri Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 27 Januari 1903 nomor 58/309

Dalam surat ini Menteri memberitahukan kepada Gubernur Jenderal bahwa pengaturan pendidikan Bumiputera yang sekarang tidak dapat disetujui seluruhnya dan berpendapat perlu diadakannya perubahan dalam arti yang praktis.

Sekolah-sekolah kelas 2 memberi kesempatan kepada sebagian kecil penduduk Hindia Belanda untuk mentrampilkan diri buat berbagai jabatan rendah dalam dinas negara atau swasta. Melihat

jumlah dan metodenya pengajaran tersebut tidak akan dapat mencukupi kebutuhan pendidikan bagi bagian terbesar penduduk. Bagi pengajaran di desa sampai sekarang belum dilakukan apa-apa oleh Pemerintah. Mata tidak tertutup bagi kenyataan ini yang sering dikonstatir dan juga tidak dapat dipungkiri, bahwa keadaan ini tidak dapat terus dibiarkan, jika kita (=Belanda) sesuai dengan tuntutan ingin melaksanakan kewajiban terhadap penduduk yang kita jajah. Memberikan pendidikan kepada seluruh penduduk Bumiputera - meskipun sementara hanya di Jawa dan Madura dan sebagian di seberang - untuk memenuhi kebutuhan, merupakan tugas yang pelaksanaannya meminta syarat keuangan dan personil yang begitu besar, sehingga hanya dapat dipikirkan dalam masa depan yang sangat jauh. Perluasan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 secara berangsur-angsur akan memberikan beberapa pengetahuan sekolah dan dengan demikian sedikit persiapan buat pekerjaan tertentu, tetapi tidak akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan paling banyak dirasakan, terutama oleh penduduk desa.

Penduduk desa membutuhkan pendidikan rakyat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu bukan hanya pendidikan untuk seluruh penduduk (surat-surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tanggal 20 Pebruari dan 9 Maret 1901 nomor 2226 dan 3167), tetapi juga pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan dari dan sesuai bagi penduduk desa. Yang perlu bagi desa ialah pendidikan yang lebih banyak didasarkan praktek kehidupan orang desa, ini lebih dibutuhkan daripada yang sekarang diberikan oleh pendidikan Pemerintah. Disamping sekolah yang diatur menurut model Barat di ibukota, di desa akan harus ada sekelompok sekolah yang memberikan pelajaran kepada orang desa yang penting untuk perjuangan hidupnya, yaitu:

1. Memperbaiki pengertian tentang pertanian dan perkebunan buah-buahan.
2. Memberi pengertian sehat tentang peternakan.
3. Mengembangkan ketrampilan dan rasa seni dalam mengerjakan kain dan bahan yang ditemukan di daerah dimana ia bertempat tinggal.

Untuk tidak menghadapi keberatan-keberatan yang tidak teratasi, maka pendidikan ini harus diatur sesederhana mungkin dan harus berkaitan

dengan kehidupan desa. Mengingat kesulitan untuk memperoleh personil, maka permulaannya harus kecil dan lebih banyak bersifat percobaan. Ini perlu, karena menghadapi masalah baru dan harus bekerja dengan meraba-raba. Kekosongan yang sungguh-sungguh dalam pendidikan Bumiputera ini sudah lama dirasakan. Keyakinan ini makin diperkuat setelah membaca artikel dari H.E. Schmalhausen dalam majalah "de Indische Gids" (Petunjuk Hindia Belanda) bulan Agustus dan September 1902 (judul "Apa yang dibutuhkan Jawa?") dan dari Bupati Ngawi dalam majalah untuk Pemerintahan Dalam Negeri bulan Juli 1902 (R.M. Tumenggung Oetoyo, judul: "Sekolah Ketrampilan yang berpindah pindah bagi Bumiputera").

Tidak semua pemikiran dalam artikel tersebut dapat diterima untuk dipraktekkan, tetapi nampaknya ada beberapa yang akan dapat dicoba dalam praktek dengan berhasil. Percobaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, supaya dapat dimulai di dalam pendidikan desa dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Masalah ini supaya dipelajari sedemikian, sehingga dalam Anggaran Belanja tahun 1904 sudah dapat dimasukkan posnya, untuk dapat dimulai dengan percobaan dalam tahun ini juga. Demi masalah percobaan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan bantuan seorang Bupati yang merasakan pentingnya masalah itu, dan dengan sendirinya sebaiknya di daerah Ngawi. Percobaan ini harus sungguh-sungguh menuju ke sasarannya, karena:

1. Belum diketahui banyaknya keberatan terhadap pendidikan desa yang diusulkan.
2. Kegunaannya oleh banyak orang masih disangsikan.
3. hanya prakteklah dapat memberi jawaban atas berbagai pertanyaan tentang masalah ini.

Dengan adanya usul ini sama sekali tidak meremehkan nilai sekolah-sekolah Bumiputera yang sekarang ada, dan akan terus berusaha keras supaya perluasan jumlahnya diteruskan seperti tahun-tahun terakhir ini. Menteri yang lama tidak dapat menyetujui pemikiran Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan untuk memperluas jumlah sekolah yang sudah ada dengan 6 kali yang dilaksanakan tahun-tahun akhir

ini tiap-tiap tahunnya. Menurut pendapatnya bantuan prakarsa swasta bagi pendidikan lebih disukai daripada pendidikan langsung oleh Pemerintah, juga karena dengan jalan ini kebutuhan akan pendidikan dapat dipenuhi dengan pengorbanan keuangan negara yang jauh lebih sedikit. Keunggulan pendidikan swasta atas pendidikan oleh Pemerintah menurut pendapatnya:

1. Dapat lebih menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang khas di daerah tertentu.
2. Dapat bersama-sama menaikkan penduduk Bumiputera ke tingkat ke-
rohanian dan kesusilaan Barat yang lebih tinggi (pendidikan tidak hanya harus terbatas mengajarkan beberapa pengetahuan sekolah, tetapi seharusnya mendalam ke kehidupan rohani si anak).
3. Pendidikan Pemerintah yang harus bersikap netral, sebagian terbesar diberikan oleh guru-guru beragama Islam.

Dengan bertambahnya pengetahuan diharapkan dapat membantu memberantas ketahayulan, tetapi justru karena kenetralan ini tidak dapat menggantikan apa yang diambilnya (=gambaran-gambaran tahayul) dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Dari sudut pandangan pedagogis pendidikan swasta lebih berhasil, karena dapat membina ke dalam dunia pikiran yang lain sama sekali.

Dengan penuh perhatian ditunggu-tunggu usul dari Gubernur Jenderal mengenai peraturan yang lebih baik dari pemberian subsidi kepada pendidikan Bumiputera swasta. Selama prakarsa swasta dalam hal ini masih lemah, pendidikan oleh Pemerintah akan tetap dimajukan dan perluasan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 dilanjutkan menurut cara dan derap yang sampai sekarang dilaksanakan.

PENDIDIKAN BAGI
ANAK-ANAK PARA PEJABAT (SWAPRAJA)

11. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) tanggal 4 Juni 1903 nomor 166 Rahasia

Keadaan, bahwa:

1. Bobot para raja dan pembesar kerajaan dari daerah-daerah dengan pemerintahan sendiri, sementara daerah sering menyedihkan.
2. Ada daerah dimana para anak raja menghabiskan waktunya tidak hanya dengan bermalas-malasan saja, tetapi dalam usia yang masih sangat muda mendapat kesempatan menyerah pada kecabulan, main judi, menyabung ayam, minum, madat, dan memeras rakyat.

Timbul pertanyaan pada Gubernur Jenderal apakah hal itu bukan hak Pemerintah untuk menuntut pada para raja, supaya mereka memberikan pendidikan tertentu kepada putera-puteranya paling sedikit puteranya yang diinginkan menjadi penggantinya.

Hak untuk menyetujui penunjukkan pengganti raja dipegang oleh Pemerintah, dan ia hanya perlu membuat persetujuan itu tergantung dari syarat, bahwa pengganti raja harus telah menikmati pendidikan tertentu. Pada hakekatnya hal ini akan mempunyai pengaruh ke arah perbaikan.

Supaya para raja dapat memberikan pendidikan yang diperlukan kepada putera-puteranya, Pemerintah harus memberikan bantuan. Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk apapun akan memerlukan biaya, dan bagi para raja yang tidak cukup keuangannya akan dirasakan terlalu berat, bahkan bagi beberapa raja pasti di atas kekuatannya. Maka dari itu demi keadilan dan politik yang baik, menuntut bahwa Pemerintah dimana perlu harus ikut menanggung pengeluarannya, paling tidak sebagian. Uang yang diperlukan untuk maksud ini menurut Wali Negara merupakan suatu penanaman yang baik, jika karenanya dapat dibentuk raja-raja, yang dalam pendidikan, otak, dan luas pandangannya akan lebih berbobot daripada kebanyakan raja-raja

sekarang. Keuntungan sampingan yang barangkali ada ialah, bahwa Pemerintah dengan menangani pengawasan atas pendidikan para calon raja akan mempunyai juga kesempatan yang lebih baik daripada sekarang untuk memperoleh keterangan yang lebih terpercaya mengenai sifat tabiat dan bakat kecerdasan mereka.

Diharapkan Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan menyampaikan pertimbangan serta nasehat mengenai masalah tersebut di atas, sesudah membicarakannya dengan pejabat-pejabat seperti Kepala Daerah Keresidenan di luar Jawa, dimana terdapat daerah swapraja, para pegawai inspeksi pendidikan Bumiputera, dan terutama Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab.

12. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 25 Nopember 1903 nomor 369 Rahasia

Dalam surat ini dijawab surat Sekretaris Pemerintah kelas I tertanggal 4 Juni 1903 nomor 166 Rahasia, mengenai pendidikan putera-putera atau calon pengganti kepala daerah Swapraja, bahwa nasehat telah dimohon dari para pembesar termaktub dalam penutup surat tersebut di atas, serta pula dari Residen Yogyakarta dan Surakarta. Nasehat dari pembesar-pembesar itu sangat berbeda:

1. Dari Gubernur Aceh dan daerah sekitarnya (Let.Jen. J.B. van Heutz), menanggapi pendidikan pada sekolah Bumiputera biasa sudah cukup.
2. Dari Residen Bali dan Lombok (J. Eschbach).
Sesudah tamat sekolah Bumiputera, supaya disuruh diajar lebih lanjut oleh guru Bumiputera dalam ilmu bumi, sejarah dan ukur tanah, kemudian oleh seorang kontrolir dalam pengetahuan praktis tentang pembuatan saluran/bangunan perairan, tentang pertanian dan tentang pemeriksaan dalam perkara-perkara pidana dan perdata.
3. Dari Residen Ternate dan daerah-daerah sekitarnya (D.W. Horst).
Menganggap perlu masuk berturut-turut Taman Kanak-kanak (sekolah Fröbel), Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) dan Sekolah Pendidikan Pangreh Praja Bumiputera (OSVIA).*)

*) OSVIA dapat pula berarti Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri Bumiputera.

4. Residen Yogyakarta (J.C. Couperus)

Menganggap sekolah-sekolah yang ada tidak ada yang cocok.

Mengusulkan mengajarkan kepada mereka mata-matapelajaran tertentu oleh guru-guru khusus, tetapi tidak dalam bahasa Belanda.

5. Residen Kalimantan Barat (A.J.Ch. de Neve)

Kebanyakan para muda tersebut sudah terlalu tua untuk mengikuti pendidikan biasa pada Sekolah Kepala Bumiputera.

Mengusulkan supaya dipondokkan pada seorang atau beberapa orang Bupati, atau keluarga-keluarga pegawai Bumiputera terkemuka di Jawa selama 3 tahun.

6. Residen Sumatera Timur (G. Schaap).

Mengusulkan didirikan sekolah-sekolah di Medan dan Tanjung Balai, khusus bagi para putera raja-raja dan pejabat swapraja, diatur dengan cara yang sama seperti sekolah rendah Eropa dengan guru-guru Belanda.

7. Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya (C.W.W.C. Baron van Hoevell). Mengusulkan supaya guru-guru Bumiputera yang cakap diperbantukan kepada raja-raja yang bersangkutan.

8. Residen Kalimantan Timur dan Selatan (C.A. Kroesen).

Mengusulkan supaya semua putera raja dari berbagai bagian Nusantara dididik bersama dalam satu sekolah dengan asrama, yang didirikan oleh Pemerintah dalam satu rumah besar dekat salah satu ibukota di Jawa.

Bagaimanapun jauhnya perbedaan nasihat-nasihat itu, hampir semuanya menyetujui dilaksanakannya pemikiran Pemerintah dalam surat rahasia tersebut di atas. Sama halnya dengan nasehat para pegawai inspeksi pendidikan Bumiputera, namun belum dapat disusun pola umum. Nasehat dari Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab (Dr. Snouck Hurgronje) memandang masalahnya lebih banyak dari sudut pandangan umum:

1. Menginginkan didirikan sebuah pusat sekolah pendidikan dengan pengajaran yang cukup tinggi dalam beberapa matapelajaran tertentu disamping pengajaran pengetahuan umum, dengan pengawasan ketat dan pembinaan kuat oleh Pemerintah.

2. Karena pelaksanaan segera dari ad.1 tidak dapat diharapkan, maka diusulkan lebih baik mulai dengan rencana yang lebih sederhana:

- a. para pemuda dipondokkan pada keluarga-keluarga Eropa yang beradab, mula-mula masuk sekolah rendah Eropa (sedekat mungkin dengan kediaman orang tua), dan kemudian untuk mengikuti pengajaran pada Hogere Burgerschool.
- b. para Residen yang bersangkutan mengawasi jalannya pendidikan pemuda-pemuda itu, jika perlu menggunakan pengaruhnya pada pemuda dan orang tuanya, supaya masuknya sekolah teratur dan supaya tidak dipergunakan uang lebih banyak daripada yang diperlukan dan berguna.

3. Di tempat dimana sudah ada Sekolah Pendidikan Pangreh Praja (OSVIA) di Jawa (Bandung, Magelang, Probolinggo) dan sekolah Kepala Bumiputera di Tondano, tidak perlu mengirimkan pemuda-pemuda itu ke HBS, kecuali bagi mereka yang istimewa pandainya. Sekolah yang direncanakan Snouck Hurgronje (ad.1) lama dan tingkatnya akan sama dengan HBS, tetapi ada beberapa matapelajaran yang dihilangkan (exakta dikurangi), dan beberapa matapelajaran ditambahkan, misalnya dasar-dasar ilmu hukum.

4. Bagi mereka yang sudah terlalu tua untuk mengikuti pendidikan di atas, diusulkan:

Mendirikan semacam sekolah Bumiputera yang lebih tinggi (Hogere Inlandse School) - menurut contoh sekolah pendidikan Pangreh Praja, tetapi diubah sesuai keadaan daerah, dengan guru Belanda dan bahasa Belanda sebagai matapelajaran bagi mereka yang mempunyai kecakapan untuk mempelajarinya.

Mendirikan sejumlah sekolah sedemikian - akan makan biaya yang sangat besar. Meskipun oleh Penasehat ada pembatasan, hanya di ibukota keresidenan dan jika di antara para putera raja dan pembesar kerajaan dapat diperoleh jumlah murid yang cukup (jumlah ditetapkan minim). Akan ada keresidenan, dimana tidak dapat didirikan sekolah semacam itu, sehingga putera-putera raja dan pembesar swapraja yang umurnya lebih tua tidak dapat memperoleh pendidikan.

5. Pemikiran Dr. Snouck Hurgronje, yang dalam prinsip dapat disetujui dan dapat dilaksanakan dengan biaya sedikit, yaitu dengan cara pada tiap-tiap Sekolah Pendidikan Pangreh Praja di Jawa dan pada Sekolah Kepala Bumiputera di Tondano diadakan kursus dengan personil Eropa dan Bumiputera, khusus bagi pemuda-pemuda tersebut dengan tujuan:

- a. mengajarkan pengetahuan umum dan kesusilaan;
- b. mempersiapkan diri agar dapat mengikuti pendidikan di sekolah Pendidikan Pangreh Praja.

Yang sekiranya tidak akan mampu, hanya diberi pelajaran yang dapat dicapai pada kursus selama 3 tahun dan tidak perlu menunggu sampai dapat mengikuti semua matapelajaran, tetapi dapat mengikuti beberapa matapelajaran saja. Selanjutnya dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Pendidikan Pangreh Praja, kalau perlu di berbagai kelas.

Bagi yang memperlihatkan kecakapan untuk belajar bahasa Belanda diajarkan bahasa Belanda dengan maksud agar untuk selanjutnya dapat mengikuti matapelajaran yang diberikan dalam bahasa Belanda. Sebaiknya murid yang meskipun sudah mengikuti semua matapelajaran, dipondokkan pada keluarga-keluarga Eropa yang beradab, di mana mereka dapat memperoleh bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam hal pemondokan ini ada kesulitan, dapat diatasi dengan bantuan dan kerjasama para Residen dan Inspektur Pendidikan yang bersangkutan dan Dr. Snouck Hurgronje.

Diusahakan agar apa yang berbau kemewahan dapat dihindarkan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Keberatan para raja, terutama dari isterinya, untuk mengirimkan putera-puteranya keluar daerah, karena:
 - a. rasa keterikatan antara ibu dan anak;
 - b. kecurigaan akan maksud Pemerintah.

Hal ini dapat diatasi dengan tindakan bijaksana dari Residen, dan dari contoh beberapa raja lainnya.

2. Mengunjungi Sekolah Rendah Eropa di dekat kediamannya menimbulkan keberatan raja, karena puteranya berkumpul dengan anak-anak kawulanya sendiri, yang misalnya, dipersiapkan untuk sekolah dokter.
3. Di beberapa Keresidenan ada raja-raja, yang sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk pendidikan para puteranya dan dari para pejabatnya.

Daerah-daerah, dimana sudah dikerjakan ke arah yang diinginkan ialah: Aceh (oleh keinginan Gubernur)

Surakarta (oleh prakarsa Susuhunan sendiri)

Kesultanan Lingga-Riau, Asahan, Bacan, kepulauan Sangir Talaud (tiap-tiap raja telah mengirimkan seorang puteranya atau lebih ke sekolah).

4. Menurut Dr. Snouck Hurgronje, untuk pelaksanaan rencana tersebut, beberapa orang tua para pemuda tersebut sama sekali tidak dapat memikul biayanya, dan ada yang hanya sebagian saja (ini merupakan kekecualian). Bantuan dari Pemerintah, tidak hanya untuk pondokan dan makan, tetapi juga untuk biaya perjalanan ke Jawa pulang-pergi.

(untuk perencanaan biaya harus ada data mengenai jumlah pemuda yang akan diterima, kekuatan keuangan para orang tua, dll.; jika rencana disetujui, akan dimulai percobaan di Bandung)

Mengenai daerah-daerah kerajaan di Jawa dapat dikemukakan, bahwa Residen Yogyakarta (L.C. Couperus):

- a. Khawatir, bahwa mempersatukan keturunan raja dengan anak-anak lain di satu sekolah tidak akan diperkenankan.
- b. Keturunan raja harus dididik hanya di tempat sendiri, dimana mereka di kemudian hari akan berkuasa.

Ad.a dibantah oleh kenyataan, bahwa menurut surat Residen Surakarta (W. de Vogel) dengan lampiran data dari Kepala Sekolah Rendah Eropa Surakarta, ternyata putera Susuhunan mengunjungi sekolah tersebut.

Ad.b pandangan ini tidak benar. Perlu diperhatikan pandangan L.C. Couperus, Residen Yogyakarta.

Pendidikan di tempat sendiri dimana seluruh lingkungan dire-sapi oleh pemujaan dan rasa bangga dan kuasa tanpa henti-hentinya mendapat tempat khusus sehingga hasil (manfaat) pendidikan akan sedikit sekali. Hal ini diinsyafi oleh Sultan.

Jika raja di Jawa lebih menginginkan pendidikan di Magelang, maka di sana akan dapat diangkat seorang guru. Lingkungan bukan Jawa di Bandung akan lebih baik. Setelah mendapat persetujuan Gubernur Jenderal, akan diadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Residen Yogyakarta dan Surakarta.

13. Surat Sekretaris Pemerintah Kelas I kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) tanggal 3 Mei 1904 nomor 203 Rahasia

Dalam surat ini diberitahukan, bahwa setelah membaca surat tanggal 25 Nopember 1903 nomor 369 (nomor 12) dengan lampirannya Nasehat dari Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab tanggal 22 September 1903 nomor 60, Gubernur Jenderal memutuskan perlunya putera putera raja yang telah ditunjuk atau akan ditunjuk menjadi pengganti untuk:

1. Disuruh masuk Sekolah Rendah Eropa (ELS), sedekat mungkin dengan tempat kediamannya.
2. Kemudian salah satu dari Sekolah Pendidikan Pangreh Praja (OSVIA) di Jawa atau Sekolah Kepala Bumiputera (Hoofdenschool) di Tondano, dengan kebebasan bagi mereka yang terbukti cakap atau yang orang tuanya lebih menyukai untuk masuk Hogere Burger School (HBS) 5 tahun.

Dr. Snouck Hurgronje mengusulkan untuk mendirikan semacam Sekolah Bumiputera Atas (Hogere Inlandse School) di ibukota Keresidenan, dimana dapat diperoleh murid yang terdiri dari putera raja dan putera pejabat swapraja dalam jumlah yang cukup bagi:

1. "Keturunan raja" yang umurnya agak lebih tua dan yang pendidikannya menurut cara adat diabaikan.
2. Juga putera-putera raja-raja yang kurang penting, dan pejabat-pejabat swapraja, yang karena keuangan atau arti jabatannya memerlukan pendidikan yang lebih sederhana.

Menurut pendapat Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengadakan sekolah demikian akan memakan biaya yang sangat besar, dan karena itu pemuda-pemuda tersebut lebih baik disuruh mengikuti kursus dengan personil Eropa dan Indonesia yang diadakan di tiap-tiap Sekolah Pangreh Praja di Jawa dan di Sekolah Kepala Bumiputera di Tondano.

Akan tetapi Wali Negara (Gubernur Jenderal) tidak mengharap-kan hasil dari mengikuti kursus di atas bagi pemuda-pemuda yang pendidikannya telah diabaikan. Dan bagi anak-anak yang lebih muda yang disebut Snouck Hurgronje (Ad.2) yang membutuhkan pendidikan yang lebih sederhana, menurut pendapat Wali Negara cukup mengikuti kursus pada Sekolah Bumiputera atau Sekolah Rendah Eropa dari Pemerintah.

Bagi para putera raja yang ditunjuk menjadi pengganti, yang usianya sudah meningkat dewasa, tindakan yang paling mengenai sa-sarannya menurut anggapan Gubernur Jenderal, ialah:

masing-masing persoalan harus ditimbang terpisah, putusan yang ditentukan tergantung dari bakat, tabiat, sifat-sifat individu lainya, dan keadaan kehidupan pemuda itu.

Wali Negara minta Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan meng-hubungi para Residen yang bersangkutan untuk diminta nasehat me-nge-nai mereka, masing-masing terpisah dan disertai dengan usul-usul tertentu.

Untuk memulai para Residen harus berusaha membujuk para raja serta pembesar daerah Swapraja, supaya putera-puteranya yang sudah mencapai usia sekolah dimasukkan ke Sekolah Rendah Eropa dalam Ke-residenan tempat tinggal mereka, dan menyelidiki kemungkinan me-mondokkan anak-anak itu pada keluarga Eropa yang beradab. Jika terdapat kesulitan, bantuan dan kerjasama Dr. Snouck Hurgronje da-pat diharapkan.

PENDIDIKAN BAGI
PENDUDUK BUMIPUTERA - AZAS-AZAS KEBIJAKSANAAN

14. Nota Menteri Jajahan (Idenburg) - tanpa tanggal. *)

Kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda membebankan kewajiban untuk memerintah bangsa-bangsa Nusantara, pertama-tama demi kepentingan mereka, dan melindungi hak-hak mereka. Kepentingan menuntut kemajuan rohani dan jasmani mereka.

(pendirian mengenai pengkristenan Hindia Belanda: kedudukan hukum orang-orang Kristen Bumiputera, sikap Pemerintah selaku "wakil Bangsa Kristen", menghormati kebebasan batin, zending "rangkap", kedudukan gereja Protestan, peningkatan kesusilaan penduduk Bumiputera)

Pendidikan penduduk Bumiputera menurut nota tersebut:

1. Organisasi pendidikan rakyat yang sesungguhnya oleh negara, akan melebihi kekuatan keuangan negara.
2. Pendidikan Bumiputera seperti yang diberikan oleh Pemerintah akan membuat propaganda bagi agama Islam.
3. Maka dari itu bantuan kuat bagi pendidikan rakyat yang diberikan zending adalah untuk kepentingan keuangan dan politik negara.

Selama prakarsa swasta masih kurang, organisasi pengajaran rakyat sebaiknya diusahakan dengan:

1. Memperluas jumlah sekolah kelas 1 dan 2 secara berangsur.
2. Perluasan hanya bagi tempat-tempat yang agak penting.
3. Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk pedesaan dengan sekolah-sekolah yang dekat berkaitan dengan kebutuhan primernya.

Saat untuk melancarkan propaganda bahasa Belanda di kalangan penduduk Bumiputera nampaknya belum tiba. Kebutuhan akan pengajaran bahasa Belanda nampak yang dipenuhi oleh prakarsa swasta, maka prakarsa itu dapat dibantu. Dalam pada itu pengajaran dalam bahasa Belanda oleh Pemerintah sebaiknya hanya diberikan pada Sekolah Bumiputera yang lebih tinggi (Pendidikan Pangreh Praja, dokter Jawa, guru).

*) Judul nota tak bertanggal ini "Nota yang berisi hal-hal yang dikemukakan Menteri Jajahan"

PENDIDIKAN BAGI ORANG-ORANG CINA

15. Nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 28 April 1905 nomor XX

Dengan surat Rahasia tanggal 19 Desember 1904 hrf. E nomor 421 Residen Betawi mengemukakan sekali lagi perlunya memberikan bantuan Pemerintah kepada sekolah bagi anak-anak Cina, yang didirikan dan diselenggarakan oleh perkumpulan "Tiong Hwa Hwee Koan", dimana diajarkan bahasa Inggris, agar supaya perkumpulan ini dapat mengangkat seorang guru Belanda dan disuruh mengajarkan bahasa Belanda.

Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Mr. Abendanon (sudah berhenti) dalam laporan rahasia tanggal 13 Januari 1904 nomor 74 dalam nasehat mengenai masalah ini mengemukakan antara lain:

- a. Sungguh aneh, bahwa anak-anak Cina mendapat pelajaran bahasa Inggris, dan tidak bahasa Belanda.
- b. Kenyataan ini tidak begitu ada artinya.
- c. Pengajaran bahasa Belanda dengan bantuan uang Pemerintah perlu dimungkinkan.

Dewan Hindia Belanda tidak dapat menyetujui pendapat ini.

Meskipun menurut penjelasan yang diberikan pada pasal 128 dari Reglemen Pemerintah termuat dalam Lampiran Lembaran Negara nomor 1037 pengurusan, mendirikan, dan menyelenggarakan sekolah bagi orang-orang Cina tidak dapat dianggap termasuk urusan Pemerintah, tetapi terhadap arah yang dianut sekolah-sekolah itu tidak boleh bersikap acuh tak acuh sama sekali.

Jika dalam arah sekolah-sekolah itu disamping diajarkan bahasa Melayu dan bahasa Cina, juga diajarkan bahasa Inggris, maka generasi yang mendatang lambat laun akan di-Inggriskan, dan makin lama makin dijauhkan dari Belanda. Kekhawatiran ini tidak boleh dianggap ham-pa, mengingat bahasa Inggris:

- a. Dianggap sebagai bahasa perdagangan.
- b. Lebih mudah dipelajari daripada bahasa Belanda.

c. Dipakai sebagai bahasa pergaulan dan dibuat populer dengan pertemuan-pertemuan orang-orang asing dengan ras kuning di Asia Timur.

d. Maka, "bahasa untuk seluruh bangsa" adalah yang mempersatukan bangsa itu bahasa dan bukan tanah asal, maka bagian kawula yang bekerja giat (= orang-orang Cina) makin lama makin berpaling dari Belanda, dan mungkin jika keadaan mengarah ke sana, akan memusuhi Belanda.

Jadi menurut pendapat Dewan Hindia Belanda, usaha orang-orang Cina untuk maju yang jelas nampak sebagai akibat perang Rusia-Jepang, seharusnya dari permulaan dibantu dan dibina sebanyak mungkin ke arah Belanda. Cara pelaksanaan akan diselidiki lebih lanjut dan dipertimbangkan. Perkumpulan "Algemeen Nederlands Verbond" akan diikutsertakan dalam masalah ini dan akan diminta menghubungi orang-orang Cina yang terpelajar dan banyak pengaruh, untuk membina masalah ini ke arah yang diinginkan. Jika perkumpulan swasta itu tidak bersedia atau kekurangan keuangan untuk itu, akan dapat dipertimbangkan untuk memberikan subsidi kepada sekolah Cina tersebut, dengan tegas diberi syarat bahwa subsidi tersebut hanya untuk pengajaran bahasa Belanda. Mengingat keadaan keuangan negara, sebaiknya pemberian subsidi atau bantuan tersebut dibatasi, hanya diberikan jika dari pihak pengurus sekolah Cina menyetakan adanya kebutuhan pengajaran bahasa Belanda. Bantuan itu dapat berupa memudahkan kesempatan untuk mendapatkan guru Belanda yang cakap atau untuk memperoleh dana yang diperlukan.

Dewan Hindia Belanda menasehatkan, supaya Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan menghubungi dan membicarakan masalah ini dengan Kelompok Hindia Belanda dari "Algemeen Nederlands Verbond", dan kemudian menyampaikannya lagi kepada Pemerintah dengan disertai usul-usul yang dirumuskan.

Anggota Dewan Hindia Mr. Nieuwenhuys mengemukakan pendapat, bahwa:

1. Kekhawatiran akan akibat pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah Cina terlalu dibesar-besarkan.

2. Tidak setuju memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah Cina betapun kecilnya.
3. Dapat menyetujui pemberian bantuan dengan cara-cara yang dinyatakan oleh Gubernur Jenderal dalam Lampiran dari Nota Sekretariat Umum.

REORGANISASI PENDIDIKAN BUMIPUTERA

- PENDIDIKAN PERTUKANGAN

16. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 15 September 1905 nomor 12/2733

Dalam pengantar nasehat mengenai perbaikan keadaan ekonomi penduduk Bumiputera, yang tahun lalu disampaikan kepada Menteri Idenburg, ia telah dengan tegas menandakan bahwa pendidikan menduduki tempat sangat penting diantara faktor-faktor yang menguasai keadaan ekonomi penduduk Bumiputera.

Menurut pendapatnya (Fock) pendidikan, jika diatur menurut kebutuhan-kebutuhan rakyat, merupakan satu-satunya jalan untuk membawa orang Bumiputera ke kebebasan (= berdiri sendiri) yang lebih besar dan ke penanggalan beberapa sifat, yang menghalang-halangi kemajuannya sosial dan ekonomis. Menurut pendapatnya, terutama pendidikan praktis yang mengarah untuk mendidik orang Bumiputera kearah industri dengan mengajarkannya untuk mendapatkan matapencarian dalam pertukangan dan kerajinan, akan dapat diharapkan berhasil baik, karena menurut jalan itu tidak hanya diletakkan dasar bagi kebudayaan lebih tinggi, tetapi juga sebagian penduduk yang selalu makin besar dibuat tidak tergantung dari pertanian bagi matapencariannya.

Berdasarkan keyakinan ini, segera sesudah pengangkatannya jadi Menteri ia menganggap perlu mengadakan musyawarah dengan Gubernur Jenderal mengenai apa yang harus dikerjakan untuk pendidikan. Ia berpendapat bahwa perluasan berangsur yang lambat seperti yang

dilaksanakan sampai kini, tidak dapat diteruskan. Oleh karena itu perlu reorganisasi, dengan perluasan yang sangat menyeluruh. Sebelum dapat diambil keputusan, perlu sebelumnya diadakan penyelidikan mendalam dan teliti, untuk menjawab pertanyaan apakah:

- a. Yang sekarang dikerjakan untuk pendidikan perlu ditinjau kembali atau diperluas?
- b. Jika sekiranya 'ya', apa yang harus dilakukan untuk reorganisasi atau penambahan.

Gubernur Jenderal diharap supaya segera:

- a. Memerintahkan mengadakan penyelidikan demikian.
- b. Menyampaikan hasil-hasil penyelidikan kepada Menteri, supaya dapat diperhitungkan pada pembicaraan Anggaran Belanja 1907, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat diajukan rencana lengkap mengenai reorganisasi dan perluasan pendidikan.

Menteri mengharap pada pembicaraan Anggaran Belanja 1906 yang akan datang, sudah dapat mengemukakan rencananya, dan dengan Nota Perubahan mengusulkan pos memori untuk biaya penelitian.

Gubernur Jenderal diminta mengabarkannya dengan telegram mengenai: kapan dimulainya penyelidikan, kepada siapa penyelidikan itu ditugaskan, dan mengabarkan apakah menaruh keberatan dan apakah sukar atau tidak menemukan pejabat yang cakap untuk penelitian.

Jika demikian maka akan dikirim dari Negeri Belanda seorang petugas yang cakap untuk itu dan tahu akan keadaan di Hindia Belanda, dan diperbantukan kepada Gubernur Jenderal.

17. Surat Pd. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 23 Oktober 1905 nomor 17664

Dalam surat ini ia menyatakan, setelah mendalami surat perintah Menteri (Jajahan) mengenai reorganisasi pendidikan Bumiputera, bahwa dari pendidikan penduduk ke arah industri tidak dapat diharapkan apa-apa dalam waktu dekat, karena menurut keyakinannya penduduk tidak membutuhkan pendidikan demikian.

Ditariknya pula nasehat tanggal 19 April 1899 nomor 6627, diperdebatkan dan diselesaikan dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1899 nomor 11, dimana dinyatakan bahwa:

1. Mendirikan sekolah-sekolah pertukangan oleh Pemerintah tidak akan dapat dibenarkan, selama masyarakat Bumiputera belum berpendirian bahwa kebutuhan akan golongan kekaryaan pertukangan memang diperlukan.
2. Tetapi dimana di kalangan penduduk Bumiputera nampak usaha untuk lebih maju, Pemerintah berkewajiban untuk membantu dengan:
 - a. memberi perluasan bagi perusahaannya.
 - b. mencobakan salah satu cabang kerajinan.
 - c. mengusahakan kerajinan rumah.

Percobaan ke arah ini (ad.c) telah dilakukan dengan mendirikan sekolah kerajinan rumah di Kabupaten Ngawi dan di Keresidenan Madiun belum selesai. Laporan mengenai sekolah-sekolah ini dan hasilnya belum diterima dari Bupati R.M.T. Oetojo, yang sekarang dipindahkan ke Jepara. Dari berbagai pihak diberi keterangan bahwa percobaan itu gagal.

Menurut dugaannya yang dimaksud Menteri sesungguhnya bukan seluruh Hindia Belanda pada umumnya, tetapi hanya Jawa dan Madura. Dipandang dari sudut pelaksanaan praktis, memang sebaiknya dibatasi hanya pada dua pulau ini. Menurut pendapatnya, penyelidikan dengan teliti dan seksama dan kemudian mengajukan hasil-hasilnya disertai dengan rencana lengkap mengenai reorganisasi dan perluasan pendidikan Bumiputera dengan lampiran hitungan biayanya, tidak mungkin dikerjakan hanya dalam beberapa bulan saja, oleh seorang saja dalam waktu yang begitu singkat. Hal ini mungkin masih dapat dikerjakan jika hanya untuk bagian terbatas dari pulau Jawa (umpamanya Keresidenan Surabaya).

Mengenai orang yang akan ditugaskan mengadakan penelitian, menurut pertimbangannya sebaiknya:

- a. Harus pegawai yang masih aktif bekerja.

- b. Harus cukup mengetahui keadaan pendidikan Bumiputera yang aktuul, dan dapat mengambil putusan mengenai pendidikan yang sungguh-sungguh beralasan.
- c. Biasa dengan orang-orang Bumiputera dan kebutuhannya dalam lapangan pendidikan. Jadi bukan hanya "tahu akan keadaan Hindia Belanda pada umumnya" saja.
- d. Harus dicari diantara pegawai Pemerintahan Dalam Negeri.

Mengingat pertimbangan di atas pandangannya jatuh pada J.E. Jasper, Kontrolir untuk Polisi Surabaya, yang dengan publikasi-publikasinya dalam surat-surat kabar dan majalah, membuktikan bahwa ia terbiasa dengan kebutuhan orang-orang Bumiputera, dan mempunyai pandangan terbuka bagi pendidikan industri orang Bumiputera.

Orang lain, yang dapat diajukan ialah H. Carpentier Alting, Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera. Tetapi mengingat pekerjaannya, tidak mungkin ia dapat diserahi tugas penelitian.

Karena dalam jabatan sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan pendidikan Bumiputera, ia telah mohon pertimbangan Dr. Snouck Hurgronje, Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab.

Bersama surat ini disampaikan catatan-catatan yang berharga sekali dari Dr. Snouck Hurgronje mengenai masalah ini, dan diharap Menteri Jajahan mempertimbangkan pandangannya, dan demi kepentingan orang-orang Bumiputera kata-kata peringatannya didengarkan.

Kesimpulannya:

- a. Rencana yang dianjurkan Dr. Snouck Hurgronje dapat dilaksanakan.
- b. Arah yang ditunjukkan Dr. Snouck Hurgronje seharusnya dimulai.
- c. Menasehatkan supaya tugas penelitian diberikan kepada Jasper dan bukan orang lain.
- d. Penyelidikan diadakan di keresidenan Surabaya, karena:
 - 1. Jasper sudah bertahun-tahun bekerja di Keresidenan Surabaya.
 - 2. Mengingat banyaknya perusahaan industri di sana.
 - 3. Dengan demikian dapat diberi jawaban atas pertanyaan, apakah peninjauan kembali pendidikan Bumiputera ke arah industri dapat menuju ke hasil yang praktis dan bahwa orang-orang Bumiputera yang diberikan didikan jadi ahli tukang, dapat menemukan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Mengenai perbaikan khusus dari apa yang sekarang sudah ada, dinasehatkan supaya diadakan musyawarah dengan para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa dalam sebuah pertemuan dalam liburan puasa. Konferensi itu akan diadakan permulaan bulan Nopember. Bilamana pembicaraan dalam konferensi menghasilkan usul-usul lebih lanjut, akan disampaikan dengan tilgram kepada Menteri (Jajahan), sehingga jika disetujui dapat diikutkan dalam pembicaraan Anggaran Belanja tahun 1906, karena maksud Menteri dalam pembicaraan terbuka dalam Majelis Rendah (Tweede Kamer) pada pertengahan bulan Nopember akan mengemukakan rencana-rencananya.

Untuk pembicaraan dengan Jasper harus dengan perantaraan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, yang sebelumnya harus ada persetujuan Gubernur Jenderal.

Setelah menerima persetujuan tersebut akan diadakan pembicaraan dengan Jasper untuk:

- a. Menentukan jalannya penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.
- b. Bagaimana posisi keuangannya selama melakukan pekerjaan penelitian akan dapat diatur sebaik-baiknya.

Catatan-catatan Dr. Snouck Hurgronje atas surat kawat Menteri (Jajahan) tanggal 15 September 1905 hrf.A. nomor 12/2733

Ad. al 2

Pemikiran tersebut dapat disetujui, tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa sangat sulit menentukan kebutuhan-kebutuhan rakyat, lebih-lebih karena rakyat masih kekanak-kanakan belum dewasa untuk mengetahui sendiri kebutuhannya, dan hanya sedikit mengemukakannya. Bahkan para pegawai Bumiputera-pun baru saja mengatasi ketidakdewasaan itu, dan baru sesudah emansipasi ini menjadi kenyataan, dapat diharapkan dapat menerima data-data yang sungguh-sungguh, sehingga dapat diambil keputusan yang betul-betul mengenai kemana arah Pendidikan rakyat dapat dimajukan demi kepentingan rakyat.

Sebagian besar pegawai Bumiputera mengangguk 'ya' pada semua pemikiran mengenai pendidikan rakyat yang selalu berganti-ganti, yang dari pihak Eropa dibayangkan kepada mereka, dan rakyat bukan pegawai bersikap seperti masa pasif, dimana diadakan bermacam-macam percobaan, yang dijejalkan pengetahuan setengah-setengah atau kurang keahlian dari luar negeri.

Andaikata terdapat lebih banyak orang Eropa daripada yang sesungguhnya ada, yang begitu mendalami penghidupan dan kebutuhan masyarakat Bumiputera sehingga dapat memberi keputusan terpercaya, untuk dapat memberi isi yang betul-betul pada putusan ini, maka dalam masyarakat Bumiputera sendiri harus nyata-nyata tampak adanya desakan ke arah tertentu yang tak dapat dipungkiri dan terlihat oleh peninjau yang berwenang.

Di kalangan pegawai-pegawai Bumiputera di Jawa dapat dilihat adanya desakan yang tidak dapat dipungkiri untuk menuntut kemajuan lebih tinggi dan emansipasi. Dengan demikian ada titik hubungan antara kegiatan pendidik Barat dan orang-orang Bumiputera. Kepada kelas-kelas masyarakat Bumiputera ini semoga diberikan sarana untuk dapat memperoleh kemajuan yang diinginkan dan cocok bagi mereka; semoga emansipasi wanita Bumiputera menjadi cukup untuk membawa keluarga pada pendirian lebih tinggi; semoga para pegawai Bumiputera yang terdidik betul-betul ini dapat dibebaskan dari pewaliannya yang sampai kini mengekang dan menghalang-halangi mereka.

Sangat disayangkan, terutama di kalangan penduduk Jawa, tidak ada dorongan sedikitpun untuk melepaskan diri dari perjanjian-perjanjian hutang yang kejam dan berat, sehingga lembaga-lembaga perkreditan tani, kas-kas simpanan, dan bank-bank pinjaman yang dari luar didesakkan kepada masyarakat Bumiputera, tidak dapat membawa hasil, dan tidak dapat merubah keadaan ekonomi.

Begitu pula halnya dengan kebutuhan pendidikan Bumiputera merupakan hanya teori-teori Eropa sebagai dasar pendapat, yang jika dilaksanakan akan menghasilkan kekecewaan yang mahal.

Ad. al 3

Andaikan dianggap perlu sekali, bahwa orang-orang Bumiputera di Jawa sebagian besar menanggalkan pertanian dan dibawa beralih ke industri, kemungkinan untuk memenuhi keinginan itu masih kurang, karena tidak ada dorongan batin dari penduduk sendiri. Pendidik (pedagog) Eropa dapat membantu memajukan, tetapi ia tidak dapat membuat sesuatu dari yang tidak ada apa-apanya. Masyarakat Bumiputera mungkin dapat memberikan sejumlah besar orang, yang di bawah tekanan dididik ke arah itu, dapat memperoleh kecakapan untuk melakukan pertukangan dan perusahaan yang memberi untung. Tetapi pada akhir pendidikannya mereka akan datang minta kepada negara diberi pekerjaan sesuai dengan pendidikannya, karena masyarakatnya tidak dapat mempergunakan keahliannya yang lebih tinggi itu dan juga tidak dapat membayarnya.

Dan negara yang telah mengadakan ahli-ahli pertukangan dan industri yang berkelebihan itu, tidak dapat menarik diri dari kewajibannya untuk menghidupi mereka. Jangan disesatkan oleh sisa-sisa industri dari abad-abad yang lalu, yang masih tinggal hidup di beberapa tempat di Jawa, yang akhir-akhir ini oleh para setengah-ahli sering dibayangkan artinya secara berlebih-lebihan. Sisa-sisa itu "rudimen" belaka dan tidak lebih. Meskipun orang romantis dan berbakat seni merasa sedih melihat mereka hilang, tetapi dari sudut pandangan ekonomis peninggalan-peninggalan sana-sini itu harganya sangat kecil. Tidak dapat menghilangkan apa-apa dari kenyataan, bahwa pada saat sekarang ini orang-orang Bumiputera di Jawa tidak memperhatikan kecenderungan dan kebutuhan, juga akan kemajuan industri, meskipun dengan berbagai rangsangan yang dibuat-buat.

Menurut pandangan Snouck Hurgronje perubahan dalam hal ini dapat diharapkan dari contoh golongan bangsawan. Jika para bangsawan mulai mendidik sebagian dari putera-puteranya untuk karier lain daripada karier "pet jabatan dan payung" (priyayi), maka gerakan itu akan menjalar ke lingkungan bawahan, dan kemudian dapat ditentukan arahnya, dimana usaha itu harus dibantu supaya berhasil lebih baik

dan lebih cepat. Untuk mendidik buat pekerjaan lain bagi bangsawan tidak kurang kesempatan.

Lembaga-lembaga tabungan dan pinjaman secara dibuat-buat, emigrasi yang secara dibuat-buat, dan pengadaan ahli-ahli pertukangan dan industri secara dibuat-buat, untuk suatu saat akan dapat memberikan hasil semu, tetapi tidak membawa orang Jawa selangkahpun maju ke kesejahteraan.

Ad. al 5

Pendidikan Bumiputera yang sekarang telah ada - kecuali perbaikan-perbaikan yang perlu menurut praktek dan pengalaman - memenuhi kebutuhan penting dari masyarakat Bumiputera dan dapat banyak sekali diperluas. Akan tetapi jika ingin mencoba apa yang akan dapat dicapai dengan jenis pendidikan yang sama sekali berlainan, yang erat berhubungan dengan apa yang dianggap kebutuhan masyarakat Bumiputera oleh beberapa kalangan Eropa, maka dinasehatkan membatasi diri pada percobaan yang betul-betul, dan:

- a. Dalam suatu daerah yang dipilih secara khusus dan sesuai.
- b. Pimpinan percobaan diserahkan kepada para pendukung yang sungguh sungguh dari pendapat (yang sekarang jadi mode) mengenai industri Bumiputera.
- c. Jika mempunyai kesanggupan hidup, akan segera terbukti, dan cara perluasannya akan menampakkan diri dengan sendirinya.
- d. Jika sebaliknya ternyata, bahwa meskipun dalam keadaan-keadaan yang paling menguntungkan, masih selalu perlu diberi bermacam-macam daya lebih dari biasa untuk menjaga jangan sampai pertukangan dan industri itu hancur, maka percobaan dihentikan, dan jangan membuang-buang uang lebih banyak lagi.

Ad. al 6

Penelitian pendahuluan yang teliti, jika dibatasi pada satu keresidenan yang paling terpilih untuk percobaan itu, mungkin dapat dilakukan dalam beberapa bulan. Untuk seluruh Jawa - ini tentunya yang

dimaksud Menteri - tidak mungkin, dan orang yang mau menanganinya dengan demikian akan kehilangan reputasinya sebagai orang yang sungguh-sungguh. Obyek penyelidikan dalam keresidenan tersebut di atas meliputi penetapan cabang-cabang pertukangan dan industri yang banyak kemungkinan dapat dikerjakan penduduk dengan berhasil baik, dan kemudian merencanakan tindakan yang perlu dalam lapangan pendidikan, untuk menjamin tercapainya maksud itu.

Ad. al 8

Tugas penelitian itu dapat diserahkan kepada kontrolir Jasper untuk keresidenan Surabaya.

Dr. Snouck Hurgronje tidak yakin bahwa seluruh tindakan (pendidikan industri rakyat) akan dapat berhasil.

18. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Pj.Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) tanggal 14 Nopember 1905 no.3836

Dalam surat ini diberitahukan, bahwa Gubernur Jenderal pada pokoknya menyetujui usul Direktur PAK dalam suratnya tanggal 23 Oktober 1905 nomor 17664:

1. J.E. Jasper, Kontrolir pada Pemerintahan Dalam Negeri di Jawa dan Madura, disetujui ditugaskan untuk mengadakan penelitian teliti di satu keresidenan tertentu yang ditunjuk mengenai cabang-cabang pertukangan dan industri, yang mempunyai kemungkinan terbesar akan dapat dilakukan penduduk dengan berhasil baik.
2. Penelitian demikian tidak perlu dibatasi hanya di keresidenan Surabaya.
3. Di beberapa tempat di Jawa, orang-orang yang beriktikad baik terhadap penduduk di lingkungan mana mereka hidup - terutama para zendeling - telah melakukan percobaan-percobaan menolong orang-orang Bumiputera yang mahir dalam berbagai kerajinan dengan metoda baru dan dengan alat-alat yang lebih baik. Tempat-tempat itu misalnya Mojowarno, Kendalpayak, dan Semampir.

Diterangkan selanjutnya, bahwa Pemerintah telah:

1. Membantu usaha-usaha tersebut di atas dengan memberi sekedar subsidi jika dimohon.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seorang Pejabat Kepala Bumiputera (= Bupati) di Ngawi melakukan percobaan-percobaan luas dengan sekolah-sekolah kerajinan, yang juga disebut-sebut dalam surat Pj. Direktur PAK.
3. Sekarang Gubernur Jenderal menganggap perlu menunjuk seorang khusus untuk memeriksa dan membandingkan hasil-hasil yang diperoleh di berbagai tempat, kemudian berdasarkan pendapatnya mempertimbangkan apa yang selanjutnya harus dikerjakan untuk melaksanakannya.

Orang tersebut harus memenuhi dua syarat:

- a. Tahu betul-betul tentang kerumahtanggaan Bumiputera.
 - b. Berbakat untuk bertindak praktis.
4. Jika kontrolir Jasper menurut pendapat Pj. Direktur PAK memenuhi kedua syarat itu, Wali Negara (Gubernur Jenderal) tidak keberatan tugas itu (ad. 3) diserahkan kepadanya.

Usul-usul yang terumus harap segera disampaikan dengan perantaraan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri.

Dilampirkan salinan-salinan dari tilgram mengenai masalah ini yang disampaikan kepada Menteri Jajahan tanggal 25 Oktober, 5 dan 9 Nopember 1905 nomor-nomor 6, 3 dan 61.

19. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 30 Nopember 1905 nomor 20007

Menarik surat Sekretaris Pemerintah kelas I tanggal 27 Oktober dan 14 Nopember 1905 nomor-nomor 3679 dan 3836.

Dalam konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa telah membicarakan:

1. Pikiran Pemerintah mengenai reorganisasi dan perluasan besar dari pendidikan Bumiputera tersebut dalam surat Menteri tanggal 15 September 1905 hrf.A1 nomor 12/2733.

2. Pertanyaan apakah dengan mendirikan sekolah-sekolah desa sederhana, seperti yang dahulu didirikan oleh Asisten Residen Ambawara P.M.L. de Bruyn Prince, dapat atau tidaknya dijadikan langkah penting ke arah pendidikan rakyat yang sesungguhnya.

Pertanyaan ini tidak dapat dijawab, karena ternyata dari para Inspektur hanya seorang saja yang pernah mendengarnya, dan ini dari desas-desus saja.

Tiga pertanyaan penting dibicarakan dalam Konperensi (lihat ad.1 di atas), yakni:

1. Apakah sekolah negeri Bumiputera, seperti yang sekarang diatur, memenuhi kebutuhan pendidikan di kalangan penduduk.
2. Bagaimana pendidikan - dimana perlu - harus direorganisir dan diperluas.
3. Apakah di sekolah rendah dapat diberikan pendidikan ke arah industri, umpamanya barangkali pengetahuan dagang dan tata buku sederhana.

Pertanyaan 1:

Semua Inspektur sependapat dan dapat dijawab dengan "ya".

Rencana pelajaran di Sekolah Bumiputera kelas 2, yang merupakan sekolah rakyat meliputi menulis dan membaca bahasa daerah, dan 4 peraturan pokok dalam berhitung dengan angka-angka penuh. Terbatas sekali tetapi memuat yang perlu sekali bagi peningkatan kemajuan rakyat. Sekolah Bumiputera kelas 1 merupakan lembaga pengajaran yang lebih diperluas.

Pertanyaan 2:

Diakui, bahwa perluasan besar jumlah sekolah merupakan tuntutan yang sangat mendesak, tetapi pembukaan sekolah-sekolah baru harus tetap tergantung dari tersedianya guru-guru yang berwewenang dan cakap. Sekolah-sekolah swasta baik yang bersubsidi maupun lainnya memberikan bukti, bahwa pendidikan dengan personil yang tidak cukup dipersiapkan, hasilnya sedikit sekali. Sekolah-sekolah swasta ini akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan dengan cara yang tidak mahal, andaikata dapat diperoleh personil yang lebih

baik. Peraturan subsidi yang diusulkan (surat Hindia Belanda tertanggal 3 Januari 1905 nomor 7/7) memberi beberapa harapan, karena bagi guru-guru swasta mengandung rangsangan untuk berusaha memperoleh wewenang tertentu untuk memberi pengajaran.

Dianjurkan supaya sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi syarat-syarat yang cukup lunak, tetapi jika dikunjungi oleh jumlah-jumlah tertentu (ditetapkan 80) murid, dapat diselenggarakan sebagai sekolah negeri, tetapi tegas-tegas dengan perjanjian tersedianya personil yang berwewenang.

Timbul pertanyaan mengenai harus atau tidaknya sekolah guru Bumiputera ditambah jumlahnya atau jumlah muridnya. Penambahan jumlah sekolah guru Bumiputera di Jawa untuk sementara waktu dipandang belum perlu, sedangkan perluasan jumlah murid secara berangsur pada sekolah-sekolah guru yang ada (terakhir dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1905 nomor 10) sementara dianggap sudah cukup. (Bandung 50, Yogyakarta 75, Probolinggo 75, Fort de Kock 50, Amboina 50).

Perlu sekali mendapat banyak guru bantu yang cakap dan diuji (pasal 5 alinea 1 sub e Lembaran Negara 1893 nomor 127) yang menurut pasal 9 sub c dari Lembaran Negara tersebut dapat diangkat jadi Kepala Sekolah Bumiputera kelas 2. Bagi banyak sekolah kecil cukup dengan guru-guru bantu, dan karena itu biayanya dapat dibatasi.

Pertanyaan 3:

Para Inspektur menyatakan keberatan terhadap pendidikan teknis, misalnya pendidikan pertukangan, diajarkan di sekolah-sekolah rendah. Juga pendidikan pengetahuan dagang dan tata-buku sederhana bagi Sekolah Rakyat dipandang tidak perlu. Didukung artikel dari bekas Inspektur Pendidikan Bumiputera J. Habboma dalam majalah "Indische Gids" bulan September 1905 yang dengan keras menentang diberikannya pendidikan kejuruan di sekolah-sekolah rendah. Sekolah Rendah harus hanya memberikan pendidikan pengetahuan umum. Kesimpulan dari pembicaraan-pembicaraan ialah: bahwa reorganisasi

sekolah rakyat negeri Bumiputera tidak perlu dan tidak diinginkan, tetapi hanya ada kebutuhan ditambahkan jumlah sekolah, dengan tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur dan dalam hal ini tergantung dari tersedianya personil yang berwewenang. Mengenai hal tersebut para Inspektur akan berusaha sebanyak mungkin untuk memajukannya (ad.2).

Dibicarakan juga kemungkinan memajukan kerajinan penduduk.

1. H.Th.J. Uijterbroeck.

Di Negara (keresidenan Kalimantan Tenggara) penduduk giat mengerjakan kerajinan penempaan alat-alat dari besi - yang meskipun masih kasar, tetapi memenuhi kebutuhan penduduk - bahkan sampai banyak dikirim keluar, ke Siam dan Australia.

2. G.J.F. Biegman.

Di keresidenan Sumatera Barat ditemukan banyak tempat kerja pengrajin tempa besi, pertukangan kayu, dan pembuatan barang pecah-belah.

3. L.G. Bertsch.

Di Jawa Tengah terdapat berbagai industri kecil Bumiputera.

Dengan penggalakan dan bantuan pertukangan dan kerajinan penduduk ini dapat ditingkatkan lebih tinggi.

Penugasan Kontrolir Jasper.

Kontrolir Jasper memenuhi kedua syarat, termaktub dalam surat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1905 nomor 3836, dan telah dipanggil ke Betawi oleh Direktorat Pemerintahan Dalam Negeri atas permohonan Direktur PAK.

Dalam pembicaraan Direktorat PAK dengan Jasper, maka disimpulkan bahwa:

1. Penelitian akan diatur sepraktis mungkin.
2. Penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dibicarakan dalam konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera tersebut di atas, dan bagaimana kerajinan rakyat, terutama kerajinan tangan, dapat digalakkan dan dimajukan (bagaimana pendidikan rakyat ke arah industri dapat dibina).

3. Penelitian sementara dibatasi pada keresidenan Surabaya dan untuk itu dijanjikan pertolongan dan bantuan para pegawai Pemerintahan Dalam Negeri, jika diperlukan.
4. Untuk penelitian kemudian tentang hasil-hasilnya pengajaran di sekolah-sekolah kerajinan dan pertukangan swasta di Jawa, dimohonkan kerjasama dari para Pegawai Pemerintahan yang bersangkutan.
5. Dari hasil penelitian harus dapat disusun pendapat pribadi yang bebas mengenai masalah yang diselidiki.
6. Kecuali jika ada keadaan luar biasa dan tidak diduga-duga, penyelidikan harus selesai paling lambat akhir April 1906 dan laporan serta usul-usul harus segera diajukan.

PENDIDIKAN RAKYAT - PERCOBAAN DENGAN
SEKOLAH-SEKOLAH DESA DI JAWA

20. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) tanggal 27 Oktober 1905 no.3679

Dalam surat ini dikemukakan, bahwa Gubernur Jenderal telah diberitahu bahwa P.M.L. de Bruyn Prince - sekarang Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda - sewaktu masih menjabat Residen Kedu atau Assisten Ambarawa telah mengambil prakarsa mendirikan sekolah-sekolah desa sederhana. Sekolah-sekolah ini setelah ditinggalkannya hilang lagi karena kurang perhatian dan pengawasan dari pengganti-penggantinya.

Gubernur Jenderal mengharap pertimbangan, apakah dengan mendirikan sekolah demikian itu disamping atau sebagai pengganti dari sekolah-sekolah Bumiputera yang sekarang ada, dan dengan mengkesampingkan sekolah kerajinan yang didirikan oleh R.M.T. Utoyo, dapat diambil langkah yang penting ke arah pendidikan rakyat yang sesungguhnya.

Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan diminta menyampaikan pertimbangan dan nasehat mengenai hal ini, setelah mengadakan konferensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera pada permulaan bulan Nopember 1905, menurut suratnya tanggal 23 Oktober 1905 nomor 17664.

Pada sekolah-sekolah desa, yang akan minta biaya Pemerintah sangat kecil (sekolah-sekolah yang didirikan P.L.M. de Bruyn dan lain-lain sama sekali tidak memerlukan biaya apa-apa dari negara), tidak hanya akan diajarkan menulis dan membaca (dengan huruf Latin dan Jawa) dan berhitung, tetapi dimana mungkin juga diberikan pendidikan pertukangan sederhana, dengan mengingat bahan-bahan mentah yang dapat diperoleh di daerah itu, alat-alat yang dipergunakan di sana dan lain-lain sebagainya.

Telah diterima surat kawat dari Menteri Jajahan, minta nasehat terakhir dari Pemerintah Hindia Belanda mengenai reorganisasi pendidikan Bumiputera yang diinginkannya, paling lambat tanggal 6 Nopember 1905. Tanggal ini supaya diperhitungkan jika konferensi tersebut di atas memperoleh hasil-hasil lebih lanjut.

21. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (D.F.W. van Rees) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 20 Maret 1906 hrf. A tanpa nomor

Pada tanggal 11 Januari 1906 Gubernur Jenderal memberi tugas secara lisan kepada mereka untuk bersama-sama mengadakan musyawarah dengan H. Carpentier Alting, Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera, dan memberikan nasehat kepada Pemerintah mengenai kemungkinan mendirikan sekolah-sekolah desa untuk kepentingan penduduk Bumiputera di Jawa dan Madura.

Pertimbangan-pertimbangan Gubernur Jenderal ialah:

1. Jumlah sekolah bagi Pendidikan Bumiputera sangat kecil dibandingkan dengan jumlah jiwa penduduk Bumiputera, sehingga hanya dapat memberi manfaat kepada persentase sangat kecil penduduk Bumiputera.

2. Perluasannya yang sedemikian rupa sehingga dapat disebut pendidikan rakyat yang umum tersebar di Jawa akan memakan biaya di luar kekuatan keuangan negara.
3. Padahal memenuhi kebutuhan pendidikan merupakan tuntutan zaman yang sangat mendesak.
4. Dari hal-hal tersebut di atas menimbulkan dua pemikiran, yaitu:
 - a. Meniru contoh sekolah desa di Negeri Belanda di zaman dahulu. Apakah di Hindia Belanda tidak dapat didirikan lembaga sejiwa dengan itu, lembaga yang sangat sederhana disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari dan keadaan kehidupan penduduk, dan biaya lembaga itu pada umumnya dibebankan kepada masyarakat setempat (= inlandsche gemeente).
 - b. Meniru prakarsa P.M.L. de Bruyn Prince sewaktu menjabat Asisten Residen di Ambarawa.
Sekolah-sekolah desa itu hilang lagi, karena terlalu sederhana pengaturannya dan kurang perhatian dari Kepala Pemerintahan pengganti de Bruyn Prince.
5. Adanya lembaga perkreditan desa (lumbung desa), yang makin lama makin laku di Jawa, memberi harapan bahwa sudut keuangan dari masalah itu tidak merupakan lagi kesulitan yang tak teratasi, memberi harapan bahwa sekolah desa akan dapat menerima bantuan kuat dari keuangan lumbung desa.

Hasil pembicaraan Pj. Direktur PAK, Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera:

1. Tidak ada keberatan mewujudkan pemikiran Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah-sekolah desa, asalkan saja Pemerintah pada prinsipnya sanggup menyediakan uang dan alat-alat pelajaran, dimana perlu, untuk dapat mengatasi kesulitan yang paling besar.
2. Sebelum memberikan keputusan definitif, sebaiknya dengan cara sistematis mengadakan beberapa percobaan yang diawasi dengan baik di beberapa daerah yang dianggap cocok.
Di daerah seperti Jawa akan mudah dalam waktu singkat dan dimana

mana mendirikan sekolah desa dalam jumlah besar, yang kelangsungannya sedapat-dapatnya terjamin, selama tetap ada perhatian dan ketekunan para pegawai pemerintahan terpusat kepadanya. Akan tetapi pada tindakan tanpa sistem sedemikian itu tidak hanya tidak ada jaminan bahwa pendidikan akan memenuhi tuntutan lunak, seperti sungguh-sungguh akan meningkatkan tingkat pengetahuan umum, akan tetapi juga dikhawatirkan, bahwa dalam beberapa hal kepada desa akan diberi beban yang menekan.

3. Sebelum melangkah mengadakan sekolah desa secara besar-besaran perlu ditinjau: akibat keuangan bagi desa sendiri, yang pengaturannya harus mengingat syarat-syarat dari Ordonansi Desa (Lembaran Negara 1905 nomor 83), konsekwensi keuangan bagi Pemerintah, belum disediakannya alat-alat pelajaran yang cukup bagi sekolah-sekolah dalam jumlah tak terbatas, sehingga dalam permulaannya harus dikerjakan dengan sangat hati-hati.
4. Dalam teori memang pendirian dan kelangsungan hidup sekolah-sekolah rakyat Bumiputera di Jawa, yang pada pokoknya didirikan dan dibiayai oleh desa-desa itu sendiri mungkin sekali, tetapi pada saat ini sebaiknya usaha ke arah ini dibatasi pada percobaan-percobaan (-- waktu percobaan dapat pendek --) untuk dengan jalan praktek demikian dapat menentukan garis-garis kebijaksanaan umum dan melihat akibat keuangan dimana perlu. Kesimpulan ad.1 - ad.4 mengenai masalah mendirikan sekolah-sekolah desa sementara terbatas pada dimana dan dengan cara apa percobaan-percobaan yang diperlukan akan dilaksanakan.
5. Perlu diminta pendapat beberapa pegawai Pemerintahan mengenai pertanyaan, apakah administrasi lumbung-lumbung desa yang sekarang dikerjakan oleh Kumitir-kumitir (= anggota kumisi) dapat diserahkan kepada guru-guru desa, yang biaya hidupnya sebagian dicukupi dari keuangan lumbung-lumbung desa.

Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera atas nama Pj. Direktur PAK dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri telah menghubungi Residen Kediri (E. Constant), Asisten Residen Kebumen (L.N. van Mee-verden) dan Residen Cirebon (J.W. Mesma) dan beberapa Bupati dalam keresidenan-keresidenan tersebut.

Para pegawai pemerintah tersebut di atas pada umumnya berpendapat:

1. Mendirikan dan memelihara kelangsungan sekolah-sekolah desa di Jawa mungkin sekali dilaksanakan.
2. Jabatan Kumitir lumbung desa tidak dapat disatukan dengan jabatan guru desa, karena waktu-waktu sibuk (waktu tanam dan waktu panen) kumitir lumbung desa dari pagi sampai sore sibuk mengatur pengeluaran/meminjamkan padi dan menerima padi pembayaran kembali, sehingga kira-kira 1/2 tahun sekolah harus berhenti.
3. Menyerahkan pendidikan sekolah kepada guru agama (kyai) di desa, untuk mengisi kekurangan tenaga guru desa, tidak dapat diterima, karena dapat menimbulkan penyalahgunaan dan bentrokan pendapat.
4. Jabatan guru desa juga tidak dapat disatukan dengan jabatan jurutulis (= carik) desa, karena carik harus sering menghadiri rapat desa, rapat-rapat pemerintahan desa di ibukota kecamatan dan ibukota kawedanaan, sehingga pengajaran sekolah akan menderita.

Residen Kediri. Asisten Residen Kebumen dan Residen Cirebon menyatakan bersedia untuk melaksanakan percobaan-percobaan di daerahnya, dan menganggap mungkin sekali untuk menyisihkan dana dari lumbung-lumbung desa, dan juga menyisihkan sebagian dari bengkok desa bagi guru-guru desa. Selain itu mereka menyatakan perlunya Pemerintah mengurus tersedianya alat-alat pelajaran yang sangat diperlukan, meskipun dengan membayar.

Sekolah desa yang di sana-sini yang ada di Jawa, yang diselenggarakan oleh orang-orang Bumiputera sebagai matapencaharian, memberi harapan, bahwa dengan organisasi yang cocok dengan tujuan dan berdasarkan kekuatan kerja-sama (kooperasi) dari desa-desa, kesulitan-kesulitan keuangan yang mungkin akan dapat diatasi.

Keberatan-keberatan lain yang akan menghalang-halangi kelangsungan hidup sekolah desa misalnya: karena tidak adanya perhatian dari desa dan adanya perlawanan dalam desa itu sendiri. Ini harus dijawab oleh praktek. Dan ini, banyak tergantung dari bagaimana pendidikan itu diatur dan yang terutama adalah mengenai pemenuhan kebutuhan akan personil pengajar. Supaya sekolah-sekolah desa

tidak akan segera kehilangan kepercayaan, maka harus ada jaminan bahwa guru-gurunya telah mendapat pendidikan tertentu, bagaimana-pun elementernya pengajaran sekolah desa diatur.

Dalam hanya beberapa tahun Jawa akan mempunyai beratus-ratus sekolah desa dan memerlukan beratus-ratus guru desa. Guru desa seharusnya berasal dari rakyat desa, karena harapan masa depannya sangat sederhana, harus puas dengan cara hidup desa, tempat tinggal dan pergaulan di desa dan pengetahuan yang dituntut dari padanya tidak lebih daripada yang diperolehnya dari ~~sekolah~~ Bumiputera kelas 2, ditambah kelakuan baik, bakat perorangan, dan kecakapan menurut penyelidikan lebih lanjut.

Luasnya rencana pelajaran pada sekolah-sekolah desa terbatas pada membaca, menulis dan dasar-dasar pertama berhitung dan dengan tujuan umum memberikan pengertian yang benar mengenai kejadian alam sehari-hari, membuat murid memperhatikan sebab dan akibat dari fakta-fakta dalam lingkungan pandangan yang dekat dan langsung. Buku-buku bacaan mengenai berbagai kehidupan sehari-hari, yang disebar-luaskan secara besar-besaran, memberi harapan baik dapat tercapainya tujuan di atas, dan membantu guru dalam meningkatkan minat murid.

Penyediaan buku-buku bacaan untuk rakyat dan sekolah desa tersebut di atas termasuk urusan Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, yang mencari dan menunjuk orang-orangnya untuk membuat karangan-karangan mengenai berbagai hal, dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti, menterjemahkannya dalam berbagai bahasa daerah, menerbitkannya dalam beribu-ribu eksemplar dan menyebar luaskan secara besar-besaran. Hal ini akan minta banyak pengaturan dan biaya.

Dalam pertemuan kedua (Pj. Direktur PAK dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri) yang dihadiri pula oleh Kontrolir Jasper (yang dengan Surat Keputusan tanggal 10 Desember 1905 nomor 20 ditugaskan mengadakan penelitian di keresidenan Surabaya) tidak menghasilkan pandangan baru dan hanya dapat menyusun "pedoman" yang

harus dipergunakan sebagai dasar petunjuk oleh para pegawai pemerintahan yang bersangkutan dalam melaksanakan percobaan-percobaan tersebut.

Di beberapa keresidenan, dimana percobaan akan dilaksanakan, Residen yang bersangkutan menentukan satu lingkaran dalam mana akan didirikan jaringan sekolah-sekolah desa dengan cara yang diberikan oleh "pedoman", dengan mengingat peraturan yang ditetapkan Residen sesuai dengan nasehat dalam "pedoman" tersebut.

Peraturan Residen, yang perinciannya tergantung dari keadaan setempat yang terbukti baik dan cocok atau diubah dan ditambah menurut pengalaman yang diperoleh akan diperuntukkan menjadi bahan-bahan, yang akan dipergunakan dalam mengatur sekolah-sekolah desa secara berangsur.

Dalam percobaan-percobaan ini akan tampak pula apa yang dapat diharapkan dalam hal ini dari para pegawai pemerintahan Bumiputera. Organisasi sepenting ini, yang menguasai seluruh kehidupan rakyat, tidak akan dapat terwujud dan bertahan, jika tidak mendapat bantuan yang nyata dan perhatian yang tidak terbagi-bagi dari para Bupati dan para pegawai rendahannya. Supaya dapat berhasil, kepada para pegawai Bumiputera harus diberi bagian yang aktif dalam pelaksanaan percobaan yang akan diambil, di bawah pimpinan Residen dengan bantuan para kontrolir.

"Pedoman" tersebut di atas dibuat dengan anggapan, bahwa Pemerintah pada dasarnya akan sudi memberikan bantuan keuangan bagi percobaan ini. Bantuan berupa kredit kepada Residen, yang besarnya akan direncanakan kemudian. Jika keadaan keuangan negara mengijinkan, diharapkan Pemerintah sudi memberikan bantuan terus, di mana perlu, meskipun waktu percobaan sudah selesai.

Bantuan ini menyimpang dari pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah Bumiputera swasta, karena bersifat sementara dan merupakan pos penutup dalam Anggaran Belanja Pendidikan desa, sesudah diperhitungkan dengan sumbangan dari keuangan desa dan dari orang-orang tua murid, sehingga tidak perlu ditakutkan akan mengambil uang negara secara berlebihan.

Dalam "pedoman" dinyatakan perlunya di sekolah desa pendidikan diberikan dengan mempergunakan huruf Latin daripada huruf Jawa. Karena latihan-latihan membaca di sekolah Bumiputera kelas 2 mempergunakan huruf Jawa, maka di sekolah desa juga terpaksa "sementara" mempergunakan huruf Jawa. Oleh Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan di kemudian hari akan diusulkan supaya secara prinsipil diputuskan huruf mana yang akan dipergunakan, huruf Jawa atau huruf Latin.

Persediaan buku-buku bacaan dan hitung untuk permulaan menurut penyelidikan di Depot alat-alat pelajaran sangat terbatas untuk dapat dipergunakan di sekolah-sekolah desa. Maka dari itu segera mencetak kembali buku-buku itu secara besar-besaran, sehingga percobaan-percobaan sekolah desa dapat berjalan terus tanpa hambatan karena tidak adanya buku-buku. Pemberian alat-alat pelajaran harus dengan cuma-cuma, dimana orang tua tidak mampu membayarnya. Mungkin sekali kebanyakan tidak akan keberatan, jika Pemerintah mengurus pengirimannya - jika perlu dari Eropa - dan pemberiannya dengan harga pembelian.

Selanjutnya kegiatan Pimpinan Umum percobaan-percobaan tersebut meliputi membagikan "pedoman" dan memberikan penjelasannya, mengatur supaya cara pelaksanaan percobaan berbagai daerah itu sama dan sesuai, dan mengawasi serta mengumpulkan hasil-hasil yang diperoleh.

Pimpinan Umum diserahkan kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, karena dalam pengurusan langsung sekolah-sekolah desa dapat mempergunakan bantuan dan jasa dari pegawai Inspeksi bawahannya, yang dalam perjalanan dinas mereka dapat mempergunakan kesempatan untuk meninjau sekolah-sekolah desa itu.

Sekalipun demikian, bantuan dan kerjasama dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan sangat diperlukan untuk:

- a. Penyusunan buku-buku bagi persediaan perpustakaan rakyat yang sangat luas serta pemberian alat-alat pelajaran yang perlu.
- b. Pemberian penyuluhan mengenai segi-segi pedagogis dari pengajaran desa.

- c. Menugaskan para pegawai Inspeksi Pendidikan Bumiputera memberi penyuluhan kepada para pegawai pemerintahan dalam negeri yang disertai percobaan, satu dan lain tanpa mencampuri urusan secara langsung, dan
- d. Dalam rangka Anggaran Belanja Departemen Pemerintahan Dalam Negeri tidak ada pos untuk itu, biaya-biaya yang diperlukan untuk percobaan terpaksa dibebankan kepada Bagian V Anggaran Belanja Pengeluaran Hindia Belanda (= Dep.PAK).

Tentang pemilihan daerah-daerah percobaan.

Mengingat persediaan alat-alat pelajaran yang terbatas, kesukaran pimpinan dari Departemen yang bersangkutan jika percobaan-percobaan itu letaknya tersebar, maka terpaksa dibatasi di daerah:

- a. Keresidenan Priangan - untuk daerah-daerah Pasundan.
- b. Keresidenan Kedu - untuk keresidenan-keresidenan Jawa Tengah (kabupaten Karanganyar - Asisten Keresidenan Kebumen).
- c. Keresidenan Kediri - untuk keresidenan-keresidenan Jawa Timur (Kabupaten Nganjuk).
- d. Keresidenan Cirebon (Kabupaten Cirebon).

Bupati R.A.A. Salmon Salam Suryadiningrat menyatakan kesediaannya.

Masing-masing Residen tersebut di atas memilih satu kecamatan atau sebagian sebagai lingkaran percobaan dengan mengingat:

- a. Kepribadian dari para pegawai pemerintahan Bumiputera yang ada di sana.
- b. Hubungan-hubungan ekonomis dan masyarakat.
- c. Jumlah sekolah dalam tiap lingkaran.

(mengingat jumlah alat-alat pelajaran yang terbatas, jumlah tersebut ditetapkan tidak lebih dari 20 sekolah).

Jika hal-hal tersebut di atas dapat disetujui Gubernur Jenderal, maka diusulkan supaya Gubernur Jenderal sudi:

1. a. Memberitahukan alasan-alasan Pemerintah untuk mendirikan sekolah-sekolah desa tersebut kepada masing-masing Residen tersebut di atas.

- b. Memerintahkan kepada para Residen tersebut di atas, supaya menentukan daerah-daerahnya untuk percobaan pendirian sekolah desa dengan musyawarah dengan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri serta mengingat "pedoman" yang diterimanya dari Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.
 - c. Menandaskan kepada para Residen tersebut supaya dihindarkan paksaan baik mengenai pendirian sekolah desa maupun mengenai masuknya sekolah. Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya sekolah desa dibuat makin disukai dengan jalan pembicaraan dan pembujukan.
2. Dengan perantaraan Residen memberitahukan kepada para Bupati yang didaerahnya diadakan percobaan, bahwa Pemerintah ingin dengan sungguh-sungguh agar sekolah-sekolah desa yang didirikan itu menghasilkan sebuah lembaga yang keluar dari desa sendiri, menyesuaikannya dengan kehidupan dan kebutuhan penduduk desa, tanpa menimbulkan keinginan pada murid-murid untuk menarik diri dari lingkungan desa sesudah mendapat pendidikan.
3. Menugaskan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri memegang Pimpinan Umum percobaan mendirikan sekolah-sekolah desa, dan kemudian:
- a. Memberi penjelasan-penjelasan kepada para Residen yang bersangkutan sesuai dengan "pedoman".
 - b. Dengan musyawarah dengan para Residen yang bersangkutan merencanakan dana-dana yang disediakan bagi masing-masing untuk membiayai percobaan termaktub dalam sub.1 sejauh tidak dapat dicukupi oleh desa-desa yang berkepentingan.
 - c. Dengan perantaraan Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengusulkan hal-hal yang perlu mengenai pemberian dana tersebut serta pemberian alat-alat pelajaran yang diperlukan bagi percobaan-percobaan dan perkembangan pendidikan desa.

4. Menugaskan Pj. Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan untuk:
 - a. Melaksanakan pembuatan buku-buku sekolah dan lain-lain kebutuhan sekolah bagi sekolah-sekolah desa di Jawa dan Madura.
 - b. Melakukan apa yang perlu dikerjakan atau diusulkan dari perpustakaan rakyat bagi kepentingan pemuda sekolah Bumi-putera.
 - c. Menyuruh Depot Negara mengeluarkan atas permintaan Departemen Pemerintahan Dalam Negeri alat-alat pelajaran bagi pengajaran desa.
5. Menugaskan Direktorat Pertanian supaya menyuruh pegawai-pegawai Kehutanan memberikan bantuan dan kerjasama, agar supaya jika ada permohonan menebang kayu dengan cuma-cuma untuk pembangunan sekolah desa, dapat segera dilayani.

Pedoman Bagi Percobaan

Mendirikan Sekolah-sekolah Desa di Jawa dan Madura

1. Sekolah ini adalah sebuah lembaga desa. Atas pertimbangan praktis dalam banyak hal beberapa desa terpaksa cukup dengan satu sekolah bersama, atau di sana-sini jika keadaan-keadaan memungkinkan beberapa dusun (dukuh) mengadakan sebuah sekolah desa sendiri. Letak dan penyebaran diatur sedemikian rupa, sehingga anak-anak tidak perlu berjalan lebih dari $1\frac{1}{2}$ pal untuk sampai ke sekolah.
2. Jika dalam lingkaran bergaris tengah $1\frac{1}{2}$ paling tinggi 2 pal ditemukan kurang dari 30 anak (lelaki dan perempuan) berumur kira-kira 6-10 tahun tidak perlu didirikan sekolah, kecuali jika dianggap perlu dan dipandang memadai jerih payahnya.
3. Jika dengan mengingat sub.1 dan sub.2 pendirian sekolah desa sudah mungkin, maka diadakan musyawarah dengan desa atau desa-desa yang bersangkutan.

Para pegawai yang bersangkutan berkewajiban:

- a. Menunjukkan kepada penduduk desa manfaatnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
- b. Membuktikan bahwa prasangka-prasangka yang ada pada mereka terhadap sekolah itu tidak benar.
- c. Menghindari dengan hati-hati, jangan sampai ada kesan pada penduduk, bahwa pendirian sekolah adalah beban dari atas.

Dari permulaan sekolah desa harus bersifat:

1. Lembaga milik desa dan dibiayai dengan sukarela oleh desa sendiri.
2. Merupakan milik desa yang dihargai.
3. Bukan beban yang didesak-desakkan.

Harus ada musyawarah dengan para pegawai desa, karena:

1. Pada pokoknya biaya-biaya sekolah desa seluruhnya atau sebagian harus ditanggung mereka.
2. Organisasi sekolah desa harus menyesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan desa.

Menurut ketentuan dalam pasal 4 Ordonansi Desa (Lembaran Negara 1906 nomor 83) diharuskan ada musyawarah desa (rapat desa) antara pamong desa dan warga-warga desa yang berhak memilih untuk mengadakan lembaga-lembaga desa. Desa harus tahu betul akibat-akibat keuangan sebelum mengambil keputusan.

4. Konstruksi bangunan sekolah harus sesederhana dan semurah mungkin. Harus sebanyak mungkin dipergunakan bahan-bahan yang ada atau dapat dibuat di tempat itu. Bangunan di atas tiang atau ompak dianjurkan. Harus cukup ruangan, cukup lubang untuk udara dan cahaya. Dinding dikapur, jika ada kapur. Jika bangunan di atas tanah, maka lantai ditumbuk dengan batu-batu atau dikeraskan dengan semen, atau ditutup dengan anyaman bambu. Kebersihan bangunan dan halaman harus dijaga. Bangunan sekolah harus di atas halaman sendiri terpisah dan sebanyak mungkin letaknya di pusat desa. Tidak boleh di rumah guru. Jika kelangsungan masih diragukan, atau uang serta bahan-bahan untuk membangun belum ada, dapat di rumah sewa atau di "balai desa".

5. Biaya bangunan dan halaman dapat ditutup dari:

- A. Uang ganti rugi yang mungkin diterima desa dari penyerahan dan pengambil-alihan tanah desa, sejauh tidak dipergunakan seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan desa lainnya yang mendesak.
- B. Hasil sewa sawah milik bersama yang tidak dibagi-bagikan atau khusus untuk maksud ini disisihkan dan dikeluarkan dari pembagian teratur.
- C. Sumbangan-sumbangan dari kas desa atau dari lumbung desa, sejauh kepentingan-kepentingan pemberian kredit mengijinkan demikian.
Bantuan ini jangan selalu diperhitungkan, karena dengan demikian orang-orang yang lebih miskin akan harus memikul beban keuangan lembaga itu.
- D. Pungutan per kepala.
- E. Pekerjaan bersama (gotong-royong) dari penduduk yang dapat dikerahkan, untuk pengerahan tersebut harus diingat pasal 17 Ordonansi Desa.

Sumber pendapatan lainnya seperti penjualan pohon milik desa, pekerjaan bersama membakar batu merah, genting, dan lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan bermacam-macam pekerjaan kayu dapat dimohonkan penebangan kayu dengan cuma-cuma di hutan-hutan negara. Di desa dimana penduduknya tidak mampu untuk memikul biaya pembangunan seluruhnya, dapat dimohonkan bantuan Pemerintah. Ini hanya jika tidak dapat dihindarkan dan dalam hal sangat terpaksa.

- 6. Bangku-bangku tinggi lebih diutamakan, karena kurang melelahkan bagi anak-anak dan lebih mudah untuk memberikan pengajaran klasikal. Meskipun demikian, bila terpaksa cukup dilaksanakan dengan dampar. Biaya pembuatan bangku diperoleh dengan cara-cara tersebut dalam sub 5.
- 7. Buku, batu tulis, anak batu tulis, dan lain-lainnya sementara dapat diterima dari Depot Negara dan alat-alat pelajaran tersebut

dapat diperoleh atas permintaan melalui Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jika orang-orang tua murid tidak keberatan, alat-alat pelajaran diberikan dengan harga pembelian. Sementara alat-alat pelajaran dapat juga diberikan dengan cuma-cuma, supaya anak-anak yang tidak mampu jangan sampai terhalang masuk sekolah. Biaya untuk pemberian dengan cuma-cuma ini akan dibebankan kepada desa dan sumbangan orang tua yang mampu.

8. Pemberian bantuan uang dari Pemerintah - jika untuk itu telah tersedia dananya pada Residen - terutama hanya untuk memberikan dorongan pertama dan menghindari kemacetan, atau untuk menutupi kekurangan Anggaran Belanja sekolah yang tidak dapat dihindarkan. Harus diusahakan supaya bantuan ini jangan menjadi bersifat tetap.

9. Dengan surat keputusan Residen ditentukan syarat-syarat untuk menjadi guru sekolah desa Bumiputera:

- a. telah tamat belajar dengan baik dari sekolah kelas 2, lima (5) tahun yang lalu;
- b. lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Sekolah Negeri Bumiputera di ibukota asisten-keresidenan di hadapan Komisi Sekolah Bumiputera setempat;
- c. memenuhi syarat umur minimum;
- d. berkelakuan baik;
- e. tidak cacat dan berpenyakit yang mengganggu.

Jika jumlah yang memenuhi syarat-syarat kurang mencukupi dapat diadakan dispensasi dari syarat-syarat tersebut - kecuali syarat b. yang harus dipenuhi.

Yang dibebaskan dari ujian tersebut dalam b. adalah:

- a. yang paling lambat 5 tahun yang lalu telah lulus ujian "kwekeling" (calon guru);
- b. bekas guru, guru bantu dan kwekeling dari sekolah negeri Bumiputera yang diberhentikan dengan hormat, tetapi harus memenuhi syarat umur, kelakuan baik dan kesehatan badan. Yang diterima jadi guru desa mendapat Surat Kekancingan (radikal = semacam Surat Putusan) dari Residen, sebagai "guru sekolah desa atau kampung".

10. Penghasilan guru desa sebulan + f. 15.- minimum dan f. 20.- — f.25.- rata-rata dipandang pantas. Gaji ini sedapat mungkin diberikan berupa hak pakai atas sebagian sawah desa dengan luas tertentu (bengkok guru desa). Bengkok guru desa ini berbeda dari bengkok pamong desa.

Di daerah, dimana desa tidak mempunyai sawah milik bersama, karena sebagian besar sawah milik perorangan turun-temurun, maka dengan bantuan uang muka dari keuangan lembaga perkreditan desa dapat dibeli sebidang sawah untuk bengkok guru desa. Kemungkinan sekali guru desa kadang-kadang dapat disertai administrasi perkreditan desa, dan dari ini ia dapat mengambil sebagian dari penghasilannya. Setidak-tidaknya guru desa dapat diberi sebagian dari uang sekolah yang dipungutnya, agar supaya ia mempunyai kepentingan dengan bertambahnya murid. Bahkan jika ternyata perlu uang sekolah dapat diserahkan seluruhnya kepadanya, jika ternyata penghasilannya dari sumber-sumber lain ternyata terlalu kecil. Selanjutnya guru desa termasuk orang yang dalam Surat Keputusan Residen dibebaskan dari rodi. Dari pihak desa ia seharusnya juga dibebaskan dari kerja bersama-sama (gugur-gunung = gotong-royong). Jika dalam keadaan luar biasa tidak dapat ditemukan orang yang mau menjadi guru desa, dan desa sungguh-sungguh tidak dapat menaikkan penghasilan guru desa, maka dapat dimintakan subsidi dari Residen, tetapi tidak lebih banyak dari pada yang diperlukannya.

11. Rencana pelajaran meliputi membaca dan menulis bahasa daerah (Jawa) dengan huruf Jawa, menurut keadaan dapat dengan huruf Latin, dan penerapan dari 4 peraturan pokok berhitung. Pendidikan bertujuan pula memberikan kepada anak-anak pengertian yang benar mengenai apa yang dapat dilihat dari sekeliling dan yang penting bagi mereka. Dalam berhitung dipergunakan ukuran panjang, luas dan timbangan yang dipakai di kalangan penduduk. Bagi yang sudah maju diperkenalkan juga ukuran panjang, luas, isi dan timbangan dari sistem metrik, dan perbandingannya dengan yang disebut pertama.

12. Tujuan umum untuk mendirikan Sekolah Desa Bumiputera - yaitu membantu meluaskan pengertian yang benar mengenai berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan dekat orang desa dan tidak akan mungkin tercapai hanya dengan keterangan-keterangan lisan dari guru desa saja, tanpa alat-alat pembantu.

Maka Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan ditugaskan untuk menyusun buku-buku bacaan, karangan-karangan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti dan diterjemahkan dalam bahasa daerah (Jawa) tentang:

- a. fungsi berbagai bagian dari tumbuh-tumbuhan;
- b. syarat-syarat hidup dan sifat-sifat serangga dan jenis-jenis binatang lainnya, yang merugikan pertanian;
- c. terjadinya mata air;
- d. penjelasan berbagai kejadian alam;
- e. keuntungan penggarapan tanah yang baik;
- f. pembuatan dan pemakaian alat-alat yang berguna;
- g. susunan umum mesin uap;
- h. hal-hal mengenai kesehatan dan kebersihan (hygiene);
- i. sebagai selingan ceritera-ceritera: dongeng, dongeng binatang, dan lain-lain yang mempunyai tujuan kesusilaan, dll.

Buku-buku ini:

- a. diberikan kepada guru-guru desa untuk dipergunakan dalam pelajaran lisan;
- b. dikumpulkan menjadi perpustakaan untuk lingkaran beberapa sekolah, diawasi oleh guru-guru sekolah negeri Bumiputera, dan secara bergiliran buku-buku ini dikirim ke sekolah-sekolah desa.

13. Penentuan waktu masuk sekolah ditetapkan dalam musyawarah dengan kepala desa untuk dapat memperhitungkan keadaan desa, sehingga kesempatan masuk sekolah dapat dipergunakan oleh umum.

Berdasarkan musyawarah tersebut, ditetapkan:

- a. anak-anak lelaki yang agak besar masuk siang, karena pagi dibutuhkan membantu pekerjaan di sawah, dll., anak-anak perempuan masuk pagi;

- b. guru mengajar 5 a' 6 jam sehari, dibagi dua: pagi dan siang;
- c. pada musim tander dan panen, jam-jam sekolah dapat dikurangi;
- d. juga harus diperhitungkan waktu dimana anak-anak belajar agama (ngaji).

Jam-jam sekolah bagi sekolah-sekolah desa tidak seragam, tetapi pemerintah harus diberitahu tentang pengaturan jam sekolah di masing-masing desa. Jika jam-jam sekolah sudah diatur dan disetujui Pemerintah, harus ditaati oleh guru dan murid-murid.

14. Penetapan liburan diatur seperti ad.13, dengan mengingat:
 - a. setiap minggu ada 1 hari libur;
 - b. libur 4 a' 5 hari sekitar 1 sawah;
 - c. syarat-syarat pekerjaan sawah dan kegiatan umum penduduk menentukan apakah perlu ada liburan panjang atau tidak, dan dalam bulan apa.
15. Kecuali bagi orang tua yang miskin, bagi murid-murid dipungut uang sekolah. Uang sekolah ditetapkan 5 sampai 50 sen tiap bulan, setiap anak, dengan ketentuan bagi anak-anak kedua dan selanjutnya dari satu keluarga diberikan pengurangan. Di beberapa daerah uang sekolah dapat dibayar dalam bentuk "natura", dan dibayar pada waktu panen.
16. Pimpinan umum untuk mendirikan dan memajukan pendidikan desa sementara ada pada Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, dan pengelolaan langsung sekolah-sekolah desa dilaksanakan oleh para pegawai Pemerintahan Dalam Negeri di bawah perintah para Residen. Masalah ini erat hubungannya dengan kehidupan rakyat dan kemajuan lembaga-lembaga desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan diwujudkan dalam Ordonansi Desa (Lembaran Negara 1906 nomor 83).
 Dalam melaksanakan azas-azas termaktub di atas, Direktur Pemerintahan Dalam Negeri memberikan penjelasan dan peraturan tersebut kepada para Residen. Residen dengan musyawarah dengan para pegawai bawahannya Eropa dan Bumiputera secara berangsur-angsur mengadakan peraturan dan instruksi, yang perlu dibuat menurut keadaan.

Untuk menjaga supaya pendidikan Bumiputera tidak akan tergantung lebih lama dari pendapat para pegawai Pemerintahan Dalam Negeri yang sering berganti-ganti, maka ditetapkan bahwa untuk mendirikan dan menghapuskan sekolah desa harus ada persetujuan Residen. Apakah tujuan sekolah desa, menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat desa dan terbuka buat semua anak desa, akan dapat tercapai terutama tergantung dari pandangan jauh, ketekunan dan perhatian terus-menerus dari para Bupati dan Kepala Bumiputera bawahannya.

Penduduk desa supaya dapat menerima lembaga yang baru ini, meskipun ada beban-beban tertentu yang dipikulkan kepada desa, sebagai keuntungan yang berguna dan dihargai. Pelaksanaannya tidak boleh ditempuh dengan jalan perintah-perintah, tetapi dengan cara pendekatan, pembicaraan dan ajakan.

Kontrolir Pemerintahan Dalam Negeri berkewajiban melakukan pengawasan umum, menghadiri pembicaraan-pembicaraan dengan penduduk, memberikan petunjuk dan bantuan menyelesaikan kesulitan-kesulitan, yang ditemui pada pelaksanaan rencana.

Dalam melakukan penyuluhan mengenai pendidikan sendiri, pegawai Pemerintahan Dalam Negeri dapat berhubungan dengan para Inspektur Pendidikan Bumiputera.

Dianjurkan pula untuk mempergunakan jasa-jasa para guru sekolah Bumiputera, dan menyuruh mereka mengunjungi sekolah-sekolah desa secara bergiliran pada hari libur tiap minggu, dengan mendapat penggantian uang perjalanan dan uang tunjangan tertentu, yang dapat diambilkan dari dana pendidikan desa di keresidenan.

REORGANISASI PENDIDIKAN BUMIPUTERA - PENDIDIKAN PERTUKANGAN

22. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 22 Mei 1906 nomor 8811

Dengan surat ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal laporan dari Kontrolir J.E. Jasper. Laporan sebelum diajukan dibicarakan lebih dahulu dengan para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa dalam pertemuan yang diadakan di Surabaya, dan kemudian oleh Pj. Direktur P.A.K. dengan para Inspektur tersebut di Betawi.

Laporan dibagi dalam 3 bagian:

- I. mengenai keadaan pendidikan Bumiputera sekarang dan sarana-sarana untuk memperbaiki;
- II. mendirikan sekolah-sekolah kelas dua baru di keresidenan Surabaya;
- III. mendirikan sekolah-sekolah kejuruan pertukangan bagi orang Bumiputera.

Bagian-bagian ini akan ditinjau berturut-turut masing-masing terpisah, dengan mempergunakan hasil-hasil pembicaraan dalam Konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa, tanggal 8 sampai 11 Mei 1906.

Bagian I

Dengan menarik surat tanggal 30 Nopember nomor 2007 dikemukakan, bahwa J.E. Jasper dan para Inspektur Pendidikan Bumiputera berpendapat bahwa:

1. pendidikan di sekolah-sekolah Bumiputera negeri, dengan mengkesampingkan kekurangan yang ada, mencukupi kebutuhan penduduk akan kemajuan;
2. jumlah sekolah yang ada jauh daripada mencukupi;
3. sekolah-sekolah swasta, kecuali yang didirikan zending, pada umumnya lebih terbelakang daripada sekolah negeri, dan para murid yang menginginkan suatu jabatan tidak puas dengan pendidikan yang diberikannya.

4. sekolah-sekolah swasta cukup bagi mereka yang tidak ingin menjadi pegawai, jadi cukup bagi petani, nelayan, dsb.

Kekurangan yang ada pada sekolah-sekolah negeri menurut Pelapor dan para Inspektur ialah bahwa:

1. kelas-kelas rendah dibagi dalam bagian-bagian, sehingga guru-guru harus memberi pelajaran di lebih dari satu bagian pada waktu yang bersamaan;
2. murid-murid baru tidak dapat diterima pada waktunya;
3. murid-murid baru yang diterima, banyak yang terlalu muda;
4. waktu belajar yang lamanya 3 tahun diperpanjang 1 tahun lagi dengan tambahan satu kelas sehingga menjadi kelas 4;
5. untuk latihan tulis-menulis banyak dipergunakan batu-tulis. Sebaiknya, untuk lebih memperbesar perhatian murid dan orang tua lebih baik dipergunakan buku tulis.

Menurut pasal 22 Reglemen Sekolah (Lembaran Negara 1893 nomor 128) sekolah kelas 1 harus terdiri dari 5, dan sekolah kelas 2 dari 3 kelas. Menurut pasal 25 penerimaan murid baru dilakukan 2 kali setahun. Peraturan ini mengakibatkan murid-murid kelas-kelas rendah harus dinaikkan tiap 1/2 tahun sekali dan ada bagian-bagian 1/2 tahunan, untuk memberi tempat bagi murid-murid baru. Tugas termaktub di ad.1 terlalu berat bagi guru-guru Bumiputera untuk dapat dilaksanakan tanpa merugikan pendidikan.

Untuk menghilangkan kekurangan ini oleh Pelapor diusulkan:

1. penerimaan murid-murid baru untuk kelas 1 dibatasi 1 kali setahun, dan bagian-bagian dari kelas-kelas rendah dihapuskan;
2. satu guru tidak boleh mengajar lebih dari 1 kelas;
3. satu kelas tidak boleh lebih dari 40 murid (para Inspektur tidak menaruh keberatan terhadap usul-usul 1 - 2 dan 3);
4. mengadakan "kelas persiapan" yang selalu terbuka untuk penerimaan murid baru.

Dalam "kelas persiapan" ini tidak diberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung, tetapi anak-anak dengan cara yang menyenangkan dengan bermain-main, dibiasakan dengan ketertiban dan

peraturan, dilatih mengeluarkan pikiran dengan betul, dilatih menggunakan pancaindera dengan baik.

(Para Inspektur sangat menentang usul ini, karena guru-guru Bumiputera belum mampu memberikan pengajaran "fröbel", dan juga orang tua belum mengerti manfaatnya, mereka memasukkan anak-anaknya ke sekolah untuk belajar dan tidak untuk main-main).

Pj. Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kerajinan berdasarkan Laporan dan usul-usul tersebut di atas, mengusulkan kepada Gubernur Jenderal:

1. penerimaan murid baru kelas 1 dilaksanakan satu kali setahun, dan sebaiknya menunggu informasi dari para pegawai Pemerintahan Dalam Negeri pada akhir liburan Puasa;
2. "kelas persiapan" jangan diadakan, meskipun bersifat percobaan.

Di kemudian hari jika di sekolah-sekolah guru untuk guru Bumiputera sudah diberikan pelajaran mengenai pengetahuan dan kecakapan untuk memberikan pengajaran persiapan, dan mereka (= guru-guru) dapat diberi keinsyafan tentang manfaat pengajaran demikian, serta ada kesadaran bahwa pengajaran persiapan itu tidak di bawah derajat mereka, maka telah tiba waktunya untuk mengadakan percobaan dengan menggunakan tenaga-tenaga yang terbaik di antara mereka. Untuk membatasi sekolah kelas 2 pada 3 kelas, tidak ada keberatan dari para Inspektur, jika hal itu mengenai sekolah-sekolah yang jumlah murid-muridnya sedikit dan personil pengajarnya terlalu sedikit untuk dapat memberi pengajaran di 4 kelas masing-masing tersendiri. Dimana penduduknya tetap membuktikan bahwa mereka menghargai sekolah yang ada tetap dipertahankan 4 kelas.

Menurut para Inspektur, penduduk dengan perantaraan Pemerintahan Dalam Negeri mendesak supaya waktu belajar diperpanjang dan pendidikan diperluas, antara lain dengan ditambah bahasa Melayu. Dimana perluasan pendidikan tidak dapat dipenuhi dengan perubahan rencana pelajaran, maka menurut para Inspektur kelas 4 harus diijinkan, jika kekuatan personil pengajar mengijinkannya.

Pentingnya perpustakaan sekolah bagi kemajuan dan perkembangan murid sudah lama diakui, tetapi biaya untuk mendirikan - meskipun secara kecil-kecilan - selalu menghambat pelaksanaannya. Disulkan supaya dapat diwujudkan.

Usul Jasper untuk dapat memperoleh bacaan-bacaan yang cocok tidak dapat dilaksanakan. Para Inspektur harus mencari dan menemukan di antara para guru (Eropa dan Bumiputera) dan orang-orang lain yang cakap, yang sedia dan sanggup menangani tugas yang berat ini, yakni menyusun bacaan hiburan bagi para murid dari berbagai kelas. Mengadakan perlombaan mengarang untuk bacaan hiburan tersebut menurut para Inspektur tidak akan banyak menolong, dan akan terpaksa mengecewakan banyak orang. Tetapi bantuan dari orang-orang selain daripada yang ditunjuk para Inspektur tidak perlu ditolak. Sebaiknya diterima dengan terima kasih.

Pikiran Jasper untuk memberikan bacaan yang baik bagi penduduk terutama bagi yang telah tamat sekolah kelas 2, dan umumnya bagi semua yang dapat membaca, sangat simpatik dan diusulkan untuk dapat dilaksanakan.

Karena untuk memberikan pendidikan ulangan biayanya sangat besar dan sulit untuk mendapatkan personil pengajar, maka pemberian bacaan yang membangun dalam bentuk yang menarik merupakan satu-satunya jalan, supaya apa yang dipelajari di sekolah tidak akan hilang sama sekali, tetapi dapat ditambah dan diperluas.

Masalah "penyediaan kebutuhan penduduk desa akan bacaan" telah dikemukakan pula dalam usul-usul bersama (Pj. Direktur P.A.K. dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri) mengenai pendirian sekolah-sekolah desa.

Mereka yang telah mendapat pendidikan lebih banyak di sekolah negeri daripada yang diperoleh di sekolah desa memerlukan bacaan yang lebih maju daripada yang diperuntukkan untuk tamatan sekolah desa.

(Usul ini disetujui Gubernur Jenderal dalam Surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 31 Mei 1906 nomor 1526/2).

Untuk memperbaiki pendidikan Bumiputera dan untuk mendapat kepastian adanya perbaikan keadaan perlu sekali mengadakan inspeksi yang teratur.

(Usul untuk mengadakan reorganisasi inspeksi, kenaikan gaji guru bantu, dan pembelian alat-alat peraga).

Sekolah-sekolah negeri Bumiputera secara lahiriah nampaknya begitu muram, sehingga lebih menakutkan daripada menarik murid-murid, dan hal ini perlu segera diperbaiki.

Pada akhir laporan Bab I dikemukakan masalah adanya dorongan di kalangan besar penduduk Bumiputera untuk menyuruh anak-anaknya belajar bahasa Belanda. Perlu dibicarakan dalam pertanyaan, apakah sekolah-sekolah kelas 1 memerlukan perubahan-perubahan dan bagaimana. Rencana anggaran biaya untuk perbaikan sekolah yang sekarang ada memerlukan beberapa perubahan berhubungan dengan sekolah yang ada sekarang diperluas, tidak hanya di keresidenan Surabaya tetapi juga di seluruh Jawa dan Madura. Perbaikan dan perubahan bukan hanya mengenai sekolah kelas 2 tetapi juga kelas 1 (Rencana anggaran biaya).

Bagian II

Jasper mengusulkan pendirian 36 sekolah kelas 2 baru di keresidenan Surabaya. Dari jumlah sekolah baru itu ada 5 sekolah, yang diperkirakan akan menyedot murid dari sekolah-sekolah swasta, ada diantaranya yang diselenggarakan oleh zending. Di tempat dimana sekolah swasta itu terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang lunak dan dengan demikian tidak memenuhi kebutuhan akan pendidikan, di situ didirikan sekolah baru. Sehubungan dengan itu jumlah sekolah baru yang akan didirikan di keresidenan Surabaya ditetapkan 33.

(Rencana anggaran biaya dari sekolah-sekolah baru yang akan didirikan).

Rencana anggaran biaya untuk mendirikan sekolah-sekolah baru di seluruh Jawa dan Madura menunggu data dari Jasper, yang akan dikumpulkannya dari tiap-tiap kecamatan. Untuk tahun 1907 dibatasi pada tersedianya personil pengajar.

Bagian III

Dari hasil-hasil penyelidikan Jasper, data penting yang dikumpulkannya dan pembicaraan-pembicaraan dengan para ahli industri yang dikerjakan orang-orang Bumiputera, dapat ditarik kesimpulan:

- a. orang-orang Bumiputera dengan persiapan yang cukup dapat dididik menjadi tukang-tukang yang baik, yang akan mendapat mata-pencaharian di industri-industri yang diusahakan oleh orang-orang Eropa;
- b. hasil-hasil penyelidikan membuktikan adanya dorongan di kalangan penduduk Bumiputera untuk maju ke arah industri, dan adanya kebutuhan akan adanya golongan tukang;
- c. golongan orang Bumiputera yang dapat dibawa ke kedudukan sosial ekonomis yang lebih tinggi, dalam jumlah yang cukup besar, akan membawa pengaruh yang lebih baik pada pertukangan di kalangan penduduk sendiri;
- d. untuk memajukan ini diusulkan supaya didirikan sekolah pertukangan di kota dengan sekolah pertukangan yang dapat dipindah-pindahkan dari satu desa ke desa yang lain, serta mendirikan tempat-tempat kerja di luar kota-kota besar, dengan atau tidak dengan dasar kooperatif;
- e. syarat untuk diterima di sekolah pertukangan harus tamat dari sekolah rendah Bumiputera. Sekolah tidak hanya terbuka bagi pemuda Bumiputera dari tempat dimana sekolah itu didirikan, tetapi juga dari luar tempat itu. Pada sekolah tersebut diperbantukan sekolah-sekolah yang dapat dipindah-pindahkan. Sekolah "mobil" ini:
 1. memberikan pendidikan praktis dalam beberapa pertukangan;
 2. setelah beberapa bulan di satu desa dipindahkan ke desa lain dimana akan dikerjakan pertukangan-pertukangan yang diajarkan di sekolah "mobile" itu;
 3. guru-gurunya diambilkan dari tamatan Sekolah Pertukangan di kota, yang telah mengikuti kursus secara menyeluruh.

(Rencana: Kursus 4 tahun untuk mata pelajaran yang paling banyak diberikan, 3 tahun untuk mata-matapelajaran lainnya; pengaturan inspeksi; penambahan "sekolah-sekolah "mobil").

Pj. Direktur P.A.K. mengusulkan supaya didirikan tidak hanya satu sekolah pertukangan (di Surabaya), tetapi juga di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut laporan Sekolah Pertukangan di Surabaya tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan Jawa Timur. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat juga perusahaan-perusahaan industri yang memerlukan tukang-tukang yang terdidik, dan pertukangan yang dikerjakan penduduk juga memerlukan perbaikan dan bantuan. Jika pendirian tiga sekolah pertukangan itu disetujui, maka tempat dari dua yang lainnya dapat ditentukan setelah diadakan penyelidikan.

(Rancangan biaya untuk sekolah-sekolah pertukangan).

Dalam surat Sekretaris Pemerintah kelas I tanggal 19 Pebruari 1906 nomor 466, disamping usul-usul mengenai reorganisasi dan perluasan pendidikan Bumiputera ke arah teknis, diminta juga pertimbangan mengenai perluasan dan penambahan sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 misalnya dengan perluasan rencana pelajaran sekolah kelas 2 agar membuat sekolah itu cocok bagi anak-anak pegawai negeri, dan perlunya perluasan atau penambahan sekolah-sekolah guru.

Untuk itu para Inspektur Pendidikan Bumiputera telah mengadakan musyawarah dengan para Residen untuk mempertimbangkan apakah perlu menambah sekolah-sekolah kelas 1 dan jika perlu dimana. Kemudian dua masalah itu dibicarakan dalam konperensi para Inspektur tanggal 8-11 Mei 1906.

Hasilnya ialah bahwa sekolah-sekolah kelas 1 telah memenuhi kebutuhan, oleh karena itu jumlahnya perlu ditambah dan rencana pelajaran diperluas antara lain dengan pendidikan bahasa Belanda.

Dalam Lembaran Negara 1903 nomor 353, pemasukan anak-anak Bumiputera ke Sekolah-Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) dipermudah dan uang sekolah bagi anak Bumiputera diturunkan. Membanjirnya anak-anak Bumiputera ke E.L.S. menyebabkan mundurnya pelajaran pada umumnya dan bahasa Belanda khususnya, dan merugikan murid-murid Belanda. Oleh karena itu perlu penambahan personil pengajar di beberapa E.L.S. Sebab utama membanjirnya anak-anak Bumiputera ke E.L.S. ialah penolakan Menteri Jajahan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang Bumiputera mendapat pendidikan bahasa Belanda dari Pemerintah.

Kursus-kursus bahasa Belanda oleh swasta, meskipun mendapat subsidi dari Kas Negara, kurang memenuhi kebutuhan. Dengan surat tanggal 11 Desember 1901 nomor 15521 Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) mengusulkan supaya pada sekolah kelas 1 di kota yang ada E.L.S. diadakan kursus 2 tahun, dimana pada siang hari diberikan pendidikan bahasa Belanda kepada pemuda Bumiputera tamatan sekolah kelas 1. Pelajaran bahasa Belanda diberikan oleh guru-guru Belanda dari E.L.S. dengan tunjangan bulanan dari Pemerintah, dan murid-murid dikenakan uang sekolah. Oleh Mr. Abendanon kursus-kursus ini dianggap sebagai penting untuk memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran di semua kelas sekolah kelas 1, kecuali di kelas terendah. Hal ini tidak segera diajukan sebagai usul mengingat bahwa guru Belanda di sekolah kelas 1 dalam tahun-tahun pertama tidak cukup tugas mengajar dan sulit untuk mendapatkan begitu banyak guru Belanda sekaligus.

Dalam suratnya tgl. 16 - 2 - 1904 nomor 2530 atas jawaban surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 tanggal 16 Pebruari 1903 nomor 555, Abendanon mengemukakan lagi usulnya tersebut di atas. Usul tersebut disetujui oleh Pemerintah dan dengan Surat tanggal 29 Maret 1904 nomor 714/10 kepada Pemerintah Belanda diusulkan supaya di tiap keresidenan di Jawa dan Madura pada satu sekolah kelas 1 diberikan pendidikan bahasa Belanda seperti termaktub dalam usul Abendanon.

Penyelidikan teliti mengenai hasil-hasil pendidikan bahasa Belanda yang diberikan "Kursus-kursus bahasa Belanda" swasta sama sekali tidak memenuhi harapan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dengan surat keputusan pemerintah tanggal 23 September 1904 nomor 9 semua pemberian subsidi kepada Kursus-kursus bahasa Belanda dicabut.

Dengan suratnya tanggal 31 Mei 1904 Litt. Al nomor 67/1539 Menteri Jajahan memberitahukan, bahwa waktunya belum tiba untuk memberikan pendidikan bahasa Belanda kepada orang-orang Bumiputera oleh Pemerintah. Dimana sungguh-sungguh ada kebutuhan supaya dipenuhi oleh prakarsa swasta.

Konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera tanggal 8-11 Mei 1906 menghasilkan pendapat bahwa:

1. dari kursus siang selama dua tahun (usul Mr. Abendanon) tidak dapat banyak diharapkan;

2. untuk membuat supaya pemuda Bumiputera dapat mengerti prosa sederhana dalam bahasa Belanda, dan dapat bicara dan menulis dalam bahasa Belanda dengan mudah, diperlukan beberapa tahun dengan jumlah jam yang cukup banyak.

Maka dari itu diusulkan supaya pendidikan bahasa Belanda pada sekolah kelas 1 dimulai di kelas 3 dengan 6 jam seminggu, kelas 4 dengan 12 jam, kelas 5 dengan 18 jam, ditambah dengan kelas 6 dimana diajarkan terutama bahasa Belanda (22 jam seminggu) dan mata-mata pelajaran lainnya dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Pendidikan bahasa Belanda tersebut di atas sementara tidak perlu diberikan pada semua sekolah kelas 1, tetapi cukup satu di tiap-tiap keresidenan (kecuali keresidenan Priangan, Kedu, Semarang dan Pasuruan masing-masing dua, Yogyakarta dan Surakarta cukup satu). Seluruhnya kedua puluh sekolah kelas 1 tersebut akan dirombak demikian.

Untuk pelaksanaan rencana di atas pada masing-masing sekolah kelas 1 yang bersangkutan akan diangkat 2 orang guru Belanda, satu untuk kelas 3, 4 & 5 dan satu untuk kelas 6, dan membantu di kelas-kelas lain. Dengan perombakan sekolah-sekolah kelas 1, maka jumlah murid Bumiputera di beberapa E.L.S. akan berkurang, dan personil pengajarnya dapat dikurangi.

(Rancangan akibat keuangan dari usul tersebut di atas).

Mengenai sekolah guru akan dibicarakan apakah jumlah murid di masing-masing sekolah ditambah, dan apakah diperlukan lebih banyak sekolah guru.

Selain itu dipandang perlu bahwa jumlah murid akan ditambah yaitu di Bandung dari 50 menjadi 100, Yogyakarta dari 75 menjadi 100, Probolinggo dari 75 menjadi 100 dan bila perlu menjadi 130 (menurut Inspektur Uijtterbroeck). Inspektur Bertsch mengusulkan untuk mendirikan sekolah guru baru dekat Semarang dengan murid sejumlah 100 orang. Di Jawa Timur dan Jawa Barat sementara tidak perlu didirikan sekolah guru baru.

Penambahan jumlah murid memerlukan penambahan personil pengajar di masing-masing sekolah guru.

Mengenai perluasan rencana pelajaran sekolah guru Bumiputera diusulkan, supaya bahasa Belanda dimasukkan sebagai mata pelajaran, karena perlu sekali untuk dapat meninggikan taraf pendidikan dari para guru. Dengan dapat membaca dan mengerti perpustakaan kejuruan guru dalam bahasa Belanda, serta memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang dengan perpustakaan bahasa Belanda, maka hal seperti itu sangat menguntungkan karena tidak adanya buku-buku seperti itu dalam bahasa-bahasa daerah.

Dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 3 Maret 1904 nomor 12 diadakan percobaan mengajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran pada sekolah guru Bumiputera di Fort de Kock. Hasil percobaan sangat baik. Ini disebabkan, karena pada sekolah tersebut diadakan bagian persiapan yang lamanya 2 tahun, sebelum sekolah kejuruan yang sesungguhnya. Pada 2 kelas persiapan ini pengajaran bahasa Belanda diberikan 20 dari 36 jam pelajaran seminggu. Dalam kelas 2 persiapan sudah dapat dipergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam beberapa mata pelajaran.

Pj. Direktur P.A.K. mengusulkan pada sekolah-sekolah guru di Jawa juga diberikan pengajaran bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, dan di Amboina menunggu laporan dari Inspektur yang bersangkutan.

(Rancangan akibat keuangan dari usul tsb.).

Mengenai penambahan jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 diusulkan untuk tahun 1907: Jawa Timur 60, Jawa Tengah 67, dan Jawa Barat 59, seluruh Jawa dan Madura 186, sedangkan dalam tahun-tahun akhir ini hanya 10 tiap tahunnya. Dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan lebih banyak sekolah baru akan dapat dibuka.

Untuk daerah luar Jawa dan Madura dipandang perlu juga, dan pada waktunya harus ada penyelidikan mengenai perluasan sekolah Bumiputera.

Dengan adanya penyelidikan di seluruh Jawa dan Madura maka kepada penduduk Bumiputera telah dibangkitkan harapan-harapan, bahwa kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya akan segera dapat dipenuhi. Di harap Gubernur Jenderal sudi menderak Menteri Jajahan supaya usul-usul tersebut dapat segera dilaksanakan, agar tidak mengecewakan lagi

harapan-harapan tersebut di atas. Hal tersebut akan memakan biaya sangat banyak sekali, tetapi hasilnya juga akan banyak, yakni meningkatkan tingkat intelektual penduduk dan mengangkat kedudukan sosial ekonomis mereka.

Untuk memenuhi keinginan Menteri Jajahan termaktub dalam alinea 3 dari surat kawatnya tanggal 11 Januari 1906 bagian A1 nomor 24/100, hal-hal pokok yang penting dari usul-usul ini dapat segera dikawatkan.

23. Surat Gubernur Jenderal (van Heutz) kepada Menteri Jajahan (Fock) tanggal 20 Juni 1906 nomor 840/1.

(Penyampaian laporan Kontrolir Jasper dan usul-usul Pott).

Dengan surat ini dikemukakan bahwa Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda dapat menyetujui:

1. Usul mengenai reorganisasi pendidikan Bumiputera yang meliputi:
 - a. perbaikan pendidikan;
 - b. perluasan korps pegawai inspeksi;
 - c. perbaikan kedudukan guru-bantu yang tidak terdidik dan calon-calon guru;
 - d. perbaikan gedung-gedung sekolah.
2. Menyetujui pengaturan pendidikan pada sekolah negeri kelas 2 (dengan sedikit pendapat dari Dewan Hindia Belanda) meliputi:
 - a. pengajaran membaca dan menulis dengan huruf Jawa, diganti dengan huruf Latin karena lebih berguna daripada huruf Jawa dan Arab;
 - b. penambahan rencana pelajaran dengan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran.

Dengan surat Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal 20 Juni 1906 nomor 1739, Direktur P.A.K. ditugaskan untuk mengadakan tindakan-tindakan pelaksanaan ad. a tersebut di atas dan untuk mempertimbangkan ad.b dengan para Inspektur.

Menurut Dewan Hindia Belanda bahasa Melayu akan dijadikan sebagai

nata pelajaran wajib di semua sekolah kelas 2 di Jawa dan Madura sementara masih akan menemui keberatan-keberatan.

3. Menyetujui usul perluasan sekolah negeri kelas 2 dengan catatan bahwa: Jika pikiran mendirikan sekolah-sekolah desa (laporan tahun ini nomor 458 dan nomor 796) dapat dilaksanakan secara umum, maka kebutuhan akan pendidikan bagi sebagian besar penduduk (petani, nelayan, dll.) akan dapat dipenuhi dengan jalan ini. Memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendirikan sekolah-sekolah negeri, menurut pendapat Dewan Hindia Belanda akan meminta biaya yang begitu banyaknya, sehingga tidak akan terpikul.

Jika di satu tempat atau di dekatnya ada beberapa golongan penduduk yang bagi anak-anaknya pendidikan di sekolah desa tidak mencukupi, mendirikan sekolah negeri dipandang perlu.

4. Tidak menyetujui usul Mr. Pott untuk mendirikan tiga sekolah pertukangan seperti yang direncanakan oleh Kontrolir Jasper, tetapi sementara sebagai percobaan cukup mendirikan satu sekolah pertukangan di Surabaya.

Dewan Hindia berpendapat:

- a. membanjirnya tenaga kerja yang baik ke pasaran kerja yang terbatas di Jawa akan membawa pengaruh yang tidak diharapkan pada keadaan ekonomi;
- b. terutama industri Eropa yang akan mendapat keuntungan dari sekolah-sekolah pertukangan tersebut, akan tetapi bagi rakyat Jawa sendiri keuntungannya hanya sedikit saja;
- c. perluasan terlalu besar akan lebih merugikan daripada menguntungkan.

Hasil yang diperoleh di Sekolah Pertukangan di Surabaya akan menunjukkan dalam praktek, apakah di tempat-tempat lain juga dapat didirikan sekolah semacam itu, dan sampai berapa jauhnya dapat melaksanakannya. (Tunjangan bulanan bagi murid-murid Sekolah Pertukangan harus hanya sebagai kekecualian).

5. a. Menyetujui dan mendukung usul untuk mengadakan bahasa Belanda sebagai matapelajaran pada sekolah-sekolah Bumiputera klas 1;
- b. Menyetujui usul Kepala Departemen P.A.K. mengenai perluasan sekolah-sekolah guru dan pendirian sekolah guru yang keempat.

Hal ini ada titik kontaknya dalam Surat Menteri Jajahan tanggal 11 Januari 1906 Bg. Al nomor 24/100.

PENDIDIKAN BAGI ORANG-ORANG CINA

24. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 11 Juli 1906 nomor 12064 (Ringkasan sejumlah surat permohonan orang-orang Cina di Makasar, Betawi dan Ambon untuk perluasan kesempatan menerima pendidikan bagi anak-anak Cina yang ditolak dari Sekolah Belanda).

Hal-hal penting dalam surat ini, yang dikemukakan oleh J.G. Pott:

1. Pemerintah memegang teguh penjelasan pasal 128 Reglemen Pemerintah (Lampiran Lembaran Negara nomor 1037), bahwa pendidikan bagi orang-orang Cina tidak termasuk urusan Pemerintah. Surat permohonan Residen Rembang untuk mendirikan sekolah khusus diperuntukkan bagi anak-anak Cina di Lasem ditolak dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 tanggal 19 Nopember 1900 nomor 3077 berdasarkan nasehat Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) tanggal 19 Oktober 1900 nomor 13747.
 2. Direktur P.A.K. (J.G. Pott) berpendapat bahwa:
 - a. Meskipun menurut Reglemen Pemerintah Gubernur Jenderal hanya berkewajiban mengurus pendidikan bagi penduduk Eropa dan Bumiputera, pendidikan bagi golongan-golongan penduduk lainnya perlu juga mendapat perhatian, jika terbukti ada kebutuhan, yang perlu sekali dipenuhi.
 - b. Adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak Cina terbukti dari:
 1. surat-surat permohonan tersebut di atas;
 2. dimana-mana didirikan sekolah-sekolah oleh orang-orang Cina sendiri;
 3. perhatian dari Pemerintahan Cina, yang mengirimkan pegawainya Liu Shih Chi untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Hindia Belanda.
- Dengan surat rahasia Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal

17 Pebruari 1906 nomor 78 Direktur P.A.K. ditugaskan untuk memberikan kepadanya informasi dan introduksi dan kemudian melaporkan kepada Pemerintah, apa yang diketahui tentang pengutusan pegawai Cina itu. Hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena Liu Shih Chi tidak mencoba menjumpainya.

- c. Terpisah dari rasa keadilan, politik yang bijaksana menghendaki, bahwa Pemerintah memanfaatkan petunjuk-petunjuk di atas dan menangani sendiri masalah pendidikan bagi anak-anak Cina dengan mendirikan sekolah-sekolah seluruhnya dengan biaya Pemerintah dan memberi bantuan keuangan untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah yang ada, dan yang akan didirikan, dengan syarat harus diberikan pendidikan bahasa Belanda, disamping bahasa Cina, Melayu dan Inggeris, yang bagi orang-orang Cina penting sekali.

Direktur P.A.K. mengharap, supaya Pemerintah memutuskan lebih dahulu, apakah Pemerintah masih teguh berpegangan pada atau mau melepaskan pendirian tersebut di atas. Jika jawabnya "ya", maka terutama akan diselidiki sekolah macam apa yang paling dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh gambaran mengenai akibat-akibat keuangan, dan dapat pula diputuskan sampai berapa jauh kebutuhan itu dapat dipenuhi.

Permohonan tersebut di atas sebaiknya dijawab, bahwa pemberian pendidikan bagi anak-anak Cina dari Pemerintah telah dipertimbangkan. Tetapi sebelum ada keputusan tidak akan diberikan janji-janji, baik untuk kepentingan tempat atau golongan orang-orang tertentu.

25. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 21 Januari 1907 nomor 23/157

Dalam surat ini diminta perhatian Gubernur Jenderal atas artikel dalam "Soerabajasch Handelsblad" tanggal 30 Nopember 1906 yang ditulis oleh orang Cina Tan mengenai "keadaan pendidikan di kalangan penduduk Cina di Hindia Belanda". Meskipun kecaman yang dilancarkan terhadap Pemerintah dalam artikel itu mungkin tak beralasan,

kenyataan-kenyataan yang diberberkan dalam artikel itu serta lampiran nomor 1258 laporan-laporan tahun 1906, memperkuat keyakinan Menteri, bahwa masalah pendidikan ini perlu sekali segera dipecahkan.

Maka dari itu dengan menyusuli suratnya tanggal 8 Desember 1906 bg. Al nomor 15/2704 Menteri mendesak supaya penyelidikan dan penyelesaian masalah pendidikan ini selekas mungkin dipercepat, sehingga dapat diperhitungkan dengan usul-usul yang bersangkutan pada rencana anggaran belanja 1908.

26. Nasihat Dewan Hindia Belanda tanggal 28 Juni 1907 nomor XVI

Dewan Hindia Belanda dapat menyetujui pendapat Direktur P.A.K. dalam suratnya tanggal 10 Juni 1907 nomor 10679 mengenai pendidikan bagi anak-anak Cina dengan catatan bahwa:

1. Menurut Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan:

- a. sebagian terbesar anak Cina dapat ditolong dengan pendidikan pada sekolah-sekolah Bumiputera;

Maka dari itu diusulkan supaya pembatasan pemasukan yang ada (pasal 21 alinea 2 Reglemen Pemerintah, Lembaran Negara 1893 nomor 128) dihapuskan, dan sekolah-sekolah Bumiputera dinyatakan terbuka bagi semua anak Cina, dengan syarat-syarat sama seperti anak-anak Bumiputera;

- b. bagi yang mampu membayar uang sekolah yang ditetapkan untuk sekolah Eropa, didirikan sekolah menurut model sekolah Eropa, yang disebut Sekolah Cina Belanda (Hollandsch Chineesche School = H.C.S.) dan didirikan di tempat-tempat dimana ada sekolah-sekolah Tionghwa (T.H.H.K.).

Menurut pendapat Dewan Hindia Belanda:

- a. pendirian H.C.S. itu harus tergantung dari kebutuhan penduduk Cina. Adanya T.H.H.K. belum tentu terasa adanya kebutuhan akan pendidikan Eropa;
- b. anak-anak Cina dapat masuk sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1, dimana telah diajarkan bahasa Belanda. Di sekolah-sekolah kelas 1, dimana belum diajarkan bahasa Belanda, supaya segera diadakan;

- c. di tempat-tempat dimana tidak diragukan adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak Cina, seperti di Betawi, Semarang dan Surabaya, didirikan H.C.S.;
- d. di tempat-tempat dimana ada beberapa puluh penduduk Eropa dan beberapa ratus penduduk Cina, dapat dipertimbangkan untuk didirikan E.L.S. (Sekolah Rendah Eropa).

Diterimanya anak-anak Cina di E.L.S. dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya rasa tidak puas di kalangan penduduk Bumiputera, terutama di kalangan bangsawan dan tokoh terkemuka, karena dengan demikian anak Cina derajatnya disamakan dengan anak bangsawan.

Yang tidak mengkhawatirkannya, mengemukakan bahwa:

- a. kebutuhan penduduk Bumiputera telah dipenuhi dengan adanya sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1, dengan bahasa Belanda;
- b. bagi tamatan sekolah kelas 1, ada kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, dan diterima menjadi pegawai negeri.

Dalam nasihat Dewan Hindia Belanda tanggal 14 Juni 1907 nomor XII, atas usul dalam surat tanggal 12 Juni 1907 nomor 12271 dan 1228 disetujui perluasan sekolah-sekolah pendidikan pegawai negeri Bumiputera (pangreh praja = OSVIA) dan sekolah-sekolah guru (kweekschool), yang menerima tamatan sekolah kelas 1.

Jika di kemudian hari ternyata ada kebutuhan akan pendidikan model Eropa bagi anak-anak Bumiputera, akan dipenuhi oleh Pemerintah.

Untuk kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Cina ini diperkirakan perlu 42 H.C.S. dengan 126 guru Belanda dari berbagai tingkat. Direktur P.A.K. hanya memberi jalan, bagaimana menyelesaikan masalah pendidikan sesuai dengan tugas yang ditugaskan kepadanya. Terserah kepada Pemerintah sampai berapa jauh dapat melaksanakannya.

PEMBATASAN PEMASUKAN ORANG-ORANG BUMIPUTERA
KE SEKOLAH RENDAH EROPA (E.L.S.)

27. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)
tanggal 23 Januari 1907 nomor 80/214

Dalam surat ini Menteri mengharap Gubernur Jenderal mempertimbangkan dan menyampaikan pendapatnya mengenai masalah pembatasan masuknya murid-murid Bumiputera ke sekolah-sekolah rendah Eropa. Dengan sendirinya tidak dimaksudkan menolak sama sekali, juga di kemudian hari murid-murid Bumiputera harus diterima di sekolah rendah Eropa jika mereka cukup menguasai bahasa Belanda (Memori Jawaban Anggaran Belanja 1907 halaman 41).

Alasan-alasannya ialah:

1. Seringkali menerima keluhan mengenai kemunduran dan hambatan pendidikan di sekolah-sekolah rendah Eropa, karena terlalu banyak menerima murid Bumiputera.
 2. Sudah ada sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 dengan bahasa Belanda, dimana mereka mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Belanda.
 3. Pada pembicaraan anggaran belanja tahun yang berjalan ini beberapa kali ditunjukkan sebagai keuntungan, bahwa dengan diadakannya sekolah-sekolah kelas 1 dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sekolah-sekolah rendah Eropa akan lebih baik dilindungi terhadap membanjirnya murid Bumiputera.
28. Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) tanggal 4 Juni 1907 nomor 48

Di kalangan Bumiputera terkemuka sudah biasa untuk mengirimkan putera-puteranya pada usia masih sangat muda ke salah satu ibu kota, memondokkannya pada keluarga-keluarga Belanda beradab, untuk mendapat pendidikan Barat dan pendidikan persiapan yang sebaik mungkin untuk masuk "Hogere Burger School".

Keluarga-keluarga Belanda tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai peradaban dan kedudukan. Sekali anak-anak tersebut ditempatkan di salah satu ibu kota, maka mereka sepatutnya diterima di sekolah yang sebaik mungkin sesuai dengan kedudukan dan peradaban mereka, yaitu di sekolah yang dipilih oleh orang Eropa yang beradab dan berkedudukan.

Banyak Kepala Sekolah sedemikian bertindak semauanya untuk menolak anak-anak Bumiputera tersebut di atas, dengan dasar bunyi pasal 14 sub 3 Reglemen Sekolah Rendah Eropa: "anak-anak Belanda didahulukan, jangan ada yang ditolak karena terlalu banyak menerima murid Bumiputera".

Anak-anak Bumiputera seperti itu, yang kedudukan dan peradabannya lebih baik, dikalahkan dengan anak-anak yang dapat menamakan diri "Eropa". Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan para Bupati dan tokoh-tokoh Bumiputera terkemuka. Hal tersebut menimbulkan keheranan, karena sangat bertentangan dengan apa yang dianjurkan dan dijaminakan Pemerintah dalam tahun-tahun akhir ini. Selain itu menimbulkan kejengkelan, karena anaknya yang di kemudian hari akan ditempatkan di jabatan penting, mempunyai hak juga atas pendidikan yang sebaik mungkin seperti anak orang Eropa, tetapi ternyata dibelakangkan.

Ini dialami Hazeu sendiri, waktu mencoba memasukkan calon-calon ke sekolah rendah Eropa di Betawi. Pertama kali 2 adik Bupati Serang, kedua adik Bupati Purworejo, dan ketiga kali putera Bupati Purwakarta (Krawang) dan putera ajun jaksa Yogyakarta. Seorang diterima, seorang lagi diterima di sekolah lain dan yang lainnya sama sekali ditolak karena adanya anak-anak Belanda yang belum kebagian tempat.

Demi rasa keadilan dan demi politik yang bijaksana, ia menentang, bahwa anak-anak orang Bumiputera terkemuka dibelakangkan.

29. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 18 Oktober 1907 nomor 19427

Dengan surat ini dikemukakan data-data kenaikan jumlah murid Bumiputera di sekolah-sekolah Rendah Eropa mulai dari tahun 1887 sampai tahun 1906. Tambahnya murid Bumiputera makin meningkat selama tahun 1898-1905, dan paling tinggi selama tahun 1901-1905. Hal ini tentu ada hubungan sebab-akibat dari tindakan-tindakan yang diambil Pemerintah:

1. Dengan surat Keputusan Pemerintah tanggal 15 Januari 1896 nomor 8 jumlah murid Bumiputera yang dapat diterima di sekolah rendah Eropa tanpa bayaran dan tanpa pengetahuan bahasa Belanda paling tinggi 30 orang setiap tahun. Dengan surat Keputusan tanggal 26 Juli 1900 nomor 10, jumlah tersebut dinaikkan menjadi 80 orang setahun.

Kesempatan ini diarahkan untuk calon murid sekolah dokter Bumiputera. Dalam tahun 1875 bahasa Melayu sebagai bahasa Pengantar di sekolah dokter Jawa diganti dengan bahasa Belanda, dengan diadakan kelas-kelas persiapan. Hasilnya tidak memuaskan. Oleh karena itu sejak tahun 1890 diterima murid-murid tamatan sekolah rendah Eropa (E.L.S.) dan anak-anak Bumiputera walaupun tanpa pengetahuan bahasa Belanda. Tahun 1900 jumlah murid sekolah dokter Bumiputera yang diterima dinaikkan dari 100 menjadi 200, dan oleh sebab itu jumlah murid Bumiputera di sekolah Belanda dinaikkan dari 30 menjadi 80 setahun.

Calon murid sekolah dokter ini kebanyakan berasal dari lingkungan rakyat biasa dan kurang mampu.

2. Dengan surat keputusan tanggal 15 Oktober 1903 nomor 14 diterima di sekolah-sekolah rendah Eropa tanpa bayaran dan tanpa pengetahuan bahasa Belanda calon-calon murid sekolah pendidikan pegawai Bumiputera (pangreh praja) sebanyak 60 setahun. Murid-murid ini diambil dari lingkungan bangsawan, tokoh terkemuka dan mampu.

3. Dengan surat keputusan tanggal 14 Oktober 1903 nomor 16 (Lembaran Negara nomor 353) tarip uang sekolah diturunkan bagi murid Bumiputera, dan diberi kesempatan menerima murid tanpa bayaran bagi anak orang Bumiputera dengan gaji kurang dari f.50.-- sebulan.

Akibat dari keputusan-keputusan tersebut di atas, terlihat kenaikan penambahan murid Bumiputera di sekolah rendah Eropa dalam tahun-tahun 1904 dan 1905, dan sangat mundurnya mutu pelajaran di sekolah tersebut.

Beberapa Kepala Sekolah mempergunakan alinea 3 pasal 14 Reglemen Sekolah untuk membatasi masuknya murid Bumiputera. Tindakan ini menyebabkan Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) mengeluarkan surat edaran kepada para Residen tanggal 14 Juli 1904 nomor 12132 untuk mencegah tindakan tersebut. Salinan surat edaran disampaikan kepada para Kepala Sekolah Rendah Eropa untuk diindahkan.

Keluhan kemerosotan mutu pendidikan:

Dari tahun 1903-1905 datang banyak sekali keluhan dari para guru dan orang tua murid. Direktur P.A.K. (J.G. Pott) mengeluarkan surat edaran berupa angket kepada para Komisi Sekolah Rendah Eropa tanggal 28 September 1905 nomor 16110 dengan tujuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai pengaruh dari adanya murid-murid Bumiputera atas pendidikan sekolah rendah Eropa.

Pada waktu diadakan angket respondennya adalah 153 sekolah campuran dan 31 sekolah untuk gadis. Di 20 sekolah untuk gadis sama sekali tidak terdapat gadis Bumiputera dan di 11 sekolah lainnya dengan jumlah murid 677 hanya ada 36 gadis Bumiputera. Dari 153 sekolah campuran ada 27 sekolah kelas 1. Di 6 sekolah tidak ada murid Bumiputera, di 21 sekolah lainnya dengan jumlah murid 2936 terdapat 194 murid Bumiputera. Di 121 sekolah campuran lainnya jumlah muridnya 13011 hanya terdapat 3450 murid Bumiputera. Seditik sekali sekolah yang jumlah murid Bumiputeranya sampai 40-50%. Jawaban angket yang masuk dari 153 sekolah dengan jumlah murid 16624 diantaranya 3680 Bumiputera.

Dari pertanyaan angket yang penting ialah:

1. Pertanyaan nomor 6:

Apakah masuknya murid-murid Bumiputera telah mempunyai pengaruh (yang tidak baik) atas mutu pendidikan, atau diperkirakan pengaruh itu akan ada? Jika "ya" atas dasar apa?

2. Pertanyaan nomor 7:

Apakah masuknya murid-murid Bumiputera telah mempunyai pengaruh jelek atas pengetahuan bahasa Belanda di kalangan murid Eropa, terutama dalam percakapannya bahasa Belanda.

3. Pertanyaan nomor 8:

Apakah adanya murid-murid Bumiputera telah mempunyai pengaruh atas mutu pendidikan susila di sekolah itu, atau apakah pengaruh itu diperkirakan akan ada?

Jawaban dari 6 sekolah tidak diikutsertakan, karena:

- a. Di 3 sekolah jumlah murid Bumiputera kurang dari 10%;
- b. Di 3 sekolah jumlah murid Bumiputera antara 80-90% (Kutaraja, Amurang, Tondano).

Tinggal 115 sekolah, dan hasilnya sebagai berikut:

Pertanyaan 1: "ya" 78, "tidak" 33, "ragu-ragu" 3, "kosong" 1;

2: "ya" 64, "tidak" 44, "ragu-ragu" 5, "kosong" 2;

3: "ya" 33, "tidak" 73, "ragu-ragu" 5, "kosong" 4.

Hasil angket ini bertentangan dengan pikiran termuat dalam surat J.H. Abendanon tanggal 17 Januari 1901 nomor 776.

Mencabut 2 surat Keputusan Pemerintah tersebut di atas, tidak mungkin karena:

- a. STOVIA mengambil muridnya dari Sekolah Rendah Eropa;
- b. OSVIA dapat mengambil muridnya dari Sekolah Bumiputera kelas 1 dengan pendidikan bahasa Belanda (tetapi belum semua sekolah kelas 1 ada pendidikan bahasa Belanda, dan OSVIA belum mempunyai kelas-kelas persiapan).

Usul-usul untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam cara penerapan surat-surat keputusan tersebut di atas akan segera menyusul.

Sebagai kesimpulan, Direktur P.A.K. mengusulkan bahwa untuk selanjutnya Sekolah Rendah Eropa hanya terbuka bagi murid-murid Bumiputera yang patut diterima untuk calon murid STOVIA dan OSVIA, dan putera orang terkemuka yang mungkin akan meneruskan ke HBS (Hoogere Burger-School). Demikian pula sekolah kelas 1 juga harus terbuka bagi mereka.

Pada umumnya mereka mampu mengikuti pendidikan persiapan untuk menguasai bahasa Belanda, dan mampu membayar uang sekolah.

Sebagai kekecualian, dalam hal luar biasa putera bangsawan dapat diterima, tanpa pengetahuan bahasa Belanda (alinea 4-e, pasal 14 Reglemen Sekolah).

Mengenai surat Dr. Hazeu tanggal 4 Juni 1907 nomor 48 Direktur P.A.K. membantah bahwa:

1. Kepala Sekolah Rendah Eropa tidak bertindak semauanya sendiri, tetapi sesuai dengan peraturan, karena banyaknya permintaan calon murid Eropa, karena itu tidak dapat diberikan tempat bagi murid Bumiputera.
2. Jika Dr. Hazeu dapat membuktikan, bahwa anak yang ditolak itu harus diterima demi untuk kepentingan negara, ia dapat minta dispensasi dari peraturan pembatasan yang ada.
3. Anak-anak tersebut yang nantinya akan melanjutkan ke HBS, sepatutnya diterima di sekolah kelas 1, tetapi membicarakan hal itu adalah terlalu jauh.

Dalam konperensi gabungan antara para Inspektur Pendidikan Eropa dan Inspektur Pendidikan Bumiputera dalam bulan Pebruari 1907 dibicarakan tindakan-tindakan untuk membatasi masuknya murid Bumiputera ke sekolah rendah Eropa.

Pendapat-pendapat para Inspektur adalah sebagai berikut:

Para Inspektur Pendidikan Eropa (Semarang D.C.J. Kool, Betawi W.F. den Broeder, Surabaya H.W. de Vriendt) berpendapat bahwa:

1. Tingkat pendidikan dalam waktu 10 tahun akhir-akhir ini sangat merosot, dengan adanya murid-murid Bumiputera.

2. Ketentuan mengenai penerimaan murid tanpa bayaran dan juga pembayaran uang sekolah kategori 6 dan 7 bagi murid Bumiputera harus dicabut.
3. Jumlah murid Bumiputera dan Timur Asing di sekolah rendah Eropa harus ditetapkan persentase tertentu.

Para Inspektur Pendidikan Bumiputera berpendapat:

L.G.J. Bertsch (Yogyakarta):

Dalam tindakan pembatasan tersebut di atas tidak ada yang tidak adil. Masyarakat Bumiputera harus merasa puas bahwa calon murid STOVIA dan OSVIA dapat mengikuti pendidikan Eropa.

Uang sekolah untuk sekolah Eropa harus lebih tinggi daripada uang sekolah untuk sekolah kelas 1.

Inspektur H.Th.J. Uytterbroek (Probolinggo) berpendapat bahwa:

Harus diusahakan supaya anak-anak bangsawan dan orang terkemuka kembali masuk sekolah Bumiputera kelas 1, yang sekarang banyak di-liwati karena terlalu banyak menerima anak-anak rakyat biasa.

Inspektur G.J.F. Biegman (Bandung) percaya bahwa kejengkelan ada di kalangan bangsawan dan terkemuka Bumiputera, tetapi tidak ada dasarnya.

Ajun Inspektur Rd. Kamil menganggap cukup bahwa sekolah rendah Eropa terbuka bagi putera-putera Bupati, Patih dan Wedono.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, Direktur P.A.K. mengusulkan supaya:

1. Menarik kembali (mencabut) ketentuan yang mengatur tentang penerimaan murid tanpa bayaran dan tarip uang sekolah golongan 6 dan 7 dalam pasal 21 sub a Reglemen Sekolah, dengan ketentuan tidak berlaku bagi yang sudah jadi murid.
2. Murid-murid calon pelajar STOVIA dan OSVIA yang ternyata tidak akan mampu mengikuti pelajaran dikeluarkan.

3. Ditunjuk sekolah-sekolah Eropa yang tidak akan menerima lagi murid calon pelajar OSVIA, karena makin banyaknya sekolah Bumiputera kelas 1 dengan bahasa Belanda.
4. Ketentuan-ketentuan dalam kedua alinea pasal 14 Reglemen sekolah diterapkan betul-betul.

PENDIDIKAN RAKYAT

SEKOLAH-SEKOLAH DESA DAN SEKOLAH NEGERI

30. Surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tanggal 25 Juni 1908 nomor 1790

Dari pembicaraan-pembicaraan dalam rapat anggaran belanja tanggal 29 dan 30 Mei 1908 dapat diketahui, bahwa Pemerintah bermaksud dalam waktu dekat meninjau kembali kebijaksanaan mengenai pendidikan Bumiputera. Gubernur Jenderal berkeyakinan, bahwa sistem reorganisasi pendidikan Bumiputera seperti yang telah diterima dalam anggaran belanja 1907 - terutama mengenai perluasan sekolah-sekolah kelas 2 dengan langkah-langkah tersebut - tidak dapat dilanjutkan baik dari sudut pandangan keuangan maupun dari sudut pandangan prinsipil.

Direktur P.A.K. yang lama (J.G. Pott) dalam suratnya tanggal 30 April 1908 nomor 7205 telah mengemukakan keberatan-keberatan praktis.

Mengenai perubahan bagian ini dari politik pendidikan Bumiputera akan diadakan musyawarah dengan Pemerintah Belanda.

Dasar-dasar pendapat Wali Negara adalah sebagai berikut:

Dalam surat tanggal 20 Juni 1906 nomor XIX 840/1 Gubernur Jenderal menyetujui pendapat Dewan Hindia Belanda yang dimuat dalam nasehatnya tanggal 8 Juni 1906 nomor XIV mengenai laporan Jasper yang disampaikan Direktur P.A.K. (J.G. Pott) dengan suratnya tanggal 22 Mei 1906 nomor 8811.

1. Kebutuhan pendidikan bagi sebagian terbesar rakyat (rakyat jelata) yang terdiri dari petani, nelayan, pekerja tangan, dll. dapat dipenuhi dengan pendirian sekolah desa oleh desa sendiri. Sekolah-sekolah desa didirikan agak jauh dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta yang sejajar.
2. Sekolah pemerintah diperuntukkan bagi anak-anak, yang di kemudian hari ingin menjadi pegawai negeri atau mencari penghidupan dalam ketrampilan dan perdagangan.

Sekolah pemerintah didirikan di tempat dimana terdapat berbagai kelas penduduk, yang menganggap pendidikan di sekolah desa tidak cukup bagi anak-anaknya.

Jika di suatu tempat dirasakan ada kebutuhan akan pendidikan, penyelesaian ialah dengan menjawab pertanyaan dapatkah kebutuhan itu dicukupi dengan sekolah desa. Meskipun dengan pembatasan ini, perluasan sekolah pemerintah tetap perlu.

Dalam suratnya tanggal 28 Juni 1906 nomor 11288 Direktur P.A.K. (J.G. Pott) memperkirakan perluasan dengan 700 sekolah negeri untuk Jawa. Menurut Gubernur Jenderal, perluasan ini jika dibagi dalam beberapa tahun, tidak mengkhawatirkan keuangan negara, asalkan dengan demikian dapat dipenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih meluas di Jawa dan Madura.

Dari perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Belanda atas Memori Penjelasan Rencana Anggaran Belanja 1907 dari Menteri Jajahan (Fock), dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian Pemerintah Belanda mengenai pendidikan rakyat Bumiputera ialah bahwa pendidikan rakyat umum oleh sekolah-sekolah desa memegang peranan pokok dan perluasan sekolah negeri (sekolah kelas 2) memegang peranan sekunder.

Pendirian tersebut di atas sesuai dengan surat tanggal 2 Juni 1907 nomor 661/9 yang mengolah nasihat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 3 April 1907 nomor 1102.

Gubernur Jenderal, dengan dasar-dasar finansial dan prinsipial, menganggap sekarang sudah perlu membatasi pendirian sekolah kelas 2

pada yang paling perlu saja:

- a. Dalam tiap-tiap keresidenan hanya di tempat-tempat dimana di antara kelompok-kelompok sekolah desa dirasakan kebutuhan lembaga pendidikan standar untuk pendidikan yang lebih luas.
- b. Di pusat-pusat pemukiman dengan mengingat tingkat peradaban penduduknya perlu sekali didirikan sekolah kelas 2, dengan pembatasan bahwa jika di daerah itu sudah ada sekolah swasta yang se-jajar, tidak perlu dibangun.

Gubernur Jenderal mengharap Direktur P.A.K. segera menyampaikan:

1. pendapatnya tentang dasar-dasar pokok tersebut di atas;
2. data mengenai jumlah sekolah kelas 2 yang atas dasar-dasar pokok di atas perlu didirikan lagi di Jawa dan Madura;
3. cara-cara bagaimana melaksanakan rencana reorganisasi yang akan ditetapkan lebih lanjut mengingat syarat-syarat keuangan dan personil.

31. Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (S. de Graaff) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 18 Agustus 1908 nomor 2457

Gubernur Jenderal menugaskan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri untuk membuat ikhtisar umum dalam garis besar mengenai pendidikan desa Bumiputera di Jawa dan Madura.

Dalam suratnya tanggal 3 April 1908 nomor 1102 Direktur P.D.N. menyatakan perlunya ada hubungan yang sesuai dengan maksudnya antara lembaga pendidikan Bumiputera oleh Pemerintah dan sekolah desa yang akan didirikan oleh desa sendiri, untuk sedapat mungkin memperoleh hubungan sistematis dalam persekolahan Bumiputera pada umumnya.

Dalam sistem persekolahan Bumiputera ada 3 lembaga:

1. Sekolah kelas 1 dengan waktu belajar 6 tahun, sebagian di bawah pimpinan 2 orang guru Belanda untuk mengajar bahasa Belanda, makin banyak diperuntukkan bagi anak-anak Kepala Bumiputera dan orang-orang Bumiputera mampu, untuk di kemudian hari mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri.

2. Sekolah kelas 2 dengan waktu belajar 4 tahun dengan pendidikan dasar yang diperluas dalam bahasa daerah dan bahasa Melayu, didirikan di tempat, yang tingkatan peradabannya menuntut pendidikan yang lebih maju bagi anak-anaknya, untuk di kemudian hari mengikuti jejak orang tuanya menjadi saudagar, pedagang, pengrajin, dll.

Lembaga ini merupakan pula tempat pendidikan guru-guru desa.

Hal ini diutarakan pula dalam surat Direktur P.A.K. tanggal 3 Juli 1908 nomor 10393 yang dilampirkan pada surat Direktur PDN tanggal 18 Agustus 1908 nomor 2458.

3. Sekolah desa, yang didirikan oleh desa sendiri, hanya memberikan pendidikan dasar dalam bahasa daerah dan beberapa pelajaran yang sangat perlu bagi orang desa biasa.

Lembaga ketiga ini mengambil tempat yang terpenting, yaitu diperuntukkan untuk memberikan pengetahuan tertentu kepada sebagian terbesar anak-anak rakyat jelata yang sesungguhnya, yang akan terus hidup dalam kelas orang tuanya sebagai petani, nelayan, pekerja tangan, dll.

Mengenai sekolah kelas 1, jumlahnya relatif cukup kecil, hanya di ibukota kabupaten (asisten residen) yang penting.

Mengenai jumlah dan penyebaran sekolah-sekolah kelas 2 tergantung dari:

1. Kebutuhan akan pendidikan dasar yang lebih luas, di pusat perdagangan dan kerajinan.
2. Perluasan sekolah-sekolah desa di masa depan, karena:
 - a. guru-guru sekolah desa diperoleh dari murid-murid sekolah kelas 2;
 - b. pada waktu permulaan guru-guru sekolah kelas 2 akan diserahkan pengawasan atas sekolah-sekolah desa yang ada di sekelilingnya (surat Direktur P.A.K. tanggal 3 Juli 1908 nomor 10393).

Mengenai sekolah-sekolah desa:

1. Lama-kelamaan akan diperlukan beribu-ribu sekolah desa untuk dapat memberi tempat pendidikan bagi anak-anak rakyat biasa di Jawa dan Madura.
2. Tidak dapat diharapkan Pemerintah akan dapat membiayai pendidikan rakyat ini dari kas negara. Seperti di negara-negara lain harus ditangani sendiri oleh prakarsa setempat (desa).
3. Sebanyak mungkin desa harus membiayai pendidikan tersebut dari keuangannya sendiri, dan Pemerintah membatasi diri pada:
 - a. pengawasan umum atas sekolah-sekolah desa;
 - b. pendidikan guru-guru desa;
 - c. pemberian buku-buku dan alat-alat pelajaran lainnya dengan ketentuan: cuma-cuma bagi yang miskin dan dengan penggantian biaya pencetakan bagi yang mampu;
 - d. pemberian bantuan keuangan hanya diberikan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.
4. Perluasan sekolah-sekolah desa hanya dapat berjalan secara berangsur, sejajar dengan perkembangan keuangan desa.
 Pada akhirnya diperkirakan sekitar sepuluh ribu sekolah desa yang diperlukan di Jawa dan Madura, atau rata-rata 3 desa 1 sekolah desa.

Pengawasan sekolah desa:

Makin banyak bertambahnya jumlah sekolah desa, makin banyak dituntut pengawasannya dari Pusat.

Untuk sementara pimpinan umum dapat tetap diserahkan kepada Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk itu perlu diperbantukan seorang Inspektur pada Departemen PDN sebagai pengganti pegawai dengan pangkat Asisten Residen, yang sekarang disertai pengawasan umum. Makin meningkatnya jumlah sekolah dan kelompok sekolah maka petugas tersebut tidak akan mungkin mengadakan pemeriksaan di tiap sekolah desa satu atau dua kali setahun. Maka dari itu di bawah perintah Inspektur ini perlu diangkat 3 Ajun Inspektur untuk Jawa Barat, Tengah dan

Timur. Ini belum dapat menjamin intensitas pengawasan. Terhadap pendidikan desa, lebih dari pada cabang pendidikan lainnya, diperlukan tenaga inspeksi yang aktif, karena pendidikan personil pengajarnya sangat terbatas dan rasa tanggung jawab atas kewajibannya juga terbatas. Disamping 3 Ajun Inspektur tersebut dapat juga dipergunakan personil Bumiputera untuk inspeksi dengan pengetahuan sedang, asalkan personil itu mempunyai kecakapan praktis. Pada tiap keresidenan perlu diangkat seorang penilik kepala, untuk mengawasi penilik-penilik Bumiputera yang diangkat dalam keresidenan yaitu 1 penilik untuk 50 sekolah desa. Penilik-penilik ini diangkat dari korps guru pemerintah.

(Rancangan biaya pengeluaran untuk inspeksi yang diusulkan, dan biaya pendidikan rakyat di Jawa dan Madura).

Subsidi Pemerintah untuk pendidikan rakyat seluruh Jawa dan Madura direncanakan f. 1.000.000.-- setahun. Dari jumlah ini kira-kira f. 300.000.-- untuk tambahan penghasilan guru desa. Subsidi per sekolah rata-rata f. 100.-- setahun.

Pada permulaan mendirikan sekolah desa sering jumlah tersebut terpaksa dilampaui. Sering dijumpai keberatan karena prasangka-prasangka kepala desa dan penduduk desa, terutama dimana penduduk harus berkorban. Hal ini disebabkan, karena desa sendiri belum cukup perlengkapan keuangannya dan karena sarana-sarana ekonomi penduduk sangat terbatas.

Lembaga perkreditan Bumiputera, yang baru saja beberapa tahun yang lalu didirikan, belum sempat memberi pengaruh pada keadaan ekonomi penduduk desa. Malahan dalam periode pertama sering hanya memberikan beban.

Dimana di kalangan penduduk tidak kelihatan adanya perhatian spontan, maka harus ada pendekatan dan bantuan untuk menarik supaya penduduk mau kerja sama dalam melaksanakan pendidikan desa ini. Maka dari itu dalam permulaan pertama bantuan keuangan pemerintah sering melebihi jumlah termaktub dalam prinsip di atas.

Sebagian terbesar dari sekolah-sekolah desa yang didirikan dalam tahun 1907 mempunyai 40-150 murid, per sekolah. Kunjungan ke sekolah yang kurang itu disebabkan karena kurang cakupnya guru desa. Mereka untuk selanjutnya akan dipersiapkan lebih baik buat tugas mengajarnya dan akan diawasi oleh seorang ahli dengan teratur, sehingga dalam hal ini akan diharapkan adanya perbaikan.

Dalam hal lain cukup banyak bantuan dan kerja sama dari penduduk. Bantuan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah tidak lebih dari f. 50.-- dan untuk perkakas sekolah f. 25.-- per sekolah. Bangunan dibuat dari bahan-bahan setempat dan dengan dana bantuan setempat.

Sebagai penghasilan guru, desa memberi "Bengkok guru desa" dari sawah milik desa misalnya di kabupaten Cirebon dan Majalengka (keresidenan Cirebon), di kabupaten Kebumen (keresidenan Kedu) berkisar antara 2 sampai 9 bau tiap orang. Pemberian bengkok guru juga akan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang akan dibuka tahun 1909 di kabupaten Purworejo (keresidenan Kedu), di kabupaten-kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Blora (keresidenan Rembang). Di keresidenan Priangan, Kediri, Semarang dan Surabaya dipungut uang sekolah untuk gaji guru. Sedangkan di Pasuruan dipungut sumbangan-sumbangan untuk gaji guru. Di Banten desa tiap tahun membeli sawah untuk bengkok guru, sampai luasnya sawah cukup luas untuk gaji guru tanpa bantuan pemerintah.

Di mana penduduk telah membuktikan kesediaannya dan kesanggupannya untuk menanggung sebagian besar biaya pemeliharaan sekolah desa, dapat diharapkan, bahwa makin tampak hasil pendidikan sehingga sekolah dapat merebut tempat di desa, maka bantuan pemerintah selanjutnya dapat dihilangkan.

Mengenai pengaturan persekolahan desa, selama masih dalam stadium pertama percobaan, dalam praktek berulang kali diperoleh pengalaman-pengalaman baru, yang memerlukan perubahan-perubahan dalam garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga sering perlu diadakan penertiban baru untuk perbaikan pendidikan. Misalnya sudah terbukti perlunya mengadakan persyaratan yang lebih tinggi untuk mempersiapkan guru-guru desa. Baru sesudah berjalan beberapa tahun dan sudah cukup

banyak sekolah desa yang tersebar di berbagai daerah, maka organisasi persekolahan desa akan memperoleh bentuk yang lebih mantap, sehingga dapat ditetapkan Peraturan Organisasi Pendidikan desa yang tetap, dan juga akibat-akibat keuangan bagi pemerintah dapat diperkirakan lebih teliti.

Jika pelaksanaan pendidikan desa dilakukan secara berangsur-angsur, tidak perlu dikhawatirkan bahwa rencana subsidi f. 1.000.000.-- setahun akan dilampaui. Senantiasa perlu diingat, bahwa sekolah desa jangan sampai melebihi kebutuhan masyarakat Jawa dan jangan melebihi daya tahan ekonomi desa.

PENDIDIKAN EROPA (BARAT)
BAGI ORANG-ORANG BUMIPUTERA

32. Surat Menteri Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)
tanggal 3 September 1908 nomor 36/1967

Dr. H.C. Snouck Hurgronje, mahaguru Universitas Leiden yang diperbantukan pada Departemen Jajahan sebagai Penasihat Urusan Hindia Belanda dan Arab, melaporkan bahwa pemuda-pemuda Bumiputera yang ingin menerima pendidikan Eropa seperti yang dapat diperoleh di Hindia Belanda sering dihalang-halangi oleh pejabat-pejabat tinggi dan dikesalkan hatinya. Sebenarnya mereka harus memberi anjuran dan semangat. Pemuda-pemuda Bumiputera yang telah mendapat pendidikan Eropa di Hindia Belanda atau di Negeri Belanda tidak selalu diberi kedudukan yang sesuai dan cocok dengan pendidikannya, sehingga ada bahaya bahwa mereka akan kehilangan lagi pendidikan yang telah diperolehnya.

Menteri menganggap tidak perlu mengecek kebenaran laporan tersebut di atas dan tidak akan memberikan kritik kepada orang-orang tertentu. Hal-hal yang dilaporkan di atas bertentangan sama sekali dengan garis kebijaksanaan pemerintah. Perlu disadari oleh personil kepegawaian pandangan Pemerintah mengenai soal ini.

Singkatnya:

1. Pemuda-pemuda Bumiputera yang ingin menerima pendidikan Eropa supaya sebanyak mungkin diberi dorongan dan semangat.
2. Pemuda Bumiputera yang telah memperoleh pendidikan Eropa jangan ditempatkan di bawah pimpinan orang Eropa atau Bumiputera, yang akan berusaha sedapat mungkin untuk "membumiputerakan" mereka kembali. Karena pemuda-pemuda demikian masih merupakan kekecualian, pimpinan yang akan memerintah mereka harus dipilih dengan saksama.

Diharapkan bantuan Gubernur Jenderal untuk melaksanakan pendapat tersebut di atas dalam personil kepegawaian di Hindia Belanda.

33. Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 10 Agustus 1909 nomor 91, Sangat Rahasia

Untuk memenuhi surat Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal 29 Mei 1909 nomor 9865 ia memberikan nasihat dan pendapat sebagai berikut:

Surat kawat Menteri Jajahan tanggal 3 September 1908 Bg. Al nomor 36/1467 itu mengenai masalah yang sangat penting, karena berhubungan dengan rencana yang sejak lama dipertimbangkan untuk mengadakan perubahan-perubahan secara berangsur dalam praktek pemerintahan di Hindia Belanda, dalam arti bahwa lambat laun kepada para pegawai Pemerintah Bumiputera harus diberikan kebebasan dan tanggung jawab yang lebih tinggi, dan tugas para pegawai Pemerintah Eropa hanya terbatas pada pengawasan yang lebih tinggi. Untuk dapat sampai ke arah itu perlu sekali bahwa terhadap para pemuda Bumiputera yang ingin menerima pendidikan Eropa yang baik, atau yang setelah menerima pendidikan demikian datang melamar pekerjaan pada Pemerintahan Dalam Negeri harus diperlakukan seperti dimaksud dalam surat kawat Menteri Jajahan. Laporan Prof. Dr. Snouck Hurgronje membuktikan, bahwa keinginan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda

tidak selalu dipatuhi oleh pegawai-pegawai Eropa yang bersangkutan.

Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, yang diminta pertimbangan dan nasihat mengenai masalah penting ini, dalam suratnya tanggal 16 April 1909 nomor 1276, antara lain:

1. Tidak menyatakan benar atau tidaknya laporan tersebut di atas, tetapi hanya menyesalkan tidak disebutkannya nama-nama dan fakta-fakta dalam laporan tersebut.
2. Menganggap, bahwa berita-berita yang bersifat demikian dan datangnya dari pihak Bumiputera atau pihak lain tidak perlu dipercaya betul-betul, karena sering adanya maksud-maksud sampingan.
3. Menganggap juga tidak perlu memberikan surat perintah mengenai masalah ini kepada para Kepala Pemerintahan keresidenan.

Cara Direktur P.D.N. menyelesaikan masalah itu, menyebabkan Penasehat Urusan Bumiputera merasa perlu untuk meneropong masalahnya lebih dekat, serta memberikan beberapa laporan yang teliti dan terperinci, meskipun tidak dapat menyebutkan nama dan fakta. Laporan ini berdasarkan pengalaman dan pergaulan yang lama di kalangan pegawai Pemerintah Eropa.

Singkatnya adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan pegawai pemerintah Eropa masih sangat konservatif dan penuh prasangka terhadap orang Bumiputera.
Setelah bertahun-tahun bekerja, karena pengalaman dan kebiasaan mereka selalu menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang betul, dan mereka kebal terhadap perbincangan-perbincangan yang masuk akal.
2. Mereka menganggap, bahwa tidak ada pengajaran, pendidikan dan kemajuan yang dapat merubah sifat orang Bumiputera, dan bahwa mereka akan tetap tidak cakap untuk pekerjaan yang berdiri sendiri dan selalu memerlukan pengawasan ketat dan pembinaan terus

menerus dari pegawai Eropa. Jadi mengapa diberi pendidikan yang lebih tinggi.

3. Mereka menganggap, bahwa pendidikan yang lebih tinggi hanya akan menghasilkan pegawai Bumiputera, yang "mau menganut pendapatnya sendiri" dan "menyusahkan", sombong atas diploma yang diperolehnya, merasa tersinggung diserahi pekerjaan "magang" dan "juru tulis" dan ingin sekali segera menduduki jabatan yang lebih tinggi.
4. Banyak yang beranggapan, bahwa pemuda keluaran sekolah pendidikan pegawai Bumiputera (pangreh praja = OSVIA), sebagai pegawai bekerja kurang memuaskan dibandingkan dengan yang hanya berpendidikan dasar, tetapi terbentuk dalam cara yang teruji hanya melalui "sekolah belajar dari praktek".
5. Sehubungan dengan anggapan tersebut di atas banyak tamatan OSVIA diterima sebagai magang dan juru tulis.

Dr. Hazeu sangat heran, betapa mundurnya mereka setelah beberapa tahun bekerja sebagai magang dan juru tulis, sedangkan mereka dulu di sekolah murid-murid yang cakap.

Dapatkah para pegawai pemerintah Eropa, yang mempunyai anggapan-anggapan tersebut di atas, atas kemauan sendiri tanpa diberi peringatan berulang-ulang akan menjalankan apa yang dikehendaki dalam surat kawat Menteri Jajahan? Tidak mungkin.

Tetapi di antara para pegawai Pemerintah Eropa masih ada beberapa, yang sadar, melihat dan merasakan perlunya pendidikan lebih tinggi di kalangan orang-orang Bumiputera umumnya dan pegawai Bumiputera khususnya.

1. Kebanyakan pegawai Pemerintah Eropa sudah tidak lagi keberatan orang-orang Bumiputera menyekolahkan anaknya ke sekolah rendah Eropa.
2. Tetapi di antara mereka masih ada yang merasa kurang senang, jika ada orang tua Bumiputera ingin supaya anaknya melanjutkan sekolahnya ke Hoogere Burgerschool (HBS). Mereka sering menganjurkan,

supaya orang tua dalam rencana menyekolahkan anaknya jangan berlebihan, lebih baik anaknya disuruh menempuh ujian pegawai kecil (Klein Ambtenaars Examen) atau masuk Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera (OSVIA).

Banyak pegawai pemerintah Eropa pada umumnya tidak senang, bahwa anak-anak Bumiputera masuk HBS, KWS atau lembaga-lembaga semacam itu lainnya.

Dalam bulan Juli 1909 dibuka sekolah pendidikan ahli hukum Bumiputera (Rechtsschool). Dari pemuda-pemuda Bumiputera yang melamar masuk sekolah tersebut, sesungguhnya banyak yang cerdas tetapi pendidikannya telah dirusak, karena mulainya terlambat, tidak teratur dan terganggu. Dalam hal ini sesungguhnya pegawai Eropa dapat memberi pengaruh yang baik, dengan menunjukkan kepada orang tua perlunya memberi pendidikan pada usia yang masih muda, pendidikan yang berjalan teratur dan tidak terganggu.

Banyak pegawai pemerintah Eropa menganggapnya tidak perlu bahkan berbahaya, jika pemuda Bumiputera mengunjungi lembaga-lembaga dimana pegawai pemerintah Eropa dididik, misalnya di HBS, atau Gymnasium bagian B. Untung bagi mereka yang konservatif dan penuh kekhawatiran itu, karena diadakan ujian pegawai besar (Groot Ambtenaars Examen). Sementara kesempatan bagi pemuda Bumiputera untuk mencoba memberanikan diri memperoleh diploma yang sama seperti yang dimiliki pegawai pemerintah Eropa menjadi sedikit sekali.

Beberapa orang Bumiputera, yang mengunjungi Gymnasium bagian B itu, lebih banyak mengalami duka daripada suka, dan sering dilontari kritik atas usahanya yang terlalu berani itu.

Fakta-fakta mengenai pemuda Bumiputera setelah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan tidak diberi jabatan yang sesuai dengan pendidikannya dapat dilihat dari banyaknya tamatan OSVIA yang diharuskan bekerja beberapa tahun sebagai "magang" dan "juru tulis". Tamatan Sekolah Pertanian sesudah lulus OSVIA tidak diperlakukan semestinya. Setelah tamat dari Sekolah Pertanian mereka diangkat

menjadi Mantri Tani dengan gaji f. 50.-- sampai f.65.-- sebulan. Sesudah mereka belajar mempraktekkan pengetahuan teori yang diperolehnya di Sekolah Pertanian, mereka mulai kariernya dalam pemerintahan yang sesungguhnya. Dalam tahun-tahun pertama dari Sekolah Pertanian mereka lebih cepat mendapat kenaikan (promosi) dari pada yang hanya dari OSVIA. Tetapi segera ada perubahan, di beberapa keresidenan mereka sama sekali tidak dibedakan dari teman-temannya yang hanya dari OSVIA, malahan ada yang dikalahkan.

3. Pemuda Bumiputera yang telah lulus ujian "Groot Ambtenaars Examen" tidak diberi kedudukan sebagai Pegawai Pemerintah Eropa (aspiran kontrolir).
 - a. R.M.A. Koesoemo Joedo, lulus Groot Ambtenaars Examen di negeri Belanda tahun 1904, mula-mula diangkat sebagai aspiran-kontrolir tetapi tidak lama kemudian ditarik dari pemerintahan dalam negeri, dan diperbantukan pada Inspektur Perkreditan Bumiputera. Pemerintah yang berubah pandangan, memutuskan tidak lagi menerima orang Bumiputera dalam korps pegawai pemerintah Eropa.
 - b. M. Mohammad Achmad, sebagai lulusan Gymnasium Willem III Bag. B menempuh dan lulus Groot Ambtenaars examen tahun 1907. Ia ditempatkan di Perkreditan Bumiputera dan dalam tahun 1909 diangkat sebagai jaksa kepala di Serang.
 - c. R.M. Sayoga, lulus Groot Ambtenaars Examen di negeri Belanda tahun 1905, ditempatkan di Perkreditan Bumiputera dan kemudian diangkat sebagai Mantri Polisi.

Kedua pemuda Bumiputera tersebut mahasiswa yang cerdas dan ujian-ujianya sangat bagus.

Maka tertarik untuk dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah Eropa itu bukan semata-mata karena alasan-alasan keuangan, juga tidak semata-mata karena kedudukan pegawai pemerintah Eropa yang sangat dihormati. Bagi pemuda Bumiputera yang terdidik modern merupakan suatu bayangan yang mengerikan, untuk selama beberapa tahun memikul beban kepatuhan sebagai budak dan beban pekerjaan yang mematikan prakarsa. Inilah yang mempengaruhi pilihan mereka.

Dengan sendirinya timbul kecurigaan terhadap maksud-maksud pemerintah dalam hati para pemuda Bumiputera, perintis generasi baru, yang mendapat pendidikan Eropa yang baik, yang dengan rajin dan ulet telah dapat sampai ke tingkat pendidikan dari rata-rata pegawai pemerintah Eropa.

Jika Pemerintah mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh, untuk lambat-laun dapat memperoleh pegawai-pegawai pemerintah Bumiputera yang intelektual terdidik, yang dapat diserahi tanggung jawab yang lebih besar dan diberi kebebasan berdiri sendiri yang lebih banyak, maka:

1. Seluruh dunia kepegawaian Bumiputera perlu sekali diyakinkan tentang masalah tersebut di atas.
2. Pejabat tinggi pemerintah Eropa diyakinkan tentang perlunya:
 - a. menempatkan pemuda-pemuda Bumiputera yang terdidik modern dalam jabatan dan dengan gaji yang sesuai dengan pendidikannya yang lebih tinggi;
 - b. memberikan kepada mereka kebebasan tertentu (untuk berdiri sendiri) dengan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan kebebasan tersebut;
 - c. menempatkan mereka di bawah pimpinan yang mempunyai pandangan luas.
3. Pegawai pemerintah Eropa supaya dapat bertindak tanpa prasangka dan obyektif, tidak lagi memperlakukan mereka dengan cara yang tanpa sistem dan membangkitkan kecurigaan dan kedongkolan, dan jangan merendahkan mereka dengan menjadikannya "mesin ketik", "pelayan", atau "mandor".
4. Jika ada kesulitan-kesulitan yang bersifat praktis dan administratif, maka:
 - a. memberikan tempat kepada pemuda Bumiputera yang terdidik lebih baik, dimana ada kesempatan menarik manfaat sebanyak mungkin dari pengetahuannya yang lebih banyak, tanpa mengacaukan sistem pemerintahan;

- b. mengadakan pembagian tugas antara pegawai pemerintah Eropa dan Bumiputera yang terdidik baik dan harus segera dengan tegas dapat mengatasi serta jangan terus-menerus ragu-ragu dan mengemukakan keberatan-keberatan. Selain itu jangan merasa puas dengan tindakan-tindakan setengah-setengah, yang pada hakekatnya hanya menghindari kesulitan untuk memuaskan diri dan orang-orang lain untuk sementara waktu.

Banyak pemuda Bumiputera, yang tergolong intelektual dan dengan moril paling baik dan paling energik, makin lama makin menjauhi karier dalam pemerintahan, dan mencari jalan lain untuk memperoleh kehidupan yang bebas.

PENDIDIKAN RAKYAT DI DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA

PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI

34. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 23 Nopember 1908 nomor 17306

Dengan surat Sekretaris Pemerintah tanggal 7 Pebruari 1908 nomor 395, Direktur P.A.K. lama (J.G. Pott) diberi tugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat, termasuk usul-usul terumus, mengenai masalah termaktub dalam Bagian III paragraf 3 dari "Nota tentang kebijaksanaan politik dan urusan pemerintahan di jajahan luar Jawa dan Madura" yang disusun oleh H. Colijn, mengenai hal-hal yang termasuk bidang Departemen ini.

Dengan surat Pemerintah tanggal 4 April 1908 nomor 976, tugas ini untuk sementara waktu dibatasi pada Sumatera, terbatas khusus pada pendapat-pendapat dalam Nota tersebut di atas mengenai Pendidikan Pegawai Negeri dan pendidikan rakyat umum di pulau Sumatera.

Pendidikan Pegawai

Setuju dengan pendapat H. Colijn, bahwa menciptakan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pegawai yang layak merupakan tuntutan yang mutlak

di jajahan luar Jawa dan Madura. Menurut uraian yang termaktub di halaman 71 dan 72 dari Bagian III Nota tersebut di atas (lihat juga halaman 117 sub 3 dan 4), H. Colijn berpendapat, bahwa mengenai masalah tersebut di jajahan luar Jawa dan Madura, dan mengingat keadaan sekolah-sekolah rendah Bumiputera di sana, harus diatur sedemikian sehingga dapat bersambungan dengan sekolah negeri Bumiputera kelas 2. Mengenai pendidikan pengetahuan umum bagi murid tidak perlu melebihi daripada yang diberikan di sekolah-sekolah pendidikan guru Bumiputera. Pada umumnya H. Colijn menyetujui kombinasi pendidikan pegawai dengan pendidikan guru, kecuali di Sumatera. Menurut pendapatnya harus ada 3 sekolah pendidikan pegawai, masing-masing untuk Sumatera Utara, Tengah dan Selatan. Untuk sekarang kombinasi itu tidak mungkin, karena untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang terdidik Sekolah Pendidikan Guru di "Fort de Kock" (Bukittinggi) sudah ada pada kapasitas maksimal. Mengingat keadaan Keuangan Negara H. Colijn mengusulkan didirikan satu sekolah pendidikan pegawai Bumiputera di "Fort de Kock" (Bukittinggi).

(Apakah di Sumatera ada kebutuhan akan 3 Sekolah Pendidikan Pegawai perlu diselidiki lebih lanjut. Sekolah pendidikan guru di "Fort de Kock" yang direorganisir, dapat juga dipergunakan sebagai sekolah pendidikan pegawai. Sekolah pendidikan pendidikan pegawai untuk Sumatera Utara dapat didirikan di Medan).

Pendidikan Umum

Pikiran H. Colijn mengenai Pendidikan Umum yang termuat dalam halaman 73 s/d 78 Bagian III dari Notanya (lihat juga halaman 118 dan 119 sub 7 s/d 15) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pendidikan rendah Bumiputera harus dengan giat dimajukan juga di luar Jawa dan Madura, agar supaya dalam waktu tidak lama di sana akan dapat diperoleh pendidikan rakyat umum.

Pemisahan tajam perlu diadakan antara pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pengajaran setempat - meskipun hanya untuk

alasan-alasan keuangan - dengan pengertian bahwa Pemerintah hanya akan mendirikan sekolah-sekolah standar di pusat-pusat pemukiman yang dipilih dengan baik. Sekolah-sekolah standar ini diperuntukkan untuk putera Kepala-kepala dan orang-orang Bumiputera terkemuka, dan selanjutnya diperuntukkan untuk menghasilkan guru bagi pendidikan rakyat.

Di samping sekolah-sekolah standar harus dihidupkan pula sekolah-sekolah rakyat yang sangat sederhana dengan mengingat keadaan setempat, yang dalam prinsipnya tidak dibiayai dari Kas Negara. Sekolah-sekolah ini berada di bawah pengawasan penilik sekolah Bumiputera, yang diangkat dari guru-guru pemerintah yang terbaik.

Sekolah standar harus merupakan sekolah Bumiputera kelas 2. Di tiap-tiap kontroliran harus ada sekolah demikian. Ini berarti jumlah sekolah kelas 2 yang sudah ada di Sumatera harus ditambah dengan 40. Tindakan-tindakan harus diambil supaya dapat tersedia lebih banyak guru yang terdidik, hal mana dapat dilaksanakan dengan meninggikan kapasitas sekolah pendidikan guru di "Fort de Kock".

Harus diselidiki kontroliran (termasuk pula asisten keresidenan yang tidak terbagi) yang belum ada sekolah kelas 2, dan dimana yang harus dipenuhi lebih dahulu. Untuk itu Gubernur Jenderal diharap memerintahkan para Residen yang bersangkutan untuk mengajukan daftar nama-nama kontroliran yang belum mempunyai sekolah kelas 2, dengan urutan nomor urut dalam daftar yang perlu diberi lebih dahulu. Untuk ini para Residen harus bermusyawarah dengan Inspektur Pendidikan Bumiputera Bagian 4.

Setelah menerima daftar-daftar tersebut Departemen P.A.K. akan menyusun rencana pendirian sekolah-sekolah tersebut, dengan mengingat kapasitas produksi Sekolah Pendidikan Guru di "Fort de Kock" yang telah direorganisir itu. Setelah disetujui Pemerintah, dan dana yang diperlukan tiap tahun disediakan dalam Anggaran Belanja, maka rencana tersebut akan dijalankan secara berangsur-angsur.

Mengenai Pendidikan Rakyat

Dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 10 Juli 1908 nomor 14

telah dipenuhi untuk keresidenan Aceh dan daerah sekelilingnya (f. 10.000.-- untuk pendirian sekolah rakyat, dan alat-alat pelajaran diberikan cuma-cuma oleh Departemen P.A.K.). Para Residen lainnya diminta mengajukan usul-usul yang terurus, dengan mengingat keadaan yang luar biasa dan mendesak di tiap-tiap keresidenan. Sesuai dengan pendapat H. Colijn mengenai masalah ini tidak ada pengaturan yang seragam. Kepada para Residen dapat diberikan satu exemplar "Petunjuk Pendirian Sekolah-sekolah Desa di Jawa", kemungkinan dapat dicontoh. Keresidenan Aceh tidak dapat diambil contoh, karena meminta biaya banyak dari Kas Negara, dan ini demi kepentingan politik.

Usul-usul para Residen disertai dengan pertimbangan serta nasihat harus disampaikan kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan Kepala Kantor Departemen P.A.K. Seperti di Jawa, pimpinan umum mengenai masalah ini sementara dapat diserahkan kepada Direktur PDN, karena sekarang di Departemen PDN ada Biro Urusan Pemerintahan Jajahan Luar Jawa dan Madura (surat keputusan Pemerintah tanggal 22 Nopember 1908 nomor 19, dengan Kepala H. Colijn).

35. Surat Menteri Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 14 Pebruari 1909 nomor 34/311

Menteri Jajahan telah menulis di halaman 25 alinea 7 dari Memori Jawaban atas Laporan Sementara dari Kamar II mengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda tahun yang berjalan, bahwa ia akan mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pendirian sekolah-sekolah rakyat di Sumatera Barat menurut contoh sekolah mukim di Aceh dan sekolah desa di Jawa.

Sehubungan dengan itu Menteri mengharap Gubernur Jenderal segera memberikan pendapatnya mengenai masalah ini dan jawaban atas pertanyaan, apakah guru-guru atau kepala-kepala sekolah agama (surau) dapat dijadikan guru sekolah rakyat, meskipun diperlukan beberapa pendidikan pendahuluan, seperti pendapat van Kol (pembicaraan pada Majelis Rendah 1908/1909 halaman 438 kolom 2).

36. Surat Penasehat Urusan Jajahan Luar Jawa dan Madura (H. Colijn) kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (S. de Graaf) tanggal 24 April 1909 nomor 48

Menteri Jajahan menurut surat kawatnya tanggal 14 Pebruari 1909 Bagian Al nomor 34/311 mengharap pendapat Pemerintah Hindia Belanda mengenai:

- a. Pemikiran untuk mendirikan sekolah rakyat di Sumatera Barat menurut contoh sekolah mukim di Aceh dan sekolah desa di Jawa;
- b. Pertanyaan apakah dalam pengajaran rakyat para guru atau kepala sekolah agama (surau) dapat dipakai, meskipun dengan mengikuti beberapa pendidikan pendahuluan sebelumnya.

Mengenai ad. a

Menurut Colijn ada perbedaan prinsipil antara sekolah mukim di Aceh dan sekolah desa di Jawa:

1. Sekolah mukim pada hakekatnya sejenis sekolah Pemerintah yang murah, sedangkan sekolah desa di Jawa berdirinya atas kegiatan masyarakat setempat (desa) dan pada pokoknya dibiayai masyarakat sendiri.
2. Pengeluaran dari Pemerintah setahun untuk sekolah-sekolah desa di Jawa f. 70.366.-- diantaranya yang f. 54.631.-- untuk tambahan penghasilan guru-guru desa, untuk 357 sekolah dengan 20.721 murid, sehingga rata-rata f. 3.50 diantaranya yang f. 2.50 untuk tambahan gaji guru tiap murid tiap tahun.

Di masa depan pengeluaran Pemerintah untuk sekolah-sekolah desa makin berkurang. Pengeluaran Pemerintah untuk sekolah-sekolah mukim di Aceh f. 9.968,78 untuk 38 sekolah dengan 1266 murid atau lebih dari f. 7.-- tiap murid tiap tahun.

Pengeluaran Pemerintah makin lama makin besar, dan 3x lebih besar daripada untuk sekolah-sekolah desa di Jawa, serta jauh lebih besar daripada pengeluaran subsidi sekolah-sekolah swasta luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1895 nomor 146).

Kebutuhan akan pendidikan terbukti terutama di Tanah Tinggi Padang dengan didirikannya sekolah-sekolah atas prakarsa sendiri. Akhir

Desember 1907 ada 40 sekolah negeri Bumiputera dan 67 sekolah swasta, 30 bersubsidi dan 37 tidak, dan dikunjungi oleh 1848 murid, diantaranya 1722 murid membayar, sebagai bukti bahwa untuk pendidikan, penduduk mau mengeluarkan uang. Sekolah-sekolah ini sebagian besar didirikan dengan musyawarah antara Pemerintah dan penduduk.

Pendapat Gubernur Sumatera Barat mengenai pendidikan Bumiputera adalah sebagai berikut:

1. Perluasan jumlah sekolah perlu dan dianjurkan supaya penduduk menanggung sendiri sebagian besar dari biayanya.
2. Pendirian sekolah-sekolah desa yang dimaksud di atas harus keluar dari masyarakat sendiri, dan bahwa ada kemampuan tidak perlu disangsikan.

Sebelum menjawab Menteri, perlu sebelumnya diadakan musyawarah dan persetujuan dengan Gubernur Sumatera Barat, supaya dapat mengajukan usul-usul, dengan dilampiri program kerja, yang pasti dapat dilaksanakan dalam praktek.

Mengenai ad. b

Pendapat yang diajukan van Kol nampaknya dipengaruhi oleh uraian dari A.W.P. Verkerk Pistorias dalam bukunya "Ulama dengan pengaruhnya pada masyarakat", Bab VII dari bukunya "Studi tentang kerumaha-tanggaan Bumiputera di Tanahtinggi Padang" halaman 223/225. Pendapat Verkerk berdasarkan peninjauan dalam tahun 1865-1870.

H. Colijn tidak dapat menyetujui pendapat van Kol, karena:

1. Sekolah agama yang disebut surau, sesungguhnya tidak patut disebut sekolah, sebab:
 - a. dalam semua hal pengaturan dan pengajarannya sangat menyimpang dari syarat-syarat pengajaran menurut pengertian Eropa;
 - b. tidak ada tertib dan disiplin sekolah, tidak ada jam-jam pelajaran tertentu, tidak ada pengawasan mengikuti pelajaran atau tidak, tidak ada perhatian terhadap kemajuan murid, murid memutuskan sendiri apakah ia mau belajar atau tidak, dan waktu mana yang akan dipergunakan untuk menerima dan mengikuti pelajaran;

- c. murid-murid belajar dalam satu ruangan, tetapi tidak ada pengajaran klasikal, masing-masing hanya mengingat kemajuannya sendiri.
2. Murid-murid surau hanya belajar menulis dan membaca huruf Arab, membaca Al qur'an dan kitab-kitab keagamaan, tanpa diberi pengetahuan yang praktis.
 3. Guru-guru sekolah agama dengan pengetahuan sekolah dan pengetahuan umum yang minim, tidak mungkin dengan beberapa pendidikan sebelumnya dibentuk menjadi guru sekolah desa.
 4. Mereka sangat konservatif, fanatik agama, bersikap bermusuhan, dan curiga terhadap Pemerintah Belanda.
 5. Mereka tidak mau menerima apapun dari orang "kafir" dan karena sikap mereka dianggap "suci" oleh murid-muridnya, sehingga mereka tidak akan mau menjadi guru dibayar dan diawasi oleh orang kafir, meskipun sesungguhnya memerlukan uang itu, karena takut kehilangan reputasi mereka.
 6. Pengajaran negeri bersifat netral, dan tidak dapat diharapkan bahwa guru-guru agama yang fanatik dan picik itu akan dapat menerima pandangan Pemerintah.
- Diusulkan supaya usul van Kol ditolak.

PERLUASAN PENERIMAAN ORANG-ORANG BUMIPUTERA
DI SEKOLAH RENDAH EROPA - PERLUASAN
SEKOLAH BUMIPUTERA KELAS 1

37. Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tanggal 27 Januari 1909 nomor 17

Diungkapkan, bahwa didirikannya perkumpulan Jawa "Boedi Utomo" yang anggota-anggotanya mengadakan Konggres dalam bulan Oktober 1908,

cabang-cabangnya mengadakan pembicaraan dalam rapat-rapat terbuka di beberapa tempat, menarik perhatian lebih dari yang pernah ada sebelumnya pada keinginan yang dikandung oleh sebagian besar orang orang Bumiputera yang terdidik, terutama orang-orang Jawa.

Para pembicara, meskipun tidak berpengalaman, ragu-ragu dan saling berbeda pendapat, dalam satu hal mereka serempak mempunyai pikiran dan keyakinan yang pasti: "terutama mengingat pendidikan sebagai sarana mutlak untuk kemajuan ekonomis dan pertumbuhan rohani".

Hazeu tidak sependapat dengan sementara kalangan yang mengatakan, bahwa keinginan pendidikan ini hanya satu mode sementara yang akan berlalu dengan sendirinya. Ia menandakan, bahwa keinginan itu merupakan akibat yang wajar dari keadaan dan hubungan masyarakat yang dalam tahun-tahun akhir ini berubah dengan sangat cepat, tidak hanya di Jawa tetapi juga hampir di seluruh dunia Timur, yang membangkitkan energi yang selama ini tidur untuk mencari senjata yang paling cocok untuk dapat berhasil dalam perjuangan hidup, yaitu pengetahuan.

Di Nusantara (Hindia-Belanda) dalam keadaan sekarang pengetahuan dan kemajuan lebih banyak hanya dapat diperoleh dengan perantaraan bahasa Belanda. Kemampuan mengetahui dan mempergunakan bahasa Belanda merupakan syarat mutlak untuk:

1. Beberapa jabatan baik negeri maupun swasta yang menetapkan sebagai syarat penerimaan yaitu "lulus ujian pegawai rendah" (Klein Ambtenaars Examen).
2. Dapat diterima dan menamatkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Maju dengan belajar sendiri dengan mempergunakan buku-buku dalam bahasa Belanda.

Maka dari itu orang-orang Bumiputera, terutama di Jawa dan di kalangan terkemuka (yang disebut priyayi) berusaha dengan sekuat tenaga dengan pengorbanan uang yang tidak sedikit, supaya anak-anaknya dapat bersekolah dengan pelajaran bahasa Belanda. Karena masuknya ke Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) sangat dipersulit dan

jumlah sekolah Bumiputera kelas 1 masih sangat kurang, maka dimana sekolah sedemikian ada, mereka dengan prakarsa sendiri mengadakan sekolah swasta dengan rencana pelajaran yang diperluas dan dengan pelajaran bahasa Belanda, dengan guru-guru swasta yang bermutu sedang. Seringkali hasilnya tidak memadai pengorbanan uang. Satu-satunya kesulitan yang besar dari sekolah swasta ini ialah "kekurangan uang", sebab di Jawa, di kalangan masyarakat Bumiputera tidak ada unsur-unsur yang kuat keuangannya. Lagi pula gaji para pegawai (kecuali Bupati) rendah dan tidak mengijinkan untuk membiayai sekolah seluruhnya dari keuangan swasta.

Sekolah kelas 1 dengan bahasa Belanda (Lembaran Negara 1907 nomor 112) dapat diterima oleh kalangan Bumiputera, barangkali dengan rasa "terima kasih", tetapi pasti "tidak puas", sebab bahasa Belanda dimulai di kelas 3 dan 4 sebagai mata pelajaran dan di kelas 5 dan 6 sebagai bahasa pengantar, dan beberapa mata pelajaran misalnya berhitung ternyata kurang, sehingga sukar untuk dapat menempuh ujian Klein Ambt. naars Examen. Anak yang pindah ke E.L.S. meskipun cerdas (intelligen) sukar mengikuti pelajaran karena pengajaran bahasa Belandanya, terlambat diikuti secara metodis.

Bagi anak yang ingin melanjutkan ke H.B.S., K.W.S. dan Rechts-school harus masuk E.L.S., sedangkan masuknya ke sekolah itu bagi anak Bumiputera sangat dipersulit (lihat surat Penasehat Urusan Bumiputera kepada Direktur P.A.K. (J.G. Pott) tanggal 4 Juni 1907 nomor 48).

Kepala-kepala E.L.S. semena-mena mempergunakan pasal 14 Reglemen Sekolah (Lembaran Negara 1894 nomor 193 diubah dengan Lembaran Negara 1907 nomor 382).

Kepala-kepala E.L.S. mempersulit masuknya anak Bumiputera, sebab takut dimarahi Inspektur dan pendapat pribadi - yang banyak tidak benarnya - bahwa pengaruh anak-anak Bumiputera kurang baik terhadap anak-anak Eropa dan jalannya pengajaran menjadi tidak teratur. Mereka melaksanakan penolakan ini dengan sistem mereka masing-masing, dengan catatan:

- a. Hanya mau menerima sejumlah murid tertentu, yang mereka tentukan sendiri, bagi masing-masing kelas.
- b. Menentukan syarat-syarat terlalu berat bagi anak-anak Bumiputera dalam pengetahuan bahasa Belanda, tercantum dalam Pasal 14 Reglemen Sekolah.

c. Menurut pandangan dan pikiran sendiri yang ada pada saat itu.

Sedangkan para orang tua sudah banyak mengeluarkan uang untuk pelajaran privat atau pengajaran swasta bahasa Belanda, tahun ini mencoba di sekolah yang satu, kemudian di sekolah lain dan seterusnya, sehingga jika akhirnya dapat berhasil diterima, banyak waktu yang berharga sudah hilang, anak itu tertinggal dengan anak-anak yang masuk sekolah pada usia muda, sering sudah terlalu tua untuk dapat menempuh ujian masuk H.B.S.

Lebih-lebih para Bupati, memondokkan anak-anaknya pada usia sangat muda pada keluarga-keluarga Belanda yang beradab, terdidik dan berkelakuan, supaya anak itu dididik secara Belanda dan kemudian dapat menikmati pendidikan yang sebaik mungkin.

Dengan sendirinya penolakan-penolakan itu menimbulkan kedongkolan. Kongres Budi Utomo di Yogyakarta dalam prinsipnya menerima untuk mengusulkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, supaya:

- 1. Penerimaan anak-anak Bumiputera di E.L.S. jangan terlalu dipersulit.
- 2. Jika Pemerintah keberatan, supaya didirikan sekolah-sekolah seperti yang didirikan untuk anak-anak Cina (H.C.S.) dan diatur sedemikian, sehingga anak-anak kelas tertinggi setelah tamat sekolah dapat seketika melanjutkan pelajarannya ke sekolah-sekolah menengah.

Penasehat Urusan Bumiputera mengusulkan:

- 1. Supaya anak-anak Bupati dan priyayi lainnya, yang banyak kemungkinannya akan menduduki jabatan-jabatan penting di kemudian hari atau akan melanjutkan pelajarannya ke HBS, KWS dan Rechtsschool, dapat diterima di E.L.S. dengan memperlunak pasal 14 Reglemen Sekolah.

2. Jika dikhawatirkan sekolah akan terlalu padat, anak-anak yang sekiranya tidak akan cocok untuk sekolah menengah (HBS) setelah beberapa waktu tertentu dikeluarkan.
3. Di sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 bahasa Belanda mulai diajarkan di kelas 1, dan dipergunakan sebagai bahasa pengantar di semua kelas, dan rencana pelajaran diperluas, sehingga murid murid kelas tertinggi langsung dapat menempuh ujian K.A.E. (Klein Ambtenaars Examen).

Di kalangan Bumiputera yang terdidik hampir tiap hari dibicarakan hal-hal dalam bidang pendidikan - yang mendapat perhatian penuh dari apa yang disebut Jong Java - seperti: sekolah "fröbel" (di mana anak-anak secara bermain-main belajar bahasa Belanda), pendidikan untuk gadis, pendidikan pertukangan dan pendidikan pertanian, perluasan jumlah guru Bumiputera.

Dikemukakan pula adanya beberapa putri Bupati di Jawa Tengah, yang mendirikan sekolah-sekolah kecil, yang diajar oleh mereka sendiri dan di bawah pimpinan mereka diajarkan beberapa mata pelajaran sekolah rendah serta pekerjaan tangan wanita oleh pembantu-pembantu mereka (juga putri-putri priyayi). Ini merupakan sesuatu yang baru, yang beberapa tahun yang lalu tak terpikirkan, suatu bukti bahwa sepuluh tahun akhir-akhir ini membawa perubahan-perubahan yang penting dalam kebiasaan dan pikiran-pikiran kuno.

38. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 8 September 1910 nomor 1139/21

Dari salinan-salinan yang dilampirkan pada Laporan pos nomor 313, dapat diketahui bahwa sekarang di Hindia Belanda masalah mengenai masuknya anak-anak Bumiputera ke sekolah-sekolah rendah Belanda menjadi hangat lagi. Masalah ini telah dikemukakan oleh Gubernur Jenderal lama (van Heutz) dalam suratnya tanggal 12 Januari 1908 nomor 42/19 dan dalam kawat Menteri Jajahan ad interim waktu itu, tanggal 13 April 1908 Bagian A1 nomor 62/658.

Yang memprakarsainya adalah Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu), yang dalam dua suratnya kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tanggal 13 April dan 1 September 1909 nomor 58 dan nomor 96 mengusulkan, supaya keinginan-keinginan orang-orang Bumiputera umumnya dan kalangan priyayi khususnya dapat dipenuhi.

Setelah mempertimbangkan nasihat dari Inspektur Pendidikan Eropa ia mengusulkan supaya Reglemen Sekolah Eropa diubah dan supaya azas untuk mempermudah masuknya anak Bumiputera ke sekolah rendah Eropa dapat dilaksanakan.

Direktur P.A.K. (M.S. Koster) meskipun bukan pendukung perlunya penerimaan murid Bumiputera di Sekolah Rendah Eropa, berpendapat bahwa perlu diambil tindakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan orang-orang Bumiputera, yang sungguh-sungguh memerlukan pendidikan rendah Eropa bagi anak-anaknya. Bagaimana cara pelaksanaannya sehingga, tanpa merasakan kekurangan akibat masuknya murid-murid Bumiputera pada sekolah terlalu dirasakan, diuraikan dalam konsep surat keputusan perubahan Reglemen Sekolah Eropa (Lembaran Negara Hindia Belanda 1908 nomor 312) yang salinannya dilampirkan bersama surat ini.

Tujuan pokok dari peninjauan kembali Reglemen Sekolah ini ialah perubahan radikal dari pasal 14 Reglemen tersebut adalah mengingat di satu pihak: masuknya murid-murid Bumiputera dibatasi dengan menerima azas, bahwa sekolah rendah Eropa hanya terbuka bagi mereka:

- a. yang mengingat masa depannya di masyarakat - dengan mengingat kedudukan dan tingkat pendidikan orang tuanya dan juga bakat intelektual mereka sendiri - sangat memerlukan pendidikan yang diberikan sekolah itu;
- b. yang masuknya ke sekolah rendah Eropa itu disyaratkan untuk menghasilkan murid-murid yang baik bagi lembaga-lembaga pendidikan yang mempersiapkan tenaga untuk jabatan-jabatan pemerintah

bagi orang Bumiputera seperti sekolah pendidikan dokter Bumiputera (STOVIA) dan sekolah pendidikan ahli hukum Bumiputera (Rechtsschool).

Di pihak lain, bagi mereka yang dapat diterima atas dua dasar tersebut di atas, untuk kemungkinan dapat diperbaiki, diadakan kelas persiapan bagi mereka, dan batas umur untuk masuk kelas 1 diatur sedemikian sehingga mereka dapat duduk 2 tahun dalam kelas persiapan.

Dewan Hindia Belanda - yang prinsipil menyetujui M.S. Koster - menurut nasehatnya tanggal 12 Agustus 1910 nomor XXXIII (salinannya terlampir) tidak keberatan untuk diadakannya percobaan seperti diusulkan kepala Departemen tersebut. Dewan tidak yakin, bahwa penyelesaian yang diusulkan ini akan memuaskan.

Gubernur Jenderal berpendapat bahwa:

1. Pandangan Penasehat Urusan Bumiputera prinsipil lebih tepat dari pada pandangan Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan.
2. Pengurusan pendidikan bagi orang-orang Eropa relatif kurang penting dari pada pengurusan pendidikan rakyat di daerah ini pada umumnya, karena kepentingan mereka pada pemberian pendidikan baik yang sesuai - dipandang dari sudut Pemerintah - itu kecil dibandingkan dengan kebutuhan akan pendidikan seperti itu bagi penduduk Hindia Belanda lainnya yang begitu besar jumlahnya.
3. Jika terpaksa harus dipilih alternatif antara, sedapat mungkin mengikut-sertakan orang-orang Bumiputera dan Timur Asing pada pendidikan bukan Bumiputera sehingga harus dimajukan, atau pintu sekolah rendah Eropa harus ditutup bagi orang-orang Bumiputera, jika ternyata penerimaannya merugikan sekolah itu.

Gubernur Jenderal akan lebih condong memilih ad. a, dari pada penganak-emasan anak-anak Eropa. Jumlah biaya terlalu besar untuk tetap memelihara pendidikan demi kepentingan mereka, yang merugikan kemajuan dari bagian penduduk lainnya yang jauh lebih besar.

4. Sangat keberatan atas usul mengenai peraturan penerimaan murid Bumiputera di sekolah rendah Eropa, dan begitu pula sangat keberatan mengadakan percobaan dengan peraturan itu.

Mengingat pertanyaan yang mungkin ada dalam pembicaraan dalam Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda, maka Gubernur Jenderal merasa perlu segera menyampaikan pendapatnya dan cara bagaimana penyelesaiannya sementara dari masalah itu kepada Menteri Jajahan.

Kesempatan untuk belajar bahasa Belanda dengan baik, sesuai dengan usul Direktur P.A.K. (M.S. Koster) dapat dilaksanakan dengan cara lain, yaitu:

1. Mengubah sekolah Bumiputera kelas 1 yang direorganisir sesuai dengan usul-usul Direktur P.A.K.:
 - a. waktu belajar dari 6 dijadikan 7 tahun;
 - b. jumlah tenaga pengajar Eropa dari 2 jadi 3 orang;
 - c. menempatkan guru-guru Bumiputera, yang karena pendidikannya yang baru, diharapkan menguasai Bahasa Belanda dengan baik;
 - d. perubahan ini hanya di ibu-ibu kota keresidenan di Jawa dan Madura.

Usul Gubernur Jenderal ini didukung oleh Dewan Hindia Belanda.

Mengingat bahwa di masa depan akan dipakai jauh lebih banyak tenaga-tenaga kerja Bumiputera dalam fungsi-fungsi yang sekarang dipegang oleh orang-orang Eropa, maka perlu sekali untuk tepat pada waktunya mengadakan organisasi pendidikan Bumiputera dalam mata rantai tengah yang akan dapat memberikan cukup banyak tenaga terdidik untuk jabatan-jabatan administrasi tingkat rendahan.

Mengenai pendirian sekolah Belanda Jawa (H.J.S.) pelaksanaannya untuk sementara ditangguhkan.

PEMBERIAN SUBSIDI
KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPUTERA SWASTA

39. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 5 April 1910 nomor 352/14

Komisaris Pemerintah untuk desentralisasi dalam nasehatnya mengenai penetapan jumlah sumbangan dari Pemerintah Swapraja Ternate dan Tidore kepada Kas Negara sebagai restitusi pengeluaran Pemerintah untuk kepentingan langsung bagi daerah-daerah itu menegaskan bahwa pengeluaran untuk subsidi bagi pendidikan Bumiputera swasta sedapat mungkin ditetapkan dalam batas-batas restitusi yang mungkin diberikan, dan karena itu dalam pembicaraan-pembicaraan tentang permohonan-permohonan subsidi harus diperhitungkan dengan kemungkinan restitusi sedemikian.

Hal ini menyebabkan pertukaran pikiran yang panjang lebar antara Gubernur Jenderal Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan Dewan Hindia Belanda. Dalam pertukaran pikiran ini berbagai hal prinsipil mengenai pendidikan Bumiputera dibicarakan sedemikian rupa, sehingga titik tolaknya sendiri terdesak ke latar belakang. Akibatnya surat kawat Menteri Jajahan tanggal 5 April 1909 Bagian A1 nomor 17/579 mengenai pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah Bumiputera swasta dari Perkumpulan Zending Utrecht yang didirikan di Buru, Halmahera, dan Guinea Baru tidak terjawab, sehingga diperingatkan dengan kawat Menteri tanggal 4 Maret 1910 nomor 6.

Secara singkat pertukaran pikiran tersebut di atas disimpulkan dalam nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 15 Oktober 1909 no. XXX Gubernur Jenderal mengajukan kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dua pertanyaan:

1. Apakah hubungan Pemerintah terhadap pendidikan swasta mengizinkan, bahwa pemberian subsidi itu dibuat tergantung dari syarat restitusi.

2. Apakah Pemerintah dapat menganggap, bahwa tugasnya dalam mencukupi kebutuhan pendidikan di daerah swapraja lebih terbatas daripada di daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah.

Pertanyaan ad. 2 oleh M.S. Koster dijawab: "tidak", dan pertanyaan ad. 1 dijawab "ya" dengan pengertian, bahwa ia keberatan, jika dibuat menjadi kebiasaan bahwa subsidi di daerah swapraja tidak diberikan, kecuali jika ada restitusi.

Mengenai hal ini H. Colijn, Penasehat sementara Urusan Pemerintahan di jajahan luar Jawa dan Madura, memberi nasehat:

1. Sistem pemberian subsidi di luar Jawa dan Madura yang ada tidak boleh diteruskan, tetapi diubah dengan sistim baru.
2. Dalam sistim pemberian subsidi yang baru ini Pemerintah:
 - a. menetapkan di masing-masing wilayah, dimana ada persekutuan Zending bekerja, jumlah uang yang dapat disisihkan dalam periode tertentu bagi pendidikan rakyat di wilayah itu;
 - b. kemudian mengadakan persetujuan dengan persekutuan yang bersangkutan. Dalam persetujuan ini persekutuan yang bersangkutan menanggung kewajiban untuk mengurus pendidikan rakyat menurut beberapa azas umum dengan subsidi sampai jumlah yang ditentukan di atas, dihitung per-tahun.

Kepala Departemen P.A.K. (Koster) meskipun dalam beberapa hal dapat menyetujui pendapat H. Colijn, secara prinsipil keberatan terhadap sistem tersebut:

1. Sistim itu tidak dapat dipersatukan dengan pendirian netral dari Pemerintah, yang harus dipegang Pemerintah terhadap bermacam-macam kumpulan gereja.
2. Sebagai penyelesaian ia mengusulkan agar peraturan subsidi bagi daerah di luar Jawa dan Madura yang ada (Lembaran Negara 1895 nomor 146) - dengan masih tetap memiliki sifatnya yang fakultatif - diubah dan ditambah sedemikian rupa sehingga jika suatu persekutuan mendirikan sekolah-sekolah besar-besaran di suatu wilayah, maka Gubernur Jenderal menentukan jumlah uang maksimum bagi seluruh subsidi yang akan diberikan kepada persekutuan itu untuk wilayah tersebut.

Tentang surat kawat Menteri Jajahan tanggal 5 April 1909 Bagian A1 nomor 17/579, M.S. Koster memberi nasehat:

1. Untuk permohonan subsidi di Buru supaya dipergunakan Peraturan subsidi dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 dengan sedikit penambahan.
2. Untuk permohonan subsidi di Halmahera dan Guinea Baru (Irian Barat) supaya diadakan peraturan subsidi tersendiri, sama dengan yang telah ditetapkan untuk Borneo Selatan dan Borneo Timur.

Dalam nasehatnya tanggal 15 Oktober 1909 nomor XXX Dewan Hindia Belanda dalam prinsip dapat menyetujui usul-usul M.S. Koster.

Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tanggal 30 September 1909 nomor 3025 mengenai masalah kewajiban manakah yang harus dipenuhi Pemerintah sehubungan dengan mencukupi kebutuhan umum penduduk dari daerah-daerah swapraja.

Nasehat mengenai masalah, apakah Pemerintah yang terikat pada keharusan memperhatikan kenetralan dalam bidang Agama, akan boleh memaksa Pemerintah swapraja Islam untuk membayar restitusi atas biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk memberi subsidi pendidikan, yang bertujuan memajukan penyebaran agama Kristen, dimuat dalam surat-surat Direktur P.A.K. tanggal 26 Nopember 1909 nomor 19094, surat Dewan Hindia Belanda tanggal 25 Pebruari 1910 no.XXI dengan nasehat-nasehat tersendiri dari Wakil Ketua Dewan.

Pertanyaan tersebut dijawab "Tidak boleh" oleh sebagian besar anggota Dewan Hindia Belanda, dan "Boleh" oleh Koster dan van Rees.

Setelah mempertimbangkan nasehat di atas, Gubernur Jenderal menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai berikut:

- Pemerintah mempunyai kewajiban moril membawa rakyat Nusantara ke tingkat yang lebih tinggi materiil dan spirituul, dan salah satu dari banyak sarana ialah Pendidikan.
- Untuk melaksanakan sarana ini harus diperhitungkan kemampuan "personil" dan "finansil".
- Ada batas relatif sempit pada apa yang dapat dianggap kewajiban Pemerintah, begitu pula pada apa yang dapat (= jadi boleh)

dilakukan Pemerintah untuk membantu prakarsa swasta atau gereja di bidang pendidikan.

- Untuk Jawa dan Madura Pemerintah telah menerima tugas pendidikan rakyat - sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 dan kelas 2, dan di bawah pimpinannya sekolah-sekolah desa oleh organisasi Pemerintah yang lebih rendah. Tugas ini belum - dan masih lama dapatnya - diterima dengan betul-betul di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura, (kecuali di Minahasa, Ambon dan tanah Batak). Perbedaan yang sangat besar dalam keadaan sosial dan ekonomis, menyebabkan juga kebutuhan-kebutuhan di berbagai daerah berbeda-beda.
- Dapat dikatakan ada hak atas subsidi bagi pendidikan Bumiputera swasta, jika pengurusan pendidikan Bumiputera sudah dilaksanakan Pemerintah betul-betul sebagai kewajiban Pemerintah.
- Kepada sekolah-sekolah swasta Gereja yang mengambil-alih tugas - yang diterima Penguasa (baik dari Pemerintah atau Swapraja) - harus diberi hak atas subsidi, demi "kepentingan rakyat", sebagaimana disebut oleh H. Colijn dalam nasehatnya tanggal 27 Mei 1909 nomor 66.
- Persekutuan zending, yang menanggung pelaksanaan pendidikan, dapat bersambungan lebih baik dengan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan rakyat dari pada Pemerintah; tidak terikat pada peraturan-peraturan kenetralan, dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, dan selain dari itu dapat bekerja dengan biaya murah.
- Di mana pengurusan pendidikan sudah diakui dengan tegas dan/atau dilaksanakan betul-betul sebagai kewajiban Pemerintah dapat dipergunakan jasa-jasa yang dilaksanakan persekutuan tersebut terhadap pendidikan, maka persekutuan itu berhak diberi subsidi. Di mana Pemerintah tidak merasa terpanggil atau tidak sanggup mengurus pendidikan bagi penduduk Bumiputera di daerah itu maka mereka tidak dapat hak atas subsidi.
- "Sistem borongan" yang dianjurkan H. Colijn akan dapat membawa masalah yang sulit ini maju selangkah ke arah penyelesaian.

Sistim ini dapat dilaksanakan di luar Jawa dan Madura. Sistim Colijn ini mencegah, bahwa Pemerintah - karena tidak tahu atau tidak sadar - melakukan propaganda agama Islam di daerah-daerah yang mulai menuju ke agama Kristen. Sistim ini membuat pendidikan (edukasi) berjalan bergandengan dengan agama (religi).

- Dalam suratnya tanggal 3 Agustus 1909 nomor 11941 Direktur PAK memberi pandangan mengenai pikiran Colijn:
 - a. dasar sistim Colijn ialah "kepercayaan";
 - b. Pemerintah harus selalu mengetahui apa yang terjadi di bidang pendidikan di wilayah yang "diborongkan";
 - c. Pemerintah dapat minta jaminan, bahwa uang yang dikeluarkan dari Kas Negara sebagai subsidi juga sungguh-sungguh dipergunakan untuk pendidikan.
- Keberatan prinsipil dari Direktur P.A.K. dan Dewan Hindia Belanda tidak dapat disetujui.
 Tujuan pokok bagi persekutuan propaganda agama, mungkin propaganda untuk kepercayaan tertentu, dan bagi Pemerintah adalah pengurusan kepentingan pendidikan secara baik.
- Pemerintah Hindia Belanda, mewakili bangsa yang beragama Kristen, menganggap peng-Kristen-an Hindia Belanda suatu hal yang perlu, tetapi sebagai penguasa tidak dapat membeda-bedakan berbagai kepercayaan atau gereja dalam agama Kristen.
- Tidak keberatan, bahwa sistim Colijn dapat menyebabkan pendidikan di suatu wilayah dapat menjadi seluruhnya konvensional, karena orang-orang yang berpikiran dan beragama lain dapat juga mendirikan sekolah-sekolah, akan tetapi tidak dapat mendapat subsidi. Kenetralan mutlak hanya ada dalam teori, dalam praktek tidak ada. Sekolah negeri yang netral malahan jadi propaganda agama Islam.
- Zending ganda (zending Protestan dan missi Katholik) dapat dianggap belum ada.

Menurut pendapat Gubernur Jenderal, peraturan subsidi di Jawa juga harus diubah, karena:

a. Pada waktu peraturan tersebut direncanakan belum ada pendidikan rakyat Bumiputera (sekolah-sekolah desa), yang ada baru pendidikan rendah Bumiputera (sekolah Bumiputera kelas 1 dan kelas 2). Untuk pemberian subsidi diambil sekolah yang terendah, pada waktu itu sekolah Bumiputera kelas 2. Sekolah kelas 2 swasta Kristen yang memenuhi syarat diberi subsidi. Tak perlu dikhawatirkan bertambahnya sekolah-sekolah demikian akan berlebih-lebihan, karena 1/3 dari biaya ditanggung swasta.

b. Keadaan berubah, karena sekolah kelas 2 tidak lagi ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan rakyat pada umumnya, tetapi sekolah desa.

Pada pendidikan Bumiputera - termasuk sekolah-sekolah desa - prakarsa swasta dan Gereja harus didahulukan, tindakan Pemerintah hanya bersifat tambahan, meskipun sebagian terbesar sekolah-sekolah di Jawa dan Madura, termasuk sekolah desa, yaitu sekolah pemerintah.

Apa yang dilakukan Pemerintah terhadap sekolah desa yang didirikan oleh desa, harus dilakukan pula terhadap sekolah desa yang didirikan oleh Zending. Jika Zending dengan subsidi yang tidak akan ditambah dapat juga mendirikan sekolah-sekolah desa, hal itu pedagogis dan politis akan disambut dengan baik.

c. Sekolah Bumiputera kelas 2 sekarang jumlahnya dibatasi dan tempat-tempatnya ditentukan. Di daerah Zending jumlah sekolah kelas 2 juga tidak dapat dibiarkan tidak terbatas. Di sini diadakan musyawarah dengan Zending untuk menentukan tempat-tempat di mana akan didirikan sekolah oleh Zending dan di mana oleh Pemerintah. Zending didahulukan. Di mana prakarsa swasta tampak akan memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah jangan mendirikan sekolah, karena masih banyak pekerjaan bagi Pemerintah.

Ini juga berlaku bagi sekolah Bumiputera kelas 1 dan sekolah Belanda Cina (H.C.S.).

d. Untuk mengadakan perubahan peraturan subsidi di Jawa sebelumnya perlu diadakan musyawarah dengan persekutuan-persekutuan Zending. Ini berlaku juga bagi sekolah-sekolah pendidikan guru.

Mengenai masalah restitusi daerah-daerah swapraja Gubernur Jenderal memberikan pandangan sebagai berikut:

- Pemerintah berhak minta restitusi dari daerah swapraja atas pengeluaran yang telah dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk swapraja, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan. Hal ini juga berlaku bagi pengeluaran tidak langsung bagi pendidikan di daerah swapraja yang dilaksanakan oleh Zending, jadi juga untuk pemberian subsidi pendidikan Zending.
- Tidak ada keberatan untuk mengadakan syarat "subsidi diberikan, jika ada kemungkinan diterimanya restitusi dari daerah swapraja". Di daerah swapraja, dimana pengurusan pendidikan tidak betul-betul diterima Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah, pendidikan Zending tidak ada hak atas subsidi. Keberatan atas penolakan permohonan subsidi di daerah tersebut, berdasarkan tidak adanya kemungkinan restitusi dari swapraja, dapat dikesampingkan.
- Pemerintah mempunyai kebebasan untuk menganggap kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah swapraja lebih terbatas daripada di daerah yang diperintah secara langsung. Di daerah swapraja Pemerintah bukan penguasa langsung, melainkan bertindak sebagai wakil penguasa (dari Pemerintah Swapraja).

Gubernur Jenderal lebih lanjut memberikan pandangan-pandangannya mengenai masalah subsidi:

- Beberapa perubahan dalam Peraturan subsidi yang ada (Lembaran Negara 1895 nomor 146) dari "fakultatif" menjadi "imperatif" sama sekali tidak cocok dengan pandangan-pandangannya di atas.
- Kecuali dalam hal khusus yang luar biasa, disamping pemberian subsidi dengan cara "borongan" sistim Colijn, tidak dapat diberikan subsidi lagi bagi pendidikan swasta yang didirikan di daerah yang "diborongkan", baik netral maupun konvensional.

Sebagai penutup Gubernur Jenderal mohon kabar dari Menteri Jajahan:

1. Sampai sejauh mana pendapatnya dapat disetujui.
2. Jika dapat disetujui, siapa yang akan ditunjuk oleh berbagai persekutuan Zending itu untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Pemerintah untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan juga untuk Jawa dan Madura.
3. Sambil menunggu peninjauan umum menurut usul-usulnya mengadakan langkah-langkah berikut:
 - a. sesudah musyawarah dengan pengurus Perkumpulan Zending Utrecht mohon surat kuasa Sri Ratu untuk penambahan-penambahan Lembaran Negara 1895 nomor 146;
 - b. menetapkan peraturan subsidi khusus bagi pulau-pulau Halmahera dan Guinea Baru seperti diusulkan Direktur P.A.K. dalam suratnya tanggal 11 Agustus nomor 12382.

Gubernur Jenderal juga menyampaikan salinan surat Sekretaris Pemerintah kelas I tanggal 5 April 1910 nomor 785 mengenai usul mendirikan sekolah Bumiputera kelas 1 swasta, dan pemberian subsidi bagi sekolah-sekolah seperti itu.

40. Surat Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 17 Oktober 1910 nomor 3/1801

Menyusuli suratnya tanggal 6 September 1910 Bagian A1 nomor 51/1552, Menteri Jajahan memberitahukan bahwa pandangan-pandangan Gubernur Jenderal mengenai Pendidikan Bumiputera dalam suratnya tanggal 5 April 1910 nomor 352/14 dapat disetujui.

Menteri Jajahan dapat menyetujui, bahwa sesuai dengan sistim yang dianjurkan oleh H. Colijn, Penasehat Urusan Pemerintahan di luar Jawa dan Madura, di wilayah-wilayah Zending di luar Jawa dan Madura, pengurusan Pendidikan Bumiputera diserahkan kepada persekutuan Zending yang bekerja di wilayah itu untuk memajukan agama Kristen, dengan pembayaran uang yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal setiap kali untuk beberapa tahun tertentu.

Pemerintah harus senantiasa memegang pimpinan, tidak hanya mengenai biaya-biaya melainkan juga mengenai luas dan sifat pengajaran dan juga menjaga jangan sampai memberikan prioritas terus-menerus pada satu Gereja, korporasi atau perkumpulan tertentu.

Menteri Jajahan mengusulkan supaya sistim ini mulai diadakan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura, dimana Pemerintah belum melaksanakan pendidikan rakyat, tetapi sudah ada Zending.

- Ditetapkan jumlah uang yang dapat disediakan bagi pendidikan dengan memperhitungkan restitusi yang mungkin akan dapat diterima dari kas swapraja.
- Kemudian ditetapkan bagaimana menggunakan uang itu seperti:
 - a. berapa keperluan untuk mendirikan dan atau menyelenggarakan sekolah dari type sekolah negeri kelas 2 - dan sekolah kelas 1;
 - b. berapa keperluan untuk mendirikan sekolah-sekolah desa.
- Kemudian diadakan persetujuan dengan persekutuan Zending, yang bekerja di daerah itu dan sanggup melaksanakan dalam 5 tahun program pendidikan yang telah direncanakan Pemerintah, dengan menerima biaya yang telah disediakan. Jika ada dua persekutuan Zending di daerah itu, diadakan kontrak borongan dengan keduanya, dengan mengingat perbandingan luasnya pekerjaan masing-masing. Kontrak tidak boleh lebih dari 5 tahun.
- Sesudah 5 tahun persetujuan itu ditinjau kembali, dengan mengingat kepentingan persekutuan-persekutuan lainnya. Jangan ada prioritas kepada Gereja, korporasi, perkumpulan tertentu.
- Pengalaman di Jawa harus dipakai di daerah luar Jawa dan Madura, yaitu jumlah sekolah kelas 2 sangat terbatas karena banyak didirikan sekolah desa untuk pendidikan rakyat umum. Menurut laporan Residen Tapanuli dalam suratnya tanggal 22 Agustus 1908 nomor 3421 hasil yang diperoleh di sekolah Zending, di mana pendidikan rakyat diatur seperti sekolah negeri kelas 2, tidak memuaskan. Sekolah-sekolah Zending di luar Jawa dan Madura lambat laun harus direorganisir menurut contoh di Jawa.

- Bagi tiap-tiap kontrak borongan harus diperkirakan, apakah akan ada restitusi dari swapraja atau tidak, jika "ya", apakah restitusi dapat dipergunakan sepenuhnya.
- Dalam penetapan jumlah uang yang disediakan untuk masing-masing daerah dan penetapan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 Zending dapat diminta nasehatnya liwat para Residen.

Dalam nasehat H. Colijn tanggal 27 Mei 1909 nomor 66, biaya pendidikan rakyat di Jawa terutama ditanggung oleh desa-desa, sedangkan di luar Jawa dan Madura sebagian terbesar oleh Pemerintah. Dalam hal ini lambat laun harus juga ada perubahan. Perlu dimusyawarahkan dengan Zending, bagaimana mengusahakan supaya rakyat dapat ikut memberi sumbangan untuk biaya pendidikan rakyat.

Dengan diadakannya sistim borongan ini, Inspeksi Pendidikan Bumi-putera harus lebih banyak berhubungan dengan pendidikan rendah yang diselenggarakan oleh Zending, untuk memeriksa pelaksanaan program pengajaran yang setiap 5 tahun ditetapkan, dan sering mengadakan inspeksi, untuk meyakinkan apakah azas-azas yang diterima Pemerintah mengenai penyusunan dan sifat pendidikan dalam praktek dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Inspeksi-inspeksi ini supaya diadakan dengan sangat bijaksana, untuk tidak membahayakan hubungan antara Pemerintah dengan Zending.

Setuju Peraturan Subsidi di Jawa dan Madura (Lembaran Negara Hindia Belanda 1906 nomor 241) ditinjau kembali. Juga dapat menyetujui pendapat, bahwa di daerah-daerah Zending, jika Zending ingin mendirikan sekolah kelas 1 dan 2, Zending didahulukan. Juga harus dipertimbangkan, bagaimana harus bertindak, jika bagian penduduk yang beragama Islam memilih sekolah yang di tempat lain didirikan oleh desa.

Mengenai pendirian H.C.S. oleh Zending diharapkan supaya diadakan penyelidikan dahulu mengenai sebab-sebabnya perlu didirikan sekolah demikian.

Disebutkan beberapa nama persekutuan Zending yang ada di negeri Belanda yang bekerja di Hindia Belanda; nama-nama orang yang

akan dapat diajak musyawarah di Hindia Belanda akan segera disusulkan.

Dipertimbangkan untuk menyerahkan sekolah-sekolah rendah negeri di kepulauan Sangir dan Talaud dan di Minahasa kepada Zending.

PENDIDIKAN RAKYAT DI JAWA DAN MADURA

41. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 6 Agustus 1910 nomor 1002/6

Dengan menarik suratnya tanggal 13 April 1910 nomor 401/35 Gubernur Jenderal menyampaikan data-data yang disanggupkan akan disampaikan kepada Menteri sebelum pembicaraan Anggaran Belanja tahun 1911, yaitu data mengenai pendidikan desa tersebut dalam nota Inspektur Pendidikan Desa tanggal 16 Juni 1910 nomor 263.

Gubernur Jenderal, Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dapat menyetujui isi nota tersebut.

42. Nota Inspektur Pendidikan Desa (J.H. Ziesel) tanggal 16 Juni 1910 nomor 265

Dalam notanya tanggal 13 Maret 1910 nomor 25 Inspektur Pendidikan Desa mengemukakan pendapatnya, bahwa sangat tidak disetujui untuk mengadakan pendidikan desa secara besar-besaran - diperkirakan sepuluh ribu sekolah di Jawa dan Madura atau 1 sekolah tiap 3 desa - secara tergesa-gesa. Dikemukakan sebab-sebabnya antara lain sebagai berikut:

Mengadakan pendidikan rakyat secara besar-besaran dalam waktu pendek dengan beban pada desa-desa hanya dapat dilaksanakan dengan paksaan besar, dan di banyak daerah akan menimbulkan ketidakpuasan, yang akan merugikan popularitas sekolah desa.

Rencana umum dari organisasi pendidikan desa didasarkan pada azas, bahwa desa sebanyak mungkin harus membiayainya sendiri.

Maka dari itu pertama-tama harus dihindarkan semua yang dapat merugikan lembaga itu, dengan akibat bahwa Pemerintah harus memikul bagian biaya yang jauh lebih besar.

Di daerah-daerah, dimana penduduk belum dapat mendukung pendirian umum sekolah desa, maka sangat bijaksanalah bahwa dalam lingkungan kecil didirikan sekolah desa - meskipun dengan paksaan halus - untuk membuat penduduk lambat laun terbiasa dengan kerjanya lembaga baru ini.

Bahwa hal ini disadari oleh para pejabat Pemerintahan terbukti dari surat-surat Residen Banyumas tanggal 19 Januari 1909, Asisten Residen Mojokerto tanggal 21 September 1909 nomor 14/32, Kontrolir Kediri tanggal 18 Oktober 1909 nomor 1277/11, Asisten Residen Malang tanggal 5 Nopember 1909 nomor 81/6 dan Asisten Residen Bangil tanggal 2 Pebruari 1910 nomor 48/16.

Percobaan dipersiapkan dalam tahun 1906 dengan dikeluarkannya "Pedoman" yang disusun oleh Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) dan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, yang disetujui oleh Pemerintah. Percobaan dilaksanakan dalam tahun 1907 dimulai dengan 100 sekolah, dibagi dalam 6 asisten-keresidenan, dalam 4 keresidenan. Pada tahun 1908 ditambah dengan 200 sekolah, tahun 1909 dengan 450 sekolah, dan tahun 1911 akan ditambah dengan 550 sekolah.

Masalah tenaga pengajar.

Pendidikan guru desa tidak cukup hanya tamat sekolah Bumiputera kelas 2 ditambah lulus ujian guru desa. Jika hanya demikian, tingkat intelektuil penduduk desa tidak dapat ditingkatkan sehingga dapat membendung invasi Cina ke desa-desa.

Harus diadakan lembaga pendidikan guru desa di sekolah negeri di bawah pimpinan guru-guru yang berpengalaman. Selain tenaga yang dapat ditempatkan di lembaga pendidikan guru desa itu terbatas jumlahnya - agar supaya pendidikan di sekolah rendah Bumiputera tidak sangat terganggu - juga jumlah sekolah kelas 2 masih sangat kurang.

Jabatan guru desa tidak mempunyai harapan masa depan yang baik, sehingga pada waktu ada perluasan-perluasan di Jawatan Pegadai-an Negeri, pada Pendidikan Negeri, pada Perusahaan Kereta Api, pada Perusahaan Perkebunan, yang membuka harapan masa depan yang lebih baik, para lulusan sekolah kelas 2 sedikit sekali yang mau jadi guru desa, dengan kehidupan yang sangat sederhana dan terbatas.

Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (de Graaff) mengeluarkan surat edaran kepada para Residen tanggal 6 Januari 1909 nomor 51, di mana para Residen diminta, jangan mengangkat guru desa dalam jabatan negeri jika ia belum berdinias sebagai guru desa selama 5 (lima) tahun.

Dengan perluasan pendidikan Bumiputera maka kekurangan guru yang berasal dari sekolah pendidikan guru sangat terasa, sehingga tenaga Penilik untuk sekolah-sekolah desa ikut juga kekurangan.

Mengadakan pendidikan rakyat secara besar-besaran dalam waktu singkat akan membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan.

PENDIDIKAN PERTUKANGAN

43. Surat Inspektur Pendidikan Menengah (M.G. Hoekstra) kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tanggal 4 Agustus 1911 nomor 112

Sebagai akibat penelitian mengenai kebutuhan penduduk Bumiputera akan keperluan yang lebih baik dan luas ke arah pendidikan teknologi yang dilakukan oleh kontrolir Jasper dalam tahun 1906, maka dalam Anggaran Belanja Hindia Belanda untuk tahun 1907 diputuskan untuk mendirikan 3 sekolah pertukangan, 1 di Surabaya (Jawa Timur), 1 di Betawi (Jawa Barat), dan 1 di Semarang (Jawa Tengah). Biaya untuk masing-masing sekolah f. 100.000.-- sekaligus dan f. 37.000.-- tiap tahun.

Karena beberapa sebab sekolah pertukangan di Serabaya dan di Betawi baru dapat dibuka pada akhir tahun 1909, dan di Semarang dalam bulan Nopember tahun 1910.

Dalam Memori Penjelasan Rencana Anggaran Belanja Hindia Belanda tahun 1907 dikemukakan, bahwa dengan sekolah-sekolah ini bagi golongan penduduk Bumiputera status sosial-ekonomisnya akan dapat ditingkatkan. Peningkatan ini akan dapat dicapai, tidak hanya dengan pendirian sekolah-sekolah tersebut, tetapi juga dengan pemberian bantuan uang dan moril kepada para lulusan sekolah pertukangan, yang akan mendirikan tempat-tempat kerja sendiri atau secara koperatif. Selain itu dengan mempergunakan pendidikan yang diberikan di sekolah pertukangan untuk memajukan industri di kalangan penduduk, dengan mengkaitkan kepada masing-masing sekolah kursus-kursus pertukangan yang ambulan (mobil), yaitu bengkel-bengkel yang sesudah beberapa bulan ada di satu desa dapat dipindahkan ke desa lain. Diberikan pendidikan praktis dalam satu atau lebih mata pelajaran. Guru-gurunya diambilkan dari para lulusan sekolah pertukangan.

Apakah dua tujuan tersebut di atas akan dapat diwujudkan, sekarang belum perlu dipertimbangkan karena lulusan pertama di Surabaya dan di Betawi baru ada dalam pertengahan II tahun 1912, dan di Semarang pertengahan II tahun 1913. Selain itu para lulusan pada waktu meninggalkan sekolah hanya mempunyai kecakapan pertama dalam kejurannya, sehingga untuk pembentukan praktis memerlukan beberapa tahun bekerja di pabrik-pabrik industri dan di pekerjaan bangunan, sebelum mereka dapat melakukan usaha sendiri atau dapat dipercaya memberikan pengajaran.

Sekolah pertukangan merupakan sarana yang dilaksanakan untuk memajukan pertukangan Bumiputera dan sekolah pendidikan tukang Bumiputera bagi industri Pemerintah dan swasta.

Harapan kontrolir Jasper terbukti sangat optimistis, dari 502 calon yang dicatatnya, pada waktu pembukaan sekolah pertukangan di Surabaya yang datang hanya 64, dan yang tetap jadi murid hanya 44.

Keadaan murid sekolah pertukangan pada akhir Juni 1911, di Surabaya kelas I 40, dan kelas II 24 (dari kota Surabaya hanya 16), di Betawi kelas I 70, kelas II 44 (dari kota Betawi 19), di Semarang kelas I 48, belum ada kelas II (dari kota Semarang 29).

Tarif uang sekolah f. 0.50 tiap murid tiap bulan, dan ada yang cuma-cuma. Penarikan uang sekolah di Betawi dan Semarang tidak ada kesulitan, tetapi di Surabaya agak sukar.

Di ketiga sekolah tersebut selama waktu belajar 3 tahun diberikan pengajaran dalam pertukangan kayu dan pertukangan besi, dalam bidang pertukangan lainnya belum dirasakan kebutuhannya. Pada umumnya hasilnya baik, dan makin lama makin menjadi baik. Masa depan sekolah tidak suram.

Jika dalam tahun-tahun berikutnya, sesudah meninggalkan sekolah murid yang berijazah dapat segera mendapat pekerjaan, maka arus masuknya murid akan bertambah, dan hak hidup sekolah tersebut akan terbukti. Baru setelah itu ada alasan untuk mempertimbangkan apakah jumlah sekolah pertukangan perlu dan dapat ditambah.

44. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 8 Agustus 1911 no.12848

Beberapa bulan yang lalu Direktur P.A.K. menerima tugas lisan dari Gubernur Jenderal untuk mempertimbangkan apakah tidak mungkin mendirikan sejumlah sekolah pertukangan bagi orang Bumiputera di samping 3 sekolah pertukangan yang sudah ada. Dengan surat ini disampaikan surat Inspektur Pendidikan Menengah (M.G. Hoekstra) tanggal 4 Agustus 1911 nomor 112 mengenai pra-advis tentang masalah tersebut di atas. Sesuai dengan pra-advis tersebut Direktur P.A.K. mengusulkan supaya lebih dahulu menunggu hasil-hasil dari 3 sekolah pertukangan yang sudah ada sebelum mempertimbangkan untuk menambah sejumlah sekolah baru.

PENDIDIKAN UNTUK PERKEMBANGAN LEBIH LANJUT BAGI ORANG BUMIPUTERA
SEKOLAH BUMIPUTERA BELANDA (HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)

45. Nota Sekretariat Umum (tidak tertanggal)

I. Urusan Pendidikan

Dengan surat keputusan tanggal 11 Nopember 1910 nomor 14 diberikan kuasa untuk menambah kursus siang untuk bahasa Perancis pada Sekolah Cina Belanda (Hollandsch-Chineesche School), sehingga sekolah tersebut secara normal dapat bersambung pada MULO. Pertanyaan diajukan kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, apakah kepada Sekolah Bumiputera kelas 1 yang direorganisir juga tidak dapat diberikan kursus-kursus tambahan sedemikian supaya dapat bersambung pada MULO.

Direktur P.A.K. dalam suratnya tanggal 4 Januari 1911 nomor 167 memberi jawaban "Tidak dapat". Direktur P.A.K. (M.S. Koster) tetap pada pendiriannya dalam notanya bulan Oktober 1910 sebagai jawaban atas pidato Mr. Van Deventer tentang masalah pendidikan di Hindia Belanda, yang diucapkan di Museum Kolonial di Haarlem.

Pendirian Koster ialah menganggap waktunya belum tiba untuk mengadakan perubahan ke arah itu. Ia menolak tuduhan, bahwa dengan demikian kepada anak-anak Cina diberi lagi kesempatan yang lebih baik daripada kepada anak Bumiputera. Titik sambung antara Bumiputera kelas 1 dan kursus MULO, baik ke bawah maupun ke atas, belum dapat ditentukan, karena baik secara praktis maupun teoritis belum dapat ditentukan, sampai berapa jauh pengaturan dan kemajuan para lulusan sekolah Bumiputera 7 tahun tersebut. Di samping itu rencana pelajaran kursus MULO, juga dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan murid Bumiputera, belum mantap.

Banyak sekali unsur ketidak pastian memaksa mengadakan sikap menunggu.

Dari kalangan penduduk Bumiputera belum kelihatan ada kebutuhan akan pendidikan yang lebih tinggi.

Gubernur Jenderal - meskipun dengan rasa terpaksa - menyetujui masalah tersebut di atas untuk sementara ditangguhkan. Ia tetap menginginkan, supaya masalah tersebut dengan cara lain dapat dilaksanakan. Ia menugaskan Direktur P.A.K., supaya kepada siapa yang berhasil untuk mempersiapkan lulusan sekolah kelas 1 dengan kursus-kursus bebas menjadi murid MULO diberi premi. Meskipun berulang kali diperingatkan, dari Direktur P.A.K. belum diterima usul-usul.

Direktur Pertanian (H.J. Lovink) dalam suratnya tanggal 14 Oktober 1911 nomor 9356 mengemukakan bahwa MULO dapat dipergunakan sebagai pendidikan persiapan bagi Pemuda Bumiputera untuk mengikuti sekolah menengah pertanian, kehutanan, dan sekolah menengah dokter hewan. Selain itu mengusulkan supaya lulusan sekolah rendah Bumiputera 7 tahun diperkenankan masuk MULO. Bersamaan dengan itu menjelaskan pendidikan dan posisi teknis dari mereka yang telah lulus dari pendidikan ini agar diajukan dengan usul yang konkrit.

Dalam suratnya tanggal 6 Nopember 1911 nomor 18146 Pj. Direktur P.A.K. (E.A.E. Kalshoven) memberikan pula pendapatnya. Dua surat terakhir ini (dari Direktur Pertanian dan Direktur P.A.K.) minta putusan prinsipil yang penting, karena mengenai azas yang menyangkut masalah politis, materiil dan finansial.

Sebelum memberi putusan tersebut lebih dahulu diberikan pandangan umum:

- Bagian utama dari penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan Eropa dan Bumiputera, masing-masing mempunyai kebutuhan sendiri, dan dengan sendirinya pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan golongan penduduk tersebut. Maka dari itu ada pendidikan Eropa (Barat) dan pendidikan Bumiputera, yang hidup berdampingan, masing-masing dengan kehidupan dan tujuan sendiri. Tidak terdapat keseragaman dan kesatuan tujuan sebagai satu sistem umum.
- Pendidikan Eropa terdiri dari pendidikan rendah dan menengah menurut pembagian dalam undang-undang pendidikan di negeri Belanda dan merupakan suatu kesatuan pendidikan tersendiri. Organ-organ-nya menuju langsung ke tujuan akhir atau kemana mereka diarahkan.

Tidak ada titik hubungan dengan pendidikan Bumiputera atau bagian persiapannya (kecuali STOVIA dan Inlandse Rechtsschool).

- Pendidikan Bumiputera terdiri dari 3 lembaga, yang hidup berdampingan masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling bersambungan yaitu: sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, dan sekolah desa.

Lembaga-lembaga pendidikan Bumiputera tidak dapat mengarahkan murid-muridnya ke sekolah-sekolah khusus untuk pendidikan lebih tinggi. Tidak ada hubungan dan sambungan dengan pendidikan Eropa.

- Sekolah desa tidak ada sambungan dengan sekolah kelas 2. Sekolah-sekolah itu sementara memenuhi syarat-syarat pendidikan rakyat dalam arti sempit, dan menurut syarat-syarat itu telah melaksanakan tugasnya dengan memuaskan.

- Sekolah kelas 1, termasuk organ tingkat tertinggi dari pendidikan rendah Bumiputera, harus menuju ke tujuan akhir tertentu yaitu ke kehidupan yang praktis atau ke sekolah persiapan untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam bentuknya yang terbaru yaitu 7 tahun dengan bahasa Belanda, sekolah kelas 1 dapat membawa murid-muridnya ke tingkat ijazah pegawai rendah (Klein Ambtenaars Diploma), jadi ke tujuan akhir yang praktis. Lain dari pada itu dapat langsung bersambungan pada sekolah pendidikan guru dan tidak langsung pada OSVIA (masuk ke bagian Persiapan). Namun demikian sekolah tersebut belum bersambungan dengan Inlandse Rechtsschool dan STOVIA, dan juga belum bersambungan pada MULO (sekolah menengah pertama).

Organisasi pendidikan Bumiputera sangat kurang efisien, karena masing-masing sekolah menengah Bumiputera mempunyai kursus persiapan sendiri untuk mengisi kekurangan-kekurangan. Di samping itu tidak ada "onderbouw" yang umum, sehingga tidak dapat dibangun "bovenbouw" (bangunan atas) umum yang organis terikat.

Tidak pula memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan dengan demikian menimbulkan kekacauan, karena anak-anak Bumiputera terpaksa ke sekolah Eropa yang tidak diperuntukkan bagi mereka, juga dalam hal-hal yang sesungguhnya anak Bumiputera dapat memperoleh kesempatan melalui pendidikan Bumiputera.

Karena kurang effisiensinya itu, organisasi pendidikan Bumiputera membawa kesulitan bagi Pemerintah, karena tidak boleh menentang hasrat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi bagi anak Bumiputera. Pemerintah seharusnya menganjurkannya dan memberikan bantuan, tetapi demi untuk kepentingan Sekolah Eropa dan juga untuk kepentingan murid Bumiputera sendiri tidak dapat membuka pintu Sekolah Eropa bagi mereka semua. Timbul pula kesulitan bagi orang tua Bumiputera sendiri, karena untuk menyekolahkan anaknya ke STOVIA harus memasukkan anaknya ke sekolah rendah Eropa, dan sesudah tamat harus masuk ke bagian persiapan STOVIA. Untuk menyekolahkan ke OSVIA cukup dari sekolah kelas 1 dan kemudian beberapa tahun di bagian persiapan OSVIA. Oleh karena itu orang tua berusaha seawal mungkin supaya anaknya dapat diterima di sekolah rendah Eropa. Kesulitan yang dihadapi orang tua Bumiputera yang anaknya akan bersekolah di Sekolah Rendah Eropa ialah ketidak pastian mengenai dapat diterima atau tidaknya, dan jika diterima dengan pengorbanan uang yang tidak sedikit. Selain itu terdapat ketidak pastian setelah tamat dan mengenai masa depan anaknya, apakah dapat mengatasi persaingan dengan orang Eropa.

Sering pula efek dari semua jerih payah dan pengorbanannya tidak seimbang dengan hasilnya.

Tidak akan berguna memperluas kesempatan bagi orang Bumiputera untuk menduduki posisi dalam masyarakat yang lebih baik, jika sarana-sarana untuk secara berangsur-angsur menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk posisi itu tidak diberikan.

Dua puluh tahun akhir-akhir ini telah banyak membawa perubahan besar, dan tidak diragukan bahwa keadaan dan hubungan dalam waktu dekat akan berubah dengan lebih cepat. Di kalangan penduduk Bumiputera telah bangkit kesadaran untuk mencapai pendidikan intelektual yang lebih tinggi. Kebangkitan ini sangat menggembirakan, tetapi juga sangat mengkhawatirkan, karena dorongan hasrat maju itu tidak hanya idil untuk lebih tahu, lebih mengerti dan lebih bisa, tetapi juga untuk merebut tempat sejajar dengan orang Eropa.

Politik yang bijaksana tidak menunggu sampai tuntutan-tuntutan kebutuhan dinyatakan, tetapi melihat jauh ke depan dan tepat pada waktunya mengadakan perubahan. Perubahan dalam pendidikan jalannya sangat lambat. Jika sampai kebutuhan itu dinyatakan, sudah terlambat untuk memperbaiki apa yang selama itu dialpakan. Kesulitan-kesulitan dalam lembaga pendidikan rendah Bumiputera tertinggi (sekolah kelas 1) selain yang diuraikan di atas ialah pendidikan Bahasa Belanda. Kursus-kursus persiapan diadakan untuk mengisi kekurangan, terutama bahasa Belanda. Kursus persiapan itu selain dipandang dari sudut organisasi tidak baik, juga jumlahnya kurang, sifatnya eksklusif dan merupakan hanya tambal sulam. Pengajaran bahasa Belanda di sekolah kelas 1 (7 tahun) harus ditinggikan sehingga mencapai tujuan akhir seperti sekolah rendah Eropa.

Apakah sekolah Bumiputera kelas 1 tidak dapat diubah dijadikan sekolah rendah Eropa?

Ini tidak mungkin, karena bahasa Belanda dapat diperluas dan lebih banyak dipergunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi tidak boleh dilupakan pengajaran bahasa-bahasa daerah, meskipun di pendidikan yang lebih tinggi pengajaran lanjutan bahasa-bahasa daerah tidak diperlukan lagi (kecuali di Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera).

Sistim pendidikan di mana murid dibuat asing terhadap bahasa daerahnya sendiri tidak dapat disetujui.

Di Gymnasium bagian B. Sekolah Willem III diberikan pengajaran bahasa-bahasa daerah, meskipun demikian tetap merupakan organ pendidikan Eropa. Di sini ada titik pertemuan antara pendidikan Eropa dengan pendidikan Bumiputera. Apakah yang dapat jadi mata rantai sambungan antara sekolah Bumiputera kelas 1 dengan sekolah menengah kejuruan, apakah Hogere Burger School atau MULO.

Hogere Burger School tidak mungkin, karena jumlahnya sangat terbatas, dan mengingat persyaratannya jika diperluas jumlahnya -- meskipun dalam batas tertentu -- akan sangat mahal.

Rencana pelajaran dan pengaturannya menurut undang-undang pendidikan di negeri Belanda serta diatur menurut model dan bagian-bagiannya disesuaikan dengan HBS di Belanda, selain itu dimaksudkan bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda.

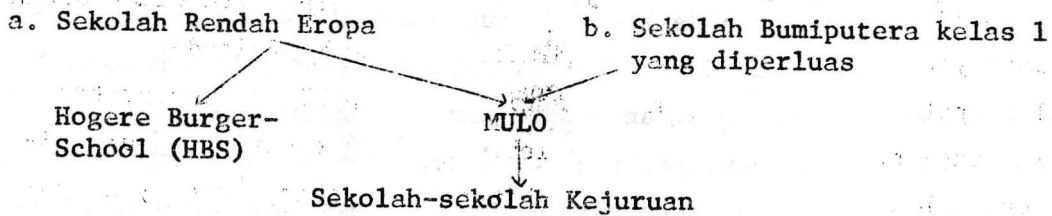
Terdapat banyak keberatan pedagogis terhadap HBS dan keberatan ini bagi murid Bumiputera akan lebih dirasakan daripada murid Eropa. Bagi murid Bumiputera bimbingan merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan.

MULO lebih tepat dijadikan basis bagi titik peralihan yang dikehendaki, karena merupakan organ dari pendidikan rendah, dan dari sudut pandangan pedagogis dapat lebih baik menyesuaikan dengan sistim sekolah Bumiputera kelas 1 karena rencana pelajaran sangat flexible, karena tidak harus patuh kepada syarat-syarat lain, kecuali yang harus ditentukan di Hindia Belanda sendiri. Dapat didirikan di banyak tempat tanpa banyak keberatan personil maupun finansial. Selain itu pada syarat-syarat pengangkatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu ditetapkan harus memiliki diploma MULO. Selain itu membuka berbagai jalan keluar bagi murid. MULO mempunyai sambungan ke bawah pada sekolah rendah Eropa dan sekolah Bumiputera kelas 1 dan sambungan ke atas pada sekolah kejuruan.

Sekolah Bumiputera kelas 1 harus bersambungan pada MULO supaya orang Bumiputera dapat ikut juga menduduki jabatan-jabatan tersebut di atas. Hal ini juga merupakan penyelesaian masalah apakah orang Eropa dapat diterima di sekolah kejuruan yang diperuntukkan bagi orang Bumiputera.

Setelah pertemuan dari Pendidikan Bumiputera dan Pendidikan Eropa telah terjadi pada MULO, maka akan dapat diletakkan basis untuk persamaan hak dari murid-murid Bumiputera dan Eropa, dan akan berguna sekali bagi kepentingan politik yang sangat besar. Jika MULO sudah meliputi banyak segi, maka sebagian dari arus masuk ke HBS akan dapat disimpangkan ke MULO. Secara skematis organisasi

tersebut di muka dapat digambarkan sebagai berikut:



II. Apakah mungkin mengadakan sambungan organis dari sekolah Bumiputera kelas 1 dengan MULO dan dari MULO dengan Sekolah-sekolah Kejuruan Bumiputera?

Pertama-tama yang harus dikerjakan ialah mengubah rencana pelajaran sekolah Bumiputera kelas 1 dengan 7 tahun. Yang harus ditambah ialah:

1. Bahasa Belanda (tamatan kelas 7 bahasa Belandanya belum mencapai tingkatan untuk dapat diterima langsung di kelas 1 MULO). Bahasa Belanda harus ditingkatkan pengajarannya.
2. Sejarah (tidak diberikan di sekolah ini, sedangkan di MULO sejarah Hindia Belanda, Belanda, dan Dunia diberikan). Sejarah harus diajarkan.
3. Ilmu Bumi (hanya ilmu Bumi Jawa dan ikhtisar Hindia Belanda, sedangkan di MULO diajarkan Ilmu Bumi negara Belanda dan Benua-benua). Pengajaran Ilmu Bumi harus ditambah.
4. Bahasa Perancis (sama sekali tidak diajarkan).

Menurut pendapat seorang ahli, sekolah Bumiputera kelas 1 harus ditambah 1 tahun lagi dengan kelas 8, untuk penambahan pengajaran bahasa Belanda, dan pengajarannya diawalkan mulai dari kelas 1 atau kelas 2. Menurut pendapat Dr. Snouck Hurgronje dan Dr. Hazeu, jumlah jam pelajaran untuk bahasa-bahasa daerah dapat dikurangi, dan dipergunakan untuk mata pelajaran Sejarah dan Ilmu Bumi.

Bahasa Perancis dapat diajarkan di kursus siang hari pada MULO sendiri yang diadakan bagi murid berasal dari HCS dan ELS yang tidak berkesempatan belajar bahasa Perancis.

Kedua: Apakah rencana pelajaran MULO tidak dipertimbangkan untuk diubah?

Oleh Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dijawab, bahwa belum dapat memberikan keputusan, karena harus menunggu lulusan pertama kursus MULO 3 tahun, baru dalam tahun 1913. Perlu diubah sedikit, dengan menjadikan bahasa Perancis mata pelajaran fakultatif.

Dengan adanya MULO maka bagian persiapan dari sekolah-sekolah kejuruan Bumiputera yang ada dapat dihapus secara berangsur-angsur dan dapat direncanakan pembukaan sekolah-sekolah kejuruan baru. Rencana reorganisasi pendidikan tersebut memerlukan penambahan personil Eropa tidak sedikit. Untuk tenaga pengajar yang berwewenang mengajar ilmu pengetahuan alam dan kimia perlu diadakan akte-tambahan, dengan pemberian tunjangan. Sebelum ada cukup guru para pengajarnya diambilkan dari orang-orang di luar bidang pendidikan. Pertanyaan dikemukakan, apakah lembaga pendidikan yang diusulkan Direktur Pertanian (H. Lovink) terbuka hanya bagi orang Bumiputera atau juga bagi orang Eropa?

MULO dibuka bagi golongan Bumiputera dan bagi Eropa, keduanya mempunyai hak yang sama dan jalan keluar yang sama, sehingga Bumiputera dan Eropa dapat menempuh jalan yang sama. Lembaga-lembaga yang direncanakan H. Lovink dengan demikian terbuka bagi keduanya.

46. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 4 Mei 1912 nomor 528/30

Dengan surat ini disampaikan salinan surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tanggal 4 Januari 1912 nomor 17 dengan lampiran Notanya. Pandangan dan nasehat Direktur P.A.K. (Dr. Hazeu) mengenai masalah sambungan sekolah Bumiputera kelas I dengan MULO dan MULO dengan sekolah-sekolah kejuruan, sehingga sistim yang sekarang ada dengan bagian persiapan dapat dihapuskan, termuat dalam suratnya tanggal 17 Pebruari 1912 nomor 2600. Salinan surat ini disampaikan pula kepada Menteri Jajahan.

Dr. Hazeu menganggap perlu sekali untuk segera memperluas pendidikan lebih tinggi bagi orang-orang Bumiputera - dan jika terdapat terlalu banyak keberatan - menurut garis dalam Nota Sekretaris Pemerintah tersebut di atas.

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 21 Pebruari 1912 nomor 403 Dewan Hindia Belanda diminta memberikan pendapat dan nasehat mengenai masalah tersebut. Dalam nasehatnya tanggal 29 April 1912 nomor 1 sebagian besar dari anggota Dewan Hindia Belanda menyetujui rencana reorganisasi pendidikan Bumiputera menurut kebijaksanaan dalam Nota, kecuali dua anggota J.G. Pott dan Ebbink.

Dengan ini disampaikan salinan surat nasehat Dewan Hindia Belanda serta nasehat tersendiri dari kedua anggota Dewan yang tidak dapat menyetujuinya.

Menurut Gubernur Jenderal keberatan kedua anggota tersebut disebabkan karena kurang memahami isi kebijaksanaan dalam Nota tentang perubahan pendidikan Bumiputera. Pada akhir Desember 1911 terdapat kira-kira 13.000 lulusan sekolah Bumiputera kelas 1, dan karena sekolah ini tidak ada tujuan akhir yang memuaskan, maka jumlah anak sedemikian banyaknya itu harus ke mana, dan perlu mendapat perhatian Pemerintah.

Kesalahan besar dari pengaturan pendidikan Bumiputera sekarang ini ialah tidak adanya organisasi yang baik dan rasionil.

Kekhawatiran Ebbink, bahwa perubahan pendidikan Bumiputera akan mengakibatkan "ploreariat intellektuël" sama sekali tidak beralasan. Perusahaan-perusahaan dagang dan industri swasta lebih suka memilih tenaga kerja yang dididik di Eropa, karena pendidikan bagi orang Bumiputera di Hindia Belanda dalam keadaan serba kurang. Perbaikan pendidikan Bumiputera akan membawa akibat yang baik. Permintaan di pasaran tenaga kerja begitu besar, sehingga pemuda Bumiputera yang terdidik baik akan dapat memperoleh penghidupan yang layak. Yang lebih mengkhawatirkan ialah bahaya dari golongan orang yang tidak puas, jika tidak tepat pada waktunya diusahakan, supaya pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan yang praktis. Sekarang dalam hal ini masih banyak kekurangan, sehingga

banyak yang terpaksa memasuki Sekolah Eropa. Hal ini tetap tidak dapat disetujui, karena sekolah Eropa harus memenuhi syarat-syarat Eropa khusus, sehingga di sekolah ini tidak ada kebebasan untuk memperhitungkan keadaan dan syarat-syarat Hindia Belanda.

MULO memang merupakan organ pendidikan Eropa, tetapi dalam Nota sudah dijelaskan bahwa tujuannya ialah membuat MULO menjadi sekolah Hindia Belanda yang khas, yang akan memberikan pendidikan dengan tujuan akhir mereka, baik Bumiputera maupun Eropa, yang ingin menempuh jalan lain daripada sekolah menengah (HBS). Dalam rencana perubahan pendidikan Bumiputera yang menjadi dasar ialah idee pemersatuan (unifikasi) dan persamaan hak untuk menghilangkan dualisme.

Pertanyaan yang dikemukakan oleh Dewan Hindia Belanda apakah MULO akan dapat mengganti bagian persiapan dari sekolah kejuruan yang ada, akan dijawab oleh praktek di kemudian hari. Jika MULO yang direorganisir telah dapat menghasilkan lulusannya dan langsung diterima masuk di sekolah kejuruan, bagian persiapan tersebut dapat mulai dihilangkan secara berangsur.

Atas dasar prinsip mau menghilangkan bagian persiapan maka usul Dewan Hindia Belanda untuk mengadakan bagian persiapan pada MULO tidak dapat diterima. Diusulkan supaya sekolah Bumiputera kelas 1 dengan 7 kelas dan pengajaran bahasa Belanda dimulai di kelas 1 ditambah lagi dengan kelas 8.

Sebagai tindakan sementara, sebelum kelas 8 itu secara umum dapat diadakan pada semua sekolah Bumiputera kelas 1 dan pengajaran bahasa Belanda dimulai di kelas 1, maka pada MULO dapat diadakan kelas persiapan.

Usul-usul terperinci belum dapat diajukan dalam rancangan Anggaran Belanja tahun 1913, karena belum ada penelitian yang harus diadakan sebelumnya. Terlebih dahulu disampaikan garis-garis besar dari rencana perubahan itu dengan pengharapan Menteri Jajahan dapat menyetujuinya, dan jika demikian supaya dikemukakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, arah mana yang akan ditempuh Pemerintah.

Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan akan ditugaskan untuk menyelesaikan selanjutnya mengenai masalah ini dengan memperhitungkan pendapat Gubernur Jenderal dalam surat tanggal 4 Mei 1912 nomor 528/30 tanpa menunggu sampai diterimanya pendapat Menteri Jajahan.

47. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 3 Juli 1912 nomor 10561

Membalas surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 24 Mei 1912 nomor 1118, Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengemukakan bahwa akan dimulai mengajarkan bahasa Belanda lebih awal (mulai kelas 1) dan memperluas pengajaran bahasa Belanda pada sekolah Bumiputera kelas 1 - terlepas dari masalah rencana perubahan pendidikan Bumiputera - merupakan tuntutan zaman, dan merupakan satu syarat yang penting sekali untuk meninggikan kembali popularitas sekolah kelas 1 di kalangan masyarakat Bumiputera, sebab popularitas itu sekarang sangat menurun.

Masalah tersebut dapat dipisahkan dengan mudah dari rencana perubahan pendidikan lanjutan bagi Bumiputera, dan tidak akan banyak menjumpai keberatan.

Para Inspektur Pendidikan Bumiputera dengan surat tanggal 4 Maret 1912 nomor 3526 telah diminta pendapat dan nasehat mengenai masalah tersebut di atas.

Nasehat para Inspektur bersama ini disampaikan surat aslinya.

Setelah mempelajari dengan cermat semua kesukaran yang diajukan, maka Direktur P.A.K. sampai pada keyakinan, bahwa keberatan itu - sejauh beralasan - tidak akan dapat mengimbangi keuntungan yang akan diharapkan dari pengajaran bahasa Belanda lebih awal. Diusulkan supaya bahasa Belanda mulai diajarkan di kelas 1 - meskipun secara terbatas - dan dapat dilaksanakan mulai tahun pelajaran 1912/1913 sesudah liburan Puasa.

Perubahan rencana pelajaran sekolah Bumiputera kelas 1 untuk sementara hanya di 3 kelas terendah dan berlaku sampai tahun 1914. Dalam tahun 1914 reorganisasi pendidikan Bumiputera pada azasnya telah selesai dan sudah ada keputusan tentang dapat atau tidaknya sekolah Bumiputera kelas 1 ditambah dengan kelas 8. Perubahan rencana pelajaran isinya telah diatur sedemikian, sehingga keputusan mengenai kelas 8 tidak akan mempengaruhinya. Pelaksanaannya apakah dapat di luar Pemerintah Pusat serta pembuat undang-undang Anggaran Belanja di negeri Belanda atau tidak, dan jika dapat maka pengajaran bahasa Belanda di kelas 1 dapat dimulai tahun ajaran 1912 ini juga. Kepala Departemen P.A.K. sendiri yang menetapkan perubahan rencana pelajaran, dan perubahan ini tidak akan mengakibatkan penambahan personil.

Direktur P.A.K. mohon perhatian Gubernur Jenderal atas beberapa konsekwensi dari tindakan tersebut yang termasuk kompetensi Pemerintah Pusat di negeri Belanda.

Perluasan pengajaran bahasa Belanda pada sekolah Bumiputera kelas 1 akan sedemikian rupa, sehingga sekolah tersebut memiliki lebih banyak sifat Belanda dan membawa akibat yang logis yaitu bahwa Pasal 2 dari Surat Keputusan Ratu dalam Lembaran Negara 1893 nomor 125 harus dirubah. Pimpinan sekolah harus pindah dari tangan guru Bumiputera ke tangan guru Eropa. Perubahan type sekolah harus dinyatakan dalam nama sekolah, sehingga nama harus diganti dengan *Hollandse Inlandse School (H.I.S.)* dengan perubahan pasal 1 dari Surat Keputusan Ratu tersebut di atas. Sekolah H.I.S. yang akan datang ini akan ditempatkan di bawah Inspeksi Sekolah Eropa, yang akan mengakibatkan perluasan personil Inspeksi tersebut, dan ini hanya mungkin dengan kerja sama pembuat undang-undang Anggaran Belanja.

Pada waktunya usul-usul yang bersangkutan akan dimajukan kepada Gubernur Jenderal.

Diharapkan supaya Gubernur Jenderal segera mengadakan pembicaraan dengan Menteri Jajahan, supaya Pemerintah tidak merasa

dihadapkan pada suatu "fait a compli". Karena perubahan rencana pelajaran itu akan mengakibatkan banyak pemindahan personil, maka sebaiknya pertukaran pikiran dengan Menteri Jajahan itu dilakukan dengan surat-surat kawat.

Mengajarkan bahasa Belanda lebih awal mulai kelas 1 pada sekolah Bumiputera kelas 1 dapat dilaksanakan tanpa penambahan personil dengan mengikut sertakan guru-guru Bumiputera yang berbahasa Belanda dalam mata-mata pelajaran dengan pengantar bahasa Belanda - bukan pelajaran bahasa Belanda (tata bahasa dan percakapan bahasa Belanda). Jika ini tidak diperkenankan, pengajaran bahasa Belanda mulai kelas 1 tidak dapat dilaksanakan mulai tahun ajaran 1912/1913, karena untuk perluasan personil Eropa harus ada kerja sama dengan pembuat undang-undang Anggaran Belanja, dan hal tersebut akan terbentur pada kekurangan tenaga pengajar Eropa. Jumlah guru Bumiputera berbahasa Belanda yang dapat tersedia kira-kira ada 80, terhitung yang lulus di 3 sekolah pendidikan guru di Jawa (Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo) tahun 1911 dan yang akan lulus dalam tahun 1912. Mereka mendapat pengajaran bahasa Belanda ada yang 4½ tahun dan ada yang 5½ tahun, dan sepanjang mereka dididik menurut pasal 4 Lembaran Negara 1912 nomor 240, kecakapan mereka untuk mengajar dalam bahasa Belanda akan bertambah. Dengan memakai tenaga pengajar Bumiputera tersebut di atas maka rencana pelajaran baru dapat segera (dalam tahun 1912) dilaksanakan di kebanyakan - bahkan mungkin di hampir semua Sekolah Bumiputera kelas 1 dengan 7 tahun di Jawa dan Madura, dengan ketentuan bahwa di sekolah-sekolah yang kurang penting harus menunggu sampai tersedianya personil yang cukup. Keberatan yang diajukan terhadap cara ini ialah apakah pengajaran dalam bahasa Belanda dengan guru Bumiputera akan dapat dicapai hasil yang memuaskan?

Jika harus menunggu tersedianya tenaga pengajar Eropa, maka pelaksanaannya jika serempak di sebagian besar atau di hampir semua sekolah Bumiputera kelas 1 akan baru dapat dilakukan di masa depan yang sangat jauh (tidak dapat diketahui kapan). Jika secara

berangsur-angsur pelaksanaannya akan sangat lambat dalam deretan tahun yang sangat panjang.

Jika cara di atas yang akan ditempuh, maka pemerataan sekolah Bumiputera kelas 1, karena banyak sekolah masih menunggu tambahan kelas 7, akan terganggu lagi untuk waktu yang sangat lama. Penambahan kelas 7 dapat selesai dalam 1 tahun, sedangkan reorganisasi baru ini (perubahan rencana pelajaran) akan memerlukan waktu 5 a 6 tahun.

Mengingat keadaan yang diuraikan di atas, maka pemakaian tenaga pengajar Bumiputera menurut Direktur P.A.K. adalah cara yang terbaik. Cara ini mungkin tidak akan menghasilkan seketika hasil-hasil yang diharapkan, tetapi membawa keuntungan bahwa reorganisasi itu dapat dilaksanakan hampir menyeluruh, dan tindakan selanjutnya yang mungkin sekali perlu, dapat dibuktikan dengan pengamatan yang teliti dari hasil yang telah diperoleh. Tindakan baru hanya perlu ditujukan pada perbaikan dari hasil-hasil yang telah tercapai.

Di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura terdapat kesulitan, karena kelas 1 dari sekolah Bumiputera kelas 1 itu sambungan dari kelas 2 dari sekolah Bumiputera kelas 2. Lambat laun harus ada keseragaman, karena kebutuhan akan pengajaran bahasa Belanda yang baik bagi Bumiputera terutama di daerah Sumatera Barat tidak kurang besarnya daripada di Jawa dan Madura. Apakah mungkin mengadakan perubahan itu dalam tahun ini pada beberapa sekolah, belum dapat ditentukan, karena belum ada data yang diperlukan.

Diharapkan segera dapat menerima pendapat Gubernur Jenderal mengenai nasehat Direktur P.A.K. dan kabar tentang hasil pertukaran pikiran dengan Menteri Jajahan.

48. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 12 Agustus 1912 no.12969

Sampai kini (tahun 1912) di Jawa dan Madura Pemerintah bertujuan untuk memberikan sebuah sekolah Bumiputera kelas 1 kepada

tiap ibukota keresidenan dan tiap ibukota kabupaten. Tujuan ini telah tercapai, dan karena itu cara kerja yang sampai kini diikuti akan diganti dalam waktu dekat dengan sistim perluasan menurut kebutuhan. Pemerintah di satu pihak sebanyak mungkin harus memenuhi kebutuhan kalangan Bumiputera akan pendidikan Belanda, dan di pihak lain harus membatasi jumlah kesempatan untuk itu karena tingginya biaya dan kekurangan personil Eropa, dan harus memelihara pembagian yang merata dari apa yang dapat diberikan. Banyak permintaan masuk sekolah Bumiputera kelas 1 terpaksa ditolak karena kekurangan tempat. Perluasan pengajaran bahasa Belanda pada sekolah kelas 1 dan reorganisasi pendidikan rendah lanjutan bagi Bumiputera yang direncanakan, akan menambah sangat kuatnya arus masuk ke sekolah itu. Terpisah dari itu diharapkan, bahwa hasrat untuk memperoleh pendidikan yang lebih maju akan makin meningkat di kalangan yang lebih banyak dan lebih luas. Sekarang jumlah sekolah Bumiputera kelas 1 berbahasa Belanda sudah mendekati seratus, dan dalam waktu dekat akan dapat dikalikan tiga tanpa dapat memenuhi semua permintaan. Bagi Anggaran Belanja Hindia Belanda hal itu akan merupakan beban yang berat. Pengeluaran per tahun per sekolah kelas 1 sekarang sudah kira-kira f. 13.000.-- (tiga belas ribu gulden).

Kebutuhan pengajaran bahasa Belanda dalam arti absolut dapat diibaratkan sebagai sebuah tong tanpa dasar. Pemerintah akan menganggapnya sebagai kebutuhan relatif dalam arti ganda yaitu bahwa bagi tiap tempat tertentu kebutuhan itu diputuskan dengan kebutuhan sejenis di lain tempat. Mengingat batas-batas finansial dalam anggaran belanja untuk bagian ini.

Dalam mencari garis kebijaksanaan umum mengenai pendirian sekolah Bumiputera kelas 1 tersebut di atas dapat diterima sebagai faktor pembatas azas yang termuat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Ratu dalam Lembaran Negara 1893 nomor 125 yang berbunyi "bahwa sekolah-sekolah tersebut terutama didirikan bagi anak-anak dari Kepala Bumiputera dan dari orang Bumiputera terkemuka dan berada".

Azas ini menurut Direktur P.A.K. hanya dapat dipertahankan, karena tidak mungkin mengadakan pemilihan rasionil dengan ukuran bakat pada anak-anak berumur 6 sampai 8 tahun.

Dalam praktek azas ini hanya berharga, jika dengan cermat dapat ditentukan orang-orang Bumiputera mana yang dipandang terkemuka dan berada, dan mana yang tidak. Tidak sukar untuk menyebut beberapa kategori dalam masyarakat Bumiputera mana yang termasuk "terkemuka dan berada". Tetapi selalu akan ada "kelonggaran" terdiri dari golongan yang dimasukkan "terkemuka dan berada" yang dipengaruhi oleh bermacam-macam penghargaan. Dalam golongan ini termasuk umpamanya para mantri dari berbagai jawatan. Dari kalangan ini ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh pendidikan Belanda yang baik, dan menurut pengalaman banyak pemuda berasal dari golongan ini termasuk yang baik.

Pertanyaan sekarang, sampai sejauh mana golongan yang diragukan apakah termasuk "terkemuka dan berada" dapat memutuskan bagi pendirian sekolah baru dengan pendidikan Belanda. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, perlu diadakan penyelidikan yang seksama dengan minta dari komisi sekolah Bumiputera di Jawa dan Madura untuk mengirimkan keterangan antara lain mengenai jumlah murid yang diterima di kelas 1 sekolah kelas 1, mengenai jumlah anak yang ditolak karena kekurangan tempat, dan mengenai kedudukan para orangtua anak-anak tersebut (ad.1 dan ad.2).

Keterangan ini tiap tahun dikumpulkan dan berdasarkan itu, dengan mengingat apa yang dapat dicapai dengan keadaan finansil dan personil, dapat ditetapkan beberapa sifat dan ciri umum yang dapat dipakai untuk menentukan kategori Bumiputera mana yang harus dianggap "terkemuka dan berada" dan mana yang tidak.

Dengan kata lain, dengan kebutuhan golongan mana harus diperhitungkan untuk mendirikan sekolah baru dengan pendidikan Belanda.

Pendirian sekolah tergantung dari permohonan (petisi) dari orang-orang yang bersangkutan atau dari usul dari pihak Pemerintahan, tanpa penyelidikan apakah sungguh ada kebutuhan akan sekolah

itu. Dan hal ini menyebabkan pembagian yang tidak merata. Penyelidikan yang saksama tiap tahun akan dapat mencegah hal itu.

Keterangan yang tiap tahun dikumpulkan itu diharapkan akan memungkinkan pembuatan rencana kerja yang rasionil bagi penambahan jumlah sekolah kelas 1. Program kerja itu dalam tahun-tahun mendatang akan dapat diubah menurut keadaan, dan berangsur-angsur dapat dilaksanakan sepanjang sarana keuangan mengijinkan.

MASYARAKAT BUMIPUTERA DAN POLITIK PENDIDIKAN

49. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 7 Oktober 1913 nomor 1196/21

Dengan surat ini Gubernur Jenderal melaporkan, bahwa akhir-akhir ini di kalangan orang Bumiputera yang terdidik terdapat jauh lebih banyak perhatian daripada sebelumnya pada pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan terutama mengenai yang dibicarakan tentang politik pendidikan.

Dari dunia Bumiputera dikeluarkan suara-suara dalam pers dan rapat yang menyatakan adanya kegelisahan tertentu dan kemarahan tertentu - menurut kata orang - mengenai maksud Pemerintah dalam bidang pendidikan. Mungkin sekali hal tersebut disebabkan oleh pembicaraan Anggaran Belanja tahun 1913 dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu perhatian Menteri Jajahan diharapkan atas hal-hal berikut ini:

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas tidak dapat dipandang sebagai "gelembung (busa) sabun", tetapi memang ada dan sungguh-sungguh. Sebagian besar karena anggapan yang keliru terhadap rencana Pemerintah. "Api" itu sudah tentu dinyalakan oleh orang-orang Eropa yang sudah dan yang belum dikenal dengan maksud tertentu, dan api ini bukan "api jerami". Memang bahan bakar sungguh ada.

Masalah ini telah dibicarakan dengan Direktur P.A.K. (J.A.C. Hazeu) dan Penasehat Urusan Bumiputera (Dr. N. Adriani).

Penjelasan Dr. Adriani adalah sebagai berikut:

Di Nusantara, Agama Islam bagi pemeluknya lebih dari apa yang oleh orang Belanda disebut agama. Islam bagi pemeluknya bukan hanya "jalan ke akhirat" melainkan juga "pembawa kesadaran nasional bagi orang berwarna coklat terhadap orang kulit putih". Penjajahan asing dapat terpukul relatif ringan, jika mereka dapat berkata kepada orang lain dan kepada diri sendiri:

"Tetapi kita memiliki 'Islam', di hari kiamat dan di kehidupan abadi di akhirat adalah masa depan bagi kita, dan di dunia ini kita merupakan suatu persaudaraan besar, tersebar di seluruh dunia yang pusatnya ialah Mekka, dan ini adalah bagian kita yang tidak dapat diganggu gugat, yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuasaan Eropa manapun".

Orang-orang Islam di Jawa belum merupakan suatu kesatuan politik, kekuasaan Belanda telah menaklukkan mereka, tetapi bagi kesadaran mereka Belanda belum membuat mereka satu Negara. Kesatuan mereka terletak pada Islam. Islam adalah satu-satunya milik mereka yang tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat diganggu gugat. Mereka ingin tetap memiliki Islam, juga bagi anak-anak mereka.

Mereka tidak menginginkan pelajaran agama dari Belanda. Yang mereka inginkan dari kepandaian Belanda ialah ketrampilan, pengetahuan duniawi, semua yang diperlukan untuk maju di dunia dan mencari uang. Ilmu sesungguhnya, pengetahuan yang lebih tinggi dan dalam dan rahasia, dan yang tidak dapat begitu saja diajarkan pada setiap orang, itulah yang dibawa Islam, dan itu tidak dapat diberikan oleh Belanda.

Jika ada paksaan - langsung atau tidak langsung - dengan memberikan hanya pengajaran Kristen, maka mereka akan segera merasa adanya usaha Pemerintah supaya mereka meninggalkan Islam, dan membuat mereka lebih kuat berpegangan pada Islam.

Islam lebih dari agama, Islam pembawa kesadaran nasional seluruhnya sesuai dengan kehidupan rohaniyah orang Timur.

Dengan surat ini diusulkan supaya Pemerintah sebanyak mungkin menghindari apapun, yang dapat memberi umpan kepada dugaan, bahwa Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung mau mendesak agama Kristen kepada orang-orang Bumiputera.

PENDIDIKAN BAGI GADIS BUMIPUTERA

50. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 4 Maret 1913 no.3891

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 9 Juni 1911 nomor 1407-b kepada Direktur P.A.K. lama (M.S. Koster) diberitahukan, bahwa usulnya dalam surat tanggal 25 Maret 1911 nomor 5017 berdasarkan nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 13 Mei 1911 nomor XIV, tidak dapat disetujui Gubernur Jenderal.

Dewan Hindia Belanda - meskipun pendukung dari Sekolah Bumiputera bagi gadis - tidak dapat menyokong usul M.S. Koster, karena alasan yang disimpulkan dari nasehat para Inspektur Pendidikan Bumiputera kurang kuat, dan menimbulkan kesangsian, apakah sungguh sudah tiba waktunya untuk memperluas jumlah sekolah yang dicobakan di Karanganyar. Selain itu belum yakin, apakah dalam masyarakat Bumiputera sungguh sudah ada kebutuhan akan sekolah-sekolah tersendiri bagi gadis-gadis Bumiputera.

Atas nasehat Dewan Hindia Belanda, maka dengan surat Sekretaris Pemerintah tanggal 9 Juni 1911 nomor 1407-a Penasehat Urusan Bumiputera (A.G.J. Hazeu) diminta pendapatnya mengenai masalah tersebut. Sekarang (1913) Hazeu selaku Direktur P.A.K. mohon diperkenankan mengirimkan kembali surat tersebut di atas dengan lampirannya.

Sementara itu kebutuhan tersebut makin terasa. Di kalangan Bumiputera makin banyak suara mendesak supaya kebutuhan itu dipenuhi, dan di beberapa tempat oleh pihak-pihak yang berkepentingan telah diadakan usaha untuk dengan kekuatan sendiri memberi kesempatan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera, misalnya di Bandung (oleh Kautamaan Istri) dan di Garut, di Buitenzorg (Bogor) (oleh Sekolah Raden Kartini), di Tasikmalaya (oleh Kautamaan Istri), di Kediri (oleh Cabang Budi Utomo).

Dalam rapatnya di Yogyakarta Budi Utomo memutuskan sangat perlunya pendirian sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera. Pengurus Besar Budi Utomo mengajukan surat permohonan tanggal 25 Januari 1913 supaya gadis-gadis Bumiputera diterima di sekolah pendidikan guru

Bumiputera. Surat permohonan itu dengan surat Direktur P.A.K. tanggal 27 Pebruari 1913 nomor 3534 diteruskan kepada Gubernur Jenderal. Dari Ruhana, Direktris perkumpulan wanita "Kerajinan Amoi Setia" di Kota Gadang (Sumatera Barat) diterima surat permohonan ijin untuk mengadakan lotere kecil-kecilan, yang hasilnya akan dipergunakan sebagai biaya pendirian dan pengaturan pertama sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera.

Yang menggembirakan ialah bahwa di sana-sini sudah ada prakarsa sendiri dari pihak Bumiputera.

Mengenai masalah apakah Pemerintah harus mendirikan sekolah Bumiputera kelas 2 bagi gadis-gadis Bumiputera di beberapa tempat, dan apakah sekolah ini akan dihargai oleh yang berkepentingan, pendapat yang diterima dari para Residen dan para Bupati sangat berbeda-beda. Juga belum mungkin ditetapkan suatu type tertentu bagi sekolah gadis dengan rencana pelajaran yang tersusun baik.

Kebutuhan masyarakat Bumiputera harus diberi kesempatan untuk menyatakan diri dalam cara pengaturan pendidikan bagi gadis, dan cara ini dapat diubah menurut keperluan yang ternyata kemudian dan pendapat yang berubah. Baru setelah percobaan berulang-ulang dapat terbentuk sebuah tipe tertentu, yang dapat memberi kepuasan kepada sebagian terbesar dari orang-orang yang berkepentingan, dan pula telah diketemukan suatu ukuran yang terpercaya untuk menentukan kebutuhan akan pendidikan bagi gadis di suatu tempat, maka sudah tibalah waktunya, pendirian sekolah bagi gadis dalam jumlah yang lebih besar dari pada kemampuan prakarsa swasta, daripada ditangani sendiri oleh Pemerintah.

Sementara itu telah ternyata, bahwa prakarsa swasta tanpa bantuan Pemerintah, tidak dapat melaksanakan tugas yang telah diterima sebagaimana mestinya. Sarana keuangan untuk pembiayaan sekolah itu tidak cukup diperoleh hanya dari sumbangan dari orang-orang yang menaruh minat dan yang berkepentingan. Dari permohonan subsidi yang diterima - yang sudah dipenuhi dan yang masih dalam pertimbangan - terbukti, bahwa bantuan Pemerintah sangat perlu.

Peraturan pemberian subsidi dalam Lembaran Negara tahun 1895 nomor 146 dan Lembaran Negara tahun 1906 nomor 241 memungkinkan untuk memberi bantuan seperti itu. Tetapi masih ada kesulitan bahwa peraturan itu tidak memberi kesempatan untuk mengatur sekolah bagi gadis-gadis menurut cara yang diinginkan, karena menurut Pasal 1 alinea 2 sub 2, dari tiap tenaga pengajar disyaratkan harus mempunyai bukti tentang wewenang dan kecakapan untuk memberi pengajaran dalam mata-mata pelajaran yang diberikan. Jumlah bantuan, termaktub dalam Peraturan dalam Lembaran Negara nomor 146 untuk pengaturan pertama dan pengeluaran selanjutnya, dan bantuan yang termaktub dalam Peraturan dalam Lembaran Negara nomor 241 untuk gaji personil serta biaya pemeliharaan biasa dan penambahan pengaturan pertama, ditambah dengan penerimaan lainnya (penerimaan sendiri) ternyata masih kurang untuk membiayai sekolah tersebut.

Juga dalam beberapa hal peraturan pemberian subsidi tersebut di atas kurang cocok untuk diterapkan pada sekolah-sekolah gadis, dan maka dari itu diusulkan supaya diadakan peraturan khusus.

Bersama ini dilampirkan konsep peraturan pemberian subsidi kepada sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera, serta penjelasannya.

Jika Gubernur Jenderal dapat menyetujuinya, maka diusulkan supaya Gubernur Jenderal:

1. Mengadakan pembicaraan dengan Menteri Jajahan mengenai Peraturan Pemberian Subsidi kepada sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera menurut konsep tersebut.
2. Mohon kepada Menteri Jajahan supaya pada penyusunan Rencana Anggaran Belandja untuk tahun 1914 sudah dimasukkan pos untuk pembiayaan pelaksanaannya sebesar f. 83.000.--

PENDIDIKAN UNTUK PERKEMBANGAN LEBIH LANJUT BAGI BUMIPUTERA
SEKOLAH BUMIPUTERA BELANDA (HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)

51. Surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 17 Maret 1913 nomor 4674

Dalam suratnya tanggal 17 Pebruari 1912 nomor 2600 Direktur PAK menjelaskan pendapatnya dan persetujuannya mengenai Reorganisasi pendidikan yang mendidik lebih lanjut bagi orang Bumiputera menurut azas azas termaktub dalam Nota Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 4 Januari 1912.

Sekarang (1913) Direktur P.A.K. menjelaskan usul-usulnya yang pada pokoknya mengikuti garis-garis dalam Nota tersebut, sebagaimana juga dalam garis-garis pokoknya telah dikemukakan Menteri Jajahan kepada Kamar Kedua Dewan Perwakilan Rakyat.

Tidak keberatan, bahwa MULO yang dikaitkan dengan beberapa sekolah rendah Eropa (E.L.S.) akan diperuntukkan menjadi Lembaga Pendidikan Rendah Lanjutan bagi para tamatan sekolah Bumiputera kelas 1 yang telah mendapat pendidikan tambahan. Sekarang telah ternyata bahwa mungkin sekali untuk mengadakan perubahan yang tidak begitu mendalam dalam rencana pelajaran MULO, supaya dapat dipergunakan sebagai basis umum untuk berbagai macam pendidikan kejuruan.

Akibat praktis yang dapat tercapai dengan tindakan tersebut di atas banyak tergantung dari "jumlah" dan "mutu" tenaga pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Terutama faktor terakhir ini yang selalu tidak pasti, sehingga beberapa bagian dari reorganisasi lebih banyak mengandung sifat percobaan.

Unsur-unsur terpenting dari ketidak pastian sementara ialah apakah perlengkapan yang direncanakan bagi sekolah Bumiputera kelas 1 akan dapat membawa sekolah-sekolah itu sampai dan tetap pada mutu yang diinginkan. Lain daripada itu apakah meskipun hasil nyata akan memuaskan, akan dapat diterima oleh kalangan Bumiputera terdidik, yang selalu menguji kesempatan pendidikan yang diberikan kepada mereka dengan apa yang telah dikerjakan Pemerintah bagi orang-orang Cina.

Reorganisasi ini dapat disetujui Direktur P.A.K. meskipun lebih banyak bersifat percobaan, karena ada jaminan, bahwa jika hasilnya tidak memuaskan tidak akan dihapuskan, tetapi dilanjutkan dalam arah yang sama dengan mencari jalan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tampak.

Dalam pengisian kekurangan tenaga pengajar Eropa sampai kini belum ada perbaikan, malahan di masa depan nampaknya tidak menggembirakan.

Dengan surat Pemerintah tanggal 15 Februari 1913 nomor 4646 disampaikan kepada Direktur P.A.K. surat kawat Menteri Jajahan tanggal 11 Januari 1913 Bagian A1 nomor 47/84 untuk mengusahakan supaya pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dapat dijamin.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas diusulkan, supaya kepada orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk dididik buat menempuh ujian mencapai wewenang mengajar menjadi guru Eropa (akte Eropa). Jumlah personil Bumiputera yang dididik sedemikian rupa sehingga diharapkan akan dapat meninggikan mutu sekolah Bumiputera kelas 1, sementara belum dapat mengisi tempat tenaga pengajar Eropa di sekolah itu. Mengerahkan (= merekrut) tenaga pengajar di negeri Belanda, dengan memperbaiki peraturan mengenai kedudukan guru Eropa di Hindia Belanda.

Dalam prinsip tidak dapat disetujui, bahwa H.I.S. yang akan ada, ditempatkan di bawah peraturan pendidikan Bumiputera yang sudah ada, dan mengusulkan supaya dengan surat keputusan Ratu tersendiri, ditentukan:

1. Bahwa sebagai Kepala Sekolah Bumiputera kelas 1, dimana hampir seluruhnya diberikan mata-mata pelajaran yang sama seperti di Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) diangkat guru Eropa pada E.L.S. negeri.
2. Sekolah tersebut di ad.1 diberi nama Sekolah Bumiputera Belanda (Hollandsch-Inlandsche School = H.I.S.).
3. Pengaturan dari dan pengawasan atas sekolah-sekolah tersebut diatur oleh Gubernur Jenderal.

Wewenang tersebut (ad.3) harus dilaksanakan berdasarkan Reglemen Sekolah Eropa serta tambahan-tambahannya yang perlu. Bersama ini dilampirkan konsep rencana Surat Keputusan Ratu tersebut.

(Surat Keputusan Ratu tanggal 16 Pebruari 1914 nomor 23 dalam Lembaran Negara 1914 nomor 359).

(Pembagian dari Bagian V dari Bagian Anggaran Belanja harus juga dirubah).

Juga dimohonkan perhatian atas bangunan gedung sekolah Bumiputera kelas 1, jika dibandingkan dengan bangunan gedung H.C.S., kelihatan buruk sekali. Tidak mengherankan, bahwa orang Bumiputera melihat di dalam bukti yang nyata, bahwa Pemerintah mendahulukan orang Cina. Diusulkan supaya Direktorat Pekerjaan Umum diberi instruksi untuk membangun gedung H.I.S. menurut proyek E.L.S.

Sambungan H.I.S. dengan MULO

Salah satu masalah dari reorganisasi tersebut yang paling banyak diperdebatkan dan paling sulit ialah mengenai H.I.S. kelas 8 yang dapat langsung atau H.I.S. kelas 7 yang tidak langsung tetapi melalui kelas persiapan masuk ke MULO. Akhirnya yang dipilih ialah H.I.S. kelas 7 dengan kelas persiapan di MULO.

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs = Pendidikan Rendah yang diperluas)

Dipertimbangkan kemungkinan MULO untuk dipergunakan juga sebagai lembaga pendidikan rendah lanjutan bagi tamatan sekolah Bumiputera kelas 1, menimbulkan pertanyaan, apakah tidak akan menyebabkan rasa tidak puas di kalangan penduduk Eropa.

Pada permulaan jumlah tamatan H.I.S. yang akan mempergunakan kesempatan masuk MULO sangat sedikit, dan juga murid-murid Bumiputera dari E.L.S. yang akan ke Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputera

tidak akan masuk MULO, sehingga penduduk Eropa masih lama ada kesempatan untuk membiasakan diri pada keadaan yang berubah.

(Dalam rencana pelajaran MULO akan diadakan perubahan untuk membuat kursus ini cocok sebagai persiapan masuk ke lembaga pendidikan kejuruan seperti OSVIA, Rechts-school, STOVIA, dll.).

Pada waktu MULO dipersiapkan Direktorat P.A.K. lama (M.S. Koster) sudah mempertimbangkan untuk melapaskan MULO dari E.L.S. dan menjadikannya suatu lembaga tersendiri, tetapi tidak dilanjutkan karena khawatir akan merugikan sambungan dan kerja sama dengan sekolah rendah, dan tanpa diketahui MULO akan menempuh jalan sendiri ke pendidikan menengah.

Sekarang sudah tiba waktunya untuk merubah MULO menjadi sekolah MULO, karena dengan diadakannya kelas persiapan bagi Bumiputera dan arus masuk murid yang besar, tidak mungkin lagi pimpinan sekolah dirangkap oleh Kepala E.L.S. dan pengajaran dirangkap oleh guru-guru E.L.S.

MULO bersambungan ke bawah dengan bermacam-macam sekolah rendah (E.L.S., H.C.S., dan H.I.S.) dan ke atas dengan berbagai sekolah kejuruan, di masa depan harus diatur sebagai lembaga pendidikan yang berdiri sendiri, dan meskipun masih diberikan pendidikan rendah (di kelas persiapan) akan menduduki tempat sebagai sekolah lanjutan di Hindia Belanda.

(Diusulkan supaya penghasilan tambahan sebagai guru MULO sebanyak f. 50.-- per bulan dinaikkan dengan jumlah yang sama).

Apakah untuk pemberian pengajaran, alat-alat pelajaran serta alat-alat tulis dan pemondokan, harus ditarik pembayaran dari orang tua atau tidak. Jika "ya", berapa jumlahnya; dan jika "tidak", diusulkan supaya tidak semua murid dibebaskan dari pembayaran, tetapi pembebasan hanya diberikan kepada mereka, yang mau mengadakan ikatan, bahwa setelah selesai dari pendidikan kejuruan akan bekerja pada Pemerintah untuk beberapa tahun tertentu. Pembebasan pembayaran dapat disertai dengan bantuan untuk pakaian dan makan.

Masalah pemondokan bagi murid-murid Bumiputera MULO.

Untuk menyelesaikan masalah ini dipertimbangkan beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Murid-murid berkelompok paling banyak 10 orang dan dipondokkan pada keluarga Belanda yang beradab dan terdidik, untuk membiasakan mereka mendapat pengaruh baik dari penghidupan keluarga Belanda yang beradab, dan membiasakan bahasa pergaulan Belanda. Ternyata pelaksanaan pikiran ini menjumpai banyak keberatan yang tidak dapat diatasi, seperti konsekwensi keuangan. Dengan tak-siran rendah uang pondokan yang diminta oleh keluarga Eropa untuk tujuan ini adalah f. 50.-- per murid per bulan. Jika seluruhnya dibebankan pada Pemerintah akan merupakan pengeluaran yang sangat besar. Jika separo dikeluarkan oleh Pemerintah dan separo lagi oleh orang tua, ternyata yang akan dapat mempergunakan kesempatan tersebut justru pemuda dari kalangan yang sesungguhnya tidak memerlukan MULO sebagai tujuan akhir (finishing touch). Sebagian terbesar murid sekolah Bumiputera kelas 1 (nantinya H.I.S.) berasal dari kalangan orang tua berpenghasilan f. 50.- ke bawah, yang tidak mungkin menyisihkan f. 25.- untuk seorang anak. Belum diperhitungkan biaya-biaya lainnya. Di Betawi saja sangat sukar untuk menemukan beberapa keluarga Belanda yang memenuhi syarat beradab dan terdidik dan yang mau menerima pondokan anak-anak Bumiputera, lebih-lebih di kota lainnya. Pikiran ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Mendirikan internat (asrama murid) untuk paling banyak 50 murid di bawah pengawasan seorang guru Belanda yang cakap (paling baik guru MULO sendiri) dengan tunjangan f. 50.-- sebulan dan perumahan percuma, yang dibangun di kompleks asrama. Pimpinan asrama di bawah pengawasan Direktur MULO, yang dengan demikian menjadi pimpinan umum asrama. Tugas ini tidak sukar dan tidak makan waktu bagi Direktur MULO, dengan penghasilan yang sudah tinggi (gaji akhir f. 725,-). Internat di bawah pengawasan Inspektur Pendidikan Rendah (dalam tahun-tahun pertama Inspektur H.I.S.).

3. Mencari rumah-rumah pondokan Bumiputera yang dipilih dengan saksama dan di bawah pengawasan yang diatur sebagaimana mestinya.

Kepada murid-murid yang sungguh berbakat istimewa tetapi orangtuanya tidak mampu, dan tanpa bantuan Pemerintah tidak akan mampu mencapai masa depan yang lebih baik, diusulkan supaya diberi beasiswa untuk pakaian dan makan, menurut standar hidup setempat dari f. 10.- sampai f.15.- per bulan. Bagi murid Eropa dan Timur Asing yang tidak mampu, dan tidak tinggal bersama orang tua, harus juga diberi bea-siswa maksimum f.20.- sampai f.25.- per bulan.

Pendidikan kejuruan.

Karena keadaan keuangan dari murid-murid di beberapa sekolah pendidikan kejuruan itu sangat berbeda, maka tidak disetujui semuanya dibebaskan dari pembayaran. Dalam prinsip menentang pemberian pendidikan secara cuma-cuma, maka tidak setuju, bahwa orang tua yang mampu membayar pondokan, makan dan pakaian anak-anaknya yang bersekolah, dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari pembayaran. Politik pendidikan yang baik menghendaki, bahwa orang tua yang dapat membayar, harus dipungut sumbangan menurut kemampuan untuk biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah. Dengan sendirinya, di bawah keadaan tertentu, mengingat hukum tawaran dan permintaan yang tidak dapat dihindarkan demi kepentingan negara, terpaksa menyimpang dari azas-azas tersebut di atas. Pembebasan pembayaran hanya diberikan hanya jika sungguh perlu.

52. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 7 Juli 1913 nomor 11522

Dengan surat Pj. Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 24 Juni 1913 nomor 1532 disampaikan kepada Direktur P.A.K. salinan surat kawat Menteri Jajahan tanggal 21 Mei 1913 Bagian 1 nomor 50/1191 yang mengharap kabar mengenai tindakan yang telah diambil Gubernur Jenderal untuk mencegah arus masuk murid-murid ke H.I.S.

Permintaan Menteri ini disebabkan oleh surat Hindia Belanda tanggal 9 Oktober 1912 nomor 1204/5, yang menyebutkan angket yang diadakan oleh Direktur P.A.K. seperti diusulkan dalam suratnya tanggal 12 Agustus 1912 nomor 12969.

Angket-angket tersebut sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk mengadakan tindakan mencegah arus masuk murid-murid ke H.I.S. tetapi dipakai untuk membatasi perluasan sekolah H.I.S. dalam batas-batas yang patut dan sebanyak mungkin menurut urutan urgensinya yang sungguh-sungguh ada.

Jika penduduk Bumiputera dibagi dalam 3 kategori -- dalam kenyataan hal ini di masa depan akan lebih tampak -- maka dalam golongan menengah hasrat untuk memperoleh pendidikan Belanda akan makin bertambah, dan justru dari kalangan intelektual Bumiputera banyak yang berasal dari golongan ini.

Karena tidak ada ukuran lain untuk mengadakan pemilihan, maka azas dalam pasal 1 Surat Keputusan Ratu, Lembaran Negara 1893 nomor 125, meskipun menurut keadaan sekarang sudah usang dan bersifat aristokratis dan plutokratis mengingat hubungan masyarakat masih dapat dipakai dalam penerimaan murid, dengan menurunkan batas-batasnya sebanyak mungkin ke bawah, untuk disesuaikan dengan kepentingan Kas Negara dan dengan tersedianya personil pengajar. Hasil angket tahun 1911 dan 1912 sesudah diatur dan disusun akan disampaikan kepada Gubernur Jenderal. Akan tetapi hasilnya kurang memenuhi syarat untuk dapat dipakai sebagaimana dimaksudkan, karena cara pengisian daftar pertanyaan di sana-sini banyak kekurangannya. Periode untuk penelitian terlalu pendek. Beberapa komisi sekolah Bumiputera tidak memiliki pendapat yang betul mengenai azas yang harus diperhatikan pada penerimaan murid.

Direktur P.A.K. lama (M.S. Koster) dalam surat rahasianya tanggal 29 Oktober 1910 nomor 235 telah menyatakan, bahwa pada penerimaan murid pada sekolah Bumiputera kelas 1 pertama-tama harus dipertimbangkan dahulu anak-anak dari orang bangsawan, terkemuka, dan berada; dan jika anak-anak tersebut sudah dapat diterima semua dan

masih ada tempat kosong, baru anak-anak lain. Menurut surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 12 Desember 1910 nomor 2822, Gubernur Jenderal dapat menyetujui pendapat Koster, tetapi menganggap tidak perlu mengadakan surat edaran kepada para komisi sekolah Bumiputera.

Akibatnya di antara komisi-komisi sekolah Bumiputera banyak yang menolak permintaan masuk, hanya didasarkan karena tidak termasuk terkemuka dan berada, bahkan ada yang menerima hanya berdasarkan prioritas waktu mengajukan permohonan masuk, sehingga yang lebih dahulu mendaftarkan diterima, dengan akibat yang diterima murid-murid dari bermacam-macam golongan seperti ada orang tua yang berpenghasilan f.12.- misalnya Opas, sedangkan banyak anak dari orang terkemuka karena terlambat mendaftarkan ditolak karena tidak ada tempat lagi.

Maka dari itu dipandang perlu untuk segera mengeluarkan surat edaran kepada komisi-komisi sekolah Bumiputera seperti yang direncanakan Koster dengan beberapa petunjuk:

- a. Pada penilaian apakah seorang Bumiputera termasuk "terkemuka", jika orang itu juga tidak termasuk "berada", jangan hanya melihat pada gelar bangsawannya saja, tetapi harus diselidiki apakah dia di kalangan masyarakat sungguh-sungguh dipandang "terkemuka".
- b. Pada pemilihan calon untuk sisa tempat, sesudah semua anak "terkemuka" dan "berada" diterima, harus didahulukan mereka, yang keadaan lingkungannya diharapkan akan banyak melakukan kerja sama dengan sekolah.
- c. Tanggal penutupan pemasukan pendaftaran harus diumumkan secara luas, dan diberi penjelasan bahwa pendaftaran yang terlambat baru akan dipertimbangkan jika masih ada tempat. Direktur P.A.K. mengharap Gubernur Jenderal akan memberikan pendapatnya dan meneruskannya kepada Menteri Jajahan.

PENDIDIKAN PERTUKANGAN

53. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 1 April 1913 nomor 359/22

Berdasarkan tugas lisan Gubernur Jenderal untuk mengadakan pemikiran tentang pendidikan ke arah industri bagi orang Bumiputera di luar ibukota dan kemudian mengajukan usul, maka Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (H.J. Lovink) menyampaikan pendapat serta usul-usulnya dengan surat tanggal 4 Mei tahun itu nomor 3867. Sebagai hasil pembicaraan dengan berbagai penguasa, Lovink mengemukakan bahwa dalam bidang ini ada 3 hal yaitu:

1. pertukangan (besi, batu, kayu, dll.);
2. industri kecil (pembakaran genteng, batu merah, dll.);
3. kerajinan tangan (seni).

Saat ini hanya dibicarakan mengenai dua hal yang pertama.

Dalam bidang tersebut dapat dicapai sesuatu dengan pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan bagi calon tukang dan calon pengrajin, penyuluhan bagi yang telah mengerjakan pertukangan dan kerajinan, satu dan lain berhubungan dengan keadaan setempat.

Sekolah pertukangan yang sudah ada di 3 ibukota di Jawa, tidak dapat dipakai untuk tujuan ini, karena murid-muridnya diambil tidak dari kalangan rakyat pekerja tetapi dari kalangan yang lebih tinggi, yang menganggap terlalu tinggi untuk menjadi tukang, sedangkan tujuan sesungguhnya ialah memajukan pertukangan di kalangan pekerja. Sekolah itu hanya dapat dipakai, untuk memberikan tenaga pengajar bagi pengajaran pertukangan rakyat.

Sekolah-sekolah pertukangan swasta yang ada - kebanyakan dari Zending - karena kekurangan tenaga pengajar yang baik tidak dapat memajukan kerajinan Bumiputera secara berarti.

Lovink menyetujui pendapat Inspektur pendidikan menengah (Hoekstra) bahwa perlu didirikan sekolah pertukangan kecil, dimana terutama diberikan pendidikan praktis. Tempat sekolah dipilih di pusat kerajinan yang sudah ada di luar ibukota. Untuk mulai cara kerja

yang sudah ada dari para pengrajin diperbaiki dan dibuat lebih ekonomis. Hanya melalui jalan ini rakyat kecil dapat dicapai. Merekalah pertama-tama yang harus dipertimbangkan untuk dibentuk menjadi tukang-tukang yang baik.

Diusulkan untuk memenuhi kebutuhan personil Eropa, agar supaya guru-guru sekolah pertukangan Negeri Belanda yang baik, setelah setengah tahun dididik di Hindia Belanda, diangkat sebagai Kepala Sekolah Pertukangan dibantu oleh seorang tenaga pengajar Bumiputera, tamatan dari salah satu dari 3 sekolah pertukangan yang ada. Yang diterima menjadi murid harus memenuhi syarat lulus sekolah Bumiputera biasa (yakni Sekolah Desa). Tugas personil pengajar pertama-tama memberi pengajaran kepada para pemuda (= murid), dan kedua memberikan penyuluhan kepada para tukang dan pengrajin yang sudah ada, sehingga di daerah letak sekolah pertukangan dapat ditinggikan mutunya. Selanjutnya diusulkan pula untuk mengangkat seorang Eropa, ahli dalam satu pertukangan tertentu, menjadi semacam guru keliling dengan tugas untuk menyelidiki kekurangan yang ada pada pertukangan di daerah-daerah dan berusaha memperbaiki kekurangan itu dengan memberikan metoda-metoda yang lebih banyak dan lebih baik, dengan mengadakan demonstrasi maupun dengan penyuluhan pendahuluan secara lisan.

Misalnya untuk memperbaiki perusahaan kecil seperti pembakaran genteng dan batu bata, Lovink mengusulkan untuk mendatangkan seorang ahli dari negeri Belanda.

Dalam suratnya tanggal 19 Juni 1912 nomor 9627 Direktur Pendidikan dan Agama menyatakan persetujuannya dengan pendapat dan usul Lovink.

Dewan Hindia Belanda yang dimohon pendapatnya dalam suratnya tanggal 2 Juli 1912 nomor XIV antara lain mengemukakan bahwa usul Lovink dan Hoekstra bukanlah hal baru, karena telah diusulkan lebih dahulu oleh Kontrolir J.E. Jasper dalam Rencana Perluasan dan Perubahan Pendidikan Bumiputera (memori penjelasan Rencana Anggaran Belanja tahun 1907, halaman 20). Rencana ini belum dapat

dilaksanakan, karena sekolah pertukangan yang ada belum berumur 3 (tiga) tahun dan belum menghasilkan tamatan. Jika usul Lovink/Hoekstra diterima, maka pembiayaannya akan jauh lebih besar daripada pelaksanaan rencana Jasper. Sangat disesalkan, bahwa baik Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan maupun Direktur Pendidikan dan Agama dengan sepatah katapun tidak menyinggung Rencana Jasper, sedangkan Rencana itu dalam semua bagiannya telah diterima. Karena itu tidak mungkin untuk mengajukan masalah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanpa memberi pertanggungjawaban mengapa sekarang akan menempuh jalan yang lebih mahal daripada pelaksanaan Rencana Jasper yang telah disetujui oleh Pembuat Undang-Undang (Legislatif).

Sebagai percobaan dapat disetujui pengangkatan guru Eropa untuk perbaikan perusahaan pembakaran genteng dan batu bata.

Dewan Hindia Belanda mengharap dari Lovink penilaiannya yang berdasar mengenai Rencana J.E. Jasper.

Dengan surat Pj. Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 18 Juli 1912 nomor 1464 permintaan Dewan Hindia Belanda diteruskan kepada Lovink. Dalam suratnya tanggal 13 Nopember 1912 nomor 1064 Lovink mengemukakan bahwa pada pelaksanaan Rencana Jasper juga diperlukan personil Eropa untuk pembinaan dan pengawasan. Dari sekolah pertukangan ambulan (mobil) Rencana Jasper tidak dapat diharapkan hasil yang baik, karena tidak mungkin untuk dalam beberapa bulan saja dapat memajukan pertukangan yang masih dalam keadaan primitif. Dalam suratnya tanggal 4 Pebruari 1913 nomor XIV Dewan Hindia Belanda menyatakan kesimpulan, bahwa Rencana Jasper tidak dapat dilaksanakan. Menyetujui pendirian sekolah pertukangan kecil yang permanen seperti diusulkan Lovink.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Gubernur Jenderal menyetujui sekali usul Lovink, dan akan melaksanakannya sementara dengan cara kecil-kecilan.

(diharapkan dalam Anggaran Belanja 1914 sudah dapat diperhitungkan pos untuk pendidikan pertukangan yang diusulkan. Pengurusan sekolah pertukangan dilimpahkan dari Departemen Pendidikan dan Agama kepada Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan).

SEKOLAH MENENGAH HINDIA BELANDA

54. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal Malefijt) tanggal 17 Juli 1913 nomor 839/2

Jika reorganisasi sekolah Bumiputera kelas 1 dan sekolah MULO sebagaimana termaktub dalam surat Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 17 Maret 1913 nomor 4674 dan dalam Memori penjelasan dari pembicaraan Rencana Anggaran Belanja Hindia Belanda tahun 1914 sudah terlaksana, maka lembaga pendidikan yang saling bersambungan ini akan membuka kesempatan untuk memperoleh kedudukan yang baik dalam masyarakat Belanda dengan atau tidak dengan melalui pendidikan di sekolah kejuruan. Lembaga-lembaga pendidikan ini secara berangsur-angsur dan dalam jumlah yang relatif besar akan didirikan tersebar di seluruh Hindia Belanda. Dengan demikian lebih banyak orang tua Eropa dan bukan Eropa akan dapat menemukan pendidikan yang cukup baik bagi anak-anak mereka dan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, dengan biaya yang tidak terlalu tinggi dan tanpa terpaksa mengirimkan anak-anaknya yang masih muda begitu jauh dari rumah tanpa pengawasan pribadi atas pendidikan mereka. Reorganisasi pendidikan lambat laun akan memberikan perbaikan yang berarti bagi sebagian besar penduduk, tetapi tidak memberikan apa-apa kepada mereka yang ingin memberikan kepada anak-anaknya pendidikan untuk mencapai jabatan-jabatan yang memerlukan ijazah H.B.S. atau untuk melanjutkan pelajaran ke Universitas di Negeri Belanda atau ke Sekolah Teknik Tinggi. Jalan ke jabatan-jabatan dan ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi itu hanya dapat melalui H.B.S. 5 tahun.

Semua orang tua di luar Jawa dan Madura dan kebanyakan orang tua di Jawa, jika menginginkan anak-anak mereka mendapat pendidikan di H.B.S., harus mengirimkan anak-anak mereka dengan usia masih muda atau ke Negeri Belanda atau ke salah satu ibukota di Jawa. Bagi anak-anak Bumiputera masih ada lagi keberatan khusus. H.B.S. di Hindia Belanda harus diatur menurut model H.B.S. di Negeri Belanda supaya memungkinkan pindahan murid dari H.B.S. Hindia

Belanda ke H.B.S. Negeri Belanda dan sebaliknya. Maka dari itu untuk ujian masuk H.B.S. (juga di Hindia Belanda) disyaratkan sedikit pengetahuan bahasa Perancis, dan ini hanya mungkin bagi murid-murid lulusan E.L.S. Hanya sedikit orang Bumiputera yang dapat memperoleh prioritas sedemikian bagi anaknya, karena tidak saja tempat yang tersedia hanya sangat sedikit, tetapi juga biaya sangat mahal. Bagi anak Bumiputera umur 12-13 tahun syarat untuk selain harus menguasai bahasa Belanda tetapi harus mengetahui sedikit bahasa Barat lainnya (Perancis) sangat berat, dan menambah satu rintangan besar lagi di jalan menuju ke H.B.S.

Timbul pertanyaan, apakah ada keharusan H.B.S. di Hindia Belanda harus sejajar dengan H.B.S. Negeri Belanda, dan jika tidak perlu, apakah tidak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, supaya syarat pengetahuan bahasa Perancis untuk ujian masuk H.B.S. Hindia Belanda dapat dihapuskan, dan bahasa Belanda lebih diajukan ke depan. Apakah tidak dapat dipertimbangkan suatu H.B.S. yang pada umumnya menjamin mutu pendidikan yang diminta H.B.S. Negeri Belanda, tetapi yang dalam bahan pelajaran dan rencana pelajaran lebih memperhitungkan keadaan-keadaan di Hindia Belanda.

Perluasan H.B.S. dalam jumlah yang berarti, supaya dalam jangkauan lebih banyak orang tua, tidak mungkin karena terbentur pada biaya yang sangat tinggi, diperkirakan f.868.-- per murid per tahun. Bagi penduduk Bumiputera sesungguhnya jalan melalui H.B.S. membawa kerugian, karena jalan dan rencana pelajaran terlalu sedikit memperhitungkan keadaan yang khas Hindia Belanda.

Apakah tidak mungkin untuk mengadakan sekolah-sekolah menengah 2 tahun, yang bersambungan dengan dan melanjutkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah MULO, yang akan membawa ke tingkat pendidikan dan ujian akhir, yang tidak "sama" (= gelijk) tetapi "dipersamakan" (= gelijkwaardig) dengan lulusan H.B.S. 5 tahun, sehingga mereka yang lulus ujian akhir sekolah menengah itu dapat diterima di fakultas-fakultas kedokteran, ilmu pasti dan ilmu alam dari Universitas Negeri Belanda, atau di Sekolah Tinggi Teknik.

Menurut pendapatnya, hal ini mungkin sekali, mengingat makin lama makin banyak lulusan STOVIA - yang pendidikannya tentu tidak begitu jauh dari pendidikan di sekolah menengah yang diusulkan - dapat memperoleh ijazah dokter di negeri Belanda tanpa begitu banyak bersusah payah.

Direktur Pendidikan dan Agama ditugaskan untuk menghubungi berbagai ahli pendidikan di Hindia Belanda mengenai pikiran Gubernur Jenderal tersebut di atas. Nasehat-nasehat mereka - yang bersama ini disampaikan dalam aselinya - pada umumnya tidak menguntungkan. Andaikata Gubernur Jenderal tidak memperhatikan tujuan sosial yang sangat luas dan merupakan keharusan dari masalah ini, yang perlu mendapat penyelesaian yang dapat diterima, maka masalah tersebut akan didiamkan. Kesan dari nasehat-nasehat tersebut ialah terlalu banyak memperhatikan "pendidikan yang sama" dan sama sekali tidak mengingat "pendidikan yang dipersamakan".

Sekolah MULO merupakan suatu keseluruhan yang terpisah dan tersendiri, sedangkan H.B.S. 3 tahun tidak merupakan suatu keseluruhan, tetapi pertengahan pertama dari H.B.S. 5 tahun. Sifat dari kedua lembaga pendidikan itu berlainan, jadi juga rencana pelajarannya berbeda. Bahwa murid yang lulus ujian akhir sekolah MULO dalam pendidikan umumnya terbelakang dengan murid yang naik kelas 4 HBS 5 tahun, itu tidak benar.

Pertanyaan sekarang, ialah bagaimana dapat mempersiapkan murid untuk ujian akhir yang sama hampir seluruhnya sama dengan ujian akhir HBS 5 tahun, mana yang lebih baik, yaitu dengan mengikuti HBS 5 tahun atau dengan menamatkan sekolah MULO dan kemudian mengikuti sekolah menengah 2 tahun.

Jika tidak mengingat segi sosialnya, pertanyaan itu akan dijawab "dengan mengikuti HBS". Tetapi mengingat tujuan sosial yang sangat luas, pikiran tersebut di atas tidak dapat dikesampingkan begitu saja, dan mengusulkan kepada Menteri Jajahan supaya menunjuk beberapa ahli pendidikan di negeri Belanda yang terkenal dan banyak berpengalaman untuk menyelidiki, apakah tidak mungkin sekolah MULO dapat disambung dengan sekolah menengah 2 tahun yang

memberi pendidikan sampai ujian akhir dengan "civil effect" yang sama seperti ujian akhir HBS 5 tahun yang sudah ada. Penyelidikan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pemilihan ahli-ahli tersebut diserahkan kepada Menteri Jajahan, hanya perhatian diharapkan atas Guru Besar J. Woltjer, ketua dari apa yang disebut "Komisi penyambungan" (penyambungan pendidikan rendah-menengah-tinggi = "ineen schakelings commissie").

Jika Menteri dapat memenuhi permohonan itu, maka diharap segera memberitahukan nama-nama para ahli yang akan diminta nasehatnya, dan pada waktunya pula diharap memberitahukan penilaian mereka.

55. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 16 Maret 1914 nomor 5080

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 9 Januari 1914 nomor 96 Direktur Pendidikan dan Agama ditugaskan oleh Gubernur Jenderal untuk mengadakan langkah-langkah serta mengajukan usul-usul untuk memenuhi keinginan Menteri Jajahan, agar supaya di Bandung pada permulaan tahun ajaran 1915/1916 didirikan HBS 5 tahun menurut pola HBS yang sudah ada di Hindia Belanda. Dalam surat tersebut di atas ternyata Gubernur Jenderal menginginkan, supaya bersama-sama dengan pengajuan usul anggaran belanja juga dapat diterima usul tentang pendirian HBS 5 tahun yang bersifat lebih khusus Hindia Belanda dan bersambungan dengan pendidikan Bumiputera.

(Usul mengenai dana, personil dan bangunan-bangunan untuk HBS 5 tahun di Bandung).

E.L.S. di Hindia Belanda merupakan salinan dari E.L.S. di Negeri Belanda, begitu pula dengan HBS di Hindia Belanda yang sudah ada. Hanya MULO, mulai tahun ajaran yang akan datang, akan kehilangan sifat Belandanya dan akan merupakan kekecualian. Reorganisasi ini harus ada, karena berbagai sekolah kejuruan, yang merupakan sambungan MULO, harus terbuka bagi lapisan luas dari masyarakat Bumiputera. Sekolah-sekolah kejuruan itu misalnya sekolah pertanian, kedokteran hewan, dll. Untuk mencapai tujuan ini MULO supaya ke bawah dapat

bersambungan dengan sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 (yang sudah dirubah), dan ke atas dengan sekolah-sekolah kejuruan tersebut di atas. Rencana pelajaran MULO harus dirubah untuk memberikan lebih banyak jam pelajaran bagi pendidikan pengetahuan alam, dan juga untuk memberikan sambungan dengan sekolah Bumiputera kelas 1 dengan diadakannya 1 atau 2 kelas persiapan (voor-klas) pada MULO, dengan menghilangkan pengajaran bahasa Perancis. Dijadikannya bahasa Perancis menjadi pelajaran pilihan (fakultatif) tidak akan ada keberatan, karena bahasa Perancis tidak diperlukan di sekolah kejuruan tersebut di atas. Di Hindia Belanda dalam praktek bahasa Perancis kurang berharga dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Jerman.

Meskipun MULO baru tahun ini dibuka bagi murid-murid sekolah Bumiputera kelas 1, akan tetapi sekarang sudah dapat dikatakan dengan pasti, bahwa sebagian besar pemuda Bumiputera tidak akan puas dengan jalan yang telah ditentukan bagi mereka yang menuju titik akhir ijazah sekolah kejuruan tersebut. Mereka akan minta sekolah menengah baik sebagai tujuan akhir, maupun sebagai persiapan untuk pendidikan tinggi. Dengan kata-kata lain, mereka menginginkan sampai memiliki ijazah yang memberikan keuntungan yang sama seperti ijazah HBS 5 tahun yang sudah ada.

Direktur Pendidikan dan Agama menganggap keinginan mereka itu wajar sekali dan dapat dibenarkan. Menurut pendapatnya tuntutan politik pendidikan yang tidak dapat ditolak ialah tidak menunggu sampai Pemerintah didesak ke arah itu, tetapi dengan melihat jauh ke depan dan atas kemauan sendiri sekarang sudah mulai menarik garis baru. Menurut garis tersebut unsur-unsur terbaik dari masyarakat Bumiputera akan dapat bergerak dalam beberapa tahun yang akan datang. Semoga jalan yang telah diambil Pemerintah dalam masalah pendidikan Cina dapat menjadi peringatan. Pemerintah janganlah menjauhkan kawula-kawulanya sendiri, tetapi penuhilah tepat pada waktunya keinginan-keinginan mereka di bidang pendidikan, juga keinginan yang di kemudian hari mungkin sekali menuju pendidikan tinggi.

Pokoknya sekolah menengah yang bersifat khas Hindia Belanda harus ada, apakah itu dengan kursus lanjutan 2 atau 3 tahun sesudah MULO atau dengan HBS 5-6 tahun, yang bersangkutan dengan sekolah Bumi-putera kelas 1, langsung atau dengan kelas persiapan, E.L.S. dan H.C.S.

Inspektur Pendidikan Menengah (Hoekstra) telah dimohon untuk membuat rencana pelajaran bagi H.B.S. khas Hindia Belanda, yang bersangkutan dengan E.L.S. Dengan suratnya tanggal 14 Desember 1913 nomor 46 Hoekstra mengajukan konsep rencana pelajaran tersebut dengan lampiran-lampirannya.

Dalam konsep rencana pelajaran itu, bahasa Perancis tidak diberikan dan bagi beberapa mata pelajaran lainnya seperti bahasa Belanda, ilmu bumi, sejarah, dan tata negara diberikan bahan pelajaran lain, tetapi tidak kurang daripada yang diberikan di H.B.S. 5 tahun yang sudah ada. H.B.S. ini terdiri dari 2 bagian yakni "onderbouw" (bagian bawah) - 3 tahun - dan, "bovenbouw" (bagian atas) - 2 tahun.

Bagian bawah ini berbeda dengan 3 tahun pelajaran H.B.S. 5 tahun yang sudah ada, karena sifatnya yang khas Hindia Belanda dan memberikan pendidikan yang dibulatkan jadi satu keseluruhan. Ijazah bagian bawah ini sama tinggi dengan ijazah MULO, bagi yang tidak melanjutkan.

Ijazah akhir dari bagian atas sama dengan ijazah H.B.S. 5 tahun yang sudah ada.

Rencana Hoekstra ini sesuai dengan MULO ditambah dengan kursus lanjutan 2 tahun sambungannya.

Sekarang belum dianggap tiba waktunya untuk menentukan rencana mana yang akan dipilih, juga belum waktunya untuk membicarakan perincian-perincian dari konsep Inspektur Hoekstra.

Ditegaskan, bahwa syarat hidup bagi sekolah menengah Hindia Belanda ini ialah, bahwa tanda lulus ujian penghabisannya antara lain harus dapat membuka jalan ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang sama, yang terbuka bagi pemilik ijazah akhir H.B.S. 5 tahun

yang sudah ada. Bagian Gymnasium yang diusulkan dengan surat tanggal 16 Maret 1914 nomor 5088, ijazahnya harus dipersamakan dengan ijazah Gymnasium Negeri Belanda.

Penerimaan azas "pendidikan H.B.S. yang khas bagi Hindia Belanda" tersebut di atas, membawa konsekwensi ekstrim untuk mengadakan reorganisasi seluruhnya dari 3 HBS 5 tahun yang sudah ada. Reorganisasi ini tidak dapat dilakukan mendadak sekaligus, tetapi harus secara berangsur-angsur.

Dengan H.B.S. 5 tahun yang ke-IV yang akan didirikan di Bandung, akan segera dimulai dengan meninggalkan sistim yang lama dan mulai nenerapkan sistim baru, yang diperhitungkan untuk kebutuhan semua bangsa dan semua lapisan atas penduduk Hindia Belanda. Direktur Pendidikan dan Agama dapat menyetujui pendapat Hoekstra dalam suratnya tanggal 12 Januari 1914 nomor 5, bahwa H.B.S. 5 tahun yang ke-IV di Bandung didirikan sebagai H.B.S. 5 tahun khas Hindia Belanda, yang terbuka bagi murid-murid E.L.S., murid-murid terbaik sekolah Bumiputera kelas 1, dan H.C.S. Dan H.B.S. inilah yang ia usulkan untuk dilaksanakan.

Di kalangan penduduk Belanda tentunya tidak setuju dengan didirikannya H.B.S. sedemikian, tetapi kebutuhan sebagian kecil harus mengalah demi kebutuhan bagian terbesar penduduk Hindia Belanda. Penduduk golongan Belanda masih akan lama dapat menikmati hak-hak yang diistimewakan, mereka masih dapat memilih salah satu H.B.S. 5 tahun yang sudah ada di Betawi, Surabaya dan Semarang.

Gubernur Jenderal dimohon untuk mengusulkan kepada Menteri Jajahan, jika beliau dapat menyetujui pandangan-pandangan tersebut di atas, agar Menteri menghubungi dan mengusulkan kepada Menteri Urusan Dalam Negeri, supaya ijazah sekolah menengah Hindia Belanda seperti yang direncanakan di atas, baik yang bersambung ke bawah dengan MULO yang sudah ada, maupun yang bersambung dengan E.L.S., sekolah Bumiputera kelas 1 dan H.C.S., oleh Pemerintah dinyatakan dalam semua hal sama tingginya dengan ijazah H.B.S. 5 tahun yang sudah ada di Hindia Belanda dan H.B.S. 5 tahun di Negeri Belanda.

Setelah pernyataan persamaan itu telah diperoleh, maka akan perlu ada pembicaraan lebih lanjut antara Menteri Jajahan dengan Pemerintah Hindia Belanda, apakah sekolah menengah Hindia Belanda akan diatur menurut rencana Inspektur Hoekstra dengan perubahan jika dipandang perlu, atau kursus lanjutan dari MULO. Baru sesudah itu dapat dibuat rancangan untuk pos Anggaran Belanja yang bersangkutan.

56. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (Pleijte) tanggal 19 Mei 1914 nomor 535/1

Untuk memenuhi surat Menteri Jajahan tanggal 4 Desember 1913 Bagian A1 Nomor 53/2857, Gubernur Jenderal telah menugaskan Direktur Pendidikan dan Agama untuk mengajukan usul-usul tentang pendirian sebuah H.B.S.5 tahun di Bandung yang tepat pada waktunya sehingga akan dapat diperhitungkan dalam Anggaran Belanja tahun 1915. Sebelumnya Gubernur Jenderal telah menugaskan Direktur P.A. untuk mempertimbangkan kemungkinan pendirian sebuah H.B.S. yang lebih bersifat khas Hindia Belanda dan bersambungan dengan pendidikan Bumiputera. Kedua tugas itu telah dipenuhi dengan suratnya tanggal 16 Maret 1914 nomor 5080, dimana Dr. Hazeu mempertimbangkan supaya sekolah baru di Bandung itu dijadikan H.B.S.5 tahun khas Hindia Belanda, yang menghilangkan pengajaran bahasa Perancis dan dengan perubahan bahan pelajaran di beberapa matapelajaran lainnya akan dapat memberikan pendidikan umum dan kecakapan untuk pendidikan tinggi sama seperti H.B.S. yang telah ada menurut model H.B.S. Belanda.

Menurut Dewan Hindia Belanda, dalam nasehatnya tanggal 1 Mei 1914 nomor XXXI, Dewan setuju dengan Direktur P.A. untuk memenuhi keinginan-keinginan kalangan Bumiputera untuk memperoleh pendidikan yang dapat mencapai diploma yang memberikan fasilitas yang sama seperti diploma H.B.S.5 tahun. Tetapi Dewan tidak dapat menyetujui cara yang diuraikan oleh Dr. Hazeu dalam suratnya di atas. Jika toh persamaan diploma bagi H.B.S. khas Hindia Belanda dapat diperoleh, Dewan tidak setuju azas-azas baru ini diterapkan pada sekolah

baru di Bandung, tetapi seyogyanya pada salah satu dari 3 sekolah yang sudah ada, misalnya H.B.S. di Semarang.

Gubernur Jenderal mengakui, bahwa karena telah diputuskan dalam rencana anggaran belanja 1915 mengenai pendirian H.B.S.5 tahun di Bandung, sekolah itu didirikan menurut model lama, dan azas-azas baru akan diterapkan pada H.B.S. yang telah ada misalnya di Semarang, tidak akan menunggu sampai ada keputusan mengenai azas "mendirikan sekolah menengah khas Hindia Belanda".

Ia menjelaskan, bahwa ia dan Dr. Hazeu sama sekali tidak bermaksud untuk sebagai konsekwensi dari penerimaan azas-azas yang diusulkan, untuk merubah seketika dan seluruhnya 3 H.B.S. yang sudah ada, dengan merugikan kepentingan banyak orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Ia akan merasa puas dengan diterimanya azas itu dan diterapkannya di satu H.B.S. saja, dan di kemudian hari dengan mengingat apa yang diajarkan dalam praktek dan arah yang akan diambil oleh perubahan pendidikan di Negeri Belanda, akan dapat ditentukan sampai sejauh mana jalan yang telah ditempuh dan dapat dilanjutkan.

Mengenai azasnya sendiri, Gubernur Jenderal mengharap perhatian Menteri Jajahan atas pandangan yang dikemukakan dalam suratnya tanggal 17 Juli 1913 nomor 839/2. Dikemukakan kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan oleh pengaturan pendidikan menengah di Hindia Belanda bagi orang-orang Bumiputera, yang ingin masuk Universitas di Negeri Belanda atau lembaga-lembaga yang menuntut syarat diploma H.B.S.5 tahun.

Karena syarat pengetahuan bahasa Perancis pada ujian masuk, maka praktis bagi orang Bumiputera tidak ada jalan lain kecuali menempuh jalan melalui E.L.S., yang hanya mungkin bagi beberapa gelintir orang Bumiputera saja. Bagi mereka-pun, yang telah menikmati pendidikan rendah yang terbaik - yang diperuntukkan Pemerintah bagi mereka yakni H.I.S. - tertutup juga jalannya untuk mencapai diploma yang membukakan pintu masuk ke pendidikan tinggi di Negeri Belanda.

Dalam surat tersebut di atas Gubernur Jenderal mencarikan jalan penyelesaian kesulitan ini dengan mengadakan sekolah menengah 2 tahun yang khas Hindia Belanda yang bersambungan dengan MULO, yang akan dapat memberikan pendidikan - yang tidak sama tetapi dipersamakan dengan pendidikan H.B.S.5 tahun, sehingga murid-murid yang dididik di sekolah itu dapat diterima ujian masuk sekolah tinggi teknik atau sekolah untuk mencapai diploma dokter.

Untuk dapat memungkinkan sambungan dengan dan pindahan ke H.B.S. di Negeri Belanda pada tiap saat yang dikehendaki, maka H.B.S. di Hindia Belanda harus sama dalam pengaturan dan rencana pelajaran.

Kenyataan, bahwa sekarang akan didirikan H.B.S.5 tahun yang keempat, maka timbullah pertanyaan, apakah keseragaman dengan H.B.S. Negeri Belanda akan masih harus tetap dipertahankan. Masalah ini harus dengan sungguh-sungguh ditinjau kembali sekali lagi, dan untuk ini tugas diberikan kepada Direktur Pendidikan dan Agama.

Sekarang di Hindia Belanda sudah ada 3 H.B.S.5 tahun yang memberikan kepada orang-orang Eropa yang tinggal di sini pendidikan yang sama dan sama bentuknya dengan yang ada di Negeri Belanda. Dapatkah orang mengatakan, jika di H.B.S. ke-4 yang akan didirikan ini diberikan lebih banyak perhatian pada golongan penduduk lainnya, bahwa kepentingan pendidikan penduduk Eropa dikorbankan bagi kepentingan Bumiputera dan Timur Asing? Apakah kepentingan penduduk Eropa, yang sangat menghargai paralelisme dengan H.B.S. Negeri Belanda, tidak diperhatikan lebih dari cukup, jika 3 dari 4 H.B.S. diatur menurut kebutuhan mereka? Apakah bukan suatu tuntutan yang wajar dan adil, bahwa satu H.B.S. dengan sengaja memperhatikan kepentingan murid-murid Hindia Belanda - terutama murid Bumiputera, yang tidak memerlukan paralelisme dan justru menjumpai rintangan besar dari paralelisme di jalan pendidikan mereka? Dirasakan sangat berat bagi murid Bumiputera untuk di samping harus menguasai secara mendalam bahasa Belanda sebagai bahasa asing, masih juga harus menguasai 3 bahasa Barat lainnya.

H.B.S. dengan sifat yang dipikirkan bagi murid Bumiputera juga akan memberikan banyak keuntungan bagi murid-murid Eropa dan Indo-Eropa di Hindia Belanda.

Menurut pendapatnya adalah hak bagi penduduk Bumiputera, bahwa ia dengan mempergunakan pendidikan di H.I.S. dengan berangsur-angsur dapat menempuh jalan ke pendidikan tinggi. Karena dengan jalan ini tidak pernah diberikan pendidikan bahasa Perancis, pada ujian masuk ke Universitas atau perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda, syarat penguasaan pengetahuan bahasa Perancis harus dihapuskan. Jika dibandingkan dengan luar negeri misalnya di Inggris, ternyata bahwa bahasa Perancis bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan. Dan tidak perlunya bahasa Perancis terbukti pula dari pengalaman dokter-dokter Jawa yang dapat memperoleh diploma dokter di Negeri Belanda.

Syarat untuk menguasai 3 bahasa Asing disamping penguasaan bahasa Belanda bagi murid Bumiputera merupakan palang pintu penutup untuk dapat masuk Universitas Negeri Belanda, dan syarat ini harus dihapuskan.

Tuntutan ini bukan hanya tuntutan hak dan keadilan, tetapi dapat dikatakan juga tuntutan politik dari zaman, tuntutan kepentingan nasional.

Tidak sukar untuk melihat ke depan, akibat apa yang akan timbul jika kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi negeri Belanda terus-menerus tidak diberikan kepada anak Bumiputera menurut jalan yang dapat ditempuh secara praktis: Orang akan memperolehnya di tempat lain, yang tidak diberikan oleh negeri Belanda. Mereka belajar di universitas luar negeri, memperoleh diploma ilmiah dari luar negeri, karena Diploma Belanda tidak dapat atau terlalu sukar dicapai oleh mereka, karena kakunya program pendidikan Belanda.

Keluhan semacam itu juga didengar dari para mahasiswa dari luar negeri, yang ingin belajar di negeri Belanda. Kekakuan dalam program pendidikan Belanda merugikan posisi Belanda di dunia, dan ini akan lebih besar artinya, jika banyak kawula Hindia Belanda

mencari kesempatan pendidikan tinggi di negeri-negeri lain. Tidak disangsikan, bahwa peraturan pendidikan tinggi dan syarat-syarat untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut dengan hasil baik, yaitu dengan ujian masuk yang ditetapkan, pertama-tama harus diuji pada kebutuhan Belanda dalam arti sempit. Tetapi jika negeri Belanda tidak mau melepaskan pimpinan dan pembinaan atas pendidikan intelektual di bagian-bagian lain dari negara, yaitu di Hindia Belanda, makin lama harus makin banyak memperhatikan kebutuhan dari bagian-bagian lainnya. Terutama sesuatu dari keseragaman yang kaku dalam syarat-syarat ujian masuk harus dikorbankan.

Saat yang menguntungkan untuk melakukan dorongan ke arah ini nampaknya telah tiba, karena sekarang peraturan persiapan pendidikan tinggi Negeri Belanda akan ditinjau kembali. Saat ini harus dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan Hindia Belanda kepada Menteri Urusan Dalam Negeri.

Dimohon bantuan Menteri Jajahan untuk membuka jalan bagi sekolah menengah Hindia Belanda, yang bersambungan dengan H.I.S. dan membuka jalan masuk ke lembaga pendidikan seperti diploma akhir H.B.S.5 tahun sekarang.

PENDIDIKAN BAGI ORANG-ORANG CINA

57. Surat Penasehat Pemerintah Urusan Cina (W.J. Oudendijk) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 2 Oktober 1913 nomor 52 Rahasia

Dengan adanya surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1913 nomor 272/A, maka Gubernur Jenderal dimohon perhatiannya atas hal-hal berikut.

Pada pembicaraan mengenai masalah bagaimana mengatur pendidikan bagi orang-orang keturunan Cina, pertama-tama harus diinsyafi tujuan yang harus dicapai. Dengan jujur harus diakui, bahwa tujuan itu bercabang dua. Pertama-tama, bagaimana caranya memberikan kepada anak-anak penduduk keturunan Cina - pembayar pajak yang baik -

kesempatan untuk maju secara rohaniah menurut tuntutan zaman modern, agar supaya menjadi anggota masyarakat Hindia Belanda yang baik, berguna, dan setia kepada Pemerintah Belanda.

Kedua, bagaimana caranya mencegah mereka ke suatu arah, yang mereka tempuh akhir-akhir ini karena terpaksa.

Untuk mencapai tujuan ini, harus selalu diingat tuntutan dan keinginan yang berhubungan dengan pendidikan, yang telah dikemukakan para kawula keturunan Cina. Harus segera diambil tindakan untuk mencapai tujuan kedua tersebut di atas.

Perlakuan terhadap orang-orang keturunan Cina, yang selalu melukai perasaan, menyakitkan hati dan membuat mereka berdendam, telah menyebabkan bahwa mereka - juga yang turun-temurun tinggal di sini - makin lama makin kuat berpaling ke Cina, negara dari mana mereka mengharap akan dapat datang pertolongan, sehingga mereka juga di bidang pendidikan menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan di Cina baru. Penduduk "Timur Asing" berusaha untuk sungguh-sungguh menjadi asing.

Dilihat tidak ada bahayanya bahwa orang-orang Cina ingin belajar bahasa Cina, karena hal itu adalah keinginan yang wajar. Lama kelamaan mereka, yang telah berdiam di sini untuk selama-lamanya, akan mengetahui bahwa bahasa "Mandarin" di sini "harga pasarannya" tidak tinggi. Banyak orang Cina mengatakan, apakah benar atau tidak, bahwa:

"Pemerintah Belanda menganggap kita sebagai orang-orang yang kurang berharga; kita boleh membayar pajak, tetapi kita tidak mempunyai hak-hak baik dari orang Belanda maupun orang Asing; pendidikan pun tidak diberikan kepada kita, maka kita akan berusaha sendiri dan kita akan menunjukkan bahwa kita dapat berdiri sendiri tanpa Pemerintah Belanda; akhirnya kita toh orang Cina, meskipun kita sejak lama berdiam di sini, dan di sana Cina - negara leluhur kita - yang mendirikan sekolah-sekolah modern dan yang menaruh perhatian kepada kita; jadi kita mendirikan sekolah-sekolah Cina saja dan tidak ambil peduli lagi dengan orang-orang Belanda".

Itulah pikiran yang ada di semua sekolah Cina, dan dengan didirikannya sekolah-sekolah H.C.S. tidak akan melemahkan semangat itu, bahkan sebaliknya di sana-sini memperkuatnya. Tetapi tidak semua orang Cina berpikiran demikian. Banyak yang meskipun ikut-ikutan dalam gerakan baru itu sesungguhnya menginginkan pendekatan lebih banyak pada peradaban Belanda, dan inilah yang menjadi tujuan utama dari Pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu tidak perlu cemas, untuk mengadakan tindakan melawan arus, dengan menarik sebagian besar pemuda Cina - terutama Cina Peranakan - ke sekolah-sekolah Pemerintah dengan pengajaran yang lebih baik.

Pendidikan Belanda tidak akan dapat membuat pemuda Cina menjadi warganegara yang setia, yang di masa depan akan merupakan kekuatan di Hindia Belanda dan akan kerja sama dengan Belanda dalam memajukan Hindia Belanda ke arah yang diinginkan Pemerintah, jika semua peraturan kekecualian dalam hukum terhadap warga keturunan Cina tidak dihapuskan, sehingga kewarga negaraan merupakan kebanggaan bagi mereka. Maka dari itu diusulkan supaya sistim surat Pas bagi warga Cina dihapuskan, sehingga mereka di tanah kelahiran di mana mereka hidup di bawah Pemerintah yang menganggap mereka sebagai warganegara-ranya mempunyai kebebasan bergerak.

Tidak dapat diharapkan untuk membuat seorang Cina menjadi orang Belanda, tetapi cukup, jika ia menjadi warga negara Hindia Belanda yang setia. Dan ini tidak dapat diharapkan dari sekolah-sekolah Cina. Mereka diusahakan supaya menjadi warga negara Republik Cina, juga bagi Cina peranakan.

Harus dipergunakan semua sarana yang ada untuk menghancurkan pengaruh sekolah-sekolah Cina. Sarana-sarana itu ada 3 macam:

1. Memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak Cina untuk diterima di semua sekolah yang disebut "Sekolah Eropa" dengan perlakuan yang sama.
2. Mengadakan sambungan sekolah H.C.S. dengan sekolah H.B.S. dan sekolah MULO, dengan penerimaan yang cukup besar.

3. Mengadakan persaingan di dalam bidangnya sendiri, dengan memberikan pengajaran bahasa Cina, secara pilihan (fakultatif) dengan jam-jam pelajaran pada sore hari.

Ad.1

Dengan menarik suratnya tanggal 21 Juli 1913 nomor 20 ia mengusulkan lagi supaya di semua sekolah yang disebut "Sekolah Eropa" ditentukan jumlah tempat tertentu (jumlah tidak kecil) yang diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputera dan Cina. Keberatan tidak mengetahui bahasa Belanda dapat diatasi dengan mengadakan kelas-kelas persiapan, dengan jumlah tempat yang seimbang dengan tempat yang disediakan bagi mereka.

Ia mengusulkan supaya H.C.S. diubah sedemikian rupa sehingga pendidikan hanya diberikan sampai dengan kelas 3, dan kemudian setelah diuji kecakapan bahasa Belanda murid-murid tersebut disuruh pindah masuk kelas 4 dari "Sekolah Rendah Umum", yang akan didirikan dan dibagi dalam kelas nomor 1 dan kelas nomor 2 menurut tarip bayaran sekolah. Di kelas 4 semua murid cukup menguasai bahasa Belanda. "Sekolah separo" seperti H.C.S. yang diubah ini dapat juga didirikan bagi anak-anak Bumiputera.

E.L.S. yang pada asalnya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, kenyataannya sekarang terutama dikunjungi oleh anak-anak berdarah campuran.

Ia tidak dapat mengerti, dengan hak apa Negara mengeluarkan biaya yang sangat besar dari sarana-sarana pajak untuk pendidikan dan dengan mudah begitu saja menutup kesempatan masuk bagi sebagian besar warganegara - pembayar pajak - karena dianggap orang yang kurang berharga. Pemberian hak istimewa (kepada beberapa orang Eropa) lama-kelamaan tidak akan dapat dipertahankan. Usaha untuk membuat Hindia Belanda menjadi bagian dari Negara yang berdiri sendiri, dengan tujuan kemakmuran sendiri, perkembangan sendiri menurut garis-garis peradaban Belanda, perasaan kesatuan sendiri atas dasar nilai-nilai Belanda, harus menuju ke azas, bahwa semua sekolah yang didirikan dan dikelola dari keuangan umum, tidak

dapat hanya diperuntukkan bagi golongan orang-orang yang diistimewakan, tetapi harus menjadi alat dan sarana untuk memberikan peradaban dan pengetahuan kepada tiap orang (warga negara) yang menginginkan dan dapat membayar. Dengan demikian Negara memenuhi panggilannya dan memperhatikan keadilan terhadap tiap warga negaranya. Perlu mulai diakhiri pemberian hak istimewa di bidang pendidikan. E.L.S. dengan pengeluaran yang besar, jangan hanya diperuntukkan untuk beberapa gelintir anak Eropa dan beberapa anak Indo-Eropa, tetapi harus menerima anak-anak Bumiputera dan Cina dalam jumlah tertentu tetapi besar.

Sekolah rendah "separo" (kelas 1 s/d kelas 3) dapat mulai didirikan bagi anak-anak Cina dan Bumiputera yang kemudian dipersatukan pada "Sekolah Rendah Umum", bagi semua bangsa, seperti yang telah diusulkan di atas.

Usul-usul tersebut dikemukakan dari sudut pandangan keadilan, karena akan menuju ke pembentukan suatu Masyarakat Hindia Belanda yang terdidik modern menurut garis-garis peradaban Belanda, dan dimana semua golongan penduduk akan dapat merasa, bahwa mereka ikut termasuk di dalamnya. Dalam keadaan sekarang dapat juga membantu kalangan Cina yang berada, untuk memalingkan pandangannya dari sekolah-sekolah Cina. Mereka akan bangga, bahwa anak mereka boleh masuk Sekolah Eropa.

Banyak orang Eropa mungkin sekali tidak mau lagi memasukkan anak-anaknya ke sekolah Eropa demikian itu, karena tidak menginginkan anak-anaknya duduk bersama-sama dengan anak Indo-Belanda, anak Bumiputera dan anak Cina. Mereka dapat saja mendirikan sekolah Eropa Khusus, sekolah Belanda swasta, baik oleh perkumpulan sekolah maupun oleh usaha swasta dan didirikan di tempat-tempat dengan hawa sejuk seperti di Bandung, Sukabumi, Lembang, dll.

Ad, 2

Bagi banyak orang Cina pendidikan di sekolah rendah saja tidak cukup. Maka diusulkan supaya sekolah-sekolah H.C.S. yang sekarang ada dapat bersambungan dengan H.B.S. dan MULO, dan dapat

menerima banyak murid Cina. Hal ini mungkin sekali dapat mengurangi hasrat masuk ke sekolah Eropa. Terutama bagi orang-orang Cina yang telah mengunjungi sekolah menengah Belanda dan Universitas Belanda merupakan orang Cina yang paling setia kepada Belanda, karena lebih mendalami peradaban Belanda.

Ad.3

Untuk mematahkan pengaruh perkumpulan sekolah Cina diusulkan pengajaran bahasa Cina, sebagai kursus pilihan (fakultatif) pada sore hari.

Pengajaran bahasa Cina yang semata-mata tidak demi bahasanya, akan tetapi untuk menyaingi sekolah-sekolah Cina, harus dapat memberikan gambaran (cara) yang sangat menarik dan diinginkan orang Cina, yaitu bahasa-tulis Mandarin. Apakah warga orang Cina bicara bahasa Cina yang baik atau yang tidak baik, bahkan tidak belajar apa-apa dari pengajaran bahasa Cina, tidak menjadi soal bagi Pemerintah.

Pengetahuan bahasa-tulis Mandarin perlu untuk mengadakan dan memelihara hubungan dagang dengan Cina. Hubungan dagang di Hindia Belanda berada di tangan orang-orang Cina. Dengan pengetahuan bahasa-tulis Mandarin, Cina-cina peranakan akan dapat lebih baik mengatasi persaingan dengan orang-orang Cina totok, yang makin lama makin banyak masuk ke sini. Melupakan sama sekali bahasa-tulis Mandarin oleh penduduk Cina yang sejak lama berdiam di sini akan merugikan, karena menjadi lebih perlu datangnya orang-orang baru dari Cina secara terus-menerus.

Kepada murid-murid Cina di H.C.S. mulai umur 8 tahun, jadi setelah beberapa tahun mendapat bahasa Belanda, diberikan pengajaran bahasa Cina pada kursus pada sore hari. Pelajaran ini pilihan (fakultatif), dan bahasa Cina diberikan tidak sebagai bahasa pengantar, tetapi sebagai mata pelajaran. Kursus ini diberikan di H.C.S. yang sudah ada, dan di H.C.S. yang terdiri dari kelas 1 s/d kelas 3 (yang diusulkan) dan di 3 kelas tertinggi dari "Sekolah Rendah Umum" (yang diusulkan).

Jumlah H.C.S. jauh belum mencukupi untuk mencapai semua penduduk Cina, demikian juga masih tidak cukup bagi penduduk warga negara saja dan meskipun dengan dibatasi pada pembayar-pembayar pajak yang baik saja. Untuk memenuhi ini diperlukan biaya yang besar.

Diusulkan, jika keadaan mengijinkan, untuk mendirikan sekolah Belanda bagi pendidikan guru Cina, yang akan disertai pendidikan Belanda di semua sekolah di tempat-tempat yang belum ada sekolah Eropa, tetapi sudah ada sekolah perkumpulan Cina.

Untuk melakukan pengawasan yang cukup atas pengajaran bahasa Cina, terutama pada pengaturan pertama, perlu mengangkat seorang ahli Cina, yang di bawah pimpinan seorang pejabat dari Urusan Cina (paling baik yang mengerti bahasa Mandarin), akan mengatur kelas-kelas pelajaran Cina, menetapkan program bacaan dan membantu pada pengangkatan guru-guru. Ia mengusulkan untuk mengirimkan seorang pejabat muda dari Urusan Cina ke Peking untuk selama 1 tahun mempelajari bahasa Mandarin.

Kursus bahasa Cina sudah dapat dimulai, tanpa menunggu kembalinya pejabat itu dari Peking.

Tidak keberatan untuk sementara mempergunakan buku-buku bacaan, yang sekarang dipakai di sekolah-sekolah Cina. Di Cina sedang disusun buku-buku bacaan dengan dasar pelajaran Kong Hu Cu, dan jika itu sudah diterbitkan, buku itulah yang dipakai.

Dalam tahun 1907 pernah dikemukakan masalah pengajaran bahasa Mandarin di sekolah H.C.S. kepada Pemerintah Belanda di Den Haag. Perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa tujuan usul pengajaran bahasa Mandarin ialah untuk menyaingi sekolah-sekolah Cina yang ada. Selain itu karena pengetahuan bahasa-tulis Mandarin bagi warga negara Hindia Belanda keturunan Cina perlu sekali, dengan mengingat juga perkembangan dagang Hindia Belanda ada di tangan Cina peranakan. Bersama surat ini juga dilampirkan terjemahan dari beberapa Bab dari Nota seorang guru Cina di Jawa, yang mengemukakan perlunya didirikan sekolah-sekolah pertukangan bagi anak-anak Cina.

58. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (Pleijte) tanggal 5 Juni 1914 nomor 617/11

Menyusuli laporan pos nomor 671 Gubernur Jenderal menyampaikan kepada Menteri Jajahan salinan dari nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 15 Mei 1914 nomor XXII mengenai usul Direktur Pendidikan dan Agama untuk mengadakan kursus-kursus bahasa Cina pada sore hari di beberapa H.C.S. seperti termuat dalam suratnya tanggal 1 April 1914 nomor 628. Dalam konperensi para ahli yang diadakan oleh Direktur Pendidikan pada tanggal 28 Pebruari 1914 yang dihadiri a.l. oleh Oudendijk dan B.A.J. van Wettum Penasehat Urusan Jepang dan Cina, ditentukan bahwa sangat sedikit diharapkan dari tindakan yang diusulkan sebagai sarana untuk menyaingi sekolah-sekolah Tiong Hoa Hwee Koan.

Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya antara lain mengemukakan bahwa tidak dapat dianggap kewajiban Pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan pengajaran bahasa tulis Cina dan salah satu bahasa dialect Mandarin sebagai bahasa percakapan, yang dibutuhkan kalangan Cina bagi perdagangan dan perniagaan mereka dengan negeri Cina.

Bahwa jika usul pengajaran bahasa Cina di H.C.S. dilaksanakan, maka akibatnya mungkin sekali jika didatangkan guru-guru bahasa Cina dari negeri Cina, akan membahayakan jiwa yang baik dari murid-murid H.S.C. Disamping itu kepada murid akan ditanamkan rasa keterikatan pada kebudayaan Cina dan patriotisme Cina dalam arti sempit.

Sifat-sifat tersebut sesungguhnya tidak perlu dipupuk bagi warga negara Belanda dengan keuangan Negara.

Bahwa jika usul tersebut dipenuhi, maka semua penduduk Timur Asing lainnya juga akan menuntut perlakuan yang sama.

Bahwa kesimpulannya ialah mengusulkan supaya usul Direktur Pendidikan yang berdasarkan pendapat bekas Penasehat Urusan Cina - (Oudendijk berhenti dalam bulan Maret 1914) - jangan dilaksanakan.

Bahwa kemajuan penduduk Hindia Belanda keturunan Cina seharusnya dibina dalam jiwa Barat dan bukan dalam jiwa Cina kuno.

Bahwa belum dapat ditentukan, apakah tindakan-tindakan yang dipertimbangkan oleh Hazeu akan menghasilkan "buah yang baik" atau malah-an sebaliknya "buah yang buruk".

Gubernur Jenderal dapat menyetujui seluruhnya nasehat Dewan Hindia Belanda. Ia belum dapat mengambil keputusan yang definitif, tanpa lebih dahulu memberikan kesempatan kepada Menteri untuk menelaah dan menilai masalahnya dan mungkin menyatakan pandangan yang lain. Jika ada sesuatu dari pendapat Oudendijk akan dapat dilaksanakan, maka saatnya yang tidak akan datang lagi ialah sekarang. Sekarang akan dapat diadakan tindakan-tindakan ke arah itu, tanpa menimbulkan kesan bahwa ada paksaan dari luar.

Mengingat masih adanya kemungkinan, bahwa Menteri akan menyuruh melaksanakan pendidikan kepada orang-orang Cina menurut cara yang diusulkan Oudendijk, maka Gubernur Jenderal merasa berkewajiban untuk memberikan pilihan agar memungkinkan Menteri mengambil suatu keputusan dalam pembicaraan Anggaran Belanja untuk tahun yang akan datang.

PENDIDIKAN RAKYAT - SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPUTERA KELAS 2 &
SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN (VERVOLG SCHOOL)*

59. Surat Menteri Jajahan (Pleijte) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 9 Januari 1914 nomor 35/72

Dalam pembicaraan mengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda tahun 1914 dalam Majelis Rendah Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa anggota mendesak supaya diadakan perluasan yang besar dari jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 dan menyesalkan, bahwa rencana perluasan jumlah sekolah Bumiputera yang telah diterima dalam tahun 1907 tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Dalam Memori Jawaban Menteri menunjuk pada garis politik yang diikuti pendirian sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 baru (menarik surat Gubernur Jenderal lama tanggal 8 Nopember nomor 1510/12).

* Catatan penyadur:

Istilah sekolah "lanjutan" bukanlah dalam arti sekolah menengah seperti keadaan sekarang, tetapi istilah tersebut adalah terjemahan dari "vervolg" yang berarti (ke)lanjutan dari Sekolah Dasar (Desa) 3 tahun.

Menteri juga mengemukakan pendapatnya, bahwa Sarekat Islam - sebagai pernyataan kebangkitan masa yang besar dari Penduduk Bumiputera - telah mengemukakan perlunya mengurus pendidikan rakyat yang lebih baik dan harus didirikan lebih banyak sekolah Bumiputera kelas 2.

Jika dikemukakan bahwa pendidikan di sekolah ini lebih baik daripada di sekolah desa, hal itu bukan semata-mata dilihat dari rencana pelajarannya yang lebih sederhana daripada sekolah Bumiputera kelas 2, tetapi dilihat juga dari mutu tenaga pengajarnya. Pendidikan mereka dibandingkan dengan pendidikan guru-guru Pemerintah, tanpa disangsikan lagi kurang memberikan jaminan bagi pendidikan rakyat yang baik. Dalam hal ini sekolah-sekolah desa akan dapat diperbaiki tetapi mungkin sekali tidak akan mudah mengadakan perbaikan dengan segera dan secara besar-besaran, karena pengangkatan tenaga pengajar yang terdidik lebih baik dan menuntut penggajian yang lebih tinggi, selain tergantung dari kekuatan keuangan dari desa dan keikhlasan serta kesediaan para warga desa untuk memberikan lebih banyak pengorbanan demi sekolah mereka. Perkembangan yang cepat dari pendidikan desa yang menyangkut jumlahnya dapat disetujui sepenuhnya. Tetapi sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, dan memperhatikan tanda-tanda jaman, Menteri berpendapat bahwa tambahnya jumlah sekolah desa tidak boleh menghalang-halangi perluasan yang kuat dan juga perlu bagi kesempatan untuk menyediakan pendidikan Sekolah Bumiputera yang lebih baik bagi penduduk.

Mengingat hal ini, maka menurut pendapat Menteri garis politik termaktub dalam lampiran Lembaran Negara nomor 7478 perlu sekali diubah.

Jika di suatu tempat diketahui, bahwa jumlah permintaan masuk menjadi murid sekolah Pemerintah begitu besar sehingga tidak semua permintaan dapat dipenuhi, sedangkan perluasan ruang sekolah tidak mungkin lagi, maka menurut pendapatnya keputusan bahwa di sana akan didirikan sebuah sekolah baru, tidak perlu menunggu sampai terbukti bahwa sekolah desa yang akan didirikan di sekeliling tempat itu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat, tetapi pembukaan sekolah baru itu harus segera dilaksanakan.

Sementara tidak perlu dikhawatirkan, bahwa penerapan politik yang lebih longgar terhadap sekolah Bumiputera kelas 2 - seperti yang diinginkan - tidak akan merupakan persaingan berat pada sekolah-sekolah desa, mengingat bahwa di bidang pendidikan rakyat lapangan kerja masih terbentang luas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan menarik apa yang telah dibicarakan dalam pembicaraan anggaran belanja dalam Majelis Rendah (pembicaraan tahun 1913-1914 halaman 381 kolom 1), Menteri mohon kepada Gubernur Jenderal supaya pada pendirian sekolah kelas 2 yang baru selanjutnya diusahakan bekerja menurut rencana sedemikian rupa sehingga memungkinkan perluasan besar dari jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 yang telah dilaksanakan dalam tahuntahun 1908-1912, dilanjutkan dengan cara dan kecepatan yang sama.

Jika waktu yang tersedia tidak mengijinkan untuk mengajukan rencana terperinci pada pembicaraan rencana anggaran belanja tahun 1915, maka akan sangat dihargai bahwa dalam rencana anggaran belanja itu diusulkan jumlah sekolah baru yang jauh lebih besar daripada yang diperhitungkan untuk tahun anggaran yang berjalan ini.

60. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 7 April 1914 nomor 6663

Gubernur Jenderal dalam bulan-bulan akhir tahun 1913 menugaskan Direktur Pendidikan dan Agama untuk mengajukan usul perluasan sistematis dari jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 di Jawa dan Madura. Masalah ini telah dibicarakan pada kesempatan konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera dalam bulan Nopember 1913 mengenai berbagai tindakan yang perlu diambil berhubung dengan makin meningkatnya kebutuhan pendidikan.

Sebagai hasil konperensi dianjurkan untuk menentukan angka perbandingan tertentu antara jumlah sekolah yang akan didirikan dan jumlah penduduk. Menurut data dalam bulan Nopember 1913, ternyata angka perbandingan itu untuk seluruh Jawa dan Madura ialah satu sekolah untuk 43.000 penduduk, sedangkan jumlah sekolah yang ada dan

tersebar di berbagai residensi adalah sebagai berikut:

Bantam 26, Betawi 42, Priangan 80, Cirebon 53, Madura 26, Pasuruan 69, Besuki 32, Banyumas 47, Pekalongan 35, Semarang 55, Rembang 30, Surabaya 53, Kedu 58, Madiun 34, Kediri 47, Surakarta 29, dan Yogyakarta 21.

Untuk penyebaran merata dari jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 di Jawa dan Madura tiap keresidenan ada hak untuk mempunyai jumlah sekolah menurut angka perbandingan tersebut, jadi:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{43.000} \times 1 \text{ sekolah}$$

Jika sekarang angka perbandingan ini ditetapkan satu sekolah per 25.000 penduduk, maka jumlah sekolah akan meningkat jadi 1276 dan terbagi: Bantam 33, Betawi 89, Priangan 112, Cirebon 73, Pekalongan 84, Semarang 107, Rembang 61, Surabaya 100, Madura 70, Pasuruan 84, Besuki 42, Banyumas 62, Kedu 99, Madiun 59, Kediri 80, Surakarta 48 dan Yogyakarta 73.

Dalam penetapan angka perbandingan tersebut di atas ada sesuatu yang tidak memuaskan, karena penetapan itu semau-maunya, dan jumlah persentase dari mereka yang akan menikmati pendidikan dibandingkan dengan jumlah persentase dari mereka yang tak berhak lagi mengikuti pendidikan.

Di Jawa dan Madura jumlah murid sekolah Bumiputera kelas 2 rata-rata 139 per sekolah, sedangkan jumlah anak berumur masuk sekolah adalah 16.000 per 100.000 penduduk.

Maka dari itu dipertimbangkan untuk pengganti dari angka perbandingan tersebut diambil pembagian administratif Jawa dan Madura sebagai dasar. Dari 1288 ibukota kecamatan (di luar Swapraja) yang sudah ada sekolah Bumiputera kelas 2 ada 497.

(Ikhtisar dari penambahan jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 menurut kriterium ini).

Mengingat kenyataan, bahwa Departemen Pekerjaan Umum tiap tahun hanya dapat membangun gedung sekolah dalam jumlah terbatas, maka diusulkan untuk membangun 60 untuk anggaran belanja tahun 1915, 80 untuk tahun 1916, 100 untuk tahun 1917, dst.

Karena menurut surat kawat Menteri Jajahan tanggal 9 Januari 1914 Bagian A1 nomor 35/72 dikehendaki perluasan yang lebih cepat, maka dengan Direktur Pekerjaan Umum diadakan pembicaraan lagi dan jumlah 60 tersebut diatas dijadikan 70, dengan ketentuan bahwa tidak ada kepastian mutlak bahwa gedung-gedung tersebut akan dapat selesai tepat pada waktunya. Dalam pembangunan sekian banyak gedung sekolah dapat saja timbul keadaan yang bersifat teknis tak terduga yang dapat menghambat pekerjaan.

Diusulkan supaya di tempat-tempat dimana ternyata mungkin dapat menyewa gedung atau ruangan sekolah yang diperlukan, atau dapat memperoleh gedung pemerintah, sekolah-sekolah baru dapat dibuka pada permulaan tahun 1915, dan bukan pada pertengahan Agustus 1915 sesudah Liburan Puasa.

(Perhitungan biaya personil dan materiil untuk perluasan yang diusulkan).

Dengan Nota tanggal 23 Pebruari 1914 nomor 14 Ziesel menjelaskan tugas dari Gubernur Jenderal yang disampaikan kepada Direktur Pendidikan dan Agama, supaya dipertimbangkan kemungkinan untuk memberikan kesempatan pada murid-murid tamatan sekolah desa yang letaknya berdekatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan akan didirikannya sekolah Bumiputera kelas 2 tidak lengkap oleh Pemerintah yang terdiri dari kelas 3 dan 4 pada sekolah kelas 2 biasa, maka akan terbentuk semacam sekolah Lanjutan (Vervolg school).

Mengenai ini perlu lebih dahulu dibicarakan dengan para Inspektur Pendidikan Bumiputera dan Inspektur Pendidikan Desa. Maka dari itu diusulkan supaya pelaksanaan tindakan mengenai sekolah lanjutan dipisahkan dari pelaksanaan perluasan sekolah kelas 2 yang dikemukakan di atas.

Jika Gubernur Jenderal mungkin akan memutuskan segera melaksanakan pikiran Ziesel pada tahun 1915 dengan mendirikan sekolah di beberapa tempat misalnya 25 sekolah lanjutan, maka dalam anggaran belanja tahun 1915 dapat dimasukkan pos pembiayaannya sebagai berikut:

1. Personil: dihitung 1 guru per sekolah, untuk tahun pertama

$$\frac{12 \times f.40 + 70}{2} = f.660.- \text{ per sekolah, untuk 25 sekolah} = f.16.500.--$$

2. Materiil: untuk pengaturan pertama f.250.-- per sekolah, untuk 25 sekolah = f.6.250.--

Untuk alat-alat pelajaran tidak perlu diadakan pos tersendiri, karena dibiayai dari pos anggaran belanja lain yang dapat ditambah.

61. Surat Sekretaris Pemerintah kepada Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) tanggal 7 Mei 1914

(Gubernur Jenderal menyetujui usul perluasan berangsur-angsur dari jumlah sekolah Bumiputera kelas 2, dan bersama dengan Dewan Hindia Belanda menyetujui "demi kepastian" jumlah tambahan 60 sekolah).

Mengenai pikiran Inspektur Pendidikan Rakyat Bumiputera (Ziesel), untuk tidak mendirikan sekolah Bumiputera kelas 2 yang lengkap di mana saja, tetapi di sana-sini mendirikan semacam sekolah kelas 2 yang bersambungan dengan sekolah desa, maka perlu diberitahukan bahwa pikiran itu disetujui oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal sangat menginginkan supaya Direktur Pendidikan dan Agama tanpa menunggu kembalinya Ziesel dari perjalanan dinas ke Maluku segera menangani masalah itu, dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh untuk mencari penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya.

Mengajukan usul-usul mengenai anggaran belanja untuk pelaksanaannya paling lambat dalam bulan Juli .

62. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 2 Desember 1914 nomor 2409

Memenuhi perintah dalam surat Sekretaris Pemerintah tanggal 7 Mei 1914 nomor 1137 dan diperingatkan lagi dengan surat tanggal 13 Nopember 1914 nomor 2680, supaya mengajukan usul-usul anggaran belanja untuk mendirikan sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 tidak lengkap, sekolah lanjutan dengan kelas 3 dan kelas 4 (mungkin sekali kelas 5), yang harus bersambungan dengan kelas 3 dari sekolah desa sebagai hasil buah pikiran dari Inspektur Pendidikan Rakyat Bumiputera (Ziesel), Direktur Pendidikan dan Agama mengemukakan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Seperti telah dikemukakan dalam surat tanggal 7 April 1914 nomor 6663 - yang diputuskan dengan Surat Keputusan tanggal 7 Mei 1914 nomor 10 - Direktur P.A. mengemukakan bahwa belum dapat segera diambil keputusan mengenai masalah tersebut di atas karena memerlukan pertimbangan dari para Inspektur Pendidikan Bumiputera.

Dua dari tiga Inspektur yang diminta pertimbangan menyatakan setuju dengan pikiran Inspektur Pendidikan Rakyat. Dalam suratnya tanggal 1 Juni 1914 nomor 1002 Inspektur Pendidikan Bumiputera Bagian I (Jawa Barat, J.C.J. Bommel) menyatakan bahwa dari sudut pandangan ilmu pendidikan di keresidenan Priangan tidak ada keberatan terhadap pendirian sekolah "vervolg". Banyak tamatan sekolah desa dapat mengikuti dengan baik pelajaran kelas 3 dari Sekolah Bumiputera kelas 2. Banyak guru sekolah desa di wilayahnya bermutu tinggi, dan menurut pendapatnya tidak akan memalukan jika diangkat guru pada sekolah kelas 2.

Dalam suratnya tanggal 2 Juni 1914 nomor 897/1, Pj. Inspektur Pendidikan Bumiputera Bagian II (Jawa Tengah: B.J. Visscher) menyatakan bahwa dari sudut pandangan ilmu pendidikan tidak ada keberatan. Kerugian bagi anak yang bersangkutan ialah bahwa mereka harus bersekolah 1 tahun lebih lama daripada jika ia langsung masuk sekolah Bumiputera kelas 2, dan menurut pendapatnya tidak mengimbangi (memperoleh) keuntungan finansial. Setiap kasus harus ditinjau secara

tersendiri dan dinilai oleh kondisi sekolah setempat, apakah di suatu tempat perlu didirikan sekolah kelas 2 lengkap atau sekolah vervolg.

Bahwa murid kelas 1 dan 2 di sekolah Bumiputera kelas 2 berkurang disebabkan karena banyak anak-anak oleh penilik sekolah disuruh masuk ke sekolah desa setempat, dan beberapa sekolah Bumiputera kelas 2 berubah menjadi sekolah lanjutan. Hal ini terbukti pada kunjungan inspeksi yang dilakukannya.

Dalam suratnya tanggal 23 Juni 1914 nomor 1230, Inspektur Pendidikan Bumiputera Bagian III (Jawa Timur, H.Ch. Croes) menyatakan bahwa nilai sekolah desa tidak sama dan bahwa sekolah desa yang jelek - dan ini banyak terdapat di wilayahnya - hampir tidak patut untuk dinamakan sekolah. Bahwa di sekolah-sekolah yang terbaik, mutu pendidikannya masih terlalu rendah untuk dapat dijadikan dasar dapat mengikuti pendidikan lanjutan dengan baik.

Mutu rendah pendidikan tersebut disebabkan tenaga pengajarnya terlalu kurang pendidikan, tidak cukup pengetahuan umum, masih terlalu muda, dan hampir tanpa pengawasan dan pembinaan.

Sekolah-sekolah lanjutan akan dapat didirikan di tempat-tempat di mana mutu pendidikan pada umumnya baik.

Direktur Pendidikan dan Agama pada kunjungan pribadi di beberapa sekolah desa dan sekolah Bumiputera kelas 2 di Jawa Tengah dan Jawa Barat mendapat kesempatan untuk dengan pengamatan sendiri memperoleh kesan tentang nilai di kedua kategori sekolah tersebut. Beberapa kali dengan sengaja kunjungan pada hari yang sama di sekolah desa dan di sekolah Bumiputera kelas 2 membuktikan adanya perbedaan cara menyajikan pengajaran di kedua sekolah tersebut. Cara menyajikan pengajaran di sekolah kelas 2 oleh guru yang pada umumnya tehnik terdidik lebih bermutu dan terutama lebih mendidik bagi murid-muridnya daripada pengajaran secara masinal dari kebanyakan guru desa.

Dari banyak pihak - terutama dari orang-orang Bumiputera yang berkepentingan a.l. Dwidjosewojo guru pada Sekolah Pendidikan Guru Bumiputera di Yogyakarta - dikemukakan bahwa perlu adanya perbaikan

dalam pendidikan dan penggajian guru desa. Selain itu harus ada tindakan pencegahan agar seorang guru tidak mengajar di dua kelas. Karena rendahnya penghasilan guru desa, maka banyak guru desa yang setelah beberapa tahun dapat memperoleh pengetahuan umum dan dapat diharapkan menjadi tenaga pengajar yang baik, pergi mencari dan memperoleh pekerjaan lain yang gajinya lebih baik. Mereka diganti oleh tenaga baru, masih terlalu muda, tidak berpengalaman dan berpendidikan sedikit sekali. Tidak jarang seorang guru yang masih muda dan tidak berpengalaman disertai dua kelas yang besar.

Direktur Pendidikan dan Agama tetap memandang sekolah desa sebagai satu-satunya sarana untuk mengadakan pendidikan rakyat yang nyata dan seumum mungkin dalam batas-batas keuangan yang memungkinkan. Tetapi ia tidak akan membiarkan keluhan kesah mengenai sekolah desa, yang begitu banyak, berlalu begitu saja.

Keluh kesah yang bertujuan supaya lebih baik didirikan sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 saja, tidak dapat dipenuhi. Keluhan harus menjurus ke arah perbaikan pendidikan guru desa dan perbaikan penghasilan guru desa, yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berusaha mencari pekerjaan lain.

Dalam Nota Inspektur Pendidikan Rakyat tanggal 23 Pebruari 1914 nomor 14 antara lain dikemukakan, bahwa banyak murid kelas 1 dan 2 dari beberapa Sekolah Bumiputera kelas 2, terutama di tempat-tempat yang kurang penting, keluar dari sekolah dan ini disimpulkan bahwa di tempat-tempat itu sekolah kelas 2 tidak cocok karena terlalu tinggi bagi petani yang sederhana, dan lebih baik di situ didirikan sekolah desa saja.

Direktur Pendidikan dan Agama tidak dapat menerima pendapat tersebut karena rencana pelajaran kelas 1 dan 2 dari Sekolah Bumiputera kelas 2 seperti membaca dan menulis bahasa Melayu, bahasa Daerah dengan huruf Jawa dan Latin, berhitung dengan bilangan bulat, tidak berbeda dengan pelajaran di sekolah desa. Bedanya hanya terletak pada mutu tenaga pengajar dalam hal umur, pengalaman, tingkat pengetahuan.

Keluarnya murid kelas 1 dan 2 sekolah Bumiputera kelas 2 harus dicari

dari sebab-sebab lain misalnya karena terlalu sedikitnya keinsyafan orang tua akan perlunya masuk sekolah secara teratur dan manfaat pendidikan pada umumnya. Terlalu sedikit pengaruh orang tua atas anak-anak dan penggunaan tenaga anak-anak sangat muda dalam pekerjaan pertanian.

Telah sering terbukti pula, bahwa keluarnya murid seperti tersebut di atas terdapat juga pada sekolah-sekolah desa. Kecuali jika ada tekanan dari atas - yang biasanya pengaruhnya hanya sementara - tampak ada perbaikan dalam masuknya murid. Jika di tempat dimana sekolah kelas 2 mengalami banyak "drop-outs" murid kelas 1 dan 2, diganti dan didirikan sekolah desa, maka tidak disangsikan lagi bahwa akan banyak terjadi "dropouts" pada sekolah tersebut.

Pendidikan Bumiputera di luar Jawa dan Madura.

Banyak keluhan, baik dalam surat-surat dinas maupun dalam majalah-majalah, bahwa pendidikan pemerintah bagi Bumiputera tidak cocok bagi anak-anak kampung yang masih sangat sederhana, terlalu teoritis dan terlalu tinggi, dan terlalu sedikit berhubungan dengan kebutuhan dari suatu daerah khusus. C. Lulofs menulis dalam sebuah artikel dalam Majalah Pemerintahan Dalam Negeri, bahwa kemajuan yang sangat sedikit di bidang ekonomi dari suku-suku bangsa di daerah-daerah yang kurang maju di bagian timur Hindia Belanda disebabkan karena kekurangan yang ada pada pendidikan.

Direktur Pendidikan dan Agama tidak dapat menerima kecaman ini, dan mengemukakan bahwa kecaman-kecaman itu akan dapat mengancam dan mengganggu politik pendidikan Pemerintah. Masalahnya harus dipandang dengan cara lain, yaitu segi metodik pengajaran yang sampai kini dipandang sebagai yang paling baik, ialah metodik yang mengarah ke "mengerti" yang teoritis dan doktriner. Metodik ini dianut juga di Hindia Belanda dan dalam beberapa hal sangat baik, tetapi ada segi kelemahannya yang terutama terasa, jika diterapkan dengan segala konsekwensinya, juga di daerah-daerah dimana penduduknya masih sangat primitif. Diakui bahwa beberapa penguasa dalam bidang pendidikan kadang-kadang sikapnya berlebih-lebihan dan tidak mau mengerti

dan memenuhi kebutuhan khusus dari penduduk. Hal seperti itu tentu salah, tetapi dapat dimengerti. Selalu ada saja orang-orang yang karena berlebih-lebihan dan fanatismenya membuat tindakan yang pada dasarnya baik menjadi sebuah "karikatur". Tetapi metodenya sendiri secara umum diterima, yang baik dari metode ini dihargai, mula-mula tidak terlihat kekurangannya, dan tidak ada seorang pun memikirkan perubahan radikal.

Pendidikan swasta di sini pada umumnya merupakan kopy dari Pendidikan Pemerintah. Hanya ada sedikit kekecualian, oleh pendidikan swasta belum pernah diadakan sesuatu yang baru. Malahan sebaliknya, kekurangan-kekurangan itu sering menjadi lebih parah, karena tenaga pengajarnya yang kurang terdidik.

Baru akhir-akhir ini mulai diragu-ragukan kebenaran dan efisiensi dari metodik pengajaran yang telah diterima di mana-mana, dan di Eropa keragu-raguan itu dinyatakan dalam banyak tulisan. Pikiran-pikiran baru dikemukakan, berbagai usul diajukan dan juga percobaan-percobaan dilakukan. Tetapi semua masih jauh untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan, dalam hal ini termasuk hal yang berhubungan dengan pendidikan Bumiputera.

Dari beberapa pihak diterima usul-usul supaya menambahkan pendidikan pertukangan, pertanian atau perkebunan pada pendidikan secara sederhana di sekolah-sekolah rakyat (= sekolah desa). Di beberapa tempat telah diadakan percobaan dengan pendidikan pertanian, tetapi masih banyak hal yang tidak menentu sehingga tinggal tetap sebagai percobaan.

Pendidikan rakyat (oleh desa) dan pendidikan swasta adalah tidak lain daripada tiruan daripada pendidikan pemerintah. Apa yang di sana-sini mungkin sekali dicapai dengan menggunakan arah baru dan akan dapat dicapai di masa depan, akan dapat juga dicapai oleh pendidikan Pemerintah.

Pendidikan rakyat itu bukan pendidikan yang diperbaiki yang lebih mengarah kepada kebutuhan suku-suku bangsa primitif, tetapi dapat dianggap sebagai penyederhanaan pendidikan Pemerintah, yang

sangat diharuskan karena pertimbangan finansial, supaya dalam masa depan yang tidak begitu jauh di sini semua akan dapat memperoleh bagian dari pendidikan. Mutu yang lebih rendah bukan keberatan di daerah-daerah yang primitif dan kurang maju, karena untuk sementara sudah dirasakan cukup dengan pendidikan yang sangat elementer. Di daerah-daerah yang lebih maju sementara terpaksa diterima dengan perasaan "lebih baik sesuatu daripada tidak ada apa-apa". Sebanyak mungkin keberatan-keberatan terutama yang berhubungan dengan mutu tenaga pengajar harus segera dapat diatasi.

Direktur Pendidikan dan Agama mendukung pendidikan rakyat (oleh desa) hanya karena pertimbangan-pertimbangan finansial dan dengan syarat supaya di daerah-daerah yang lebih maju, seperti banyak bagian di Jawa dan Sumatera Barat, harus ada perhatian luar biasa supaya segera dapat diperoleh dan dipertahankan tenaga pengajar yang terdidik sebagaimana mestinya.

Di mana terbukti, bahwa dari sudut pandangan ilmu pendidikan tidak ada keberatan untuk melaksanakan pikiran Ziesel, terutama demi pertimbangan finansial dapat didirikan sekolah-sekolah lanjutan. Meskipun pendirian sekolah tersebut lebih murah daripada pendirian sekolah kelas 2 lengkap, penghematan biaya yang akan diperoleh tidak akan sebesar seperti diharapkan dalam nota Pj. Inspektur Pendidikan Rakyat (Mantz). Di Jawa, dengan hasrat memperoleh pendidikan yang makin besar itu, apakah akan ada jaminan, bahwa dengan dapat dicapainya sekolah kelas 2 melalui sekolah desa, pemasukan ke sekolah-sekolah desa akan bertambah. Sesudah tindakan baru ini berjalan beberapa waktu, maka segera akan timbul pendapat pada anak-anak, bahwa mengunjungi sekolah desa saja belum cukup dan harus dilanjutkan ke sekolah lanjutan, sehingga hasrat untuk masuk sekolah pemerintah akan bertambah. Dengan demikian sekolah lanjutan tidak akan cukup dengan satu kelas 3 dan satu kelas 4 saja, akan tetapi harus dengan 4 kelas atau lebih, sehingga tidak akan lebih murah daripada sekolah kelas 2 yang lengkap.

Hanya tamatan sekolah desa yang baik dapat diterima di sekolah lanjutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pendirian sekolah

lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Harus diselidiki apakah sungguh ada kebutuhan pendidikan lebih lanjut daripada apa yang diberikan oleh sekolah desa.
2. Untuk tiap tahun harus ditetapkan berapa sekolah lanjutan yang akan didirikan.
3. Karena sekolah-sekolah desa sendiri masih dalam stadium pertama, jumlah seluruhnya sekolah lanjutan yang akan dibutuhkan, belum dapat direncanakan.
4. Sukar ditentukan berapa besarnya biaya per sekolah lanjutan, karena jumlah tenaga pengajarnya tergantung dari jumlah murid sekolah desa yang akan masuk sekolah lanjutan.

Direktur Pendidikan dan Agama mengajukan pertanyaan, apakah sudah ada usul pendirian sekolah-sekolah lanjutan yang diterima dan apakah pendirian sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 yang lengkap akan masih dilanjutkan menurut jalan yang termaktub dalam surat Hindia Belanda tanggal 7 Mei 1914 nomor 482/10. Mungkin sekali, bahwa di suatu tempat yang tadinya akan diberi sebuah sekolah kelas 2 lengkap, sekarang ternyata cukup dengan sebuah sekolah lanjutan. Kriteria untuk itu, pertama-tama dan terutama harus mengingat sifat penduduk dan keadaan ekonominya, misalnya di tempat-tempat yang agak besar (maju) diperlukan sekolah-sekolah kelas 2 lengkap.

Diharap Gubernur Jenderal sudi menyampaikan kepada Menteri Jajahan rencana pendirian sekolah-sekolah lanjutan dan mohon perluasan jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 yang lengkap dapat dikurangi daripada yang semula diharapkan dalam surat Hindia Belanda tersebut dan kepada Gubernur Jenderal diberikan kuasa untuk menentukan di mana harus didirikan sekolah kelas 2 lengkap dan di mana harus didirikan sekolah lanjutan.

Karena masih terdapat banyak kota dalam tiap keresidenan di Jawa dan Madura, di mana masih dibutuhkan sekolah kelas 2 lengkap, maka dalam tahun-tahun pertama tidak dapat diharapkan pengurangan jumlah sekolah lengkap untuk diganti dengan sekolah lanjutan. Untuk anggaran belanja tahun 1915 diusulkan tetap adanya 60 sekolah lengkap dan untuk sementara ditambah 30 sekolah lanjutan.

Jika dari Direktur Pekerjaan Umum tidak ada keberatan dan tidak ada kesempatan untuk menyewa ruangan yang diperlukan, maka dalam tahun 1915 gedung-gedung sekolah lanjutan dibangun sementara dengan 2 kelas. Jika penambahan 30 sekolah lanjutan tidak mungkin dalam tahun 1915, maka diusulkan dilaksanakan dalam tahun 1916, daripada mengorbankan sekolah-sekolah kelas 2 lengkap.

(Rencana pengeluaran untuk sekolah-sekolah yang diusulkan tahun 1915).

Mohon diusulkan dalam anggaran belanja tambahan (suppletoir) tahun 1915 untuk 30 sekolah lanjutan yang akan didirikan dalam tahun yang akan datang (= 1915).

PENDIDIKAN SWASTA BERSUBSIDI - MENENTUKAN PENDIDIKAN AGAMA,
MENJADI FAKULTATIF

63. Surat Menteri Jajahan (Pleyte) kepada Sri Ratu, tanggal 6 Nopember 1914, nomor 52

Dalam berbagai peraturan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta untuk penduduk Bumiputera, yang dikeluarkan akhir-akhir ini dimasukkan ketentuan bahwa kepada anak-anak, yang orang tuanya telah memberitahukan keinginannya, harus diberi pembebasan dari pengajaran agama dan tindakan-tindakan keagamaan. Sri Ratu diperintahkan memeriksa peraturan-peraturan yang termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda 1912 nomor 579 (pasal 1, ayat 2, sub 4), 1913 nomor 309 (paragraf 3, ayat 3) dan 1913 nomor 524 (pasal 1, sub 5).

Dalam pembicaraan anggaran belanja yang sedang berjalan ini di Dewan Perwakilan Rakyat oleh beberapa anggota dinyatakan sangat perlunya untuk juga mengadakan syarat sedemikian bagi sekolah-sekolah swasta bersubsidi lainnya selain dari sekolah rendah, yang bersangkutan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas (laporan sementara Majelis Rendah, halaman 4).

Pendapat ini segera dapat disetujui. Dalam pembicaraan dalam Majelis Rendah dan dalam Memori Jawaban atas Laporan Sementara Majelis Tinggi (halaman 14/15) dikemukakan pendapatnya, bahwa Pemerintah harus memelihara, supaya pendidikan harus memenuhi keinginan dan kebutuhan dari mereka, untuk siapa pendidikan itu diadakan. Tuntutan ini tidak hanya berlaku bagi pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah, tetapi juga bagi pendidikan yang diberikan swasta dengan bantuan Pemerintah.

Keharusan ini segaris dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Menteri Jajahan lama Keuchenius dalam suratnya kepada Sri Ratu tanggal 29 Juli 1889 Letter A 1 nomor 16/1336, untuk menetapkan legalitas pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah swasta Kristen untuk penduduk Bumiputera bukan Kristen.

Mengingat kenyataan, bahwa dalam praktek pada pemberian keputusan atas permohonan untuk bantuan subsidi bagi sekolah-sekolah demikian tidak diselidiki, apakah di tempat dimana sekolah itu telah didirikan sungguh-sungguh ada kebutuhan akan pendidikan agama Kristen. Tetapi bahwa menurut kenyataannya dimana ada kebutuhan akan pendidikan dalam arti umum tanpa disebutkan lebih lanjut mengenai "arahnya" sudah cukup untuk memberikan subsidi kepada sekolah itu. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan jaminan bahwa orang-orang yang beragama lain yang karena keadaan, misalnya karena tidak ada atau kurang cukup sekolah yang sesuai dengan kepercayaan, terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta Kristen atau agama lain, yang diberi subsidi oleh Pemerintah, akan bebas menentukan apakah anak-anak itu akan mengikuti atau tidak pendidikan agama atau upacara keagamaan yang diberikan di sekolah tersebut.

Dalam Majelis Rendah (pembicaraan-pembicaraan 1913-1914 halaman 225/226) dikemukakan pula, bahwa jaminan ini tidak harus berlaku tanpa syarat. Dalam hal-hal, dimana penduduk ada cukup pilihan kesempatan pendidikan, sehingga mereka tidak seluruhnya atau sebagian harus terikat memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta beragama, jaminan itu tidak diperlukan.

Sesuai dengan yang dijanjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, telah diadakan pertukaran pikiran dengan Gubernur Jenderal mengenai masalah ini. Menurut suratnya tanggal 29 Mei 1914 nomor 589/68, Gubernur Jenderal menyetujui untuk mengadakan ketentuan baru itu secara umum dalam peraturan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah swasta beragama, dan mempertimbangkan supaya peraturan umum dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 dan 1906 nomor 241, begitu pula peraturan yang hanya berlaku bagi Halmahera dan Irian Barat dalam Lembaran Negara tahun 1911 nomor 112 ditambah dengan ketentuan baru tersebut.

Jika dalam peraturan itu sudah ada ketentuan (pasal 1, alinea 3) bahwa Gubernur Jenderal dapat memberikan pembebasan dari satu syarat atau lebih yang telah ditentukan, maka tidak perlu diadakan peraturan khusus, yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk memberikan pembebasan dari ketentuan baru itu bagi tempat dimana di samping sekolah swasta dengan dasar agama terdapat banyak sekolah Pemerintah atau sekolah swasta lain yang tidak berdasarkan agama.

Lebih lanjut akan diadakan pertukaran pikiran dengan Gubernur Jenderal, sampai sejauh mana ia akan mempergunakan wewenangnya, jika dari pengurus sekolah-sekolah swasta beragama Kristen menaruh keberatan terhadap ketentuan baru itu bagi sekolah mereka, yang telah mendapat subsidi Pemerintah berdasarkan peraturan yang lama. Dari 2 surat permohonan yang telah diterima Menteri Jajahan terbukti adanya keberatan demikian di beberapa kalangan Zending. Sampai sekarang sebagian besar dari Zending belum mengajukan keberatan terhadap ketentuan baru itu.

Penambahan ketentuan baru itu dipandang tidak perlu ditambahkan pada peraturan untuk Halmahera dan Irian Barat, karena akan diganti dengan peraturan baru sejiwa dengan Peraturan pendidikan untuk Sumba dan Flores yang sudah mengandung ketentuan tersebut (Lembaran Negara 1913 nomor 309).

Sri Ratu dimohon memberikan kuasa kepada Gubernur Jenderal untuk menambahkan ketentuan: "murid-murid, yang orang tua dan atau

walinya menginginkan, harus dibebaskan dari pendidikan agama dan tindakan keagamaan" pada peraturan dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 dan 1906 nomor 241.

SEKOLAH BUMIPUTERA BELANDA (HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)

MASUKNYA ANAK-ANAK EROPA

64. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 20 Nopember 1914 nomor 23349

Di beberapa tempat di Nusantara sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 (yang segera akan ganti nama menjadi Hollandsch-Inlandsche School) merupakan satu-satunya kesempatan untuk mendapat pendidikan Belanda, karena tidak adanya E.L.S. dan H.C.S. Tempat-tempat itu misalnya Cilegon, Sumedang, Kuningan, Ciamis, Magetan, Pacitan, Probolinggo, Lamongan, Payakumbuh.

Di tempat-tempat tersebut jumlah anak yang dapat digolongkan "anak Eropa" terlalu kecil, sehingga dapat disyahkan pendirian sekolah E.L.S. Dengan demikian mereka tidak dapat menerima pendidikan, sepanjang mereka tidak berkesempatan masuk sekolah di tempat lain.

Dari dua diantara tempat-tempat tersebut di atas, telah diterima permohonan dari beberapa anak Eropa untuk dapat diterima di sekolah Bumiputera kelas 1 (H.I.S.) yang ada di tempat itu. Pada prinsipnya tidak ada keberatan terhadap permohonan itu. Sebaliknya permohonan itu jika mungkin harus dipenuhi, karena dengan demikian merupakan langkah pertama ke jalan pemersatuan (unifikasi) dalam pendidikan rendah biasa, yang harus diusahakan karena berbagai pertimbangan antara lain pertimbangan finansil.

Akan tetapi dalam pertimbangan permohonan itu dijumpai kesulitan besar, yang disebabkan karena kenyataan, bahwa bagi hampir semua sekolah Bumiputera kelas 1 jumlah calon murid -- terutama untuk kelas 1 -- selalu melebihi jumlah tempat yang tersedia. Bagaimana harus bertindak terhadap calon-calon murid Eropa dalam hal sedemikian?

Jika mereka didahulukan, hal tersebut akan merupakan ketidakadilan terhadap orang-orang tua Bumiputera. Kesempatan bagi anak-anak mereka untuk dapat diterima di sekolah Bumiputera kelas 1, yang sampai sekarang mereka sangat hargai, akan berkurang demi untuk kepentingan anak-anak Eropa, yang di bidang pendidikan telah begitu banyak diberi hak-hak istimewa.

Maka dari itu diusulkan, supaya calon-calon murid Eropa hanya dapat diterima di H.I.S., jika tidak atau tidak akan menyebabkan ditolaknya beberapa anak Bumiputera atau yang dipersamakan dengan Bumiputera. Bagi calon murid Eropa kesempatan untuk diterima di kelas 1 kecil, tetapi di kelas lebih tinggi kesempatan itu besar, jika mereka bersedia mengingat kepada perkembangan anaknya di kemudian hari. Bagaimana dengan uang sekolah dari murid-murid Eropa di H.I.S., apakah menurut tarip murid Bumiputera di H.I.S. atau menurut tarip murid Eropa di E.L.S. Menurut pendapatnya lebih logis dan adil diusulkan yang pertama.

Peraturan uang sekolah murid-murid Eropa di H.C.S. (Lembaran Negara 1908 nomor 348 paragraf IVc) dianggap kurang rasionil, dan tidak perlu diikuti di H.I.S.

Dianggap rasionil, apabila murid-murid Eropa di H.I.S. tidak diwajibkan mengikuti pengajaran yang diberikan dalam bahasa daerah dan bahasa Melayu.

Jika pandangan di atas dapat disetujui Gubernur Jenderal, maka diusulkan supaya pada Paragraf I dari pasal 2 dari konsep Surat Keputusan Gubernur Jenderal mengenai Peraturan dan Pengawasan H.I.S. ditambahkan alinea 2 dan alinea 3 yang isinya sebagai berikut:

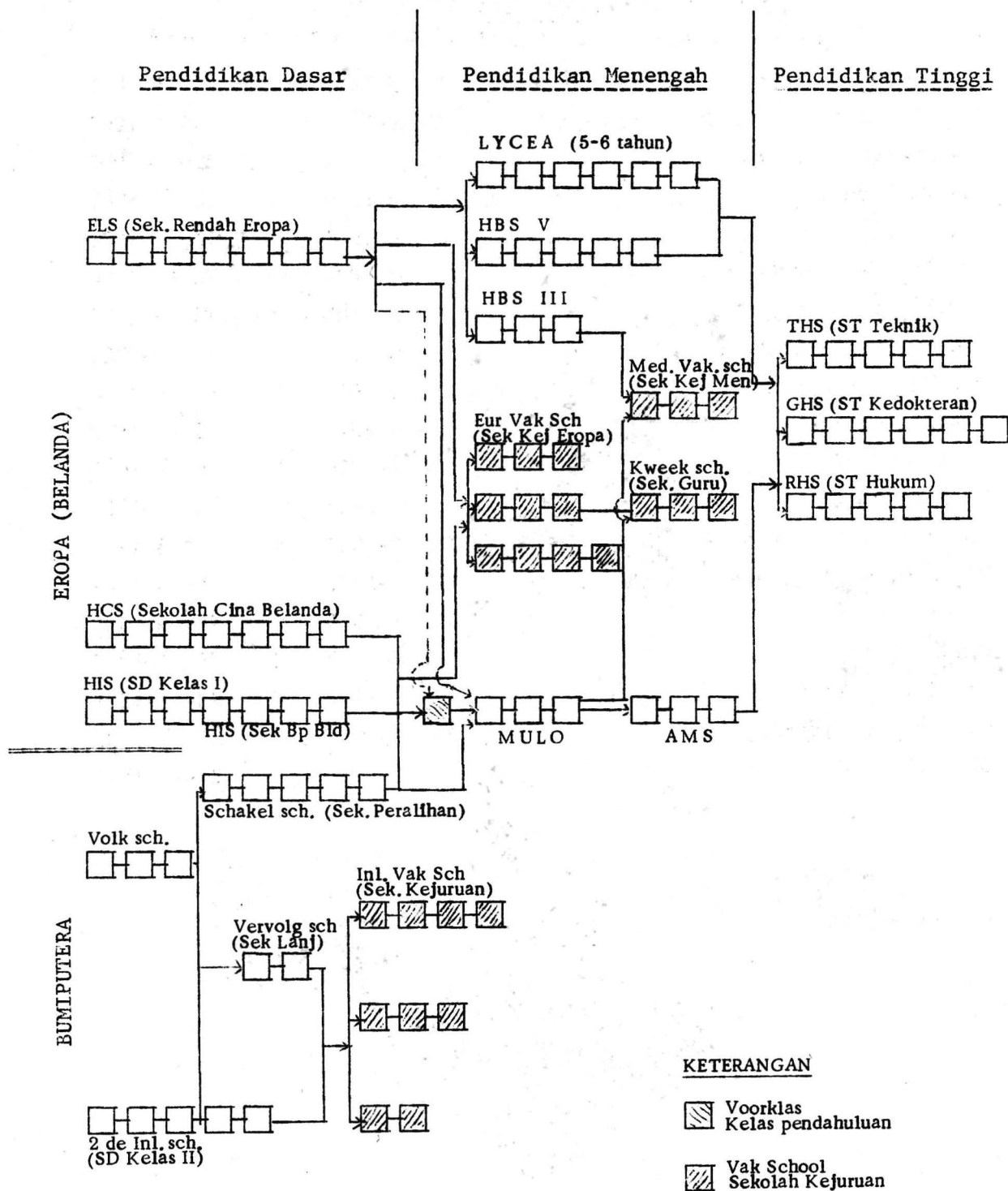
- (2) Di tempat-tempat, dimana tidak ada E.L.S., pada H.I.S. bagi anak-anak Bumiputera dan yang dipersamakan dapat juga diterima anak-anak Eropa dan yang dipersamakan, jika penerimaan itu tidak menyebabkan atau tidak akan menyebabkan anak-anak Bumiputera dan atau yang dipersamakan harus ditolak karena kekurangan tempat.

- (3) Anak-anak dari orang-orang Eropa dan atau yang dipersamakan, yang diterima sebagai murid H.I.S. tidak perlu mengikuti pendidikan yang diberikan dalam bahasa daerah atau bahasa Melayu, jika orang tua atau walinya menghendakinya.

Catatan:

H.I.S. diadakan dengan Surat Keputusan Sri Ratu tanggal 16 Pebruari 1914 nomor 23 (Lembaran Negara 1914 nomor 359) sedangkan Peraturan dan Pengawasan H.I.S. ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 14 Desember 1914 nomor 17 (Lembaran Negara 1914 nomor 762).

Lampiran I

SISTIM PERSEKOLAHAN JAMAN HINDIA BELANDA

Lampiran IIDAFTAR MENTERI URUSAN DAERAH JAJAHAN1900-1940

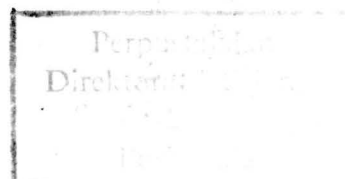
J.T. Cremer	27- 7-1897 sampai	1- 8-1901
Jhr. Mr. T.A.J. van Asch van Wijck	1- 8-1901	" 9- 9-1902
J.W. Bergansius, a.i.	10- 9-1902	" 25- 9-1902
A.W.F. Idenburg	25- 9-1902	" 16- 8-1905
Mr. D.Fock	17- 8-1905	" 11- 2-1908
Mr. Th. Heemskerk, a.i.	12- 2-1908	" 20- 5-1908
A.W.F. Idenburg	20- 5-1908	" 16- 8-1909
J.H. de Waal Malefijt	16- 8-1909	" 29- 8-1913
Mr. Th. B.Pleijte	29- 8-1913	" 9- 9-1918
A.W.F. Idenburg	9- 9-1918	" 13-11-1919
S. de Graaff	13-11-1919	" 4- 8-1925
H. Colijn, a.i.	4- 8-1925	" 26- 9-1925
Ch. J.I.M. Welter	26- 9-1925	" 8- 3-1926
Dr. J.C. Koningsberger	8- 3-1926	" 10- 8-1929
S. de Graaff	10- 8-1929	" 26- 5-1933
Dr. H. Colijn	26- 5-1933	" 24- 6-1937
Ch. J.I.M. Welter	24- 6-1937	" 25- 7-1939
C. van den Bussche	25- 7-1939	" 10- 8-1939
Ch. J.I.M. Welter	10- 8-1939	" 20-11-1941

DAFTAR GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA1900-1940

W. Rooseboom	3-10-1899	sampai	1-10-1904
J.B. van Heutz	1-10-1904	"	18-12-1909
A.W.F. Idenburg	18-12-1909	"	21- 3-1916
Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum	21- 3-1916	"	24- 3-1921
Mr. D. Fock	24- 3-1921	"	7- 9-1926
Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff	7- 9-1926	"	12- 9-1931
Jhr. Mr. B.C. de Jonge	12- 9-1931	"	17- 9-1936
Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer	17- 9-1936	"	8- 3-1942

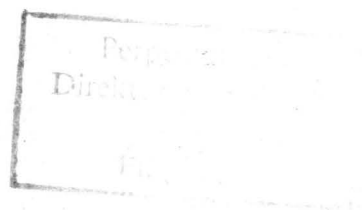
DAFTAR KETUA DEWAN HINDIA BELANDA1900-1940

Mr. Th. H. de Meester	Diangkat	27- 5-1898
P.M.L. de Bruyn Prince	"	24- 9-1904
Jhr. O. van der Wijck	"	29- 9-1905
D.F.W. van Rees	"	24- 4-1908
J.B. van der Houven van Oordt	"	3- 9-1914
Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff	"	2- 1-1917
H.N.A. Swart	"	2- 9-1918
Dr. E. Moresco	"	25- 2-1922
W. Frijling	"	9-11-1923
Mr. K.F. Creutzberg	"	3-11-1924
Ch. J.I.M. Weiter	"	10-10-1929
C.W. Bodenhausen	"	4- 3-1931
Dr. J.W. Meyer Ranneft	"	26- 4-1933
C. van den Bussche	"	23- 6-1936
Mr. H.J. Spit	"	21-11-1938



Lampiran IIIDAFTAR DIREKTUR PENDIDIKAN, AGAMA (DAN KERAJINAN)1900-1940

Mr. J.H. Abendanon	4- 3-1900 sampai	4- 3-1905
A.J.G.A. Wiemans, (wd) secr.dept.O.E. en N.	4- 3-1905 "	15- 8-1905
Mr. J.G. Pott	15- 8-1905 "	3- 5-1908
Mr. dr. M.S. Koster	3- 5-1908 "	3- 1-1912
Dr. G.A.J. Hazeu	3- 1-1912 "	3-12-1914
Dr. E. Moresco (wd)	3-12-1914 "	18-12-1916
Mr. K.F. Creutzberg	18-12-1916 "	6- 3-1922
J.F.W. van der Meulen, onderdir. (wd)	6- 3-1922 "	19- 7-1923
Mr. K.F. Creutzberg	19- 7-1923 "	-11-1923
P. de Man (wd)	-11-1923 "	2- 2-1924
J.F.W. van der Meulen	2- 2-1924 "	2-12-1925
P. de Man, onderdir. (wd)	2-12-1925 "	24- 3-1926
J. Hardeman	24- 3-1926 "	6- 5-1929
Dr. B.J.O. Schrieke	6- 5-1929 "	16- 5-1934
Dr. A.D.A. de Kat Angelino	16- 5-1934 "	31- 5-1937
Dr. P.J.A. Idenburg	31- 5-1937 "	15- 5-1940
Prof.Dr. Pangeran A. Hoesein Djaja- diningrat (fd)	15- 5-1940 "	28- 5-1941



PEL

Perpu
Jend